

**IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG  
KELUARGA BERENCANA (KB) DI KAMPUNG  
KALIWADAS KELURAHAN LOPANG  
KECAMATAN SERANG KOTA SERANG  
PROVINSI BANTEN**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik pada  
Program Studi Administrasi Publik



Oleh

Riski Hoeriah

NIM 6661150081

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

**SERANG 2019**

**IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG  
KELUARGA BERENCANA (KB) DI KAMPUNG  
KALIWADAS KELURAHAN LOPANG  
KECAMATAN SERANG KOTA SERANG  
PROVINSI BANTEN**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik pada  
Program Studi Administrasi Publik



Oleh

Riski Hoeriah

NIM 6661150081

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

**SERANG 2019**

## ABSTRAK

**Riski Hoeriah. NIM 6661150081. SKRIPSI. Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Kampung Kaliwadas Kelurahan Lopang Kecamatan Serang Kota Serang Provinsi Banten. Program Studi Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dosen Pembimbing I Dr. Agus Sjafari, S.Sos., M.Si. Dosen Pembimbing II Riny Handayani, S.Si., M.Si**

Dalam implementasi program Kampung KB di Kampung Kaliwadas, terdapat beberapa masalah seperti: kurangnya partisipasi keluarga dalam kelompok kegiatan BKB (Bina Keluarga Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja), BKL (Bina Keluarga Lansia), UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) dan PIK-R (Pusat Informasi dan Konsultasi-Remaja); kurangnya sarana dan prasarana dalam menjalankan program Kampung KB, terutama belum adanya rumah dataku dan sekretariat KKB sehingga belum adanya mekanisme operasional seperti rapat perencanaan kegiatan, rapat koordinasi dengan dinas/instansi terkait pendukung kegiatan, sosialisasi kegiatan, juga monitoring dan evaluasi kegiatan; kurangnya koordinasi dan komitmen dengan instansi lainnya (lintas sektor). Teori yang digunakan teori implementasi Merille S. Grindle yang terdiri atas *content of policy* dan *context of policy*. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran dengan teknik analisis data menggunakan teknik menurut Miles and Huberman. Hasil dari penelitian ini Implementasi program Kampung KB di Kampung Kaliwadas belum berjalan secara optimal karena pengurus kampung KB yang kurang aktif dan inisiatif dalam membuat kegiatan untuk poktan, sarana dan prasarana yang kurang memadai, juga kurangnya koordinasi dan dukungan dari lintas sektor. Saran kepada dinas terkait untuk melakukan peningkatan potensi pengelola dan pelaksana kegiatan di Kampung KB juga peningkatan sarana dan prasarana di Kampung KB.

**Kata Kunci: Implementasi, Program, Kampung KB**

## **ABSTRACT**

***Riski Hoeriah. NIM 6661150081. SKRIPSI. The Implementation of the Family planning village (Kampung KB) Program in the Village of Kaliwadas Lopang Village Serang District Serang Banten Province. Public Administration Program Study. Faculty of Social Science and Political Science. Sultan Ageng Tirtayasa University. The 1<sup>st</sup> Advisor: Dr. Agus Sjafari, S.Sos., 2<sup>nd</sup> Advisor: M.Si. Dosen Pembimbing II Riny Handayani, S.Si., M.Si***

*In the implementation of the Kampung KB Program in Kaliwadas Village, there were several problems such as: lack of family participation in BKB (Bina Keluarga Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja), BKL (Bina Keluarga Lansia), UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) dan PIK-R (Pusat Informasi dan Konsultasi-Remaja) activity groups; lack of facilities and infrastructure in running the Kampung KB program, especially the absence of Rumah Dataku and KKB secretariat so that there were no operational mechanisms such as activity planning meetings, coordination meetings with relevant agencies, with supporting activities, disseminating activities, also monitoring and evaluating activities; lack of coordination and commitment with other agencies (across sectors). The theory used was the implementation theory of Merille S. Grindle consisting of content of policy and context of policy. The research method that use was descriptive qualitative aims to provide an overview of data analysis techniques using techniques according to Miles and Huberman. The results of this study the implementation of the Kampung KB program in Kaliwadas Village has not been running optimally because the Kampung KB management was less active and initiative in making activities for POKTAN, facilities and infrastucture, lack of coordination and support form across sectors. Advice to relate agencies to increase the potential of the organizers and implementers of Kampung KB activities and also to improving facilities and infrastucture in Kampung KB.*

***Keywords: Implementation, Program, Kampung KB***

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Riski Hoeriah  
NIM : 6661150081  
Tempat Tanggal Lahir : Bogor, 15 Maret 1998  
Program Studi : Administrasi Publik

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Kampung Kaliwadas Kelurahan Lopang Kecamatan Serang Kota Serang Provinsi Banten”. Adalah hasil karya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, maka gelar kesarjanaan saya bisa dicabut.

Serang, Mei 2019



Riski Hoeriah  
Nim: 6661150081

## LEMBAR PERSETUJUAN

NAMA : RISKI HOERIAH  
NIM : 6661150081  
JUDUL : IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG KELUARGA  
BERENCANA (KB) DI KAMPUNG KALIWADAS  
KELURAHAN LOPANG KECAMATAN SERANG KOTA  
SERANG PROVINSI BANTEN

Serang, Juli 2019

Skripsi ini telah disetujui untuk diujikan

Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. Agus Sjafari, S.Sos., M.Si

NIP. 197108242005011002

Pembimbing II



Riny Handayani, S.Si., M.Si

NIP. 197601062006042007

Mengetahui,

Dekan,

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa



Dr. Agus Sjafari, S.Sos., M.Si

NIP. 197108242005011002

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

## LEMBAR PENGESAHAN

NAMA : RISKI HOERIAH  
NIM : 6661150081  
JUDUL : IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG KELUARGA  
BERENCANA (KB) DI KAMPUNG KALIWADAS  
KELURAHAN LOPANG KECAMATAN SERANG KOTA  
SERANG PROVINSI BANTEN

Telah diujikan di Hadapan Dewan Penguji Sidang Skripsi di Serang, tanggal 8  
Juli 2019 dan dinyatakan **LULUS**

Serang, 8 Juli 2019

Ketua Penguji  
**Dr. Arenawati, M. Si**  
NIP. 197004102006042001



Anggota:  
**Listvaningsih, S.Sos., M.Si**  
NIP. 197603292003122001



Anggota:  
**Dr. Agus Sjafari, S.Sos., M.Si**  
NIP. 197108242005011002



Mengetahui,

Dekan FISIP  
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
  
**Dr. Agus Sjafari, S.Sos., M.Si**  
NIP. 197108242005011002

Ketua Program Studi  
Administrasi Publik  
  
**Listvaningsih, S.Sos., M.Si**  
NIP. 197603292003122001

Habluminallah dan Habluminannas

Keep Moving Forward

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, ketiga adik saya, juga keluarga besar saya yang selama ini selalu mendoakan dan memberi support kepada saya.



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah, segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, dan para sahabatnya yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang seperti sekarang. Syukur Alhamdulillah dengan izin Allah SWT penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan judul **“Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Kampung Kaliwadas Kelurahan Lopang Kecamatan Serang Kota Serang Provinsi Banten”**. Penelitian skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Administrasi Publik pada program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Penelitian skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan pihak yang selalu mendukung peneliti secara moril dan materil. Maka dengan ketulusan hati, peneliti mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Yth. Bapak Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd., Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
2. Yth. Bapak Dr. H. Agus Sjafari, S.Sos., M.Si., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sekaligus selaku

Dosen Pembimbing I yang telah membantu dan membimbing peneliti dalam penyusunan skripsi.

3. Yth. Ibu Rahmawati, S.Sos., M.Si., Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
4. Yth. Bapak Imam Mukhroman, S.Sos., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
5. Yth. Bapak Kandung Sapto Nugroho, S.Sos., M.Si., Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
6. Yth. Ibu Listyaningsih, S.Sos., M.Si., Ketua Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
7. Yth. Ibu Dr. Arenawati, M. Si., Sekretaris Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
8. Yth. Ibu Riny Handayani, S.Si., M.Si., Dosen Pembimbing II yang telah membantu dan membimbing peneliti dalam penyusunan skripsi.
9. Yth. Bapak Abdul Hamid, S.IP., M.Si. Phd., Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi masukan, dukungan dan membimbing peneliti dari semester 1 sampai akhir.
10. Kepada Seluruh Dosen dan Staf Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang membekali penulis dengan ilmu pengetahuan dan informasi selama perkuliahan.
11. Kepada kedua orang tua tercinta Ayah dan Mamah, Bapak Eris Alhamdi dan Ibu Khaerunnisa beserta ketiga adik tercinta, Syamiah, Muhammad

Ikhwan Ma'rufi dan Faris Alhamdi yang menjadi penyemangat terbesar bagi peneliti, yang selalu mendoakan peneliti, dan membantu peneliti dalam segala hal.

12. Sahabat-sahabat tercinta, Ayu Nurmalasari, Dwi Kustari Catur Pamungkas, Enggita Sekar Munggarani Sachlan, Maulinda Muzdalifah, Maya Evilla Maulyda dan Nanda Rizkia yang sama-sama berjuang untuk menyelesaikan skripsi, saling membantu, memberikan masukan-masukan dan nasihat. Tidak lupa canda tawa dan keharuan, saling berbagi cerita dari awal perkuliahan hingga hari ini dan nanti. Terima kasih telah menjadikan masa perkuliahan peneliti menjadi sangat indah.
13. Teman-teman seperjuangan Administrasi Publik angkatan 2015 khususnya kelas C yang memberikan kesan, kenangan dan solidaritas selama masa kuliah.
14. Teman sekamar kostan tercinta Tiara Nuraidha yang menemani peneliti, pengertian kepada peneliti, memberikan dukungan dan masukan kepada peneliti.
15. Sahabat-sahabat tercinta Nurun Nida, Sri Dea Wiranda Hasni dan Ullya Farah yang sudah seperti keluarga, selalu mendengarkan keluh kesah, memberikan masukan-masukan kepada peneliti dan membuat peneliti bertahan menjalankan kehidupan di Kota Serang.
16. Beserta semua pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu, peneliti ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya.

17. Terima Kasih kepada Bapak Yuda Ganda Putra, S.IP. MM selaku Subbidang Hubungan Antar Lembaga dan Bina Lini Lapangan BKKBN Provinsi Banten yang telah memberikan informasi dan data kepada peneliti.
18. Terima Kasih kepada Ibu Imas Hotimah, S.Pd, M.Si selaku Seksi Penggerakan dan Pendayagunaan Penyuluh KB (PLKB) dan Kader KB DP3AKB Kota Serang yang telah memberikan informasi dan data kepada peneliti.
19. Terima Kasih kepada Bapak H. Cece Saputra, S.KM, Ibu Nunuk Sunartowati, dan Ibu Elisiana, S.Sos Balai Penyuluhan KB Kecamatan Serang yang telah memberikan informasi dan data kepada peneliti.
20. Terima Kasih kepada Bapak Sodri, S.E selaku Kepala Kelurahan Lopang dan Ibu Raminah selaku Ketua Forum Kelurahan Lopang dan Ketua Kelompok Kegiatan UPPKS yang telah memberikan informasi dan data kepada peneliti.
21. Terima Kasih kepada Bapak Agus F, S.H selaku Ketua Kampung KB Kaliwadas/Ketua RW. 06 yang telah memberikan informasi dan data kepada peneliti.
22. Terima Kasih kepada Ibu Siti, Ibu Hasanah, Ibu Iroh Sutiroh dan Pak Ali Rohman selaku Ketua Kelompok Kegiatan di Kampung KB yang telah memberikan informasi dan data kepada peneliti.

23. Terima Kasih kepada semua informan, Ibu Nurhayati, Ibu Fatiah, Ibu Eva S, Ibu Yeti dan seluruh warga Kampung KB Kaliwadas yang telah memberikan informasi kepada peneliti.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan penelitian skripsi ini, karena keterbatasan peneliti, maka dari itu kritik dan saran yang membangun tetap dinantikan guna perbaikan dimasa yang akan datang. Akhir kata semoga penelitian skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Serang, Mei 2019

Riski Hoeriah

## DAFTAR ISI

**ABSTRAK**

***ABSTRACT***

**PERNYATAAN ORISINALITAS**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**KATA PENGANTAR.....ii**

**DAFTAR ISI.....vii**

**DAFTAR TABEL.....xi**

**DAFTAR GAMBAR.....xiii**

**DAFTAR LAMPIRAN .....xiv**

**BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang .....1

1.2 Identifikasi Masalah.....19

1.3 Batasan Masalah .....20

1.4 Rumusan Masalah.....20

1.5 Tujuan Penelitian .....21

1.6 Manfaat Penelitian .....21

**BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN ASUMSI**

**DASAR PENELITIAN**

2.1 Landasan Teori.....23

2.2 Kebijakan Publik.....24

2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik.....24

2.2.2 Tahapan Kebijakan Publik.....26

2.3 Implementasi Kebijakan Publik.....	29
2.3.1 Pengertian Kebijakan Publik.....	29
2.3.2 Model-Model Implementasi Kebijakan Publik.....	31
2.4 Program.....	46
2.5 Kampung Keluarga Berencana (KB) .....	47
2.5.1 Definisi Kampung Keluarga Berencana (KB).....	47
2.5.2 Tujuan Kampung Keluarga Berencana (KB) .....	48
2.5.3 Sasaran Kampung KB .....	50
2.6 Penelitian Terdahulu .....	52
2.7 Kerangka Pemikiran Penelitian.....	55
2.8 Asumsi Dasar .....	59
 <b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian .....	60
3.2 Ruang Lingkup/Fokus Penelitian.....	62
3.3 Lokasi Penelitian.....	63
3.4 Fenomena yang Diamati .....	63
3.4.1 Definisi Konsep .....	63
3.4.2 Definisi Operasional.....	64
3.5 Instrumen Penelitian .....	65
3.6 Informan Penelitian.....	68
3.7 Teknik Pengelolaan dan Analisis Data .....	71
3.7.1 Teknik Pengelolaan Data.....	71
3.7.2 Teknik Analisis Data .....	76

3.7.3 Uji Keabsahan Data.....	79
3.8 Jadwal Penelitian .....	80
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
4.1 Deskripsi Obyek Penelitian.....	82
4.1.1 Deskripsi Wilayah Kecamatan Serang, Kelurahan Lopang dan Kampung Kaliwadas.....	82
4.1.2 Deskripsi BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) Provinsi Banten .....	89
4.1.3 Deskripsi DP3AKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana) Kota Serang .....	92
4.1.4 Deskripsi Balai Penyuluhan KB Kecamatan Serang .....	96
4.1.5 Deskripsi Implementasi Program Keluarga Berencana (KB) di Kampung Kaliwadas.....	98
4.2 Deskripsi Data.....	100
4.2.1 Deskripsi data penelitian .....	100
4.2.2 Informan Penelitian .....	104
4.3 Hasil Temuan .....	105
4.3.1 <i>Content Of Policy</i> .....	106
4.3.2 <i>Context of Policy</i> .....	162
4.4 Pembahasan Hasil Penelitian .....	189
4.4.1 <i>Content Of Policy</i> .....	190
4.4.2 <i>Context of Policy</i> .....	205

## **BAB V PENUTUP**



5.1 Kesimpulan .....	212
5.2 Saran.....	213

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Rumah Tangga dan Rata-Rata Banyaknya Anggota Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten 2017 .....	2
Tabel 1.2 Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Menurut Kecamatan Di Kota Serang, 2016 dan 2017 .....	4
Tabel 1.3 Presentase Partisipasi Keluarga dalam Poktan (Kelompok Kegiatan) di Kota Serang .....	13
Tabel 1.4 Data Jumlah Balita, Remaja, dan Lansia pada Kampung KB di Kampung Kaliwadas .....	14
Tabel 1.5 Data yang Mengikuti Kegiatan Kampung KB di Kampung Kaliwadas .....	14
Tabel 3.1 Kategori Informan .....	69
Tabel 3.2 Pedoman Wawancara .....	73
Tabel 3.3 Jadwal Penelitian .....	81
Tabel 4.1 Cakupan Wilayah Kelurahan Lopang .....	85
Tabel 4.2 Cakupan PUS dan Peserta KB .....	86
Tabel 4.3 Jumlah Rumah Tangga, KK, WUS dan PUS .....	87
Tabel 4.4 PUS Bukan Peserta KB .....	87
Tabel 4.5 Un-Met Need .....	88
Tabel 4.6 Deskripsi Informan Penelitian .....	104
Tabel 4.7 Data Anggota PAUD Bina Keluarga Balita (BKB) Kendedes Kampung KB Kaliwadas .....	120
Tabel 4.8 Data Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Kendedes Kampung KB Kaliwadas .....	120
Tabel 4.9 Data Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Kendedes Kampung KB Kaliwadas .....	122

Tabel 4.10 Data Anggota Pusat Informasi dan Konseling-Remaja (PIK-R) Kenedes Kampung KB Kaliwadas.....	123
Tabel 4.11 Data Anggota UPPKS di Kecamatan Serang.....	125

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Wilayah Kelurahan Lopang.....	5
Gambar 1.2 Sarana Kampung KB Kaliwadas.....	16
Gambar 2.1 Tahapan Kebijakan Publik .....	27
Gambar 2.2 Model Implementasi Kebijakan Publik Menurut Donald Van Meter Dan Carl Van Horn .....	35
Gambar 2.3 Model Implementasi Kebijakan Publik Menurut Daniel Mazamania dan Paul Sabatier.....	40
Gambar 2.4 Model Implementasi Kebijakan Publik Menurut Model George C. Edward III .....	43
Gambar 2.5 Kerangka Berfikir.....	58
Gambar 3.1 Analisis Data Miles & Huberman .....	77
Gambar 4.1 Peta Wilayah Kelurahan Lopang.....	83
Gambar 4.2 Peta Konsep Program Kampung KB.....	110
Gambar 4.3 Koordinasi Program Kampung KB di Kampung Kaliwadas Kelurahan Lopang Kecamatan Serang Kota Serang Provinsi Banten .....	141
Gambar 4.4 Mobil Pelayanan KB yang Disediakan Saat Acara Sosialisasi dan Pelayanan Keluarga Berencana di Kampung KB Kaliwadas .....	147
Gambar 4.5 Kartu KKA .....	153
Gambar 4.6 Kobong tempat mengaji sekaligus tempat PIK-R .....	155
Gambar 4.7 Timbangan Bayi untuk Posyandu dan Timbangan untuk Lansia....	156
Gambar 4.8 Sosialisasi dan Pelayanan Keluarga Berencana di Kampung KB Kaliwadas.....	172
Gambar 4.9 Kegiatan Penyuluhan KKBPK pada Majelis Ta'lim di Kampung Kaliwadas.....	172

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Surat Keterangan Informan/Member Check

Lampiran 2 Matriks Hasil Wawancara Sebelum Reduksi Data

Lampiran 3 Matriks Hasil Wawancara Setelah Reduksi Data

Lampiran 4 Surat Ijin Penelitian

Lampiran 5 Catatan Bimbingan

Lampiran 6 Struktur Organisasi BKKBN Provinsi Banten

Lampiran 7 Struktur Organisasi DP3AKB Kota Serang

Lampiran 8 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI

Lampiran 9 SK Walikota Serang Nomor: 476/Kep.223-Huk/2017

Lampiran 10 SK Camat Kecamatan Serang Kota Serang Nomor: 400/SK-05/IV/2017

Lampiran 11 SK Kepala Kelurahan Lopang Kecamatan Serang Kota Serang

Lampiran 12 Rekapitulasi Data Keluarga di Kampung KB

Lampiran 13 Brosur Kampung KB di Kota Serang

Lampiran 14 Dokumentasi

Lampiran 15 Curriculum Vitae

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.7 Latar Belakang**

Penduduk Indonesia adalah semua orang yang berdomisili di wilayah teritorial Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap (*Statistical Yearbook of Indonesia 2018*). Indonesia Merupakan negara dengan jumlah penduduk keempat terbesar di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2018 yang berjudul Statistik Indonesia 2018 (*Statistical Yearbook of Indonesia 2018*), jumlah penduduk Indonesia adalah sebanyak 261.890.900 jiwa pada tahun 2017. Angka tersebut lebih tinggi atau bertambah sebanyak 2.186.000 jiwa dibandingkan dengan tahun 2016 yang berjumlah 258.704.900 jiwa.

Permasalahan mengenai laju pertumbuhan penduduk di suatu negara merupakan suatu hal yang harus diperhatikan secara serius, karena bila terjadi laju pertumbuhan yang besar dan tidak terkendali akan menimbulkan berbagai masalah kompleks lainnya yang dapat mengganggu proses pembangunan suatu negara.

Pada tahun 2045 Indonesia genap berusia 100 tahun yang berarti 100 tahun emas, rentang 2020-2045 (25 tahun) 70% penduduk Indonesia dalam usia produktif yaitu 15-64 tahun. Pendapatan perkapita yaitu \$47.000 diproyeksikan menjadi salah satu dari tujuh kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Generasi masa depan

Indonesia memiliki kecerdasan yang komperhensif, yakni produktif, inovatif, damai dalam interaksi sosialnya, berkarakter kuat, sehat, menyehatkan dalam interaksi alamnya, dan berperadaban unggul ([www.bkkbn.go.id](http://www.bkkbn.go.id)).

Jumlah penduduk Provinsi Banten selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Penduduk Banten berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2017 sebanyak 12,45 juta jiwa yang terdiri atas 6,34 juta jiwa penduduk laki-laki dan 6,1 juta jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2016, penduduk Banten mengalami pertumbuhan sebesar 2,01%. Kepadatan penduduk Provinsi Banten tahun 2017 mencapai 1.288 jiwa/km<sup>2</sup> dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4 orang (Provinsi Banten dalam Angka 2018).

Jumlah penduduk Kota Serang pada tahun 2017 sebesar 666.600 jiwa, dengan penduduk laki-laki sebanyak 355.803 jiwa dan lebih banyak dibanding penduduk perempuan yang sebesar 341.597 jiwa. Tingkat kepadatan penduduk di wilayah Kota Serang sebesar 2.499 jiwa/km<sup>2</sup> dimana sebagian besar penduduknya mendiami daerah perkotaan (Provinsi Banten dalam Angka 2018).

### 1.1 Jumlah Rumah Tangga dan Rata-Rata Banyaknya Anggota Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten 2017

Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga	Rata-Rata Banyaknya Anggota Rumah Tangga
Kabupaten		
1. Pandeglang	283 782	4,25
2. Lebak	314 180	4,10
3. Tangerang	879 566	4,08
4. Serang	342 033	4,37
Kota		
1. Tangerang	565 489	3,78
2. Cilegon	102 100	4,16
<b>3. Serang</b>	146 311	<b>4,56</b>
4. Tangerang Selatan	419 313	3,92
Banten	3 052 774	4,08

(Sumber: Banten dalam Angka 2018)

Menurut tabel 1.1 diatas, terlihat bahwa Kota Serang merupakan kota dengan Jumlah tertinggi dalam presentase jumlah rumah tangga dan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga menurut kabupaten/kota di Provinsi Banten. Rumah tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus dan biasanya tinggal bersama serta pengelolaan makan dari satu dapur. Yang dimaksud makan dari satu dapur adalah jika kepengurusan waktu sehari-harinya dikelola bersama-sama menjadi satu. Anggota rumah tangga adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal disuatu rumah tangga, baik yang berada dirumah pada waktu pencacahan maupun yang sementara tidak ada. Rata-rata rumah tangga adalah angka yang menunjukkan rata-rata jumlah anggota rumah tangga per rumah tangga. Rata-rata banyaknya anggota rumah tangga di Kota Serang lebih tinggi dari kota/kabupaten di Provinsi Banten yang lain yaitu 4,56. Kota Serang dengan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga tersebut seharusnya menjadikan Kota Serang memiliki tingkat partisipasi yang baik dalam kampung KB, karena Kampung KB mencakup seluruh anggota keluarga, seperti KB untuk PUS (Pasangan Usia Subur), BKL untuk lansia, BKR untuk remaja, BKB untuk balita, dan lain-lain yang menyertakan seluruh anggota keluarga.



### 1.2 Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Menurut Kecamatan di Kota Serang, 2016 dan 2017

NO	Kecamatan	Jumlah PUS (Pasangan Usia Subur) 2016	Jumlah PUS (Pasangan Usia Subur) Baru 2017	Total
1.	Curug	10.361	48	10.409
2.	Walantaka	16.981	385	17.366
3.	Cipocok Jaya	16.135	549	16.684
<b>4.</b>	<b>Serang</b>	<b>34.336</b>	<b>1.121</b>	<b>35.457</b>
5.	Taktakan	17.236	643	17.879
6.	Kasemen	16.828	578	17.406
	Total	111.877	3.324	115.201

(Sumber: Kota Serang dalam Angka 2017 dan 2018 diolah oleh peneliti)

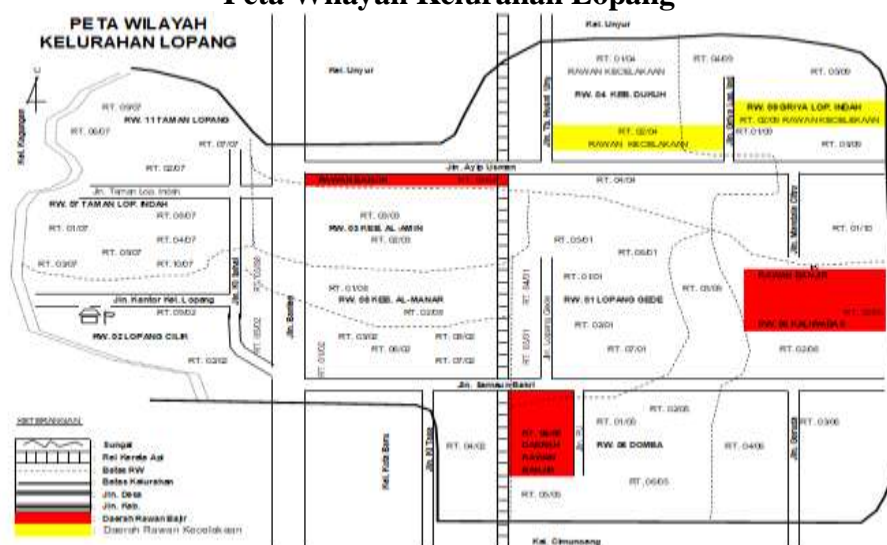
Menurut tabel 1.2 diatas, terlihat Kecamatan Serang merupakan kecamatan dengan jumlah tertinggi dalam jumlah pasangan usia subur (PUS) menurut kecamatan di Kota Serang, 2017, yaitu dengan jumlah PUS baru sebanyak 1.121. dan PUS 2016 34.336 dengan total PUS 35.457.

Kecamatan Serang memiliki luas wilayah 25,88 Km<sup>2</sup> dengan batas-batas kecamatan yaitu, Utara: Kecamatan Kasemen, Selatan: Kecamatan Cipocok Jaya / Taktakan, Barat: Kecamatan Taktakan, dan Timur: Kecamatan Cipocok Jaya. Ibu Kota Kecamatan Serang terletak pada jarak 1,5 Km dari ibu Kota Serang. Secara administrasi wilayah Kecamatan Serang terbagi menjadi 190 lingkungan, 196 Rukun Warga (RW), 803 Rukun Tetangga (RT), dengan jumlah penduduk 226.717 jiwa, yang terdiri dari 115.425 jiwa laki-laki, dan 111.292 jiwa perempuan (Kecamatan Serang dalam Angka 2018).

Di Kota Serang ada 7 kampung KB, wilayah kampung KB di Kota Serang yang telah dibentuk. Kampung KB di Kecamatan Serang, Kelurahan Lopang, RW. 06

Kampung Kaliwadas; Kampung KB di Kecamatan Cipocok Jaya, Kelurahan Gelam, RW. 03 Kampung Jagarayu; Kampung KB di Kecamatan Kasemen, Kelurahan Kasunyutan, RW. 05 Kampung Kenari; Kampung KB di Kecamatan Taktakan, Kelurahan Karanganyar, RW. 06 Kampung Kalanganyar; Kampung KB percontohan yang merupakan kampung KB percontohan Kota Serang di Kecamatan Taktakan, Kelurahan Sayar, RW. 02 Kampung Cikentang; Kampung KB di Kecamatan Walantaka, Kelurahan Nyapah, RW. 02 Kampung Nyapah Masjid; Kampung KB di Kecamatan Curug, Kelurahan Pancalaksana, RW. 01 Kampung Cibeo.

**Gambar 1.1**  
**Peta Wilayah Kelurahan Lopang**



(Sumber: Profil Kelurahan Lopang)

Luas wilayah keluarahan Lopang adalah 1.17 Km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk 12.729 Jiwa, kepadatan penduduk 11.39 Jiwa/Km<sup>2</sup> yang terdiri dari laki-laki 6.510 Jiwa dan perempuan 6.210 Jiwa. Jumlah keluarga di Kelurahan Lopang adalah 3.208 Keluarga. Kelurahan Lopang terdiri dari 12 RW dan 57 RT. Di Kelurahan

Lopang hanya terdapat satu Kampung KB yaitu di Kampung Kaliwadas. Di wilayah Kampung KB di Kampung Kaliwadas RW 6 terdapat 5 RT (Profil Kelurahan Lopang 2017).

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai dasar pelaksanaan program kependudukan dan keluarga berencana menekan kewenangan kepada BKKBN. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah semakin mempertegas kewenangan tersebut, dimana pada lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten dan kota pada huruf N (Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) menegaskan kewenangan dalam pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota. Empat sub urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang harus dilaksanakan oleh masing-masing tingkatan pemerintah yaitu; (1) sub urusan pengendalian penduduk, (2) sub urusan keluarga berencana (3) sub keluarga sejahtera, dan (4) sub urusan sertifikasi dan standarisasi. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Delapan fungsi keluarga adalah: fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi, fungsi ekonomi, dan fungsi pembinaan lingkungan.

Selanjutnya, dalam rangka menindaklanjuti pencaangan Kampung KB oleh Bapak Presiden RI dibuatlah Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 440/70/SJ. Lalu setelah mendapat surat edaran, Walikota Serang mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Serang Nomor: 476/Kep.223-Huk/2017 tentang Penunjukan Dan Penetapan Lokasi Kelurahan Binaan Untuk Pelaksanaan Program Terpadu Kependudukan Dan Kampung Keluarga Berencana Kota Serang. Selanjutnya, terdapat Surat Keputusan Camat Kecamatan Serang Nomor: 400/SK-05/IV/2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berencana (KB) Kecamatan Serang. Yang terakhir, terdapat Surat Keputusan Kepala Kelurahan Lopang Nomor: 148/DK-03/KB05/2017 tentang Pembentukam Kelompok Kerja Keluarga Berencana (Kampung KB) Kelurahan Lopang, dan Surat Keputusan Kepala Kelurahan tentang Kegiatan Dan Pelaksanaan Kegiatan Kelompok Bina Kelurga Balita (BKB) “Kendedes” Kelurahan Lopang, tentang Kegiatan Dan Pelaksanaan Kegiatan Kelompok Bina Kelurga Remaja (BKR) “Kendedes” Kelurahan Lopang , tentang Kegiatan Dan Pelaksanaan Kegiatan Kelompok Bina Kelurga Lansia (BKL) “Kendedes” Kelurahan Lopang, tentang Pembentukan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) “Semarak” Kelurahan Lopang, dan tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Kegiatan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) “Tunas” Kelurahan Lopang.

Dalam upaya meningkatkan kembali program KB yang mulai redup, Bapak Presiden Jokowi mengatasmakan BKKBN melakukan kegiatan/program yang dapat memperkuat upaya pencapaian target sasaran pembangunan bidang

pengendalian penduduk dan keluarga berencana 2015-2019 bekerjasama dengan kementerian lembaga terkait. Dalam hal ini kemudian disepakati agar BKKBN segera membentuk Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) yang mana program ini akan dijadikan salah satu sistem dalam pengentasan kemiskinan. Pada tanggal 14 Januari 2016 untuk pertama kalinya Kampung KB telah dicanangkan oleh Presiden RI di Dusun Jenawi Desa Mertasinga, Kabupaten Cirebon.

Tujuan nasional yang ingin dicapai dari Kampung KB adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memprioritaskan daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI dan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Kampung KB adalah wujud dari pelaksanaan agenda prioritas pembangunan pembangunan nawacita ke 3, 5, dan 8 yaitu: (3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; (5) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat; dan (8) Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta tanah air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia. Kriteria pemilihan Kampung KB yaitu utamanya pencapaian KB rendah dan pra keluarga sejahtera; wilayah miskin, terpencil, kumuh dan perbatasan; juga lintas sektor pendidikan rendah dan infrastruktur kurang memadai. Kegiatan lintas sektor seperti pelayanan KB, pelayanan pembuatan akta, pembangunan jalan dan jembatan, pembuatan kartu tanda penduduk, penyediaan buku bacaan, posyandu, juga pendidikan anak usia

dini dan lain-lain. Kegiatan dari sisi ketahanan keluarga yaitu Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja (PIK-R), juga Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).

Yang melatarbelakangi Kampung Keluarga Berencana (KB) adalah (1) Program Keluarga Berencana (KB) tidak lagi bergema dan terdengar gaungnya seperti pada era orde baru; (2) Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat ditingkat Kampung atau yang setara melalui program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas; (3) Penguatan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang dikelola dan diselenggarakan dari oleh dan untuk masyarakat; (4) Mewujudkan cita-cita pembangunan Indonesia yang tertuang dalam nawacita terutama agenda prioritas ke 3 yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; (5) Mengangkat dan menggairahkan kembali program Keluarga Berencana (KB) guna menyongsong tercapainya bonus demografi yang diprediksi terjadi pada tahun 2020-2030.

Pembentukan Kampung KB menjadi inovasi strategis untuk dapat mengimplementasikan kegiatan-kegiatan prioritas program KKBPK (Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga) secara utuh di lini lapangan yang dapat bersinergi dengan mitra kerja, stakeholders, instansi terkait sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah dimana Kampung KB tersebut dibentuk. Kampung KB upaya cegah ledakan penduduk dengan realisasi

633 Kampung KB pada April 2017 dan 87% telah diintervensi program lintas sektor. Dengan sasaran utamanya yaitu keluarga-keluarga Indonesia. Target 7.166 kecamatan pada tahun 2017. Manfaat Kampung KB dapat membangun masyarakat berbasis keluarga melalui delapan fungsi keluarga dan mensejahterakan masyarakat melalui integrasi program lintas sektor.

Bila tak dicegah dengan program keluarga berencana (KB), penduduk Indonesia naik dua kali lipat dalam rentang 1990-2020. Tahun 1990 sebanyak 178,6 juta jiwa; tahun 2000 205 juta jiwa, bila tanpa KB 285 juta jiwa, 80 juta kelahiran tercegah; tahun 2010 240 juta jiwa, bila tanpa KB 340 juta jiwa, 100 juta kelahiran tercegah. “Serangan bukan hanya perang, tapi juga ledakan penduduk tak terkendali” (Kepala BKKBN Surya Chandra Surapaty).

Dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) dan rencana strategis BKKBN tahun 2015-2019 sejalan dengan renstra dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana Kota Serang, dalam bidang pembangunan kependudukan dan keluarga berencana, memiliki 6 sasaran strategi yaitu:

1. Menurunkan rata-rata laju pertumbuhan penduduk,
2. Menurunkan *total fertility rate* (TFR),
3. Meningkatkan *contraceptive prevalence rate* (CPR),
4. Menurunnya *unmet need*,
5. Menurunnya *age specific fertility* (ASFR),
6. Menurunnya presentase kehamilan.

Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat RW, dusun atau yang memiliki kriteria tertentu, dimana terdapat keterpaduan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistematis dan sistematis.

Dalam Kampung KB terdapat indikator keberhasilan yang menjadi tolak ukur keberhasilan program Kampung KB antara lain:

A. Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga

1. Setiap keluarga mampu melaksanakan fungsi secara optimal
2. Terbinanya kesertaan ber-KB
3. Tersedianya pusat-pusat pelayanan KKBPK
4. Meningkatnya partisipasi keluarga dalam kelompok kegiatan
5. Tumbuh dan berkembangnya “gotong royong masyarakat dalam membangun kampung KB”.

B. Sektor pembangunan lainnya disesuaikan dengan sasaran/indikator keberhasilan yang disusun/ditentukan oleh sektor yang bersangkutan.

Pada tahun 2016 Kota Serang telah menentukan lokasi Kampung Cikentang Kelurahan Sayar Kecamatan Taktakan sebagai wilayah pertama yang dicanangkan sebagai Kampung KB percontohan di Kota Serang. Pada tahun 2017 di Kota Serang dibentuk 6 Kampung KB di masing-masing Kecamatan satu Kampung KB berdasarkan SK WaliKota Serang Nomor: 476/Kep.223-Huk/2017.

Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) menjadi salah satu inovasi strategis yang secara langsung bersentuhan dan memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat Indonesia, yang mengimplementasikan kegiatan-kegiatan



prioritas program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK) dan pembangunan sektor terkait lainnya secara utuh di lini lapangan. Kampung KB merupakan salah satu bentuk/model miniatur pelaksanaan total program KKBPK secara utuh yang melibatkan seluruh bidang di lingkungan BKKBN dan bersinergi dengan kementerian/lembaga, mitra kerja, stakeholders instansi terkait sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah, serta dilaksanakan di tingkat pemerintahan terendah (sesuai prasyarat penentuan lokasi Kampung KB) di seluruh kabupaten dan kota.

Sasaran kegiatan operasional pada Kampung Keluarga Berencana (KB) yaitu Keluarga, PUS (Penduduk Usia Subur), Lansia, dan Remaja, juga keluarga yang memiliki balita, keluarga yang memiliki remaja, dan keluarga yang memiliki lansia. Sasaran sektoral pada Kampung Keluarga Berencana (KB) yaitu Kepala desa/kelurahan, Ketua RW, Ketua RT, PKB (Penyuluh Keluarga Berencana), Petugas lapangan sektor terkait, TPPKK (Tim Penggerak, Kader institusi masyarakat pedesaan (IMP) dalam hal ini PKKBD dan Sub PPKBD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, serta kader pembangunan lainnya.

Jumlah PUS (Pasangan Usia Subur) di Kecamatan Serang Desember 2018 adalah 37.134 Jiwa. Alasan Kampung Kaliwadas menjadi kampung KB adalah karena pencapaian KB di Kampung Kaliwadas kurang atau paling rendah diantara kelurahan di Kecamatan Serang, karena Kampung Kaliwadas merupakan daerah kumuh miskin perkotaan, juga termasuk daerah tertinggal. Anggaran untuk kampung KB seharusnya dari APBDes, namun di Kampung Kaliwadas tidak ada

anggaran pasti, hanya ada dari lintas sektor seperti dari Dinas Pertanian memberikan tanaman, Dinas Kesehatan memberikan timbangan dan pengukur tinggi badan, juga dari Dinas Lingkungan Hidup memberikan tempat sampah 3 warna. Belum ada anggaran berupa uang untuk kampung KB (Berdasarkan wawancara awal dengan Ibu Elsiana, S.Sos sebagai Sekretaris Penyuluh KB di Balai Penyuluh KB Kecamatan Serang).

Dalam kampung KB di Kampung Kaliwadas, kegiatan yang dilakukan untuk BKB adalah Posyandu yang dilaksanakan sebulan sekali dan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) yang diadakan dari hari Senin sampai dengan Kamis, untuk BKL terdapat pengajian rutin setiap hari Jumat dan posyandu lansia, untuk BKR terdapat pengajian rutin setiap hari Minggu, untuk UPPKS pernah diadakan penyuluhan untuk industri/produksi rumah tangga. Untuk anggaran kampung KB dari swadaya masyarakat dalam setiap kegiatan pada kampung KB. (Berdasarkan wawancara awal dengan Ibu Siti Iswati sebagai Sekretaris kampung KB di Kampung Kaliwadas).

Berdasarkan hasil observasi peneliti ke lapangan, berikut beberapa masalah yang peneliti temukan pada Kampung KB di Kampung Kaliwadas, Kelurahan Lopang, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten.

*Pertama*, kurangnya partisipasi keluarga dalam kelompok kegiatan BKB (Bina Keluarga Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja), BKL (Bina Keluarga Lansia), UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) dan PIK-R (Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga,

Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga Pasal 22 Pengembangan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara membentuk dan mengembangkan: a. Pembinaan keluarga balita dan anak; b. Pembinaan ketahanan keluarga remaja dan pembinaan pusat informasi dan konseling ketahanan reproduksi remaja/mahasiswa; c. Pembinaan ketahanan keluarga lansia; d. Pembinaan ekonomi keluarga.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu prasyarat wajib dalam pembentukan Kampung KB yang tertulis sesuai petunjuk teknis Kampung KB oleh BKKBN, yang berarti partisipasi keluarga dalam kelompok kegiatan BKB, BKR, BKL, UPPKS dan PIK-R sangat berperan penting dalam pelaksanaan Kampung KB.

### 1.3 Presentase Partisipasi Keluarga dalam Poktan (Kelompok Kegiatan) di Kota Serang

Kampung KB			Kelompok Kegiatan					Total
Kecamatan	Kelurahan	Kampung	BKB	BKR	BKL	PIK-R	UPPKS	
<b>Serang</b>	<b>Lopang</b>	<b>RW.06 Kaliwadas</b>	<b>1,37 %</b>	<b>1,34 %</b>	<b>8,57 %</b>	<b>0,66%</b>	<b>0,91%</b>	<b>12,85 %</b>
Cipocok Jaya	Gelam	RW.03 Jagarayu	100%	24,38 %	2,86 %	4,65%	0%	131,89%
Kasemen	Kasunyatan	RW.05 Kenari	26,09 %	0%	0%	0,7%	0,55%	27,34 %
Taktakan	Karanganyar	RW.06 Kalanganyar	0%	0%	30%	0%	0,9%	30,9 %
Taktakan	Sayar	RW.02 Cikentang	92,56 %	0%	0%	0%	0%	92,56 %
Walantaka	Nyapah	RW.02 Nyapah Majid	72,86 %	0%	0%	0%	0,79%	73,65 %
Curug	Pancalaksana	RW.01 Cibeo	36,28 %	0,59 %	0%	0%	0%	36,87 %

(Sumber: <http://Kampungkb.bkkbn.go.id/>)

Dapat dilihat dari presentase pada tabel 1.3 diatas, bahwa tingkat partisipasi keluarga dalam kelompok kegiatan di Kampung Kaliwadas, Kelurahan Lopang, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten masih sangat rendah yaitu

untuk presentase partisipasi keluarga dalam kelompok kegiatan BKB (Bina Keluarga Balita) 1, 37%, BKR (Bina Keluarga Remaja) 1,34%, BKL (Bina Keluarga Lansia) 8,57%, UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) 0,91%, dan PIK-R (Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja) 0,66%. Bila ditotalkan presentase partisipasi keluarga pada kelompok kegiatan yaitu 12,85%. Dari ke 7 kampung KB di Kecamatan Serang, partisipasi dalam kelompok kegiatan paling rendah adalah kampung KB di Kampung Kaliwadas yaitu dengan total partisipasi di kelompok kegiatan sebesar 12,85%.

#### **1.4 Data Jumlah Balita, Remaja, dan Lansia pada Kampung KB di Kampung Kaliwadas**

Kategori	RT 01	RT 02	RT 03	RT 04	RT 05	Total
Balita 0-5 Tahun	10	26	-	16	28	80
Remaja 12-25 Tahun	54	90	-	60	75	279
Lansia 50 Tahun Keatas	37	54	-	42	31	164

(Sumber: Rekapitulasi Data di Kampung KB)

#### **1.5 Data yang Mengikuti Kegiatan Kampung KB di Kampung Kaliwadas**

RT	PUS	BKB	BKR	BKL	UPPKS	PIK-R
RT 01	57	5	25	24	-	4
RT 02	67	8	23	5	-	4
RT 03	-	-	-	-	-	-
RT 04	75	-	86	146	9	-
RT 05	51	6	4	4	4	4
Total	250	19	138	179	13	12

(Sumber: Rekapitulasi Data di Kampung KB)

Dari tabel 1.4 Data Jumlah Balita, Remaja, dan Lansia pada Kampung KB di Kampung Kaliwadas dan 1.5 Data yang Mengikuti Kegiatan Kampung KB di Kampung Kaliwadas diatas, dapat kita lihat bahwa partisipasi masyarakat Kampung Kaliwadas pada kelompok Kegiatan Kampung KB masih kurang.

*Kedua*, kurangnya sarana dan prasarana dalam menjalankan program Kampung KB, terutama belum adanya rumah dataku dan sekretariat KKB (Kependudukan dan Keluarga Berencana) sehingga belum adanya mekanisme operasional seperti rapat perencanaan kegiatan, rapat koordinasi dengan dinas/instansi terkait pendukung kegiatan, sosialisasi kegiatan, juga monitoring dan evaluasi kegiatan. Pada Kampung KB yang bertempat di Kampung Kaliwadas, Kelurahan Lopang, Kecamatan Serang, Kota Serang Provinsi Banten ini masih minim sarana dan prasarannya. dari hasil observasi lapangan peneliti, untuk sarana yang dimiliki oleh Kampung KB hanya timbangan bayi, timbangan berat badan, dan timbangan gantung untuk BKL, sedangkan sarana untuk kelompok kegiatan yang lain belum tersedia. Di Kampung KB tersebut belum ada prasarana seperti rumah data dan sekretariat KKB, sehingga data-data Kampung KB tidak terkumpul dan tidak dapat merencanakan dan menjalankan kegiatan dengan baik. Hal tersebut tercantum pada website Kampung KB, bahwa sarana dan prasarana Kampung KB adalah adanya sekretariat KKB, BKB, BKR, BKL, kelompok UPPKS, PIK-R dan rumah dataku, dan seperti di Kampung KB di Kampung Cikentang, Kelurahan Sayar, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Banten sebagai wilayah pertama yang dicanangkan dan sebagai Kampung KB percontohan di Kota Serang, sarana dan prasarana tersebut sudah ada dan lengkap. Kurangnya sarana dan prasarana dalam menjalankan program Kampung KB, terutama belum adanya rumah dataku dan sekretariat KKB dapat menjadi hal yang sangat penting karena masyarakat tidak punya tempat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan Kampung KB secara nyaman, sehingga sampai saat ini di Kampung KB tersebut belum ada mekanisme

operasional seperti rapat perencanaan kegiatan, rapat koordinasi dengan dinas/instansi terkait pendukung kegiatan, sosialisasi kegiatan, juga monitoring dan evaluasi kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga Pasal 37 ayat (1) penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (3) dilaksanakan melalui mekanisme operasional pelayanan dasar program pengendalian penduduk dan keluarga berencana; (2) mekanisme operasional pelayanan dasar program pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Analisis data mikro keluarga;
- b. Penajaman sasaran pelayanan dasar;
- c. Penguatan koordinasi antarpihak terkait di setiap tingkatan;
- d. Melakukan evaluasi dan rencana tindak lanjut;
- e. Pembagian peran antarunsur terkait;
- f. Pelayanan terintegrasi dengan sektor pembangunan jalan; dan
- e. Pengendalian dan pemantauan.

**Gambar 1.2**  
**Sarana Kampung KB Kaliwadas**



(Sumber: Dokumentasi Peneliti)

Gambar 1.2 diatas merupakan sarana yang dimiliki oleh Kampung KB untuk kegiatan BKB (Bina Keluarga Balita). Kegiatan BKB pun dilaksanakan di rumah

salah satu warga yang merupakan salah satu pengurus Kampung KB pada kelompok kegiatan BKL. Selama ini rumah tersebut yang digunakan sebagai posko Kampung KB karena belum adanya rumah dataku dan sekretariat KKB.

*Ketiga*, kurangnya koordinasi dan komitmen dengan instansi lainnya (lintas sektor), seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, juga Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak yang merupakan wilayah koordinasi lintas sektoral. Lintas sektor adalah program yang melibatkan suatu institusi atau instansi negeri atau swasta yang membutuhkan pemberdayaan dan kekuatan dasar dari pemerintah atau swasta mengenai peraturan yang ditetapkan untuk mewujudkan alternatif kebijakan secara terpadu dan komprehensif sehingga adanya keputusan dan kerjasama. Dalam Kampung KB sangat dibutuhkan peran dari lintas sektor. Akan tetapi kenyataannya dilapangan, peran dari lintas sektor itu masih kurang, sejauh ini koordinasi lintas sektor yang pernah terjadi adalah dengan Dinas Pertanian memberikan tanaman, Dinas Kesehatan memberikan timbangan dan pengukur tinggi badan, juga dari Dinas Lingkungan Hidup memberikan tempat sampah 3 warna dan hal tersebut pun belum bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat Kampung Kaliwadas (Berdasarkan wawancara awal dengan Ibu Elsiana, S.Sos sebagai Sekretaris Penyuluh KB di Balai Penyuluh KB Kecamatan Serang). Kegiatan lintas sektor yang dibutuhkan pada Kampung KB seperti pada bidang pemukiman, sosial ekonomi, kesehatan, pendidikan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak juga program lain yang disesuaikan dengan kebutuhan wilayah Kampung KB tersebut. Seperti pada kampung KB di Desa

Pangkat, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang yang sudah mempunyai koordinasi dan komitmen dengan lintas sektor yaitu Kanwil Kemenag (Kantor Wilayah Kementerian Agama) dan juga seperti di Kampung KB di Kampung Pasir Angin, Kelurahan Cikerei, Kecamatan Cibeer, Kota Cilegon yang sudah mempunyai koordinasi dan komitmen dengan TNI-POLRI. Dengan permasalahan yang ada dilapangan peran dari lintas sektor sangat dibutuhkan. Karena Kampung Keluarga Berencana (KB) bukan milik Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) saja tetapi milik semuanya. Kampung Keluarga Berencana (KB) bukan untuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) saja tetapi untuk kesejahteraan masyarakat.

*Keempat*, pada Kampung KB di Kampung Kaliwadas Belum adanya kepengurusan atau kelompok kerja KKB (Kependudukan dan Keluarga Berencana) yang sesuai dengan 8 fungsi keluarga, sehingga belum dapat menerapkan 8 fungsi keluarga dengan baik yaitu fungsi Keagamaan, Sosialisasi/Pendidikan, Reproduksi, Ekonomi, Perlindungan, Kasih Sayang, Sosial Budaya, dan Pembinaan Lingkungan. Pada Kampung KB di Kampung Kaliwadas kelompok kerja yang terbentuk hanya berupa ketua, sekretaris, bendahara, dan sesuai kelompok kegiatan yaitu BKB, BKR, BKL, UPPKS, DAN PIK-R. Jadi kelompok kerja atau kepengurusan di Kampung KB yang bertempat di Kampung Kaliwadas tersebut belum sesuai dengan 8 fungsi keluarga yang disarankan oleh BKKBN sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga Pasal 7 ayat (1) kebijakan



nasional pembangunan keluarga dimaksudkan untuk memberdayakan keluarga agar dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal. Ayat (2) fungsi keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Fungsi keagamaan; b. Fungsi sosial budaya; c. Fungsi cinta kasih; d. Fungsi perlindungan; e. Fungsi reproduksi; f. Fungsi sosialisasi dan pendidikan; g. Fungsi ekonomi; dan h. Fungsi pembinaan lingkungan. Tidak adanya kepengurusan atau kelompok kerja KKB yang sesuai dengan 8 fungsi keluarga tersebut menjadikan Kampung KB Kaliwadas belum dapat menerapkan 8 fungsi keluarga dengan baik, yaitu fungsi keagamaan, sosialisasi/pendidikan, reproduksi, ekonomi, perlindungan, kasih sayang, sosial budaya, dan pembinaan lingkungan, sedangkan manfaat Kampung KB adalah dapat membangun masyarakat berbasis keluarga melalui delapan fungsi keluarga dan mensejahterakan masyarakat melalui integrasi program lintas sektor.

Berdasarkan fenomena-fenomena di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Kampung Kaliwadas Kelurahan Lopang Kecamatan Serang Kota Serang Provinsi Banten”.

### **1.8 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang di atas, dapat identifikasikan penelitian sebagai berikut:

1. Kurangnya partisipasi keluarga dalam kelompok kegiatan BKB(Bina Keluarga Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja), BKL(Bina Keluarga

Lansia), UPPKS(Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) dan PIK-R(Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja)

2. Kurangnya sarana dan prasarana dalam menjalankan program Kampung KB, terutama belum adanya rumah dataku dan sekretariat KKB (Kependudukan dan Keluarga Berencana) sehingga belum adanya mekanisme operasional seperti rapat perencanaan kegiatan, rapat koordinasi dengan dinas/instansi terkait pendukung kegiatan, sosialisasi kegiatan, juga monitoring dan evaluasi kegiatan
3. Kurangnya koordinasi dan komitmen dengan instansi lainnya (lintas sektor), seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, juga Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak

### **1.9 Batasan Masalah**

Pembatasan masalah dalam penelitian diperlukan untuk lebih mempersempit masalah yang akan diteliti. Dari uraian-uraian yang ada dalam keterangan latar belakang dan identifikasi masalah, maka dari itu peneliti membatasi penelitiannya pada Implementasi Poktan (Kelompok Kegiatan) Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Kampung Kaliwadas.

### **1.10 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Kampung Kaliwadas Kelurahan Lopang Kecamatan Serang Kota Serang Provinsi Banten?

### **1.11 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah, maka peneliti mempunyai tujuan untuk mengetahui, mendapatkan gambaran yang jelas, dan menganalisis mengenai Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Kampung Kaliwadas Kelurahan Lopang Kecamatan Serang Kota Serang Provinsi Banten.

### **1.12 Manfaat Penelitian**

Umumnya setiap penelitian yang dilakukan mempunyai manfaat tersendiri. Maka dalam penelitian ini, menjelaskan manfaat penelitian secara teoritik dan praktik.

1. Manfaat Teoritik
  - a. Pengembangan teori Kebijakan Publik yang telah diperoleh selama perkuliahan.
  - b. Dapat dijadikan bahan pemahaman untuk penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktik
  - a. Hasil penelitian ini menjadi bahan masukan khususnya kepada pemerintah dalam menyelesaikan masalah serta mengambil langkah suatu kebijakan untuk menangani lebih lanjut mengenai Implementasi

Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Kampung Kaliwadas Kelurahan Lopang Kecamatan Serang Kota Serang Provinsi Banten.

- b. Hasil penelitian ini memberi manfaat kepada masyarakat sebagai pembelajaran dalam Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Kampung Kaliwadas Kelurahan Lopang Kecamatan Serang Kota Serang Provinsi Banten.
- c. Menjadi bahan pembelajaran bagi penulis ataupun pembaca agar lebih bijaksana dalam mengambil langkah yang akan diambil atas suatu kebijakan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN ASUMSI DASAR PENELITIAN**

#### **2.1 Landasan Teori**

Pada bab ini peneliti akan menggunakan beberapa teori yang mendukung masalah dalam penelitian ini. Deskripsi teori menjelaskan tentang teori-teori dan atau konsep yang dipergunakan dalam penelitian yang sifatnya utama, tidak tertutup kemungkinan untuk bertambah seiring dengan pengambilan data di lapangan. Deskripsi teori menjadi pedoman dalam penelitian ini dan untuk menerjemahkan fenomena-fenomena sosial yang ada dalam penelitian. Teori yang relevan peneliti kaji sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya.

Penelitian mengenai Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Kampung Kaliwadas Kelurahan Lopang Kecamatan Serang Kota Serang Provinsi Banten dikaji dengan beberapa teori dalam ruang lingkup administrasi publik, yaitu: Kebijakan Publik, Kampung KB, Implementasi, Surat Keputusan Walikota Serang Nomor: 476/Kep.223-Huk/2017, dan untuk melengkapinya peneliti lampirkan penelitian terdahulu yang juga menjadi bahan kajian dalam penelitian ini.

## **2.2 Kebijakan Publik**

### **2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik**

Secara umum, istilah “kebijakan” atau “*policy*” digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu (Charles O. Jones, 1984:25 dalam Budi Winarno, 2014:19). Salah satu definisi mengenai kebijakan publik diberikan oleh Robert Eyestone (1971:18), ia mengatakan bahwa “Secara luas” kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai “hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya” (Budi Winarno, 2014:20). Batasan lain tentang kebijakan publik diberikan oleh Thomas R. Dye (1975:1) yang mengatakan bahwa “Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan” (Budi Winarno, 2014:20).

Seorang pakar ilmu politik lain, Richard Rose (1969:79) menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai “serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri” (Budi Winarno, 2014:20). Carl Friedrich memandang kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu (Budi Winarno, 2014:20-21). Menurut Anderson kebijakan merupakan

arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan (Budi Winarno, 2014:21). Kebijakan publik adalah “serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut” (Ibid dalam Budi Winarno, 2014:22). Kebijakan publik sebagai suatu hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan (Jeffery L. Presman dan Aaron Wildavsky dalam Amir Santaso, Ibid dalam Budi Winarno, 2014:22).

Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt (1973:265), dalam perspektif mereka mendefinisikan kebijakan publik sebagai: “‘keputusan tetap’ yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repetisi) tingkahlaku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut”. (Leo Agustino, 2008:6-7). Definisi lain mengatakan bahwa, “kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan” (Dye, 1995:1 dalam Leo Agustino, 2008:7).

Menurut Anderson, konsep kebijakan publik ini kemudian mempunyai beberapa implikasi, yakni *pertama*, titik perhatian kita dalam membicarakan kebijakan publik berorientasi pada maksud atau tujuan dan bukan perilaku secara serampangan. Kebijakan publik secara luas dalam sistem politik modern bukan sesuatu yang terjadi begitu saja melainkan direncanakan oleh aktor-aktor yang terlibat di dalam sistem politik. *Kedua*, kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang tersendiri. Suatu kebijakan mencakup tidak hanya

keputusan untuk menetapkan undang-undang mengenai suatu hal, tetapi juga keputusan-keputusan beserta dengan pelaksanaannya. *Ketiga*, kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, atau mempromosikan perumahan rakyat dan bukan apa yang diinginkan oleh pemerintah. *keempat*, kebijakan publik mungkin dalam bentuknya bersifat positif atau negatif. Secara positif, kebijakan mungkin mencakup bentuk tindakan pemerintah yang jelas untuk memengaruhi suatu masalah tertentu. Secara negatif, kebijakan mungkin mencakup suatu keputusan oleh pejabat-pejabat pemerintah, tetapi tidak untuk mengambil tindakan dan tidak untuk melakukan sesuatu mengenai suatu persoalan yang memerlukan keterlibatan pemerintah (Budi Winarno, 2014:23-24).

### **2.2.2 Tahapan Kebijakan Publik**

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu, beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap. Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn (1999:24-25) adalah sebagai berikut:

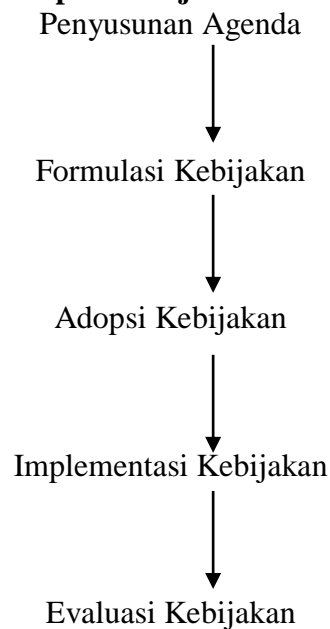
#### **1. Tahap Penyusunan Agenda**

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak



disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

**Gambar 2.1**  
**Tahapan Kebijakan Publik**



(Sumber: Budi Winarno, 2014)

## 2. Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*) yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

Pada tahap ini, masing-masing aktor akan “bermain” untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

### 3. Tahap Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan pengadilan.

### 4. Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elite, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (*implementors*), namun beberapa lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

### 5. Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini, kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu,

ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

## **2.3 Implementasi Kebijakan Publik**

### **2.3.1 Pengertian Kebijakan Publik**

Menurut Lester dan Stewart Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program (Budi Winarno, 2014:147). Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) maupun sebagai suatu dampak (*outcome*) (Ibid dalam Budi Winarno, 2014:147). Ripley dan Franklin berpendapat bahwa Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*) (Budi Winarno, 2014:148). Grindle juga memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah (Budi Winarno, 2014:149).

Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan (Leo Agustino, 2008:138). Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam bukunya *implementation and public policy* (1983:61) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya (Leo Agustino, 2008:139). Chief J. O. Udoji (1981), pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan. (Leo Agustino, 2008:140).

Van Meter dan Van Horn membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam

rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan saran-saran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut (Budi Winarno, 2014:149-150).

### **2.3.2 Model-Model Implementasi Kebijakan Publik**

Dalam sejarah perkembangan studi implementasi kebijakan, dijelaskan tentang adanya dua pendekatan guna memahami implementasi kebijakan, yakni: pendekatan *top down* dan *bottom up*, dalam bahasa Lester dan Stewart (2000:108) istilah itu dinamakan dengan *the command and control approach* (pendekatan kontrol dan komando, yang mirip dengan *top down approach*) dan *the market approach* (pendekatan pasar, yang mirip dengan *bottom up approach*). Masing-masing pendekatan mengajukan model-model kerangka kerja dalam membentuk keterkaitan antara kebijakan dan hasilnya. Beberapa teori implementasi kebijakan adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Publik Model Donald Van Meter Dan Carl Van Horn

Model pendekatan top-down yang dirumuskan oleh Donald Van Metter dan Carl Van Horn disebut dengan Amodel of The Policy Implementation. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk

meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik.

Ada enam variabel, menurut Van Metter dan Van Horn, yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut, adalah:

a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan.

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

b. Sumberdaya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumberdaya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

Tetapi diluar sumberdaya manusia, sumberdaya-sumberdaya lain yang perlu diperhitungkan juga, ialah: sumberdaya finansial dan sumberdaya waktu. Karena, mau tidak mau, ketika sumberdaya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka memang menjadi persoalan pelik untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan publik. Demikian pula halnya dengan sumberdaya waktu. Saat sumberdaya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan persoalan waktu yang terlalu ketat, maka hal ini pun dapat menjadi penyebab ketidakterhasilan implementasi kebijakan.

Karena itu sumberdaya yang diminta dan dimaksud oleh Van Meter dan Van Horn adalah ketiga bentuk sumberdaya tersebut.

#### c. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksana. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku atau tindakan manusia secara radikal, maka agen pelaksana proyek itu haruslah berkarakteristik keras dan ketat pada aturan serta sanksi hukum. Sedangkan bila kebijakan publik itu tidak terlalu merubah perilaku dasar manusia, maka dapat-dapat saja agen pelaksana yang diturunkan tidak sekeras dan tidak setegas pada gambaran yang pertama.

Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

d. Sikap/Kecenderungan (Disposition) Para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor pelaksanakan adalah kebijakan “dari atas” (*top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

e. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivasi Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dan, begitu pulia sebaliknya.

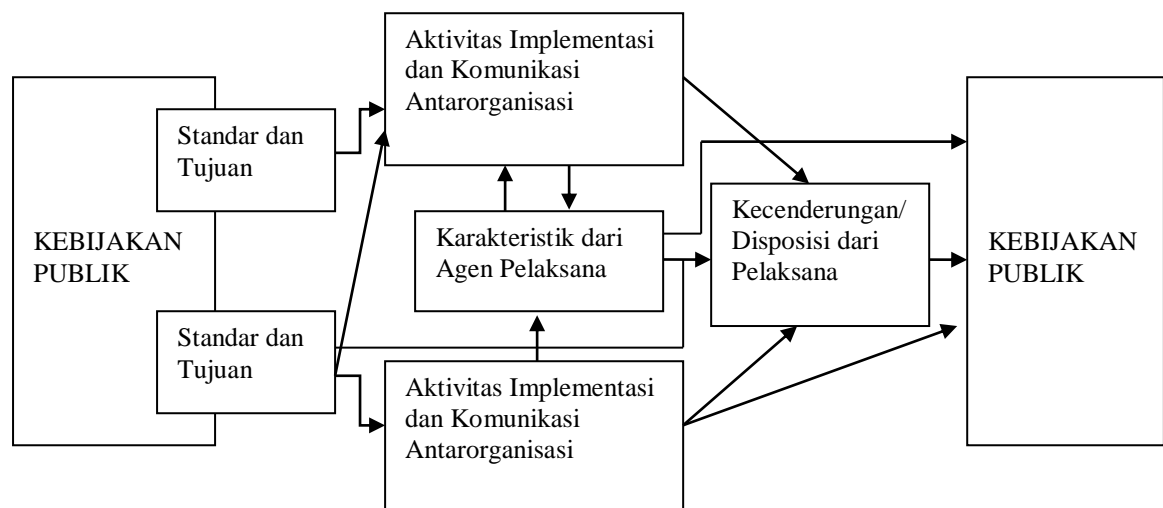
f. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna melalui kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah, sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak



kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

**Gambar 2.2**  
**Model Implementasi Kebijakan Publik Menurut Donald Van Meter Dan Carl Van Horn**



(Sumber: Leo Agustino, 2008)

## 2. Implementasi Kebijakan Publik Model Daniel Mazamanian dan Paul Sabatier

Model implementasi kebijakan publik yang lain ditawarkan oleh Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier. Model implementasi yang ditawarkan mereka disebut dengan *A Framework for Policy Implementation Analysis*. Kedua ahli kebijakan ini berpendapat bahwa peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Dan, variabel-variabel yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori besar, yaitu:

a. Mudah atau Tidaknya Masalah yang akan Digarap, Meliputi:

1) Kesukaran-Kesukaran Teknis

Tercapai atau tidaknya tujuan suatu kebijakan akan tergantung pada sejumlah prasyarat teknis, termasuk diantaranya: kemampuan untuk mengembangkan indikator-indikator pengukur prestasi kerja yang tidak terlalu mahal serta pemahaman mengenai prinsip-prinsip hubungan kausal yang mempengaruhi masalah. Disamping itu tingkat keberhasilan suatu kebijakan dipengaruhi juga oleh tersedianya atau telah dikembangkannya teknik-teknik tertentu.

2) Keberagaman Perilaku yang Diatur

Semakin beragam perilaku yang diatur, maka asumsinya semakin beragam pelayanan yang diberikan, sehingga semakin sulit untuk membuat peraturan yang tegas dan jelas. Dengan demikian semakin besar kebebasan bertindak yang harus dikontrol oleh para pejabat pada pelaksana (administrator atau birokrat) di lapangan.

3) Presentase Totalitas Penduduk yang Tercakup dalam Kelompok Sasaran

Semakin kecil dan semakin jelas kelompok sasaran yang perilakunya akan diubah (melalui implementasi kebijakan), maka semakin besar peluang untuk memobilisasikan dukungan politik terhadap sebuah kebijakan dan dengannya akan lebih terbuka peluang bagi pencapaian tujuan kebijakan.

4) Tingkat dan Ruang Lingkup Perubahan Perilaku yang Dikehendaki

Semakin besar jumlah perubahan perilaku yang dikehendaki oleh kebijakan, maka semakin sukar/sulit para pelaksana memperoleh implementasi yang berhasil.

Artinya ada sejumlah masalah yang jauh lebih dapat kita kendalikan bila tingkat dan ruang lingkup perubahan yang dikehendaki tidaklah terlalu besar.

b. Kemampuan Kebijakan Menstruktur Proses Implementasi Secara Tepat

Para pembuat kebijakan mendayagunakan wewenang yang dimilikinya untuk menstruktur proses implementasi secara tepat melalui beberapa cara:

1) Kecermatan dan Kejelasan Penjenjangan Tujuan-Tujuan Resmi yang akan Dicapai

Semakin mampu suatu peraturan memberikan petunjuk-petunjuk yang cermat dan disusun secara jelas skala prioritas/urutan kepentingan bagi para pejabat pelaksana dan aktor lainnya, maka semakin besar pula kemungkinan bahwa output kebijakan dari badan-badan pelaksana akan sejalan dengan petunjuk tersebut.

2) Keterandalan Teori Kausalitas yang Diperlukan

Memuat suatu teori kausalitas yang menjelaskan bagaimana kira-kira tujuan usaha pembaharuan yang akan dicapai melalui implementasi kebijakan.

3) Ketetapan Alokasi Sumberdaya

Tersedianya dana pada tingkat batas ambang tertentu sangat diperlukan agar terbuka peluang untuk mencapai tujuan-tujuan formal.

4) Keterpaduan Hirarki Didalam Lingkungan dan Diantara Lembaga-Lembaga atau Instansi-Instansi Pelaksana

Salah satu ciri penting yang perlu dimiliki setiap peraturan perundangan yang baik ialah kemampuannya untuk memadukan hirarki badan-badan pelaksana. Ketika kemampuan untuk menyatupadukan dinas, badan, dan lembaga alpa dilaksanakan, maka koordinasi antar instansi yang bertujuan mempermudah jalannya

implementasi kebijakan justru akan membuyarkan tujuan dari kebijakan yang telah ditetapkan.

#### 5) Aturan-Aturan Pembuat Keputusan dari Badan-Badan Pelaksana

Selain dapat memberikan kejelasan dan konsistensi tujuan, memperkecil jumlah titik-titik veto, dan intensif yang memadai bagi kepatuhan kelompok sasaran, suatu undang-undang harus pula dapat mempengaruhi lebih lanjut proses implementasi kebijakan dengan cara menggariskan secara formal aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana.

#### 6) Kesepakatan para Pejabat Terhadap Tujuan yang Termasuk dalam Undang-Undang

Para pejabat pelaksana memiliki kesepakatan yang diisyaratkan demi tercapainya tujuan. Hal ini sangat signifikan halnya oleh karena, *top down policy* bukanlah perkara yang mudah untuk diimplankan pada para pejabat pelaksana di level lokal.

#### 7) Akses Formal Pihak-Pihak Luar

Faktor lain yang juga dapat mempengaruhi implementasi kebijakan adalah sejauhmana peluang-peluang yang terbuka bagi partisipasi para aktor diluar badan pelaksana dapat mendukung tujuan resmi. Ini maksudnya agar kontrol pada para pejabat pelaksanaan yang ditunjuk oleh pemerintah pusat dapat berjalan sebagaimana mestinya.

c. variabel-variabel di luar undang-undang yang mempengaruhi implementasi

#### 1) Kondisi Sosial-Ekonomi dan Teknologi

Perbedaan waktu dan perbedaan diantara wilayah-wilayah hukum pemerintah dalam hal kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi sangat signifikan berpengaruh terhadap upaya pencapaian tujuan yang digariskan dalam suatu undang-undang. Karena itu, eksternal faktor juga menjadi hal penting untuk diperhatikan guna keberhasilan suatu upaya pengejawantahan suatu kebijakan publik.

#### 2) Dukungan Publik

Hakekat perhatian publik yang bersifat sesaat menimbulkan kesukaran-kesukaran tertentu, karena untuk mendorong tingkat keberhasilan suatu implementasi kebijakan sangat dibutuhkan adanya sentuhan dukungan dari warga. Karena itu, mekanisme partisipasi publik sangat penting artinya dalam proses pelaksanaan kebijakan publik di lapangan.

#### 3) Sikap dan Sumber-Sumber yang Dimiliki Kelompok Masyarakat

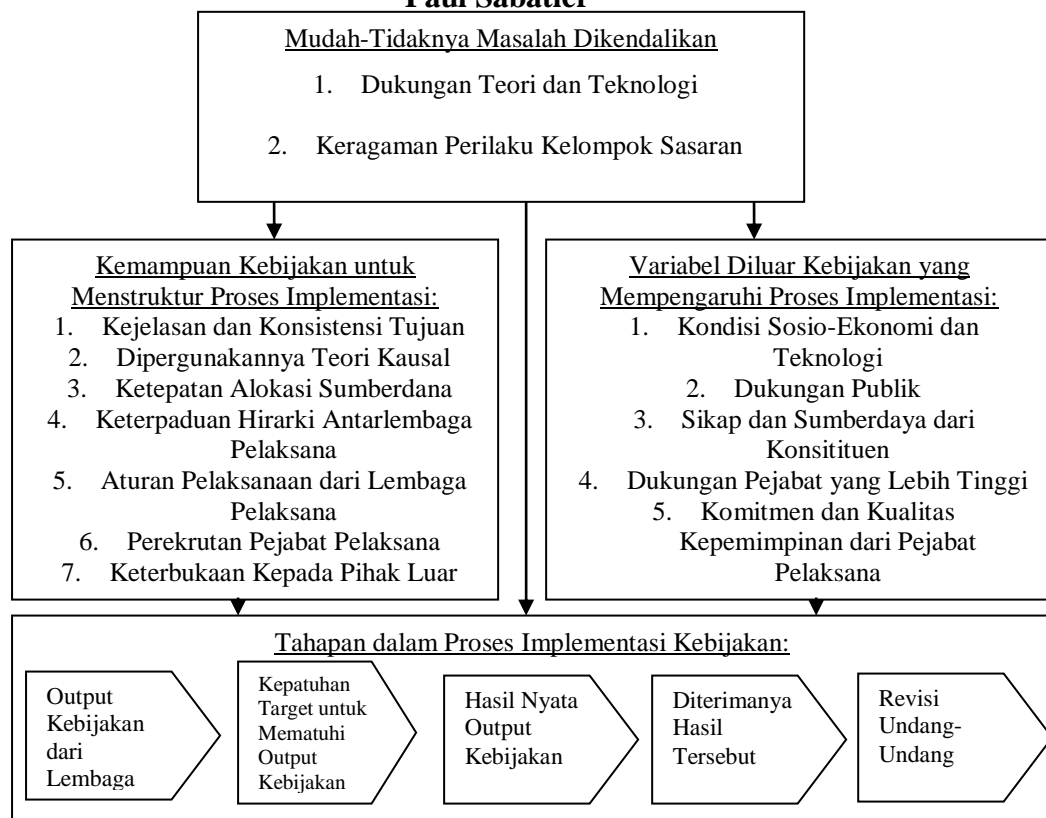
Perubahan-perubahan yang hendak dicapai oleh suatu kebijakan publik akan sangat berhasil apabila ditingkat masyarakat, warga memiliki sumber-sumber dan sikap-sikap masyarakat yang kondusif terhadap kebijakan yang ditawarkan pada mereka. Ada semacam *local genius* (kearifan lokal) yang dimiliki oleh warga yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan implementasi kebijakan publik. Dan, hal tersebut sangat dipengaruhi oleh sikap dan sumber yang dimiliki oleh warga masyarakat.

#### 4) Kesepakatan dan Kemampuan Kepemimpinan para Pejabat Pelaksana

Kesepakatan para pejabat instansi merupakan fungsi dari kemampuan undang-undang untuk melambangkan pengaruhnya pada badan-badan pelaksana melalui penyeleksian instruksi-instruksi dan pejabat-pejabat terasnya. Selain itu pula,

kemampuan berinteraksi antarlembaga atau individu di dalam lembaga untuk mensukseskan implementasi kebijakan menjadi hal indikasi penting keberhasilan kinerja kebijakan publik.

**Gambar 2.3**  
**Model Implementasi Kebijakan Publik Menurut Daniel Mazamanian dan Paul Sabatier**



(Sumber: Leo Agustino, 2008)

### 3. Implementasi Kebijakan Publik Model George C. Edward III

Model implementasi kebijakan ketiga yang berprespektif *top down* dikembangkan oleh George C. Edward III. Edward III menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan *Direct and indirect impact on implementation*. Dalam pendekatan yang diteorematkan oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: (1) komunikasi; (2) sumberdaya; (3) disposisi; dan (4) struktur birokrasi.

Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, menurut George C. Edward III, adalah komunikasi. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai (atau digunakan) dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut di atas, yaitu:

- a. Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula.
- b. Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureuacrats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua).
- c. Konsistensi; perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan).

Variabel atau faktor kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumberdaya. Indikator sumberdaya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

- a. Staf; sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf.
- b. Informasi; dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu yang pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.
- c. Wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan.

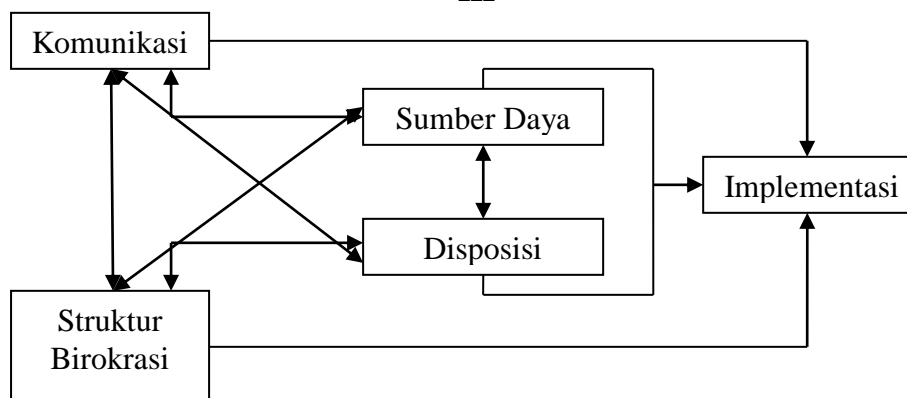
- d. Fasilitas, fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan.

Variabel ketiga yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik, bagi George C. Edward III, adalah disposisi. Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut George C. Edward III, adalah:

- a. Pengangkatan birokrat;
- b. Insentif

variabel keempat, menurut Edward III, yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Dua karakteristik, menurut Edward III, yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik, adalah: melakukan standar operating prosedurs (SOPs) dan melaksanakan fragmentasi.

**Gambar 2.4**  
**Model Implementasi Kebijakan Publik Menurut Model George C. Edward III**





(Sumber: Leo Agustino, 2008)

#### 4. Implementasi Kebijakan Publik Model Merilee S. Grindle

Model keempat yang berpendekatan top-down dikemukakan oleh Merilee S. Grindle (1980). Pendekatannya tersebut dikenal dengan *Implementation As A Political and Administrative Process*. Menurut Grindle ada dua variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Hal ini dikemukakan oleh Grindle, dimana pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari dua hal, yaitu:

- a. dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (design) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
- b. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu:
  - 1) Impact atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok
  - 2) Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik, juga menurut Grindle, amat ditentukan oleh tingkat *implementability* kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas *content of policy* dan *context of policy* (1980:5).

- a. *Content of policy* menurut Grindle adalah

- 1) *Interest Affected* (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi)

Berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauhmana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut.

2) *Type Of Benefits* (tipe manfaat)

Pada poin ini *content of policy* berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.

3) *Extent Of Change Envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai)

Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai. *content of policy* yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.

4) *Site Of Decision Making* (letak pengambilan keputusan)

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.

5) *Program Implementer* (pelaksana program)

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Dan, ini harus sudah terdata atau terpapar dengan baik pada bagian ini.

6) *Resources Committed* (sumber-sumber daya yang digunakan)

Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumberdaya-sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

b. *Context of policy* menurut Grindle adalah:

1) *Power, Interest, And Strategy Of Actor Involved* (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat)

Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang, sangat besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh arang dari api.

2) *Institution And Regime Characteristic* (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa)

Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.

3) *Compliance And Responsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana)

Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah keputusan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

## **2.4 Program**

Menurut Charles O. Jones, pengertian program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan, beberapa karakteristik tertentu yang dapat membantu seseorang untuk mengidentifikasi suatu aktivitas sebagai program atau tidak yaitu:

1. Program cenderung membutuhkan staf, misalnya untuk melaksanakan atau sebagai pelaku program
2. Program biasanya memiliki anggaran tersendiri, program kadang biasanya juga di identifikasikan melalui anggaran
3. Program memiliki identitas sendiri, yang bila berjalan secara efektif dapat diakui oleh publik

Program terbaik di dunia adalah program yang didasarkan pada model teoritis yang jelas, yakni: sebelum menentukan masalah sosial yang ingin diatasi dan memulai melakukan intervensi, maka sebelumnya harus ada pemikiran yang serius terhadap bagaimana dan mengapa masalah itu terjadi dan apa yang menjadi solusi terbaik (Jones, 1996:295).

## **2.5 Kampung Keluarga Berencana (KB)**

### **2.5.1 Definisi Kampung Keluarga Berencana (KB)**

Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat RW, Dusun atau yang setara dengan kriteria tertentu diimana terdapat keterpaduan program pembangunan antara program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat.

Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat RW, dusun atau setara yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta sektor terkait yang dilaksanakan secara sistematis dan sistematis.

Satuan wilayah setingkat desa dengan kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program KKBPK dan pembangunan sektor terkait dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat.

Kampung KB merupakan salah satu upaya untuk mendekatkan pelayanan program KKBPK kepada masyarakat dengan mengakuyualisaskan 8 fungsi keluarga dan membangun karakter bangsa melalui perwujudan keluarga kecil bahagia sejahtera.

Kampung KB menjadi salah satu model miniatur pelaksanaan program KKBPK secara utuh yang melibatkan seluruh bidang di lingkungan BKKBN secara sinergis dengan kementerian/lembaga, pemangku kepentingan, dan mitra kerja terkait sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah, serta dilaksanakan di tingkatan pemerintah terendah di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.

### **2.5.2 Tujuan Kampung Keluarga Berencana (KB)**

Tujuan kampung KB jangka panjang adalah meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat melalui program KKBPK yang terintegrasi dengan sektor pembangunan lainnya.

Tujuan Kampung KB jangka pendek:

- 1) Meningkatkan pengetahuan pengelola kampung KB percontohan di dalam mengelola kampung KB

- 2) Meningkatkan pencapaian program KKBPK di kampung KB percontohan
- 3) Meningkatkan komitmen dan koordinasi mitra kerja di berbagai tingkatan terhadap keterpaduan program KKBPK dan pembangunan sektor terkait di kampung KB percontohan

Meningkatkan kualitas pengelolaan kampung KB melalui peningkatan sinergitas pelaksanaan pembangunan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga (KKBPK) serta pembangunan sektor terkait bersama mitra kerja agar mampu menjadi kampung KB percontohan.

A. Tujuan Umum:

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

B. Tujuan Khusus

Meningkatkan peran pemerintah, pemerintah daerah, lembaga non pemerintah, dan swasta dalam memfasilitasi, melakukan pendampingan dan pembinaan kepada masyarakat agar turut berperan serta aktif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui:

- a. Peningkatan kualitas dan akurasi data dan peta keluarga
- b. Peningkatan jumlah peserta KB aktif (CU/PUS)
- c. Peningkatan jumlah peserta KB MJKP
- d. Peningkatan jumlah peserta KB Pria

- e. Penurunan angka *unmet need*
- f. Peningkatan partisipasi keluarga yang memiliki balita dalam Bina Keluarga Balita (BKB)
- g. Peningkatan partisipasi keluarga yang memiliki remaja dalam BKR
- h. Peningkatan partisipasi keluarga yang memiliki lansia dalam BKL
- i. Peningkatan partisipasi lansia dalam BKL
- j. Peningkatan partisipasi remaja dalam PIK
- k. Peningkatan rata-rata usia kawin pertama perempuan
- l. Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- m. Peningkatan gizi dan kesehatan masyarakat
- n. Peningkatan status sosial ekonomi
- o. Peningkatan rata-rata lama sekolah anak usia sekolah
- p. Peningkatan lingkungan dan pemukiman yang sehat
- q. Peningkatan kualitas pembangunan sektor pembangunan terkait

### **2.5.3 Sasaran Kampung KB**

Sasaran kampung KB utamanya adalah penduduk yang tinggal di wilayah miskin, padat penduduk, kurang memiliki akses kesehatan, tetrapencil, pesisir, kumuh, dan kesertaan ber—KB nya masih rendah. Penggarapan program pembangunan berbagai sektor terkait di kampung KB ini diharapkan dapat dilakukan oleh seluruh masyarakat dengan fasilitasi dari Kepala Desa, Ketua RW, ketua RT, PKB/PKLB, PKK, institusi masyarakat pedesaan (IMP), tokoh masyarakat, kader, serta lintas sektor terkait.

Sasaran kampung KB terbagi menjadi sasaran langsung dan sasaran tidak langsung sebagai berikut:

- 1) Sasaran Langsung
  - a. Keluarga;
  - b. Pasangan Usia Subur;
  - c. Masyarakat;
  - d. Balita, Remaja, Lansia.
- 2) Sasaran Tidak Langsung
  - a. Tokoh-tokoh masyarakat;
  - b. Organisasi masyarakat (PPKBD, Sub-PPKBD, DKM, Organisasi pemuda, dan sebagainya);
  - c. Petugas lapangan dan provider.

#### 2.5.3.1 Sasaran Penggarapan

##### 1. Sasaran:

Sasaran yang merupakan subjek dan objek dalam pelaksanaan program dan kegiatan di kampung KB adalah:

- a. Keluarga;
- b. Remaja;
- c. Penduduk Lanjut Usia (Lansia);
- d. Pasangan Usia Subur (PUS);
- e. Keluarga dengan balita;
- f. Keluarga dengan remaja;
- g. Keluarga dengan lansia;



- h. Sasaran sektor sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- c. Pelaksana:
  - a. Kepala Desa/Lurah;
  - b. Ketua RW;
  - c. Ketua RT;
  - d. PKB/PKLB/TPD;
  - e. Petugas lapangan sektor terkait;
  - f. Pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK) tingkat desa/kelurahan;
  - g. Institusi masyarakat pedesaan (PPKBD dan Sub PPKBD);
  - h. Tokoh masyarakat (Tokoh Adat/Tokoh Agama/tokoh masyarakat di desa/kelurahan);
  - i. Kader.

## **2.6 Penelitian Terdahulu**

Sebagai bahan pertimbangan penelitian, peneliti mencantumkan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu merupakan kajian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang dianggap relevan. Hasil-hasil penelitian tersebut selanjutnya dijadikan rujukan serta dipakai sumber untuk menemukan konsep-konsep yang terkait dengan penelitian ini. Berikut penelitian yang dibaca oleh peneliti.

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Apriadalista Nurul Pertiwi, mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 2017. Dengan judul “Analisis SWOT Pengelolaan Program Kampung KB (Keluarga Berencana) di Kampung

Kaso Desa Sukaraja Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak” dengan teori yang digunakan adalah teori Analisis SWOT dalam Fred R. David (2009:324) yang terdiri dari empat dimensi dalam Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Temuan dalam penelitian ini adalah masih kurangnya sumberdaya manusia dalam pengelolaan kampung KB (Keluarga Berencana), masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang program kampung KB (Keluarga Berencana), masih rendahnya dukungan pemerintah dari sisi anggaran, kurang optimalnya koordinasi antar lintas sektor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Pengelolaan Program Kampung KB (Keluarga Berencana) di kampung. Hasil penelitian menunjukkan belum optimal, dan strategi yang tepat untuk diterapkan yaitu melakukan kerjasama dengan dinas terkait lainnya untuk berkonsentrasi meningkatkan kualitas sumberdaya masyarakat, melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat. Kesamaannya dengan penelitian yang dikaji peneliti saat ini adalah sama-sama mengkaji tentang program kampung KB (Keluarga Berencana), namun berbeda secara teori dan lokus penelitiannya.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Desi Ariani, mahasiswa Universitas Sumatera Utara pada tahun 2018. Dengan judul “Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana di Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang” dengan teori yang digunakan adalah teori implementasi model Van Meter dan Van Horn yang terdiri dari 6 variabel yaitu (1) standar dan sasaran

kebijakan, (2) sumberdaya, (3) disposisi, (4) struktur birokrasi, (5) disposisi implementor, (5) kondisi sosial, politik dan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program kampung KB belum berjalan dengan baik hal ini dilihat dari pelaksanaan program ini yang tidak berjalan lagi serta banyak kekurangan dari berbagai indikator diantaranya sumberdaya, hubungan antar organisasi, dan disposisi implementor. Kesamaannya dengan penelitian yang dikaji peneliti saat ini adalah sama-sama mengkaji tentang program kampung KB (Keluarga Berencana) namun, berbeda secara teori dan lokus penelitiannya.

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Silvia Romanova, mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 2016. Dengan judul “Implementasi Program Pro Rakyat Fase ke 5 Pemerintah Kota Cilegon (Studi Kasus Warung Ekonomi Pedagang Kaki Lima)” dengan teori yang digunakan adalah teori implementasi dari Merille S. Grindle. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Temuan dalam penelitian ini adalah sosialisasi program warung ekonomi pedagang kaki lima belum dilakukan secara maksimal, pelaksanaan bantuan kios warung ekonomi belum dilakukan secara merata, besaran pinjaman penerima bantuan kios warung ekonomi tidak mempertimbangkan ketentuan, dan tidak adanya koordinasi antara pihak pelaksana warung ekonomi dengan satpol PP Kota Cilegon. Hasil penelitian ini adalah Implementasi Program Pro Rakyat Fase ke 5 Pemerintah Kota Cilegon (Studi Kasus Warung Ekonomi Pedagang Kaki Lima) belum berjalan optimal. Kesamaannya dengan penelitian yang dikaji peneliti saat

ini adalah menggunakan teori implementasi yang sama yaitu teori implementasi model Merile S. Grindle, namun dengan fokus dan locus yang berbeda.

Semua hasil penelitian yang telah dipaparkan tersebut, sangat berkontribusi sebagai bahan masukan dan perbandingan dalam penelitian ini, terkait dengan implementasi program. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini akan mengkaji lebih dalam tentang implementasi program kampung keluarga berencana (KB) yang baru berkembang dan belum dikenal luas oleh masyarakat umum, padahal program ini merupakan program keluarga berencana yang dicanangkan dalam rangka usaha pemerintah untuk membangun masyarakat Indonesia yang lebih berkualitas, sehingga penelitian ini sangat menarik dan dapat dijadikan sebagai sarana untuk mempromosikan keberadaan kampung KB di kota Serang.

## **2.7 Kerangka Pemikiran Penelitian**

Suriasumantri, 1986 (dalam Sugiono, 2009:92) mengemukakan bahwa seorang peneliti harus menguasai teori-teori ilmiah sebagai dasar menyusun kerangka pemikiran yang membuahkan hipotesis, kerangka pemikiran merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan. Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, diperlukan sebuah kerangka konsep atau model penelitian. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi laju pertumbuhan penduduk agar tidak terjadi ledakan penduduk yang lebih besar lagi, selain itu salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah kota Serang dengan menetapkan program kampung keluarga berencana (KB)

sesuai dengan surat keputusan Walikota Serang Nomor: 476/Kep.223-Huk/2017 mencanangkan kampung keluarga berencana (KB) di kampung Kaliwadas kelurahan Lopang kecamatan Serang kota Serang guna mendukung percepatan pembangunan yakni keluarga yang sejahtera. Dari latar belakang tersebut dapat dirumuskan permasalahannya yaitu: (1) Kurangnya partisipasi keluarga dalam kelompok kegiatan BKB (Bina Keluarga Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja), BKL (Bina Keluarga Lansia), UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) dan PIK-R (Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja), (2) Kurangnya sarana dan prasarana dalam menjalankan program Kampung KB, terutama belum adanya rumah dataku dan sekretariat KKB (Kependudukan dan Keluarga Berencana) sehingga belum adanya mekanisme operasional seperti rapat perencanaan kegiatan, rapat koordinasi dengan dinas/instansi terkait pendukung kegiatan, sosialisasi kegiatan, juga monitoring dan evaluasi kegiatan, (3) Kurangnya koordinasi dan komitmen dengan instansi lainnya (lintas sektor), seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, juga Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, dan (4) Belum adanya kepengurusan atau kelompok kerja KKB (Kependudukan dan Keluarga Berencana) yang sesuai dengan 8 fungsi keluarga, sehingga belum dapat menerapkan 8 fungsi keluarga dengan baik yaitu fungsi Keagamaan, Sosialisasi/Pendidikan, Reproduksi, Ekonomi, Perlindungan, Kasih Sayang, Sosial Budaya, dan Pembinaan Lingkungan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan publik model Merilee S. Grindle. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik, juga menurut Grindle amat

ditentukan oleh tingkat *implementability* kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas *content of policy* dan *context of policy* (1980:5).

*Content of policy* menurut Grindle adalah

- 1) *Interest Affected* (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi)
- 2) *Type Of Benefits* (tipe manfaat)
- 3) *Extent Of Change Envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai)
- 4) *Site Of Decision Making* (letak pengambilan keputusan)
- 5) *Program Implementer* (pelaksana program)
- 6) *Resources Committed* (sumber-sumber daya yang digunakan)

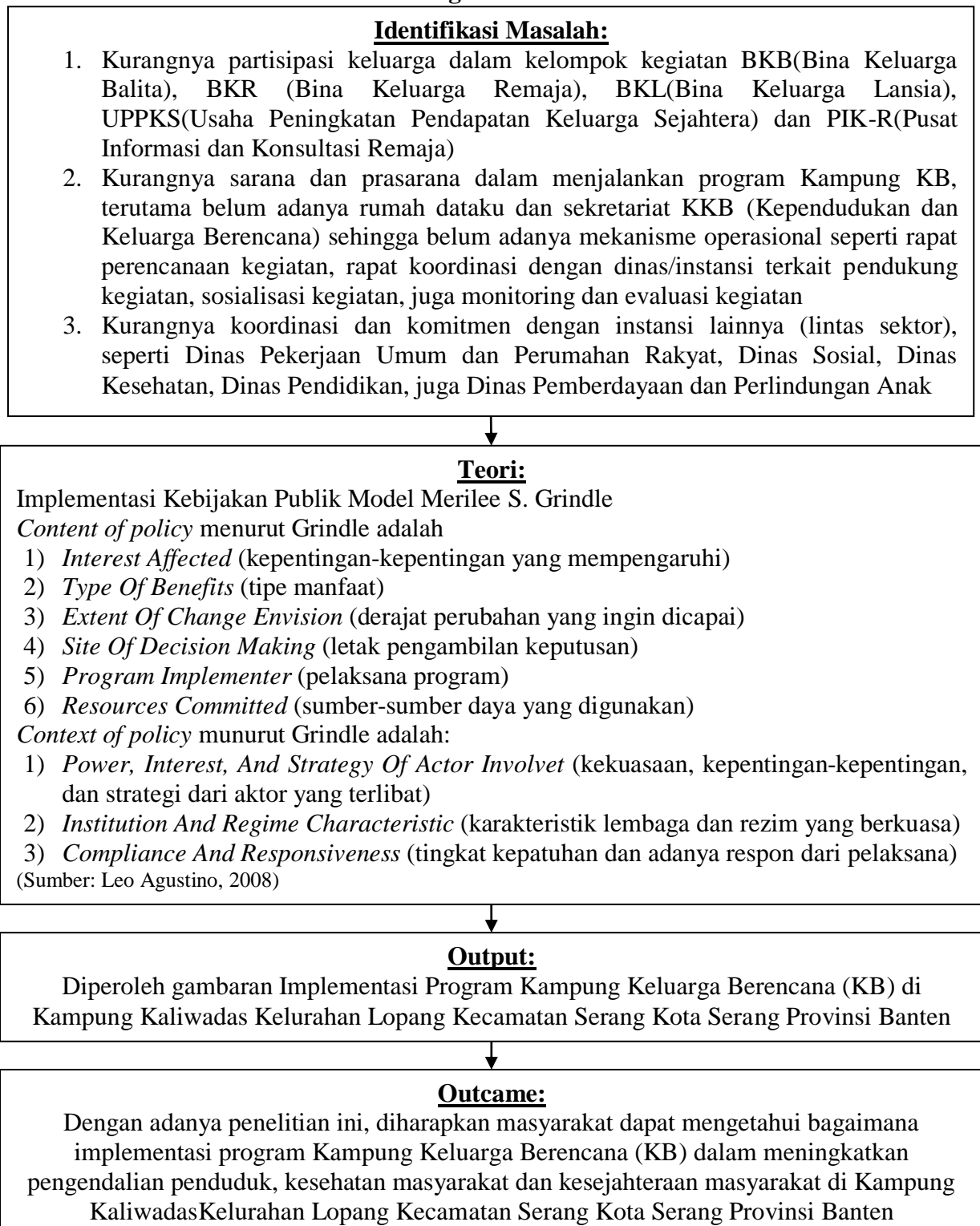
*Context of policy* menurut Grindle adalah:

- 1) *Power, Interest, And Strategy Of Actor Involved* (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat)
- 2) *Institution And Regime Characteristic* (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa)
- 3) *Compliance And Responsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana).

Dengan output yaitu diperoleh gambaran Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Kampung Kaliwadas Kelurahan Lopang Kecamatan Serang Kota Serang Provinsi Banten dan outcome yaitu dengan adanya penelitian ini, diharapkan masyarakat dapat mengetahui bagaimana implementasi program Kampung Keluarga Berencana (KB) dalam meningkatkan pengendalian penduduk, kesehatan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat di Kampung Kaliwadas Kelurahan Lopang Kecamatan Serang Kota Serang Provinsi Banten.

Untuk lebih jelasnya, kerangka berfikir penulis dalam penelitian ini dapat dilihat gambar di bawah ini:

**Gambar 2.5**  
**Kerangka Berfikir**



(Sumber:Peneliti, 2018)



## **2.8 Asumsi Dasar**

Berdasarkan identifikasi masalah yang dipaparkan serta observasi awal yang peneliti lakukan terhadap objek penelitian. Maka peneliti berasumsi bahwa Implementasi Kampung Keluarga Berencana (KB) di Kampung Kaliwadas Kelurahan Lopang Kecamatan Serang Kota Serang Provinsi Banten masih belum optimal dan belum memiliki implementasi yang tepat dalam mencapai keberhasilannya. Hal ini dilihat berdasarkan permasalahan-permasalahan yang timbul.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian**

Penelitian yang dilakukan mengenai “Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Kampung Kaliwadas Kelurahan Lopang Kecamatan Serang Kota Serang Provinsi Banten”, menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif karena bermaksud untuk mendalami dan menghayati suatu obyek. Menurut Bogdan dan Taylor (1975:5) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, menurut mereka pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan (Lexy J. Moleong, 2011:4). Sejalan dengan definisi tersebut, Kirk dan Miller (1986:9) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya (Lexy J. Moleong, 2011:4).

Selanjutnya, menurut David Williams (1995) menulis bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah. Jelas definisi ini memberi gambaran bahwa penelitian kualitatif mengutamakan latar

alamiah, metode alamiah, dan dilakukan oleh orang yang mempunyai perhatian alamiah (Lexy J. Moleong, 2011:5). Penulis buku penelitian kualitatif lainnya (Denzin dan Lincoln 1987) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Dari segi pengertian ini, para penulis masih tetap mempersoalkan latar alamiah dengan maksud agar hasilnya dapat digunakan untuk menafsirkan fenomena dan yang dimanfaatkan untuk penelitian kualitatif adalah berbagai macam metode penelitian. Dalam penelitian kualitatif metode yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen (Lexy J. Moleong, 2011:5). Menurut Jane Richie, penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial, dan perspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti. Pada definisi di sini dikemukakan tentang peranan penting dari apa yang seharusnya diteliti yaitu konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti (Lexy J. Moleong, 2011:6). Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (Sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada *generalisasi* (Sugiyono, 2010:1).

Dari kajian tentang definisi-definisi tersebut dapatlah disintesis bahwa penelitian penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll (Lexy J. Moleong, 2011:6).

Jadi yang akan dihasilkan dalam penelitian ini adalah berbentuk kata, kalimat, untuk mengeksplorasi bagaimana kondisi faktual yang terjadi dengan mendeskripsikan variabel yang sesuai dengan masalah dan unit yang diteliti dalam hal ini peneliti mencoba menjelaskan bagaimana Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Kampung Kaliwadas Kelurahan Lopang Kecamatan Serang Kota Serang Provinsi Banten. Penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini didasarkan atas pertimbangan bahwa pendekatan kualitatif relevan dan cocok dengan masalah penelitian. Selanjutnya digunakan untuk membangun pemahaman dan memberikan eksplansi terhadap fenomena yang diteliti.

### **3.2 Ruang Lingkup/Fokus Penelitian**

Ruang lingkup merupakan suatu bagian yang membatasi dan menjelaskan substansi materi kajian penelitian yang akan dilakukan. Dalam hal ini, ruang lingkup penelitian digunakan untuk menjadi batasan penelitian agar terfokus pada fokus penelitian. Dengan itu maka diharapkan dapat memudahkan peneliti untuk lebih fokus pada penelitian yang akan dilakukan yaitu mengenai “Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Kampung Kaliwadas Kelurahan Lopang Kecamatan Serang Kota Serang Provinsi Banten”.

Pembatasan ruang lingkup penelitian sendiri didasarkan pada penjabaran yang terdapat pada latar belakang masalah yang telah dipaparkan secara ringkas dalam identifikasi masalah. Adapun ruang lingkup atau batasan masalah dalam

penelitian ini adalah mendeskripsikan bagaimanakah Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Kampung Kaliwadas Kelurahan Lopang Kecamatan Serang Kota Serang Provinsi Banten secara mendalam.

### **3.3 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yaitu menjelaskan locus penelitian yang akan dilaksanakan, termasuk dalam menjelaskan tempat, serta alasan memilihnya. Penelitian ini dilakukan di Kampung Kaliwadas Kelurahan Lopang Kecamatan Serang Kota Serang Provinsi Banten. Penentuan lokasi penelitian ini dengan alasan bahwa penetapan program kampung keluarga berencana (KB) di kecamatan Serang adalah di kampung Kaliwadas kelurahan Lopang. Oleh karenanya, peneliti akan meneliti terkait Implementasi Kampung Keluarga Berencana (KB) di Kampung Kaliwadas Kelurahan Lopang Kecamatan Serang Kota Serang Provinsi Banten.

### **3.4 Fenomena yang Diamati**

#### **3.8.1 Definisi Konsep**

Definisi konseptual adalah memberikan penjelasan mengenai konsep dari variabel penelitian yang akan diteliti menurut pendapat peneliti berdasarkan konsep kerangka berfikir penelitian itu sendiri. Variabel penelitian ini adalah Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Kampung Kaliwadas Kelurahan Lopang Kecamatan Serang Kota Serang Provinsi Banten. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Implementasi Kebijakan Publik menurut Donald Van Meter Dan Carl Van Horn yang

menjelaskan bahwa ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik, yaitu: (1) Ukuran dan tujuan kebijakan, (2) Sumberdaya, (3) Karakteristik Agen Pelaksana, (4) Sikap/kecenderungan (*disposition*) para pelaksana, (5) Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana, dan (6) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik. Keenam variabel ini dinilai tepat untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Definisi konseptual merupakan bagian dari definisi-definisi yang bersisi penjelasan dari konsep yang digunakan agar tidak ada perbedaan penafsiran antara peneliti dan pembaca. Adapun konsep yang digunakan sesuai dengan konteks penelitian ini, adalah:

#### 1. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah suatu tindakan atau usaha untuk melaksanakan keputusan yang telah ditetapkan pada perumusan kebijakan, dan kebijakan tersebut dilaksanakan oleh individu, pejabat atau kelompok tertentu seperti pemerintah atau swasta

#### 2. Kampung KB (Keluarga Berencana)

Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat desa, atau setara yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta sektor terkait yang dilaksanakan secara sistematis dan sistematis.

### **3.8.2 Definisi Operasional**

Mengacu dari definisi konsep serta teori yang digunakan dalam penelitian ini, berdasarkan teori implementasi menurut Grindle (1980:5), keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik amat ditentukan oleh tingkat *implementability*

kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas *content of policy* (isi kebijakan) dan *context of policy* (konteks kebijakan). Adapun isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut:

- a. *Content of policy* menurut Grindle adalah
  - 1) *Interest Affected* (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi)
  - 2) *Type Of Benefits* (tipe manfaat)
  - 3) *Extent Of Change Envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai)
  - 4) *Site Of Decision Making* (letak pengambilan keputusan)
  - 5) *Program Implementer* (pelaksana program)
  - 6) *Resources Committed* (sumber-sumber daya yang digunakan)
- b. *Context of policy* menurut Grindle adalah:
  - 1) *Power, Interest, And Strategy Of Actor Involved* (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat)
  - 2) *Institution And Regime Characteristic* (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa)
  - 3) *Compliance And Responsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana)

### **3.9 Instrumen Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang

selanjutnya terjun kelapangan (Sugiyono, 2010:59). Selanjutnya Nasution (1988)

(dalam Sugiyono, 2010:60) menyatakan:

“Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah bahwa, segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya”.

Menurut Nasution (1988) (dalam Sugiyono, 2010:61) peneliti sebagai instrumen penelitian serasi untuk penelitian serupa karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Peneliti sebagai alat peka dan dapat bereaksi terhadap segala stimulus dari lingkungan yang harus diperkirakannya bermakna atau tidak bagi penelitian
2. Peneliti sebagai alat dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek keadaan dan dapat mengumpulkan aneka ragam data sekaligus
3. Tiap situasi merupakan keseluruhan. Tidak ada suatu instrumen berupa test atau angket yang dapat menangkap keseluruhan situasi, kecuali manusia
4. Suatu situasi yang melibatkan interaksi manusia, tidak dapat dipahami dengan pengetahuan semata. Untuk memahaminya kita perlu sering merasakannya, menyelaminya berdasarkan pengetahuan kita
5. Peneliti sebagai instrumen dapat segera menganalisis data yang diperoleh. Ia dapat menafsirkannya, melahirkan hipotesis dengan segera untuk



menentukan arah pengamatan, untuk mentest hipotesis yang timbul seketika

6. Hanya manusia sebagai instrumen dapat mengambil kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan pada suatu saat dan menggunakan segera sebagai balikan untuk memperoleh penegasan, perubahan, perbaikan atau pelaksana

Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif cukup rumit. Ia sekaligus merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analis, penafsir data, dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya. Pengertian instrumen atau alat penelitian di sini tepat karena ia menjadi segalanya sari keseluruhan proses penelitian. (Lexy J. Moleong, 201:168).

Penelitian mengenai “Implementasi Kampung Keluarga Berencana (KB) di Kampung Kaliwadas Kelurahan Lopang Kecamatan Serang Kota Serang Provinsi Banten”, instrumen yang digunakan adalah peneliti sendiri. Dalam penelitian ini peneliti menempatkan diri sebagai *observer*. Adapun jenis data yang dikumpulkan pada penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder. Peneliti sebagai *key instrument* dalam penelitian karena peneliti dapat merasakan langsung, mengalami, melihat sendiri obyek atau subyek yang sedang diteliti. Selain itu, peneliti juga mampu menentukan kapan penyimpulan data telah mencakupi, data telah jenuh, dan kapan penelitian dapat dihentikan.

Peneliti juga dapat langsung melakukan pengumpulan data, melakukan refleksi secara terus-menerus dan secara gradual membangun pemahaman yang tuntas mengenai sesuatu, dalam hal ini Implementasi Program Kampung Keluarga

Berencana (KB) di Kampung Kaliwadas Kelurahan Lopang Kecamatan Serang Kota Serang Provinsi Banten.

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini yaitu data-data yang didapat berupa kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati dari hasil wawancara dan observasi lapangan. Sedangkan data-data sekunder yang didapatkan berupa dokumen tertulis berupa catatan atau dokumentasi DP3AKB Kota Serang, seperti profil instansi, kepegawaian, struktur organisasi, dan data lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun alat-alat tambahan yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data adalah pedoman wawancara, alat perekam, buku catatan dan kamera.

### **3.10 Informan Penelitian**

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Teknik yang digunakan untuk menentukan informan dalam penelitian kualitatif ini yaitu dengan jalan peneliti memasuki situasi sosial tertentu, melakukan observasi, dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang mengetahui tentang situasi sosial (Prastowo, 2011:197). Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive*, yaitu informan yang sengaja dipilih oleh peneliti, karena dianggap memiliki ciri-ciri tertentu yang dapat memperkaya penelitian (Irawan, 2006:17).

Menurut Patton dan Denzini (2009:290), alasan logis dibalik teknik *purposive* dalam penelitian kualitatif merupakan prasyarat bahwa sampel yang dipilih

sebaiknya memiliki informasi yang kaya (*rich information*). Penggunaan teknik tersebut disesuaikan dengan kondisi atau situasi yang ada di lapangan dalam penelitian mengenai Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Kampung Kaliwadas Kelurahan Lopang Kecamatan Serang Kota Serang Provinsi Banten.

Untuk memudahkan dalam pembacaan hasil penelitian, maka berikut ini akan diuraikan daftar informan yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

**Tabel 3.1**  
**Kategori Informan**

No.	Kategori	Koding	Jabatan/Status Sosial Informan	Kuantiti (Per orang)	Status Informan
1.	BKKBN Provinsi Banten	I <sub>1</sub>	Subbidang Hubungan Antar Lembaga dan Bina Lini Lapangan	1 orang	Key Informan
2.	DP3AKB Kota Serang	I <sub>2</sub>	Seksi Penggerakan dan Pendayagunaan Penyuluh KB (PLKB) dan Kader KB	1 orang	
3.	Perangkat Kecamatan	I <sub>3</sub>	Kepala Balai Penyuluhan KB Kecamatan Serang	1 orang	
4.		I <sub>4</sub>	Ketua Forum Kader dan PPKBD Kecamatan Serang	1 orang	
5.		I <sub>5</sub>	Ketua PKB Kecamatan Serang	1 orang	
6.	Perangkat Kelurahan	I <sub>6</sub>	Kepala Kelurahan Lopang	1 orang	
7.		I <sub>7</sub>	Ketua Forum Kelurahan Lopang	1 orang	
8.	Pengurus Kampung KB	I <sub>8</sub>	Ketua Kampung KB Kaliwadas/Ketua RW. 06	1 orang	
9.		I <sub>9</sub>	Ketua Kelompok Kegiatan BKB, BKR, BKL, PIK-R, dan UPPKS	5 orang	
10.		I <sub>10</sub>	Masyarakat Kelompok Kegiatan BKB, BKR, BKL, PIK-R, dan UPPKS	4 orang	

(Sumber: Peneliti, 2018)

Dalam penelitian kualitatif tidak ada istilah populasi, tetapi dinamakan “social situation” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen, yaitu: tempat (place), pelaku (actor), dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara strategis.

Dalam mencari sumber data, peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam terhadap narasumber yang bersangkutan dengan fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Wawancara mendalam (indepth interview) adalah data yang diperoleh terdiri dari kutipan langsung dari orang-orang tentang pengalaman, pendapat perasaan dan pengetahuan informan penelitian. Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi yang diperlukan selama proses penelitian.

Mengingat bahwa penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan seluas-luasnya dan selengkap mungkin mengenai Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Kampung Kaliwadas Kelurahan Lopang Kecamatan Serang Kota Serang Provinsi Banten. Oleh karena itu, dalam hal ini peneliti menggunakan teknik *purposive* yaitu pengambilan sumber data dengan pertimbangan bahwa orang yang dijadikan informan penelitian merupakan orang yang mengetahui bagaimana Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Kampung Kaliwadas Kelurahan Lopang Kecamatan Serang Kota Serang Provinsi Banten, sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan data yang diharapkan.

### 3.11 Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

#### 3.11.1 Teknik Pengelolaan Data

Teknik pengelolaan/pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2010:62).

Sesuai dengan bentuk pendekatan penelitian kualitatif dan sumber data yang akan digunakan adalah dengan analisis dokumen, observasi dan wawancara. Untuk mengumpulkan data dalam kegiatan penelitian diperlukan cara-cara atau teknik pengumpulan data tertentu, sehingga proses penelitian dapat berjalan lancar.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Lexy J. Moleong, 2011:186). Esterberg (2002) mendefinisikan wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2010:72). Menurut Sugiyono (2014, 138:141), wawancara dibagi ke dalam dua bentuk yaitu:

- 1) Wawancara terstruktur, digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti

tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah dipersiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberikan pertanyaan yang sama, dan pengumpul mencatatnya.

- 2) Wawancara tidak terstruktur, adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Wawancara tidak terstruktur atau terbuka sering digunakan dalam penelitian yang lebih mendalam tentang responden.

Dalam penelitian ini wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur dipergunakan untuk mengadakan komunikasi dengan pihak-pihak terkait penelitian, dalam rangka memperoleh informasi tentang hal-hal yang belum tercantum dalam observasi. Pada penelitian Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Kampung Kaliwadas Kelurahan Lopang Kecamatan Serang Kota Serang Provinsi Banten, peneliti akan melakukan wawancara kepada informan dengan berpedoman pada indikator yang digunakan, bentuk pernyataan akan lebih meluas dan bebas (tidak terstruktur) tanpa keluar dari indikator yang telah ditentukan. Hal tersebut dilakukan peneliti guna menemukan jawaban dari permasalahan yang ada dan tidak menutup kemungkinan permasalahan yang sudah diidentifikasi sebelumnya akan

bertambah. Wawancara yang dilakukan akan dibantu oleh alat perekam pada *handphone* sebagai bentuk dari dokumentasi wawancara pada penelitian Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Kampung Kaliwadas Kelurahan Lopang Kecamatan Serang Kota Serang Provinsi Banten.

**Tabel 3.2**  
**Pedoman Wawancara**

No	Dimensi	Uraian Pernyataan	Informan
1.	Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi	1. Latar belakang dibuatnya program Kampung KB	I <sub>1</sub> , I <sub>2</sub>
2.	Tipe Manfaat	2. Sejauh ini bagaimana pelaksanaan dari program kampung KB?	I <sub>1</sub> , I <sub>2</sub> , I <sub>3</sub> , I <sub>4</sub> , I <sub>5</sub> , I <sub>8</sub>
		3. Apakah ada peningkatan keterlibatan keluarga dalam kelompok kegiatan di kampung KB?	I <sub>1</sub> , I <sub>2</sub> , I <sub>3</sub> , I <sub>4</sub> , I <sub>5</sub> , I <sub>6</sub> , I <sub>7</sub> , I <sub>8</sub> , I <sub>9</sub>
3.	Derajat perubahan yang ingin dicapai	4. Apa tujuan dari program kampung KB?	I <sub>1</sub> , I <sub>2</sub>
		5. Bagaimana penerapan 8 fungsi keluarga dalam kehidupan masyarakat di kampung KB?	I <sub>1</sub> , I <sub>2</sub> , I <sub>3</sub> , I <sub>4</sub> , I <sub>5</sub> , I <sub>6</sub> , I <sub>7</sub> , I <sub>8</sub>
4.	Letak pengambilan keputusan	6. Bagaimana dukungan dari lintas sektor terhadap program kampung KB?	I <sub>1</sub> , I <sub>2</sub> , I <sub>3</sub> , I <sub>4</sub> , I <sub>5</sub> , I <sub>6</sub> , I <sub>7</sub> , I <sub>8</sub>
		7. Bagaimana proses penyusunan rencana kegiatan di kampung KB di Kampung Kaliwadas?	I <sub>3</sub> , I <sub>4</sub> , I <sub>5</sub> , I <sub>6</sub> , I <sub>7</sub> , I <sub>8</sub> , I <sub>9</sub>
		8. Bagaimana koordinasi yang dilakukan terhadap implementasi program kampung KB?	I <sub>1</sub> , I <sub>2</sub> , I <sub>3</sub> , I <sub>4</sub> , I <sub>5</sub> , I <sub>8</sub>
5.	Pelaksana program	9. Bagaimana kinerja dinas terkait dalam melakukan pengawasan kampung KB?	I <sub>1</sub> , I <sub>2</sub> , I <sub>3</sub> , I <sub>4</sub> , I <sub>5</sub>
		10. Bagaimana pelaksanaan pelayanan KB di kampung KB?	I <sub>1</sub> , I <sub>2</sub> , I <sub>3</sub> , I <sub>4</sub> , I <sub>5</sub> , I <sub>6</sub> , I <sub>7</sub> , I <sub>8</sub> , I <sub>10</sub>
6.	Sumber-sumber daya yang digunakan	11. Bagaimana sarana dan prasarana yang ada dalam menunjang program kampung KB?	I <sub>1</sub> , I <sub>2</sub> , I <sub>3</sub> , I <sub>4</sub> , I <sub>5</sub> , I <sub>6</sub> , I <sub>7</sub> , I <sub>8</sub> , I <sub>9</sub> , I <sub>10</sub>
		12. Bagaimana dana dan anggaran dalam menunjang program	I <sub>1</sub> , I <sub>2</sub> , I <sub>3</sub> , I <sub>4</sub> , I <sub>5</sub> , I <sub>6</sub> , I <sub>7</sub> , I <sub>8</sub> , I <sub>9</sub>

		kampung KB?	
1.	Kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat	13. Apakah ada pembinaan bagi pengurus kampung KB guna meningkatkan kualitas sumberdaya manusia?	I <sub>1</sub> , I <sub>2</sub> , I <sub>3</sub> , I <sub>4</sub> , I <sub>5</sub> , I <sub>6</sub> I <sub>7</sub> , I <sub>8</sub> , I <sub>9</sub>
		14. Bagaimana sosialisasi yang dilakukan dalam memberikan pemahaman tentang program kampung KB?	I <sub>1</sub> , I <sub>2</sub> , I <sub>3</sub> , I <sub>4</sub> , I <sub>5</sub> , I <sub>8</sub> , I <sub>9</sub>
2.	Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa	15. Apasaja peran dari <i>stakeholder</i> dan kesiapan <i>stakeholder</i> dalam program kampung KB?	I <sub>1</sub> , I <sub>2</sub>
3.	Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana	16. Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap kampung KB di Kampung Kaliwadas?	I <sub>8</sub> , I <sub>9</sub> , I <sub>10</sub>
		17. Apakah ada pertemuan rutin yang dilakukan oleh pengurus kampung KB di Kampung Kaliwadas?	I <sub>3</sub> , I <sub>4</sub> , I <sub>5</sub> , I <sub>6</sub> I <sub>7</sub> , I <sub>8</sub> , I <sub>9</sub>
		18. Apakah kendala yang dihadapi oleh pengelola selama proses pengelolaan kampung KB?	I <sub>1</sub> , I <sub>2</sub> , I <sub>3</sub> , I <sub>4</sub> , I <sub>5</sub> , I <sub>6</sub> I <sub>7</sub> , I <sub>8</sub> , I <sub>9</sub>

(Sumber: Peneliti, 2018)

## 2. Observasi

Nasution (1988) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Sedangkan Mardhall (1995) menyatakan bahwa melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut (Sugiyono, 2010:64). Sanafiah Faisal (1990) mengklasifikasikan observasi menjadi observasi berpartisipasi (*participant observation*) yang dibagi menjadi 4 yaitu observasi yang pasif, observasi yang moderat, observasi yang aktif, dan observasi yang lengkap; observasi yang secara terang-terangan dan tersamar (*overt observation and covert observation*); dan observasi yang tak terstruktur (*unstructured observation*) (Sugiyono, 2010:64).



Pada penelitian ini, teknik observasi partisipatif yang dipakai adalah observasi partisipatif pasif. Peneliti hanya sebagai pengamat saja tanpa menjadi anggota resmi organisasi pelaksana maupun objek kebijakan yang diteliti. Peneliti melakukan observasi dengan melakukan wawancara kepada instansi pemerintah, petugas kampung KB, dan masyarakat kampung KB guna mengetahui bagaimana Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Kampung Kaliwadas Kelurahan Lopang Kecamatan Serang Kota Serang Provinsi Banten. Observasi yang dilakukan peneliti dengan mendatangi kantor instansi terkait dan tempat kampung KB.

### 3. Dokumentasi

Analisis dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan-catatan, peraturan, kebijakan, laporan-laporan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2014:240).

Pada penelitian Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Kampung Kaliwadas Kelurahan Lopang Kecamatan Serang Kota Serang Provinsi Banten dokumentasi yang dilakukan dengan menggunakan tulisan catatan wawancara, foto yang menggunakan *handphone*, serta arsip lainnya yang

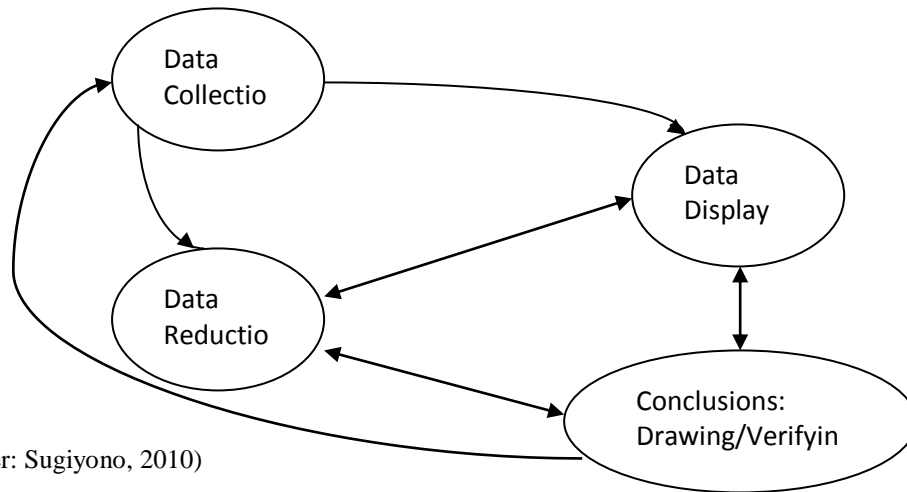
bersumber dari dinas, di lapangan dan media, baik media cetak maupun media elektronik.

### **3.11.2 Teknik Analisis Data**

Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen, 1982 adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Lexy J. Moleong, 2011:248). Spradley (1980) menyatakan bahwa analisis dalam penelitian jenis apapun, adalah merupakan cara berfikir. Hal itu berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian, dan hubungannya dengan keseluruhan. Analisis adalah untuk mencari pola (Sugiyono, 2010:89). Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dikemukakan di sini bahwa, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2010:89).

Dalam menganalisis data penelitian yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan, maka peneliti menggunakan analisis data model Miles dan Huberman. Model interaktif dalam analisis data ditunjukkan pada gambar dibawah ini:

**Gambar 3.1**  
**Analisis Data Miles & Huberman**



(Sumber: Sugiyono, 2010)

Berikut adalah penjelasan mengenai gambar analisis data menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2010:92-99), yang diantaranya:

- a. Data Reduction (Reduksi Data) berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan peneliti akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.

- b. Data Display (Penyajian Data) dalam kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman (1984) menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut (Sugiyono, 2010:95).
- c. Concluson Drawing/Verification, penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian mengenai “Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Kampung Kaliwadas Kelurahan Lopang Kecamatan Serang Kota Serang Provinsi Banten”, menggunakan teknik analisis Miles & Huberman dengan empat langkah analisis data, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hal ini digunakan sebagai alat untuk mempermudah peneliti untuk menganalisis data yang didapat dari hasil penelitian lapangan dan mendapatkan kesimpulan mengenai penelitian yang dilakukan peneliti.

### 3.11.3 Uji Keabsahan Data

Dalam menguji keabsahan data yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data atau keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Pada penelitian ini, peneliti dalam menguji keabsahan hasil penelitian menggunakan teknik triangulasi dan *member check*.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya (Lexy J. Moleong, 2011:330). Adapun pada penelitian ini menggunakan triangulasi data (sumber) dan triangulasi metode (teknik) sebagai berikut:

1. Triangulasi Data (sumber)

Menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi, atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.

2. Triangulasi Metode (teknik)

Penggunaan berbagai metode untuk meneliti suatu hal, seperti metode wawancara dan metode observasi. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara yang ditunjang dengan metode observasi pada saat wawancara dilakukan.

3. Member Check

Member check adalah, proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan member check adalah untuk mengetahui seberapa jauh data



	Proposal											
3.	Bimbingan dan Perbaikan Proposal											
4.	Seminar Proposal											
5.	Perbaikan Proposal											
6.	Proses Pencairan Data dilapangan											
7.	Pengolahan dan Analisis Data											
8.	Penyusunan Bab 4 dan 5											
9.	Bimbingan dan Perbaikan Bab 4 dan 5											
10.	Sidang Skripsi											

(Sumber: Peneliti, 2018)

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **4.1 Deskripsi Obyek Penelitian**

Deskripsi obyek penelitian menjelaskan tentang obyek penelitian yang meliputi lokasi penelitian secara jelas dan memberikan gambaran umum Kecamatan Serang, Kelurahan Lopang, Kampung Kaliwadas, BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) Provinsi Banten, DP3AKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana) Kota Serang, dan Balai Penyuluhan KB Kecamatan Serang juga struktur organisasi dari populasi/sampel yang telah ditentukan serta hal lain yang berhubungan dengan obyek penelitian. Pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti berjudul Implementasi Program Keluarga Berencana (KB) di Kampung Kaliwadas Kelurahan Lopang Kecamatan Serang Kota Serang Provinsi Banten akan dipaparkan sebagai berikut.

##### **4.1.1 Deskripsi Wilayah Kecamatan Serang, Kelurahan Lopang dan Kampung Kaliwadas**

Kecamatan Serang merupakan salah satu wilayah Kota Serang Provinsi Banten yang memiliki luas wilayah 25,88 Km<sup>2</sup> dengan batas wilayah:

Sebelah Utara : Kecamatan Kasemen

Sebelah Selatan : Kecamatan Cipocok Jaya

Sebelah Barat : Kecamatan Serang



Sebelah Timur : Kecamatan Cipocok Jaya

Ibu Kota Kecamatan Serang terletak pada jarak lebih kurang 1,5 Km dari Ibu Kota Serang. bentuk Topografi bentuk wilayah Kecamatan Serang sebagian besar merupakan daratan, dengan ketinggian rata-rata kurang dari 500 m dari permukaan laut, dengan rata-rata curah hujan 75mm/Tahun. Berdasarkan ketinggian curah hujan, suhu udara dan kesuburan serta jenis tanah yang dominan, maka daerah ini sangat cocok untuk usaha pemukiman dan perumahan.

Secara administrasi wilayah kecamatan serang terbagi menjadi 191 lingkungan. Dusun/RW 191, RT 771 terbagi menjadi 12 keluarahan dengan jumlah penduduk 217.504 Jiwa yang terdiri dari 110.868 Jiwa laki-laki dan 106.636 Jiwa Perempuan.

Kecamatan Serang memiliki fasilitas umum dan sosial berupa sarana dan prasarana pendidikan mulai dari BKB/PAUD, TK, SD, SMP, SMA, AKBID, Perguruan Tinggi, Pasar, POM Bensin, jaringan instalasi listrik, jaringan telepon, rumah sakit umum maupun swasta serta 5 pukesmas yang terletak disepuluh wilayah Kecamatan Serang.

**Gambar 4.1**  
**Peta Wilayah Kelurahan Lopang**



(Sumber: Profil Kelurahan Lopang)

Kelurahan Lopang Kecamatan Serang terletak  $\pm$  1,5 Km dari pusat pemerintahan Kecamatan Serang dan  $\pm$  2,5 Km dari pusat pemerintahan Kota Serang yang mempunyai luas wilayah: 111,508 Ha dengan batas-batas sbb:

Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Unyur

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Kota Baru

Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Kagungan

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Cimuncang

Kelurahan Lopang termasuk daerah dataran rendah yang ketinggian tanahnya dari permukaan air laut  $\pm$  16 M. Keadaan lembaga kemasyarakatan yang ada di wilayah

Kelurahan Lopang Kecamatan antara lain:

- a. BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat)
- b. Forum RW (Forum Rukun Warga)
- c. LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat)
- d. PKK (Pemberdayaan dan Kejahteraan Keluarga)
- e. Kader Posyandu
- f. Karang Taruna
- g. Kader JKN

Visi Misi Kelurahan Lopang

Visi: Terwujudnya pelayanan umum kepada masyarakat dengan cepat dan mudah serta terlaksananya secara profesional

1. Mendorong untuk meningkatkan sumber daya manusia
2. Menata administrasi kantor yang lebih sistematis
3. Meningkatkan koordinasi dan keterpaduan dengan para RT dan RW

Misi:

1. Agar masyarakat terlayani dengan cepat
2. Meningkatnya mutu pelayanan kepada masyarakat
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelayanan umum
4. Melaksanakan kegiatan dalam pemerintah khususnya pembangunan di masyarakat
5. Terciptanya penyelenggaraan kegiatan pelayanan
6. Terciptanya tugas pemerintahan, pembinaan TRANTIB, pembinaan pembangunan perkeonomian dan pembangunan lingkungan hidup
7. Terciptanya pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan manusia

Jumlah penduduk Kelurahan Lopang

Jumlah Jiwa: 12.729

Perempuan: 6.219

Kepadatan (Jiwa/Km<sup>2</sup>): 11.39/Km<sup>2</sup>

Kepala Keluarga: 3. 208

Laki-Laki: 6.510

**Tabel 4.1**  
**Cakupan Wilayah Kelurahan Lopang**

NO	RW	Kampung	Jumlah RT
1	1	Lopang Gede	8
2	2	Lopang Cilik	5
3	3	Kebaharan Al-Amin	4
4	4	Kebaharan Dukuh	4
5	5	Lopang Domba Lepin	6
6	6	Kaliwadas	5
7	7	Taman Lopang Indah	6
8	8	Kebaharan Al-Manar	3
9	9	Griya Lopang	5
10	10	Mandala Citra Indah	1
11	11	Taman Lopang Indah	5
12	12	Lopang Cilik Al-Hidayah	8
Jumlah	12	-	57

(Sumber: Data Kampung KB Kampung Kaliwadas Kelurahan Lopang Kecamatan Serang 2018)

Kelurahan Lopang terdiri dari 12 RW dan 57 RT. Di wilayah kampung KB di Kampung Kaliwadas RW 6 terdapat 5 RT.

**Tabel 4.2**  
**Cakupan PUS dan Peserta KB**

NO	RW	Kampung	Jumlah RT	Jumlah PUS	Jumlah PA	PA/PUS
1	1	Lopang Gede	8	180	116	64,44
2	2	Lopang Cilik	5	128	112	87,50
3	3	Kebaharan Al-Amin	4	138	91	65,94
4	4	Kebaharan Dukuh	4	291	223	76,63
5	5	Lopang Domba Lepin	6	223	171	76,68
6	6	Kaliwadas	5	236	197	83,47
7	7	Taman Lopang Indah	6	227	206	46,70
8	8	Kebaharan Al-Manar	3	87	49	56,32
9	9	Griya Lopang	5	131	110	83,97
10	10	Mandala Citra Indah	1	19	13	68,42
11	11	Taman Lopang Indah	5	127	81	63,78
12	12	Lopang Cilik Al-Hidayah	8	94	79	84,04
Jumlah	12	-	57	1881	1348	71,66

(Sumber: Data Kampung KB Kampung Kaliwadas Kelurahan Lopang Kecamatan Serang 2018)

Dari PUS sebanyak 1881, yang menjadi peserta KB aktif (PA) sebanyak 1348 (71,66%). Diwilayah kampung KB (Kampung Kaliwadas) dari PUS sebanyak 236 yang menjadi peserta KB aktif (PA) sebanyak 197 (83,47%).

**Tabel 4.3**  
**Jumlah Rumah Tangga, KK, WUS dan PUS**

NO	RW	Kampung	Jumlah RT	Jumlah KK	Jumlah PUS
1	1	Lopang Gede	8	327	180
2	2	Lopang Cilik	5	239	128
3	3	Kebaharan Al-Amin	4	226	138
4	4	Kabaharan Dukuh	4	412	291
5	5	Lopang Domba Lepin	6	352	223
6	6	Kaliwadas	5	453	236
7	7	Taman Lopang Indah	6	427	227
8	8	Kebaharan Al-Manar	3	171	87
9	9	Griya Lopang	5	167	131
10	10	Mandala Citra Indah	1	31	19
11	11	Taman Lopang Indah	5	225	127
12	12	Lopang Cilik Al-Hidayah	8	178	94
Jumlah	12	-	57	3208	1181

(Sumber: Data Kampung KB Kampung Kaliwadas Kelurahan Lopang Kecamatan Serang 2018)

Pada Bulan Desember 2017 terdapat 3208 Kepala Keluarga dan 1881 PUS (Pasangan Usia Subur). Diwilayah Kampung KB (Kampung Kaliwadas) terdapat 453 Kepala Keluarga dengan 236 PUS (Pasangan Usia Subur).

**Tabel 4.4**  
**PUS Bukan Peserta KB**

NO	RW	Kampung	Jumlah RT	Hamil	IAS	IAT	TIAL
1	1	Lopang Gede	8	1	10	25	29
2	2	Lopang Cilik	5	1	2	4	9
3	3	Kebaharan Al-Amin	4	9	2	10	26
4	4	Kebaharan Dukuh	4	8	15	21	24
5	5	Lopang Domba Lepin	6	1	21	10	20
6	6	Kaliwadas	5	5	5	12	17
7	7	Taman Lopang Indah	6	0	38	19	64
8	8	Kebaharan Al-Manar	3	2	14	5	17
9	9	Griya Lopang	5	2	3	4	12
10	10	Mandala Citra	1	0	1	4	1

		Indah					
11	11	Taman Lopang Indah	5	0	5	7	34
12	12	Lopang Cilik Al-Hidayah	8	2	2	6	5
Jumlah	12	-	57	31	118	126	258

(Sumber: Data Kampung KB Kampung Kaliwadas Kelurahan Lopang Kecamatan Serang 2018)

Jumlah PUS bukan Peserta KB	Diwilayah Kampung KB (Kampung
Hamil: 31	Kaliwadas)
IAS: 118	Jumlah PUS bukan Peserta KB
AT: 126	Hamil: 5
TIAL: 258	IAS: 5
	IAT: 12
	TIAL: 17

**Tabel 4.5**  
**Un-Met Need**

NO	RW	Kampung	Jumlah RT	Jumlah PUS	Jumlah Un-Met Need	Un-Met Need (%)
1	1	Lopang Gede	8	180	65	36,11
2	2	Lopang Cilik	5	128	16	12,50
3	3	Kebaharan Al-Amin	4	138	47	34,06
4	4	Kebaharan Dukuh	4	291	68	23,37
5	5	Lopang Domba Lepin	6	223	52	23,32
6	6	Kaliwadas	5	236	39	16,53
7	7	Taman Lopang Indah	6	227	121	53,30
8	8	Kebaharan Al-Manar	3	87	38	43,68
9	9	Griya Lopang	5	131	21	16,03
10	10	Mandala Citra Indah	1	19	6	31,58
11	11	Taman Lopang Indah	5	127	46	36,22
12	12	Lopang Cilik Al-Hidayah	8	94	15	15,96
Jumlah	12	-	57	1881	533	28,34

(Sumber: Data Kampung KB Kampung Kaliwadas Kelurahan Lopang Kecamatan Serang 2018)

Pengertian Un-Met Need adalah kebutuhan akan keluarga yang belum terpenuhi. Jumlah Un-Met Need: 533 (28,34%). Di wilayah kampung KB jumlah Un-Met Need: 39 (16,53%).

#### **4.1.2 Deskripsi BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) Provinsi Banten**

Perwakilan BKKBN Provinsi Banten merupakan instansi vertikal dalam melaksanakan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di wilayah Provinsi Banten, memiliki Visi yang sama dengan BKKBN yaitu menjadi “Lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang dan Keluarga Berkualitas”. Visi tersebut dijabarkan untuk mendukung dan mensukseskan Visi dan Misi Pembangunan 2015-2019 dimana Visi Pemerintah 5 (lima) tahun ke depan adalah untuk mewujudkan “Indonesia yang beradab, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong” dan 9 (sembilan) agenda prioritas pembangunan (Nawa Cita). BKKBN berpartisipasi dalam mensukseskan agenda prioritas ke-5 (lima) yaitu “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia”.

Dalam mendukung upaya perwujudan visi pembangunan 2015-2019 di atas, perwakilan BKKBN Provinsi memiliki misi: 1) Mengarusutamakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan, 2) Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, 3) Memfasilitasi Pembangunan Keluarga, 4) Membangun dan Menerapkan Budaya Kerja Organisasi secara Konsisten, serta

5) Mengembangkan Jejaring Kemitraan dalam Pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

Berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan ketentuan lampiran huruf (n) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, BKKBN mempunyai tugas melaksanakan pemerintahan dibidang pengendalian penduduk dan KB. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut, berdasarkan peraturan Kepala BKKBN Nomor 82 Tahun 2011 Perwakilan BKKBN Provinsi Banten menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan nasional dibidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- b. Pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- c. Penyelenggaraan, pemantauan, dan evaluasi dibidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- d. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi, penggerakan hubungan antar lembaga, bina lini lapangan serta pengelolaan data dan



informasi di bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;

- e. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan dibidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- f. Pelaksanaan tugas administrasi umum, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- g. Pembinaan dan fasilitasi terbentuknya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota

#### Tujuan

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Pembangunan 2015-2019 serta Visi dan Misi Pemerintahan Provinsi Banten khususnya dalam program KKBPK, perwakilan BKKBN Provinsi Banten memiliki tujuan antara lain:

- a. Memperkuat akses pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas
- b. Peningkatan pembinaan peserta KB, baik menggunakan MKJP maupun non-MKJP
- c. Meningkatkan pemahaman remaja mengenai Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
- d. Penguatan tata kelola, penelitian dan pengembangan bidang Keluarga Berencana

#### **4.1.3 Deskripsi DP3AKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana) Kota Serang**

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Serang merupakan salah satu perangkat daerah (PD) yang menjalankan roda pemerintahan didasarkan kepada kebijakan umum daerah Kota Serang. Sesuai undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, dimana memberikan kewenangan kepada daerah kota/kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Serang dibentuk berdasarkan peraturan Walikota Serang Nomor 14 Tahun 2017 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana. Pasal 2 menyebutkan bahwa: DP3AKB mempunyai tugas-tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pelayanan keluarga, membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan pada daerah sesuai dengan visi, misi dan program wilkota sebagaimana dijabarkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.

Susunan Organisasi

Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) diatur berdasarkan pasal 2 perwal nomor 14 tahun 2017, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahkan:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Pengendalian penduduk dan Advokasi Penggerakan dan Informasi membawahkan:
  1. Seksi Advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE);
  2. Seksi Penggerakan dan Pendayagunaan Penyuluh KB (PKB) dan Kader KB
  3. Seksi Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi Keluarga.
- d. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga membawahkan:
  1. Seksi Jaminan Pelayanan KB;
  2. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan KB;
  3. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat membawahkan:
  1. Seksi Pemberdayaan Perempuan;
  2. Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;

3. Seksi Pengemban dan Penguatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
- f. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak membawahkan:
  1. Seksi Perlindungan Perempuan dari Anak;
  2. Seksi Pemenuhan Hak Anak;
  3. Seksi Informasi Gender dan Anak.
- g. Unit Pelaksana Teknis
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

#### Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan pasal 2 peraturan walikota nomor 14 tahun 2017, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan wajib non pelayanan dasar di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pelayanan program keluarga berencana. DP3AKB dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi dan kewenangan:

- a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan dibidang pemberdayaan perempuan dan masyarakat, perlindungan perempuan dan anak, pengendalian penduduk, advokasi pergerakan dan informasi serta keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan bidang pemberdayaan perempuan dan masyarakat, perlindungan perempuan dan anak, pengendalian penduduk, advokasi pergerakan dan informasiserta keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan perempuan dan masyarakat, perlindungan perempuan dan anak, pengendalian penduduk, advokasi pergerakan dan informasi serta keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan bidang pemberdayaan perempuan dan masyarakat, perlindungan perempuan dan anak, pengendalian penduduk, advokasi pergerakan dan informasi serta keluarga berencana. Ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- e. Pengelolaan UPT; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

#### Visi Misi Walikota Serang

#### Visi

Terwujudnya Kota Peradaban yang Berdaya dan Berbudaya

#### Misi

1. Memperkuat Peradaban Berbasis Nilai-Nilai Kemanusiaan;
2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Daerah yang Berwawasan Lingkungan
3. Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat yang Berdaya Saing
4. Meningkatkan Tata Kelola yang Baik

Oleh karenanya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Serang berkewajiban untuk menjalankan

komitmen walikota terpilih yang mengacu pada visi kota serang “Terwujudnya Kota Peradaban yang Berdaya dan Berbudaya”: padamisi kesatu (1) yaitu Menguatkan Peradaban Berbasis Nilai-Nilai Kemanusiaan serta misi ketiga (3) yaitu: Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat yang Berdaya Saing.

#### **4.1.4 Deskripsi Balai Penyuluhan KB Kecamatan Serang**

Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (BPKB) bersinergi dengan PPKS (Program Pelayanan Keluarga Sejahtera) “SMS” (Serang Maju Sejahtera) yang keberadaannya di level kecamatan diharapkan mampu menjadi one stop service persoalan dalam lingkup keluarga maupun masyarakat yang lebih luas seperti masalah kependudukan dan keluarga berencana. Oleh karena itu bentuk pelayanan dalam PPKS telah distandarkan secara nasional yang setidaknya mencakup delapan hal:

1. pelayanan informasi dan dokumentasi kependudukan dan keluarga berencana
2. konseling keluarga balita dan anak
3. konseling pra nikah
4. konseling keluarga remaja dan remaja
5. konseling keluarga lansia dan lansia
6. konseling keluarga berencana dan kesehatan reproduksi
7. konseling keluarga (married conceling)
8. pembinaan usaha ekonomi keluarga

Melalui berbagai layanan tersebut, maka dapat dipastikan keluarga akan dapat lebih mengoptimalkan pelaksanaan 8 fungsi keluarga sebagai modal dasar untuk membangun keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Dengan terwujudnya keluarga-keluarga kecil bahagia dan sejahtera secara langsung maupun tidak langsung akan mampu mengatasi persoalan penduduk di negeri ini baik secara kuantitas maupun kualitas sebagaimana diatur dalam PP Nomor 57 Tahun 2009 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 27 Tahun 1994 tentang pengelolaan perkembangan kependudukan.

#### Tujuan

##### Tujuan umum

Pusat pelayanan informasi dan rujukan penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja (PKBR), jaminan pelayanan KB dan KR, pertumbuhan dan perkembangan anak dan remaja dan ketahanan keluarga, ketahanan ekonomi dan kesejahteraan keluarga serta informasi kependudukan dan KB.

##### Tujuan Khusus

1. memberikan pelayanan informasi penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja (PKBR),
2. memberikan pelayanan informasi jaminan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi,
3. memberikan pelayanan informasi tumbuh kembang anak dan ketahanan keluarga,
4. memberikan pelayanan informasi ketahanan ekonomi dan kesejahteraan keluarga,

5. memberikan pelayanan data informasi kependudukan dan keluarga berencana,
6. menggalang kemitraan jejaring kerja dengan instansi terkait, LSM, dan ormas lain.

#### Visi dan Misi KB

Visi: Terlayannya kebutuhan informasi kependudukan dan program KB demi terwujudnya keluarga sejahtera

#### Misi:

1. Memberikan layanan informasi data kependudukan
2. Memberikan layanan informasi dan pengaduan/konseling program layanan KB
3. Memberikan layanan informasi dan konseling ketahanan dan pemberdayaan keluarga
4. Memberikan informasi layanan pengembangan UPPKS dan Tribina

#### **4.1.5 Deskripsi Implementasi Program Keluarga Berencana (KB) di Kampung Kaliwadas**

Implementasi program kampung KB di Kampung Kaliwadas belum berjalan secara optimal. Sebagaimana tujuan pembentukan kampung KB untuk membangun Indonesia dari pingiran dengan memprioritaskan daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI dan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, maka arah kebijakan pembentukan kampung KB seharusnya sebagai berikut. Pertama, kurang optimalnya pengelola dan pelaksana program di kampung KB



dalam meningkatkan penggerakan program KKBPk secara sistematis terencana dan berkesinambungan bersama-sama dengan masyarakat di kampung KB. Kedua, belum menetapkan program KKBPk sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat melalui program 8 (delapan) fungsi keluarga, dalam rangka mengentaskan kemiskinan di kampung KB. Dan ketiga, kurangnya pengembangan dan penguatan kemitraan di kampung KB.

Kurang optimalnya pengelola dan pelaksana program di kampung KB di Kampung Kaliwadas tercermin dari masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam poktan (kelompok kegiatan), sehingga belum dapat meningkatkan penggerakan program KKBPk secara sistematis terencana dan berkesinambungan bersama-sama dengan masyarakat. Selama ini pengelola kampung KB di Kampung Kaliwadas khususnya pengurus poktan (kelompok kegiatan) belum melakukan penyampaian dari pembinaan yang mereka dapatkan dari DP3AKB tentang kelompok kegiatan yang ada di Kampung KB kepada masyarakat kampung KB Kaliwadas.

Kedua, belum menetapkan program KKBPk sebagai sarana karena di kampung KB Kaliwadas belum mempunyai sarana yang menunjang dalam program KKBPk, seperti buku materi untuk bina keluarga kelompok kegiatan pun mereka belum mempunyai, jadi untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat, pengurus kampung KB khususnya pengurus kelompok kegiatan belum melakukan kegiatan yang bersangkutan paut dengan bina keluarga. Pengelola kampung KB seperti BKKBN dan DP3AKB telah melakukan pembinaan dan sosialisasi sesuai dengan program 8 (delapan) fungsi keluarga, namun hal tersebut

belum berjalan secara optimal, karena belum dapat mengentaskan kemiskinan di kampung KB. Pengurus kampung KB kelompok kegiatan pun belum melakukan kegiatan maupun sosialisasi untuk masyarakat Kampung Kaliwadas, sehingga belum dapat menerapkan program 8 (delapan) fungsi keluarga secara optimal.

Dan ketiga, kurangnya pengembangan dan penguatan kemitraan dalam program-program kampung KB di Kampung Kaliwadas, sehingga masih belum dapat memberikan perhatian ataupun dampak kepada masyarakat dan lintas sektor.

## **4.2 Deskripsi Data**

### **4.2.1 Deskripsi data penelitian**

Data yang disajikan di bawah ini merupakan data yang sudah melalui proses reduksi. Deskripsi data menjelaskan hasil penelitian yang telah diolah dari data mentah dengan menggunakan teknik analisis data yang relevan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Teori Implementasi Merilee S. Grindle yang mengemukakan keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik dapat diukur dari dua hal, yaitu: isi kebijakan dan konteks kebijakan. Mengingat bahwa jenis dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, maka data yang diperoleh bersifat deskriptif berbentuk kata dan kalimat dari hasil wawancara, hasil observasi lapangan, serta data atau hasil dokumentasi lainnya.

Berdasarkan teknik analisis data kualitatif mengikuti konsep yang dipaparkan Prasetya Irawan, data-data tersebut dianalisis selama proses penelitian berlangsung. Data yang diperoleh dari hasil lapangan meliputi wawancara,

dokumentasi, maupun observasi dan dilakukan reduksi untuk mencari tema dan pola dan diberikan kode-kode pada aspek tertentu berdasarkan jawaban-jawaban yang sama dan berkaitan dengan pembahasan masalah penelitian serta dilakukan kategorisasi. Dalam penyusunan jawaban penelitian, peneliti memberikan kode pada beberapa aspek yaitu:

1. Kode A-F menandakan indikator pertanyaan
2. Kode Q<sub>1</sub>- Q<sub>18</sub> menandakan daftar pertanyaan
3. Kode I<sub>1</sub>-I<sub>10</sub> menandakan kode urutan informan

Setelah memberikan kode-kode pada aspek tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian sehingga tema dan polanya ditemukan, maka dilakukan kategorisasi berdasarkan jawaban-jawaban yang ditemukan dari penelitian lapangan dengan membaca dan menelaah jawaban-jawaban tersebut dan mencari data-data penunjang yang memperkuat hasil penemuan lapangan. Mengingat penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tidak menggeneralisasikan jawaban penelitian, maka semua jawaban-jawaban yang dikemukakan informan dipaparkan dalam pembahasan penelitian yang disesuaikan dengan teori penelitian. Berdasarkan kategori-kategori yang telah disusun oleh peneliti berdasarkan dengan hasil lapangan yaitu:

**Isi Kebijakan:**

1. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi kebijakan
  - a. Latar belakang dibuatnya program Kampung KB
2. Jenis manfaat yang diperoleh
  - a. Sejauh ini bagaimana pelaksanaan dari program kampung KB?

- b. Apakah ada peningkatan keterlibatan keluarga dalam kelompok kegiatan di kampung KB?
3. Derajat perubahan yang ingin dicapai
  - a. Apa tujuan dari program kampung KB?
  - b. Bagaimana penerapan 8 fungsi keluarga dalam kehidupan masyarakat di kampung KB?
4. Letak pengambilan keputusan
  - a. Bagaimana dukungan dari lintas sektor terhadap program kampung KB?
  - b. Bagaimana proses penyusunan rencana kegiatan di kampung KB di Kampung Kaliwadas?
  - c. Bagaimana koordinasi yang dilakukan terhadap implementasi program kampung KB?
5. Pelaksana program
  - a. Bagaimana sosialisasi yang dilakukan dalam memberikan pemahaman tentang program kampung KB?
  - b. Bagaimana pelaksanaan pelayanan KB di kampung KB?
6. Sumberdaya yang digunakan
  - a. Bagaimana sarana dan prasarana yang ada dalam menunjang program kampung KB?
  - b. Bagaimana dana dan anggaran dalam menunjang program kampung KB?

**Konteks Kebijakan:**

1. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat
  - a. Apakah ada pembinaan bagi pengurus kampung KB guna meningkatkan kualitas sumberdaya manusia?
  - b. Bagaimana kinerja dinas terkait dalam melakukan pengawasan kampung KB?
2. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa
  - a. Apasaja peran dari *stakeholder* dan kesiapan *stakeholder* dalam program kampung KB?
3. Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana
  - a. Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap kampung KB di Kampung Kaliwadas?
  - b. Apakah ada pertemuan rutin yang dilakukan oleh pengurus kampung KB di Kampung Kaliwadas?
  - c. Apakah kendala yang dihadapi oleh pengelola selama proses pengelolaan kampung KB?

Berdasarkan kategori diatas, maka peneliti membuat matriks agar data-data yang ada dari hasil kategorisasi dapat dibaca dan dipahami secara keseluruhan. Kemudian dilakukan analisis kembali untuk mencari kesimpulan yang signifikan selama sisa waktu penelitian dengan mencari kembali data dan informasi dari berbagai sumber. Setelah data dan informasi yang didapatkan bersifat jernih,

artinya telah ada pengulangan informasi, maka kesimpulan tersebut dapat diambil untuk dijadikan jawaban dalam membahas masalah penelitian ini.

#### 4.2.2 Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terkait dengan Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Kampung Kaliwadas Kelurahan Lopang Kecamatan Serang Kota Serang Banten, berikut ini adalah daftar data informan yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

**Tabel 4.6**  
**Deskripsi Informan Penelitian**

No.	Koding	Pembagian Koding	Jabatan/Status Sosial Informan	Kategori	Status Informan
1.	I <sub>1</sub>	Yuda Ganda Putra, S.IP. MM	Subbidang Hubungan Antar Lembaga dan Bina Lini Lapangan	BKKBN Provinsi Banten	Key Informan
2.	I <sub>2</sub>	Imas Hotimah, S.Pd, M.Si	Seksi Penggerakan dan Pendayagunaan Penyuluh KB (PLKB) dan Kader KB	DP3AKB Kota Serang	
3.	I <sub>3</sub>	H. Cece Saputra, S.KM	Kepala Balai Penyuluhan KB Kecamatan Serang	Perangkat Kecamatan	
4.	I <sub>4</sub>	Nunuk Sunartowati	Ketua Forum Kader dan PPKBD Kecamatan Serang		
5.	I <sub>5</sub>	Elisiana, S.Sos	Ketua PKB Kecamatan Serang		
6.	I <sub>6</sub>	Sodri, S.E	Kepala Kelurahan Lopang	Perangkat Kelurahan	
7.	I <sub>7</sub>	Raminah	Ketua Forum Kelurahan Lopang dan Ketua Kelompok Kegiatan UPPKS		
8.	I <sub>8</sub>	Agus F, S.H	Ketua Kampung		

			KB Kaliwadas/Ketua RW. 06	Kampung KB	
9.	I <sub>9-1</sub>	Ibu Hasanah	Ketua Kelompok Kegiatan BKB dan Bendahara Kampung KB		
10.	I <sub>9-2</sub>	Ibu Iroh Sutiroh	Ketua Kelompok Kegiatan BKR		
11.	I <sub>9-3</sub>	Ibu Siti	Ketua Kelompok Kegiatan BKL		
12.	I <sub>9-4</sub>	Pak Ali Rohman	Ketua Kelompok Kegiatan PIK-R		
13.	I <sub>10-1</sub>	Ibu Nurhayati	Masyarakat Kelompok Kegiatan BKB dan Akseptor KB	Masyarakat Kampung KB	Secondary Informan
14.	I <sub>10-2</sub>	Ibu Fatiah	Masyarakat Kelompok Kegiatan BKR dan PIK-R		
15.	I <sub>10-3</sub>	Ibu Eva S	Masyarakat Kelompok Kegiatan BKL		
16.	I <sub>10-4</sub>	Ibu Yeti	Masyarakat Kelompok Kegiatan UPPKS		

(Sumber: Peneliti, 2019)

### 4.3 Hasil Temuan

Setelah melakukan penelitian ke lokasi baik melalui wawancara maupun observasi lapangan, peneliti mendapatkan data-data yang kompleks. Namun setelah melakukan proses reduksi data maka didapatkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Data-data tersebut akan dipaparkan yang terdiri atas:

### 4.3.1 *Content Of Policy*

Pada *Content of policy* terdapat enam dimensi yang akan dijadikan indikator sejauh mana implementasi kebijakan atau program dapat berjalan. Indikator tersebut yaitu sebagai berikut:

#### 1. **Keentingan-Keentingan yang Mempengaruhi Kebijakan**

Berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauhmana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut.

Pada indikator ini berkaitan dengan kepentingan-kepentingan yang dapat mempengaruhi implementasi suatu kebijakan atau program. Dari indikator kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi ini, peneliti menilai aspek yang terkandung di dalamnya yaitu latar belakang dibuatnya program Kampung KB. Peneliti melakukan wawancara terkait dengan kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi pelaksanaan program Kampung KB pada aspek yang terkandung di dalamnya yaitu latar belakang dibuatnya program Kampung KB ini kepada I<sub>1</sub> yang mengatakan bahwa:

“Kampung KB bidang ini yang mengelola secara umum. Kampung KB adalah wadah, isinya ada program KB, program KSPK, ada bidang daladuk dan bidang pembangunan lainnya. Saya disubbid hubungan antara lembaga itu ngurus rumahnya, wadahnya, jadi semua terkait dalam bentuk pengelolaan Kampung KB, cuma punya bagian-bagiannya, kalau saya lebih kepada struktur kelembagaannya, kalau yang lain terkait dengan program kegiatannya, semisal di KB nanti ada pelayanan KB nya ada sosialisasi kespronya, di KS nanti ada kegiatan tribinanya, PIK-Remaja dan yang lain-lain. Itu semua terkait. Tapi



umumnya di Adpin. Kampung KB itu adalah rumahnya. Isinya kegiatan-kegiatan, ada dari bidang KB, bidang KS, dari bidang pembangunan lainnya, kesehatan, kemudian sosial tenaga kerja, keamanan, nanti masuk disana.”

Lalu I<sub>2</sub> juga berpendapat mengenai latar belakang dibuatnya program

Kampung KB ini yaitu:

“Kampung KB untuk operational penggerakannya di kita di dalduk, kalau semua pelayanan KB ada di bidang KB. Kalau kita dalduk mengolah data-data hasil pelayanan adanya di dalduk. Lebih fokus ke seksi penggerakannya masing-masing OPD. Di kabupaten/kota berbeda yang pegang kampung KB, ada yang di bidang KB, kalau kita di pengendalian penduduk. Dari BKKBN turunannya ke DP3AKB lalu ke UPT Kecamatan lalu langsung ke kampung KB. Kampung KB itu satu kelurahan, tiap kecamatan ada 1, kecuali di Taktakan ada 2 kampung KB. Kalau untuk penggarapan wilayahnya 1 RW, fokusnya ke 1 RW, di kampung KB sendiri poktannya tingkat RW, pokonya ketika dibentuk kampung KB, otomatis dibentuk BKB, BKL, dan BKR dibuat di 1 RW itu. Pokonya kampung KB selalu kita prioritaskan disamping yang lain. Dibuat kampung KB itu salah satunya karena pencapaian KB nya sangat rendah, dan itupun yang menentukannya pihak dari BKKBN Provinsi Banten, jadi bukan kita yang menentukan, mereka sudah punya data melalui pendataan keluarga.”

Berdasarkan hasil wawancara kepada narasumber terkait dengan indikator kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi pelaksanaan program kampung KB dapat disimpulkan, kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi pelaksanaan program kampung KB yaitu 3 program utama kampung KB, yang terdiri dari program kependudukan, program KB-KR (Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi), dan program PK (Pembangunan Keluarga), juga kepentingan 5 poktan kampung KB yaitu BKB, BKR, BKL, PIK-R, dan UPPKS. Karena kampung KB adalah wadah, yang di dalamnya terdapat program KB, program KSPK, pengendalian penduduk, dan bidang pembangunan lainnya. Koordinasi yang dilakukan adalah dari BKKBN ke DP3AKB lalu ke UPT kecamatan (Pos

Penyuluhan KB) setelah itu langsung ke kampung KB. Kampung KB sebenarnya 1 kelurahan namun untuk penggarapan wilayahnya 1 RW, di Kota Serang terdapat masing-masing 1 kampung KB di tiap kecamatan kecuali di Taktakan terdapat 2 kampung KB. Kampung KB selalu di prioritaskan dibandingkan dengan yang lain. Menjadi kampung KB di Kota Serang salah satu alasannya karena pencapaian KB nya sangat rendah, yang menentukan wilayahnya yaitu dari BKKBN. Jadi kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi pelaksanaan program kampung KB terdapat pada kepentingan BKKBN untuk meningkatkan program KB-KR, program PK, dan program kependudukan.

## **2. Jenis Manfaat yang Dihasilkan**

Pada poin ini *content of policy* berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.

Pada indikator ini menegaskan kepada manfaat yang diperoleh dari pengimplementasian suatu program yang telah lebih mengarah kepada dampak positif dari penerapannya. Dari indikator jenis manfaat yang dihasilkan ini, peneliti menilai beberapa aspek yang terkandung di dalamnya mulai dari sejauh ini bagaimana pelaksanaan dari program kampung KB. Peneliti melakukan wawancara terkait dengan bagaimana pelaksanaan dari program kampung KB ini kepada I<sub>1</sub> yang mengatakan bahwa:

“Program kampung KB sudah berjalan 3 tahun sejak dicanangkan oleh Presiden pada tanggal 14 Januari 2016. Kegiatannya macem-macem, contohnya untuk

lansia, bisa pengajian untuk lansia, senam lansia, kemudian pembuatan keterampilan kreasi bagi lansia, intinya BKL itu mengajarkan kepada keluarga-keluarga yang punya lansia untuk bisa membina dan mendidik lansia-lansia itu tetap produktif, tetap punya aktivitas, tetap sehat, tidak minder, itu output yang diharapkan dari BKL, jadi sasarannya bukan keluarganya aja, tapi lansianya juga, sasarannya bisa langsung kita bikin kegiatan untuk lansianya.”

“BKB dan PAUD, didalam konsep BKB holistik, itu terintegrasi antara PAUD dan BKB, jadi dimana ada PAUD pasti disitu ada BKB, tapi kalau yang BKB nya bukan BKB holistik, di bisa berdiri sendiri tanpa adanya PAUD, contoh BKB kan bisa saja nanti dipadukan dengan posyandu bisa, diposyandu itu kan udah jelas ada penimbangan, pemberian imunisasi buat anak, selagi itu dilaksanakan, orang tuanya juga diberikan pemahaman bagaimana cara mendidik balita. Bedanya antara PAUD dengan BKB dari sasarannya, kalau PAUD yang disasar adalah balitanya, tapi kalau misalkan BKB, orangtuanya, jadi kita sejalan, orang tuanya diberikan wawasan, si anak-anak nya juga diberikan wawasan, karena nanti ngerasain, kalau punya anak itu, bagaimana repotnya ngurus anak, gamudah, ketika kita punya balita, makanya, silahkan buka di playstore, disitu banyak materi-materi tentang ketahanan keluarga, bagaimana jadi orang tua yang hebat, bagaimana menjadi ibu rumah tangga yang bekerja, itu banyak materi-materi.”

Lalu I<sub>2</sub> juga berpendapat mengenai sejauh ini bagaimana pelaksanaan dari program kampung KB yaitu:

“Pelaksanaan kampung KB itu bukan cuma pelayanan tentang KB saja, tapi ada BKB, BKL, BKR, PIK-R, dan UPPKS yang semua itu disebut pokja (kelompok kerja). Kita melakukan pembinaan kepada pengurus pokja tersebut, kepada ketua-ketua pokja, sebagai perwakilan, untuk diteruskan kembali kepada masyarakat melalui mereka.”

Dari I<sub>1</sub> dan I<sub>2</sub> kita dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan dari program kampung KB itu terdiri dari Program KB-KR (Keluarga Berencana-Kesehatan Reproduksi), program PK (Pembangunan Keluarga) dan Program Kependudukan. Program-program tersebut seharusnya di dukung oleh lintas sektor. Untuk program KB-KR berjalan dengan kegiatan sosialisasi dan pelayanan KB gratis.

Program pembangunan keluarga dibentuk 5 poktan yaitu BKB, BKR, BKL, PIK-R, dan UPPKS untuk menjalankan kegiatan pembangunan keluarga.

**Gambar 4.2**  
**Peta Konsep Program Kampung KB**



(Sumber:<http://Kampungkb.bkkbn.go.id> diolah oleh peneliti)

Dari peta konsep program kampung KB diatas, dapat dilihat bahwa kampung KB itu terdiri dari program KB-KR (Keluarga Berencana-Kesehatan Reproduksi), Program PK (Pembangunan Keluarga) dan Program Kependudukan, yang didukung oleh lintas sektor.

Lalu I<sub>3</sub> juga berpendapat mengenaisejauh ini bagaimana pelaksanaan dari program kampung KB yaitu:

“Selama ini belum ada/mengadakan konseling untuk remaja (PIK-R), tapi pernah ada penyuluhan PIK-R Kampung KB diundang di KPRI, sering diundang keluar anak-anak PIK-R, mengadakan pembuatan kerajinan dan dipamerkan. Catatan kegiatan yang pernah dilaksanakan di Kampung KB ada di buku pokja. Karena mereka masing-masing kelompok itu punya kegiatan sendiri, jadi adanya di tiap ketua poktan. Pembinaan apapun yang dilakukan oleh DP3AKB atau BKKBN pasti mereka mencatat.”

Lalu I<sub>4</sub> juga berpendapat mengenaisejauh ini bagaimana pelaksanaan dari program kampung KB yaitu:

“Kampung KB di Kaliwadas pelaksanaanya masih kurang partisipasi masyarakatnya, sudah kita lakukan pembinaan ketua pokjanya, namun belum bisa menyampaikan kepada masyarakat, kegiatannya pun belum banyak, tapi sudah ada BKB nya ada PAUD.”

Lalu I<sub>5</sub> juga berpendapat mengenai sejauh ini bagaimana pelaksanaan dari program kampung KB yaitu:

“Satu bulan dengan 2 bulan dengan 3 bulan itu harus berbeda capaiannya, harus lebih berkembang, kalau tidak berkembang, jalan ditempat artinya berarti Kampung KB tidak dibina oleh kita. MOP banyak di Kampung KB (data jumlah capaian yang ada di Kelurahan Lopang).”

Lalu I<sub>8</sub> juga berpendapat mengenai sejauh ini bagaimana pelaksanaan dari program kampung KB yaitu:

“Pelaksanaan program Kampung KB ini baik, ketua-ketua pokja mengikuti pembinaan-pembinaan dari dinas, dan posyandu berjalan terus, pelayanan KB juga ada.”

Dari I<sub>3</sub>, I<sub>4</sub>, I<sub>5</sub> dan I<sub>8</sub> terdapat kesimpulan pelaksanaan program kampung KB di Kampung Kaliwadas pada program KB-KR sudah berjalan dengan baik, karena sudah meningkatnya jumlah akseptor KB di Kampung Kaliwadas. Pada program Pembangunan Keluarga (PK) di Kampung Kaliwadas masih kurang partisipasi masyarakat pada poktan (kelompok kegiatan), karena masih kurangnya kontribusi dari ketua poktan dalam meningkatkan kegiatan pembangunan keluarga tersebut. Untuk program kependudukan di kampung KB belum terlaksana karena kurangnya koordinasi dengan lintas sektor.

Dari indikator jenis manfaat yang dihasilkan ini, peneliti juga menilai aspek apakah ada peningkatan keterlibatan keluarga dalam kelompok kegiatan di kampung KB. Peneliti melakukan wawancara terkait dengan manfaat yang dihasilkan dari pelaksanaan program kampung KB ini kepada I<sub>1</sub> yang mengatakan bahwa:

“Dikita itu ada laporan f1 dala (pengendalian lapangan), di dalam laporan F1 dala itu, setiap bulan dilaporkan, berapa jumlah poktan yang ada di suatu wilayah, termasuk berapa jumlah anggota dari poktan tersebut disuatu wilayah dalam kurun waktu tertentu, dan ini sifatnya fluktuatif.”

“Yang bertugas untuk mengupdate website Kampung KB itu adalah kader, PPKBD dan Sub PPKBD didampingi oleh PLKB atau PKB. PLKB dan PKB intinya sama, dia menjalankan fungsi 10 langkah PLKB, dimulai dari pendekatan kepada tokoh masyarakat sampai kepada proses pencatatan pelaporan dalam program KKBPK itu dilaksanakan, bedanya PKB adalah pejabat fungsional, kalau PLKB adalah pejabat fungsional umum atau struktural, pejabat fungsional, khusus penyuluh.”

“Partisipasi diukur dari laporan kesertaan, jadi ada laporan di S1 dala itu berapa jumlah keluarga, berapa jumlah keluarga yang memiliki balita, dan berapa jumlah yang memiliki balita yang tergabung didalam kelompok BKB, jadi kita punya perbandingan, misal keluarganya 10 di Kampung KB itu, yang punya BKB 5 , yang punya balita 5 keluarga, yang dari 5 keluarga itu kita berupaya kelimanya bisa menjadi peserta BKB. Kalau itu dikatakan sukses 100%, tapi kalau misal hanya dari 5 itu cuma ada 1 keluarga atau 2 keluarga saja, berarti itu tidak sukses, itu berarti kesertaannya rendah. diukur kuantitatif di website Kampung KB itu 1 desa, kuantitatif, kalau kualitatif panjang, sejauh ini hanya terukur kuantitatif.”

Lalu I<sub>2</sub> juga berpendapat mengenai apakah ada peningkatan keterlibatan keluarga dalam kelompok kegiatan di kampung KB ini yaitu:

“Kalau partisipasi poktan dilihat dari kehadiran dalam pembinaan, sudah bagus. PLKB kecamatan yang bertugas meng update website kampung KB. Sementara di PLKB, nanti kedepannya inginnya kampung KB difasilitasi laptop agar bisa update langsung ke website tersebut. Tapi sekarang karena keterbatasan sarana dan prasarana, masih PLKB tersebut yang menginput.”

“Hanya pengurus poktan yang diundang untuk pembinaan, lalu yang menyampaikan ke masyarakat kampung KB nya itu seharusnya pengurus poktan itu, jadi intinya kepanjangan tangan dari kita. Kita membina pengurus poktan itu, kita berharap dari apa yang telah kita sampaikan, mereka bisa menyampaikan lagi ke masyarakat, tapi banyak yang tidak. Semoga saja mereka sudah melaksanakan tugasnya, tapi mungkin dari 5 orang yang diundang, ada 1 atau 2 orang yang menyampaikan, yang 3 nya belum. Kita sih berharapnya begitu.”

“Pembinaan langsung ke masyarakat pernah, kita melalui majlis ta’lim, kita langsung berhubungan dengan ibu-ibu yang khusus di kampung KB. Kita juga telah melaksanakan KIE kepada perwakilan masyarakat. Khusus wilayah kampung KB, itu se Kota Serang di kampung KB. Kita undang, kita satukan, semua kampung KB disatukan se Kota Serang.”

Dari I<sub>1</sub> dan I<sub>2</sub> menjelaskan bahwa peningkatan keterlibatan keluarga dalam kelompok kegiatan di kampung KB bisa dilihat di website kampung KB yang di *update* setiap bulannya oleh PLKB, peningkatan keterlibatan keluarga dalam kelompok kegiatan di kampung KB diukur dari keaktifan masyarakat dalam mengikuti kelompok kegiatan, baik pembinaan yang dilakukan oleh DP3AKB maupun kegiatan langsung yang dilaksanakan oleh ketua poktan kepada masyarakat atau anggota poktan. BKKBN dan DP3AKB pernah melakukan pembinaan langsung kepada masyarakat. DP3AKB rutin melakukan pembinaan kepada ketua potan di kampung KB.

Lalu I<sub>3</sub> juga berpendapat mengenai apakah ada peningkatan keterlibatan keluarga dalam kelompok kegiatan di kampung KB ini yaitu:

”Partisipasi, setiap ada pembinaan dari kita, 1 bulan sekali, karena yang kita hadirkan pengelola pokja, ya alhamdulillah. Kalau kita melakukan pembinaan itu bukan kepada masyarakat tapi kepada pokja pengelola, nanti pengelola yang melakukan pembinaan kepada masyarakat, jadi pokja-pokja dan poktan-poktan itu kepanjangan dari kita.”

Lalu I<sub>4</sub> juga berpendapat mengenai apakah ada peningkatan keterlibatan keluarga dalam kelompok kegiatan di kampung KB ini yaitu:

“Ada capaian pelayanan KB di Kampung KB. Selalu ada peningkatan KB, artinya kesertaan ber KB nya ada peningkatan karena target kita adalah harus ada perubahan sebelum ada Kampung KB dan setelah ada Kampung KB.”

Lalu I<sub>5</sub> juga berpendapat mengenai apakah ada peningkatan keterlibatan keluarga dalam kelompok kegiatan di kampung KB ini yaitu:

“Jadi ekonominya meningkat melalui keterampilan kesertaan berKB nya juga meningkat, karena awal ditunjuk menjadi Kampung KB itu masyarakat main set nya belum tau, bahkan sampai sekarang masih seperti itu, susah merubahnya masyarakat itu. Ya kesertaan berKB nya meningkat, ekonomi masyarakat meningkat, SDM nya meningkat itu melalui masing-masing pokja dan poktan, mungkin melalui UPPKS, kesejahteraannya masyarakatnya meningkat, ekonomi kegiatannya meningkat, keterampilannya itu bisa meningkat sehingga bisa produktif, dari pembinaan masyarakat SDM nya meningkat. Mulai dari pengetahuan pendidikan, pendidikan usia dini, narkoba dan lain-lain, SDM nya juga meningkat, lebih mengutamakan kepada pendidikan. Tidak sebodoh kaya orang kampung jadi merasa bahwa pendidikan itu penting. Terus kesertaan berKB nya juga meningkat yang tadinya dia tidak mau berKB, jadi berKB, semuanya meningkat untuk secara umum.”

Lalu I<sub>6</sub> juga berpendapat mengenai apakah ada peningkatan keterlibatan keluarga dalam kelompok kegiatan di kampung KB ini yaitu:

“Awal partisipasi poktan bagus. Jika ada kegiatan satu kelurahan terlibat, Kampung Kaliwadas namun pengurus dari kader kelurahan secara otomatis dari lingkungan masing-masing keterlibatan informasi dan ketika kegiatan turut serta se kelurahan. Kalau struktur sarannya ada pasti meningkat, namun ini sudah di data duluan, sudah masuk akseptor, jadi kalau peningkatan sarannya sudah tidak ada, kalau meningkat ya meningkat.”



Lalu I<sub>7</sub> juga berpendapat mengenai apakah ada peningkatan keterlibatan keluarga dalam kelompok kegiatan di kampung KB ini yaitu:

“Kelompok kegiatan BKL pengajian, BKR pengajian dan senam, BKB posyandu dan PAUD, PIK-R majlis ta’lim, dan UPPKS bikin olahan rumahan baso dan kerajinan. PAUD dibuat pas ada Kampung KB. Kelompok UPPKS di Kampung KB ada tapi 1 Kelurahan, karena UPPKS itu satu kelurahan 1 kelompok, dan terdapat 4 kelompok di Kecamatan Serang. Kondisi ekonomi masyarakat sedikit berubah. Karena kita Kampung KB yang dulunya awam sama KB, jadi sekarang sedikit memahami. Kalau ekonomi belum signifikan, masih berusaha karena sekarang sudah ada UPPKS, karena untuk meningkat secepatnya itu tidak mungkin.”

“Di Kelurahan Lopang ada 1 kelompok UPPKS, UPPKS “TUNAS” dengan alamat di Lopang Cilik RT03 RW02. Tidak ada kelompok UPPKS khusus di kampung KB, tapi anggota UPPKS”TUNAS” ini ada beberapa yang dari kampung KB. Sedangkan di Kecamatan Serang ada 4 kelompok UPPKS, yaitu kelompok “Ratu” di Lontar Baru, kelompok “Yudistira” di Cimuncang, kelompok “Kreasi” di Unyur, dan “Tunas” di Lopang.”

“Nanti ada kegiatan di Kampung KB yang anggarannya pembinaan dari Kampung KB, dan sekarang mau diadakan praktek untuk meningkatkan kesejahteraan di Kampung KB. Praktek itu, praktek yang supaya bisa menghasilkan entah itu dalam bentuk kerajinan atau makanan itu yang dikelola anggarannya dari kas Kampung KB. Misal kita mau membuat suatu produk ekonomi kerakyatan, misalkan 1 produk makanan, di dalam pembinaan itu mau diadakan praktek, nah disitu dilakukan praktek membuat, cara membuat makanan, supaya sehingga si makanan ini menjadi sebuah produk dan bisa dipasarkan dan dijual dan pendapatannya akan kembali ke Kampung KB. Jadi supaya ada kegiatan di Kampung KB itu yang menghasilkan, Sehingga ekonomi dan kesejahteraan di Kampung KB itu meningkat. Jadi yang pengangguran diajak, misalkan produk ini berkembang dan bisa dipasarkan, yang pengangguran ini bisa diajak, dilibatkan dalam membuat keterampilan atau makanan itu. Itu termasuk poktan UPPKS, UP2K bisa, PIK-R bisa, marketingnya dari UPPKS, semuanya tidak keluar, berkesinambungan.”

Lalu I<sub>8</sub> juga berpendapat mengenai apakah ada peningkatan keterlibatan keluarga dalam kelompok kegiatan di kampung KB ini yaitu:

“Sesuai rutinitas ada perkembangan, pembentukannya juga berjalan baik dari awal, misalnya yang BKB, BKB berjalan, anak-anaknya ada, itu juga masih keterbatasan tempat, sarannya belum memadai. Tapi kalau kelompok kegiatan yang lain masih cakupan ketua kelompoknya aja kalo ada penyuluhan dari DP3AKB.”

“Satu bulan sekali pelayanan KB, kemarin satu bulan dua kali, ada peningkatan penggunaan KB dari masyarakat. Peningkatan keikutsertaan masyarakat juga ada, ada kegiatan pembinaan, masyarakat antusias. Ada 40-70 yang datang di masjid ta’lim waktu kemarin dari BKKBN pusat ada penyuluhan.”

“Kegiatan rutin BKB PAUD, BKL pengajian, Remaja pengajian, UPPKS usaha kegiatan buat produksi, cuma itu mereka tidak berfikir untuk lebih, jadi hanya cukup seperti itu, Kelompok UPPKS ada 1. Ekonomi masyarakat disini rata-rata pedagang dan buruh kasar/buruh pabrik. Setelah ada UPPKS sebenarnya ada perubahan, tapi kegiatannya belum terpikir untuk lebih kedepannya, hanya cukup untuk hari ini, tidak ada inisiatif untuk usahanya menjadi besar. Kondisi sosial remajanya ada majlis ta’lim.”

Peningkatan keterlibatan keluarga dalam kelompok kegiatan di kampung KB Kaliwadas belum signifikan, diawal pembentukannya, anggota yang terdaftar memang banyak, namun untuk kegiatan yang dilaksanakan untuk program kampung KB nya yang aktif hanya pengurus pokjanya saja.

Sedangkan dari penerima program sendiri merasakan manfaat yang berbeda, dengan manfaat yang diharapkan oleh pelaksana kebijakan berpendapat mengenai apakah ada peningkatan keterlibatan keluarga dalam kelompok kegiatan di kampung KB. Hal tersebut dikatakan langsung oleh I<sub>9-1</sub>, I<sub>9-2</sub>, I<sub>9-3</sub>, I<sub>9-4</sub> yang mengatakan bahwa, menurut I<sub>9-1</sub>:

”BKB kegiatan rutinnya waktu awal seminggu sekali, sekarang sudah seminggu 4 kali, senin sampai kamis, itu PAUD, kalau untuk penyuluhan sebulan sekali di posyandu, jadi setiap posyandu anaknya ditimbang, kalau posyandu untuk mengetahui berat badannya, kalau BKB, untuk tumbuh kembangnya, jadi kalau dari kartu KKA bisa dilihat perkembangannya. Paling banyak datang pernah 25 orang, waktu sukarela banyak yang datang awal-awal. Tapi disuruh bayar pada

gaada, pada mundur gamau, karena orang sini susah inginnya bener-bener ga bayar.”

“PAUD dibawah dinas pendidikan, BKB dibawah dinas DP3AKB, seharusnya menegaskan kepada ketua BKB karena dia menamakan BKB PAUD Kendedes. Padahal sudah dikasih tau kalau PAUD dan BKB berbeda. Membentuk PAUD mengambil kesempatan ada BKB, dan salah kita juga membentuk PAUD. PAUD nya masih mandiri, belum melibatkan dinas pendidikan, karena tidak ada SK nya, jadi berdiri sendiri mandiri, SK nya menggunakan SK BKB.”

“PAUD dari jam 8-10, Gurunya ada 2, dan saya pembina, kalau salah satu guru tidak ada, saya yang mengganti. Tadinya hanya pakai kaos olahraga, sekarang ada batik, awalnya haya kaos olahraga saja. PAUD yang ikut awalnya diprioritaskan hanya kaliwadas, tapi dari mana-mana banyak yang ingin ikut masuk, awalnya saya tolak, tapi kasian juga, lama kelamaan yaudah tahun 2018 menerima yang lain, karena orang-orang sini memang yang pada malas, jadi daripada disini pada engga, jadi saya menarik dari luar. Ada kelas A dan Kelas B, banyak yang berenti dan ada yang anaknya ingin masuk tapi ibunya tidak mau mengantar anaknya terus ada anaknya yang ga mau, pengen nya main aja, tapi ibunya tidak membimbing, sekarang kelas A sudah sedikit, ada yang keluar. Kegiatan di PAUD edukasi seperti TK ada calistung (baca, tulis, ngitung), PAUD ini sudah merambat ke TK, karena ibu-ibu ingin anaknya bisa baca supaya bisa langsung masuk SD. Jadwal nya pagi dibarengin, ada 2 kelas A dan B, dibagi 1 gurunya, yang lulusan kuliah kelas B pemantapan, yang lulusan SMA kelas A dasar-dasar.”

“Di daerah kampung KB tidak ada PAUD dan TK, jadi PAUD ini jadi TK juga. Jadi daripada BKB ini tidak dimanfaatkan, jadi saya manfaatkan dengan membuat PAUD, pertamanya kumpulan anak-anak biasa. PAUD dibuat sejak adanya kampung KB, tidak bekerjasama dengan dinas pendidikan, masih mandiri, saya juga ingin, tapi harus punya yayasan, harus ada uang. Perubahan sebelum jadi kampung KB dan setelah jadi kampung KB, untuk pengetahuan ibu-ibunya ada peningkatan, dari mereka gatau tentang mengurus bayi yang benar, tapi tetap saja masih belum diterapkan, karena susah, tapi pelan-pelan, perubahan ada tapi tidak drastis.”

Lalu I<sub>9.2</sub> juga berpendapat mengenai apakah ada peningkatan keterlibatan keluarga dalam kelompok kegiatan di kampung KB ini yaitu:

“Kondisi sosial ada PIK-R di majelis, kegiatannya mengaji sehari-hari BKR, pengajian minggu sore dan malam Jum’at, dan minggu sore. Kadang disatuin pengajian bareng BKL. Jadi datanya nyampur, belum ada kegiatan khusus. Kadang kalau datang semua banyak. Kalau dari RT 01-05 minggu sore.

Kalau dari sebrang, malam jumat sama jumat siang jam 2an. Ada juga dari RT kita Cuma 1-2 Orang Doang.”

“PIK-R di majelis, Belum ada khusus BKB, BKL, BKR, jadi dicampur aja, belum ada, kita belum ada tempat. Mausih pengen, tempat mah diusahain bisa disini, tapi gaada waktu. Sebagian BKR kan remajanya ada yang gabisa baca, Sebelum jadi Kampung KB, pengetahuannya jadi lebih tambah luas, banyak yang ber KB. Keikutsertaan akseptor KB juga bertambah. Disini yang sepuh-sepuh yang muda-muda pada gatau/gamau, padahal hari minggu tidak kerja, ada pertemuan RT juga harus di panggil lagi. Gaada uang kas di BKR, Bikin sendiri ketua BKR seperti buku absen dan lain-lain pakai uang kantong sendiri (seharusnya ke Bu RW (Kata Bu Siti) itu buat bikin profil juga abis 20rb pakai uang sendiri) buat ada kegiatan dipanggil dari kecamatan. Kalau BKR punya buku baru buat, kalau BKL tidak buat.”

Lalu I<sub>9.3</sub> juga berpendapat mengenai apakah ada peningkatan keterlibatan keluarga dalam kelompok kegiatan di kampung KB ini yaitu:

“BKL di kita aja, soalnya Kampung KB itu dibagi jalan. Percobaannya didaerah sini, nanti kalau ada perkembangan jelas baru nyebrang. Tapi Pak RW pengennya kita 1 RW bareng-bareng, setiap kegiatan itu menyeluruh, jangan di 3 RT aja. Kalau ada penyuluhan sebrang ikut, jadi udah pada kesini, tapi ga seluruhnya, paling yang BKB yang balita ngambil dari sebrang. Kan ada 6 anggota tiap poktan, dari sebrang juga dilibatkan. Cuma untuk yang lansia itu kan kegiatannya kan di pengajian yang sering tiap minggu, jumat siang ada. Itu keseluruhan, kalo khusus belum ada, belum terbina gaada waktu, jadi langsung semua.”

“150 lansia 1 RW, 90 di Ibu (di 3 RT), namun belum ada data pastinya. Kalau ada kegiatan, terutama kegiatan untuk PKK kecamatan. Mengisi pokja 4, jadi bagian dari semua untuk sementara ini kalau ada pelatihan apa-apa udah nabung. Kalo untuk masing-masing poktan belum ada, jadi digabungin, Paling senam, BKL dan BKR digabungin.”

Lalu I<sub>9.4</sub> juga berpendapat mengenai apakah ada peningkatan keterlibatan keluarga dalam kelompok kegiatan di kampung KB ini yaitu:

“Banyak yang ikut PIK-R, tapi tidak masuk anggota. Anggota hanya ada 40, ada beberapa anak belum dimasukkan. Karena laporannya ada di K0, jadi yang baru-baru belum masuk. Karena disini PIK-R itu ikut ke pondok, jadi anak-anak yang masuk ke pondok sekalian masuk ke dalam PIK-R, bukan pondok ikut PIK-R, tapi

PIK-R ikut ke pondok. 40 orang laki-laki dan perempuan. Pondok (mengaji) laki-laki dan perempuan. Tapi yang ngingep dipondok laki-laki semua.”

“Kalau masyarakat awam tau Kampung KB itu KB saja. Kalau PIK-R kebanyakan masyarakat mengenal, belum tau apa itu PIK-R, masih langka didengar oleh telinga masyarakat di sini. Pelaksanaan program Kampung KB berjalan normal, berjalan lancar, namun PIK-R kedengarannya masih awam, masih langka.”

“Untuk perkembangan PIK-R alhamdulillah meningkat. Sebenarnya memang PIK-R itu belum ada sekretariatnya, Cuma disini ikut numpang di pondok/kobong. Sosialisasi ke masyarakat/remaja-remaja yang belum masuk PIK-R, termasuk kerja bakti, Pengajian rutin, karena adanya di kobong, jadi pengajian setiap waktu, magrib, subuh, sehabis isya. Pendidikan rata-rata remaja SMA, tapi kebanyakannya kerja dan dagang.”

Untuk peningkatan keterlibatan keluarga dalam kelompok kegiatan BKB, sebelum dimintai dana sukarela untuk guru yang mengajar, memang banyak yang mengikuti PAUD, namun setelah ditentukan dana yang harus diberikan per pertemuan, yang mengikuti PAUD menjadi berkurang, berikut daftar balita yang mengikuti PAUD:

**Tabel 4.7**  
**Data Anggota PAUD Bina Keluarga Balita (BKB) Kendedes Kampung KB**  
**Kaliwadas**

Kelas A		Kelas B	
No.	Nama	No.	Nama
1.	Aisyah	1.	Arpha
2.	Alip	2.	Amira
3.	Biandra	3.	Albar
4.	Fathan	4.	Dini
5.	Fadlikah	5.	Febi
6.	Kayla	6.	Lucky
7.	Liza	7.	Lutvi Nur Ikhsan
8.	Nur Asfahani	8.	Mukti
9.	Nino	9.	Muhammad Ridwan
10.	Rma	10.	Restu
11.	Radit	11.	Syifa
12.	Sempurna	12.	Sarah
13.	Siti Abidah	13.	Soleh

14.	Syakira	14.	Yusril
15.	Zahra	15.	Zulfa

(Sumber: Data Ketua BKB Kampung KB Kaliwadas diolah oleh peneliti)

Namun dalam daftar tersebut sudah ada yang jarang mengikuti PAUD. Selanjutnya untuk BKR, karena belum ada kegiatan rutin, BKR ini hanya mengikuti kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh DP3AKB, sekarang yang aktif dalam kegiatan BKR adalah hanya pengurus BKR yang secara bergantian mengikuti pembinaan. Awal pembentukkan BKR jumlah anggota yang ada adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.8**  
**Data Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Kendedes Kampung KB**  
**Kaliwadas**

NO	Nama Anak/Ibu Bapak	Usia	Status	PUS/Non PUS	Jumlah Anak
1.	Deni Sopiandi Umayah/Ibrohim (Alm)	20	Janda	Non PUS	4
2.	Andriansyah Heni/Nurjaman	17	Kawin	PUS	4
3.	Firgi Firmansyah Julaekah/Asep Raup	19	Kawin	PUS	4
4.	Naif Bitullah Sarnah/H. Nasir (Alm)	14	Janda	Non PUS	2
5.	Deden Gunawan A In/Abdurahman	19	Kawin	PUS	3
6.	Achmad Febriyanto A Mariah/A. Suhaemi	18	Kawin	PUS	5
7.	M. Baihaki Tati (Alm)/Jahudi	19	Duda	Non PUS	3
8.	A. Ghani A Siti Gantini/M. Misri	20	Kawin	PUS	4
9.	M. Sadam Umsiyah/A. Munajat	16	Kawin	PUS	2
10.	Asda Amnah/Atra	18	Kawin	PUS	3
11.	M. Rafiudin Marhamah (Alm)/Ust. Asma'i	20	Duda	Non PUS	6
12.	Taufik Nuraeni/Saripudin	17	Kawin	PUS	2

13.	Aris Stiana Rini/Saiful An'am	17	Kawin	PUS	1
14.	M. Fajar Fauzi Giyatmi/Sayumi	14	Kawin	PUS	1
15.	Adam Hasanun Fini Haryani/Misri	16	Kawin	PUS	3
16.	Fajar Nuralif Iis Marlina/Bailudi	13	Kawin	PUS	2
17.	Rizki Ramadan Salhiyah/Muiz Efendi	14	Kawin	PUS	5
18.	M. Sulaeman Halimah/Nahrawi	14	Kawin	PUS	5
19.	Ipan Arfian Tuti Ambriah/Hidayatullah (Alm)	14	Janda	PUS	3
20.	Fauzi Julaekah/Asep Raup	13	Kawin	PUS	4
21.	Malikulmulki Ernawati/Mad Aliyudin	14	Janda	PUS	2
22.	Nasrullah Aslihah/Fturohman	22	Kawin	PUS	2
23.	Kisti Hardiyanti Martini/Kadi	21	Kawin	Non PUS	4
24.	Defa Restu Destiana Siti Iswati/M. Sunadi	20	Kawin	Non PUS	3
25.	Gustia Sulastri Andriani/Bgd. Afrizal	18	Kawin	PUS	5
26.	Asrorul Maulana Nurhayati/Asma'il	19	Kawin	PUS	4
27.	Tatik Marlina Marsiah/Tarwadi	17	Kawin	PUS	2
28.	Ilham Muhaji Farida/Iskandar (Alm)	18	Janda	Non PUS	6
29.	Bella Imal/Ello	13	Kawin	PUS	2
30.	Nisa Fitriani Hendi/Rohilah	13	Kawin	PUS	2

(Sumber: Data Ketua BKR Kampung KB Kaliwadas diolah oleh peneliti)

Untuk BKL, pembinaan yang dilakukan oleh DP3AKB pun hanya diikuti oleh pengurus poktan BKL. Poktan BKL terdapat kegiatan rutin yaitu mengaji, namun jumlah tiap harinya berbeda, secara keseluruhan jumlah anggota BKL yang pernah mengikuti kegiatan BKL adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.9**  
**Data Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Kendedes Kampung KB Kaliwadas**

NO	Nama	P/L	Usia	Status	Jumlah Anak
1.	Malikah	P	64	Janda	4
2.	Misnah	P	58	Janda	6
3.	Suhariah	P	53	Kawin	5
4.	Umyanah	P	53	Janda	5
5.	Hj. Romlah	P	54	Janda	6
6.	Nunung/Nyai	P	57	Janda	4
7.	Hj. Mudrikah	P	60	Kawin	4
8.	Siti Iswati	P	58	Kawin	3
9.	Sumirah	P	62	Janda	6
10.	Sulenhah	P	52	Kawin	4
11.	Sumiyati	P	47	Kawin	5
12.	Nurhayati	P	48	Kawin	3
13.	Hati'ah	P	45	Kawin	3
14.	Rohimah	P	63	Kawin	3
15.	Rohanah	P	60	Kawin	8
16.	Marliah	P	66	Kawin	-
17.	Ayu Hajar Mutmainah	P	63	Janda	4
18.	Badriyah	P	-	Kawin	5
19.	Haeriyah	P	52	Janda	5
20.	Nani	P	61	Janda	6
21.	Hindun	P	60	Kawin	5
22.	Suhendah	P	55	Kawin	1
23.	Hj. Ipuk	P	-	Janda	-
24.	Hamdiah	P	62	Janda	1
25.	Mumun	P	56	Janda	-
26.	M. Suhadi	L	60	Kawin	3
27.	Jarkasih	L	-	Kawin	-
28.	Mansur	L	-	Kawin	-
29.	Musaeri	L	-	Kawin	-
30.	Jasim	L	-	Duda	-
31.	Jajuli	L	59	Kawin	1
32.	Kadi	L	-	Kawin	4
33.	Ust. Asma'i	L	-	Duda	8
34.	Iksan	L	-	Kawin	1
35.	Suherman	L	60	Kawin	4
36.	Damaksari	L	-	Kawin	6
37.	Udin Ali	L	-	Duda	1
38.	Ajimil	L	-	Kawin	-
39.	Sana	L	-	Kawin	2
40.	Supeni	L	-	Kawin	4



41.	Asma'il	L	-	Kawin	4
42.	H. Jahidi Karim	L	-	Kawin	4

(Sumber: Data Ketua BKL Kampung KB Kaliwadas diolah oleh peneliti)

Di Kampung KB Kaliwadas belum pernah ada pembinaan PIK-R kepada masyarakat langsung dari DP3AKB ataupun BKKBN, namun hanya pembinaan dari DP3AKB kepada pengurus KB, itu pun hanya berhenti di pengurus kampung KB, dan tidak disosialisasikan kembali kepada remaja di Kampung Kaliwadas. Pengurus poktan kampung KB menjelaskan kegiatan rutin mereka yaitu pengajian, karena PIK-R tersebut sebenarnya memang tempat mengaji (kobong) yang sudah ada sebelum terbentuknya kampung KB, berikut jumlah anggota PIK-R yang mengaji di kobong.

**Tabel 4.10**  
**Data Anggota Pusat Informasi dan Konseling-Remaja (PIK-R) Kendedes**  
**Kampung KB Kaliwadas**

NO	Nama	No.	Nama
1.	Deni Sofiandi	24.	Rafiudin
2.	Defa Restu Diana	25.	Baihaki
3.	Gustia Sulastri	26.	M. Sulaeman
4.	Ainul Yalim	27.	Ipan
5.	Asda	28.	Naip Dayatulloh
6.	Adam Hasanun	29.	Febri
7.	A. Ardi Febrianto	30.	Malikulmulki
8.	Asrosul M	31.	Rizki Ramadhan
9.	Aris Sefiana	32.	Andriansyah
10.	Hairul Anwar	33.	Neng Devi
11.	M. Yusuf	34.	Nova
12.	Nurhidayat	35.	Nurhasanah
13.	Solihin	36.	Nurmah
14.	Abdul Ghani	37.	Rani Oktaviani
15.	M. Sadam	38.	Putri
16.	Sahlan	39.	Hilda Nurafni
17.	Firqi Firmansyah	40.	Irawan
18.	Fauzi	41.	Muhaimin
19.	Fajar Nuralif	42.	Rohyadi
20.	Fajar Fauji	43.	M. Hasan
21.	Rindi Nindiani	44.	Taufik

22.	Rajib	45.	Amelia
23.	Rafi	46.	Ina Fitriani

(Sumber: Data Ketua PIK-R Kampung KB Kaliwadas diolah oleh peneliti)

Untuk UPPKS, yang khusus di Kampung Kaliwadas tidak ada, UPPKS dibentuk perdesa. Di Kelurahan Lopang ada 1 kelompok UPPKS, UPPKS “TUNAS” dengan alamat di Lopang Cilik RT03 RW02. Tidak ada kelompok UPPKS khusus di kampung KB, tapi anggota UPPKS ”TUNAS” ini ada beberapa anggota yang dari kampung KB. Sedangkan secara keseluruhan di Kecamatan Serang ada 4 kelompok UPPKS, berikut daftar kelompok UPPKS di Kecamatan Serang.

**Tabel 4.11**  
**Data Anggota UPPKS di Kecamatan Serang**

No.	Nama Kelompok	Kelompok Desa	Nama Anggota
1.	Ratu	Lontar Baru	-
2.	Yudistira	Cimuncang	-
3.	Kreasi	Unyur	-
4.	Tunas	Lopang	1. Suprihatin (Ketua) 2. Anisa 3. Raminah

			4. Purwati 5. Siti Iswati 6. Iroh Sutiroh 7. Lisa Destin 8. Stani Tursinah
--	--	--	--

(Sumber: Data Ketua UPPKSKelurahan Lopang diolah oleh peneliti)

Dari hasil wawancara dengan I<sub>9-1</sub>, I<sub>9-2</sub>, I<sub>9-3</sub>, dan I<sub>9-4</sub> dapat disimpulkan bahwa peningkatan keterlibatan keluarga dalam kelompok kegiatan di kampung KB belum signifikan, yang terjadi sekarang adalah karena kurangnya inisiatif dan keaktifan pengurus poktan Kampung KB Kaliwadas membuat tidak adanya kegiatan rutin yang dilakukan poktan di Kampung Kaliwadas, dan menyebabkan anggota berkurang dan partisipasi masyarakat menjadi berkurang juga.

Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa narasumber terkait dengan indikator jenis manfaat yang dihasilkan dalam pelaksanaan program kampung KB ini dapat disimpulkan, jenis manfaat yang dihasilkan dalam pelaksanaan program kampung KB di Kampung Kaliwadas yaitu awalnya memang manfaat yang dirasakan oleh masyarakat kampung KB yaitu dengan adanya kegiatan di kampung KB, namun sekarang karena minimnya kegiatan poktan, masyarakat kurang merasakan manfaat adanya Kampung KB di Kaliwadas. Pengurus kampung KB atau ketua poktan (kelompok kegiatan) mendapatkan manfaat positif dengan mengikuti pembinaan dari DP3AKB, namun manfaat tersebut tidak disalurkan kembali kepada masyarakat. dampaknya partisipasi masyarakat menjadi rendah. Adapula manfaat yang dirasakan yaitu meningkatnya jumlah akseptor KB di Kampung Kaliwadas, masyarakat dapat merasakan manfaat adanya program kampung KB yaitu dari pelayanan KB gratis.

### **3. Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai**

Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai. *content of policy* yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.

Pada indikator ini peneliti akan mengetahui seberapa besar perubahan yang akan dicapai dari suatu pelaksanaan program. Dari indikator derajat perubahan yang ingin dicapai, peneliti menilai beberapa aspek yang terkandung didalamnya yaitu apa tujuan dari program kampung KB dan bagaimana penerapan 8 fungsi keluarga dalam kehidupan masyarakat apa tujuan dari program di kampung KB. Peneliti melakukan wawancara terkait kampung KB ini kepada I<sub>1</sub> yang mengatakan bahwa:

“Tujuan kampung KB seperti yang ada di juknis kampung KB yang dikeluarkan oleh BKKBN yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program KKBPK dan juga pembangunan di sektor terkait untuk mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas, itu secara umum nya. Kalau secara khususnya salahsatunya untuk peningkatan jumlah peserta KB.”

Lalu I<sub>2</sub> juga berpendapat mengenai apa tujuan dari program kampung KB ini yaitu:

“Tujuan kampung KB sesuai dengan petunjuk teknis kampung KB dari BKKBN yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.”

Dapat diambil kesimpulan dari I<sub>1</sub> dan I<sub>2</sub> bahwa tujuan kampung KB yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program-programnya.

Dari indikator derajat perubahan yang ingin dicapai ini, peneliti juga menilai aspek bagaimana penerapan 8 fungsi keluarga dalam kehidupan masyarakat di kampung KB. Peneliti melakukan wawancara terkait dengan bagaimana penerapan 8 fungsi keluarga dalam kehidupan masyarakat di kampung KB ini kepada I<sub>1</sub> yang mengatakan bahwa:

“Kelompok kerja (pokja) harus sesuai 8 fungsi keluarga, adanya ditingkat desa. Jadi yang namanya Kampung KB itu, bukan setingkat RW, tapi setingkat desa, namanya aja Kampung KB karena untuk mengidentikkan walaupun sebetulnya ketika berbicara cakupan kewilayahan RW adalah kampung, kampung adalah RW, tapi di dalam pedoman yang dikeluarkan oleh BKKBN bahwa Kampung KB itu sudah setingkat desa, jadi pokja ditingkat desa.”

“Poktan. Sama saja seperti tadi saya bilang, bahwa Kampung KB itu pengurusnya adalah pokja Kampung KB, pokja Kampung KB itu punya seksi-seksi semisal tadi seksi ekonomi, itu poktan bisa masuk, poktan UPPKS, poktan itu kelompok kegiatan, nah di KS itu kan ada beberapa poktan, semisal tribina, BKB, BKR, BKL, UPPKS, dan PIK-Remaja. Nah nanti kespronya ada seksi kesehatan reproduksinya, bisa nanti PIK-R masuk disana kegiatannya, jadi setiap seksi itu punya program kegiatan yang mengarah sesuai dengan 8 fungsi keluarga, nanti di kespro itu juga bisa bidang kespro KB, seksi kespro dibidang KB masuk yang di sana kegiatannya. Sosialisasi tentang kespro, pelayanan KB dan lain-lain.”

Lalu I<sub>2</sub> juga berpendapat mengenai bagaimana penerapan 8 fungsi keluarga dalam kehidupan masyarakat di kampung KB ini yaitu:

“Penerapan 8 fungsi keluarga, di kampung KB itu sebenarnya dari kita materinya diterapkan, yang mereka kuasai, penyuluhan tentang keluarga, yang kita sampaikan itu sudah penerapan 8 fungsi keluarga. Cuma dari merekanya seharusnya menyampaikan lagi ke masyarakat. Intinya yang sudah disampaikan mereka paham.”

Dari I<sub>1</sub> dan I<sub>2</sub> menjelaskan bahwa 8 fungsi keluarga dalam kehidupan masyarakat di kampung KB telah diterapkan melalui pembinaan-pembinaan yang telah dilakukan oleh BKKBN dan DP3AKB, didalam setiap pembinaan dan sosialisasi yang dilakukan, mereka telah menyelipkan 8 fungsi keluarga.

Lalu I<sub>3</sub> juga berpendapat mengenai bagaimana penerapan 8 fungsi keluarga dalam kehidupan masyarakat di kampung KB ini yaitu:

“Kelompok kerja, ada tingkat dari provinsi sampai kelurahan, tapi kalau di Kampung KB ada pokja Kampung KB, tapi tingkatannya kelurahan. Tingkat provinsi, kota, kecamatan, dan kelurahan, dan RW. Pokja itu harus sesuai dengan 8 fungsi keluarga, cuma pembinanya bukan dibawah kita, tapi PKK. Kalo pokja dibawah PKK, sesuai 8 fungsi keluarga.”

Lalu I<sub>4</sub> juga berpendapat mengenai bagaimana penerapan 8 fungsi keluarga dalam kehidupan masyarakat di kampung KB ini yaitu:

“8 fungsi keluarga di Kampung KB, biasanya kalau kaya gitu kaya penyuluhan, penyuluhan agama, misal majlis ta’lim, ekonomi UPPKS atau pokja yang dibawah PKK, kalau UPPKS kan dibawah dinas KB, berarti mereka lewat UP2K (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga). Kalau ekonomi UP2K atau UPPKS, karena dibawah pokja lewat UP2K nya. Ada PKK, ada DP3AKB, kalau DP3AKB itu UPPKS, kalau PKK UP2K.”

Lalu I<sub>5</sub> juga berpendapat mengenai bagaimana penerapan 8 fungsi keluarga dalam kehidupan masyarakat di kampung KB ini yaitu:

“Kalau pokja dibawah PKK, kalau dibawah kita itu poktan. Berarti pokja itu dibawah PKK pembinanya kelurahan. Kalau tingkat provinsi yang membinaanya PKK tingkat provinsi, kalau kecamatan pembinanya kota. Pokonya berjenjang. Beda rumah, kalo pokja di bawah PKK, kalau DP3AKB poktan. Sama semuanya kalo untuk penyuluhan atau pembinaan ke masyarakat, itu lewat 8 fungsi

keluarga, baik dari pokja atau poktan semua sesuai 8 fungsi keluarga. Cuma pembinanya aja yang beda.”

Lalu I<sub>6</sub> juga berpendapat mengenai bagaimana penerapan 8 fungsi keluarga dalam kehidupan masyarakat di kampung KB ini yaitu:

“Penerapan 8 fungsi keluarga di kampung KB ini terus diterapkan, kita ada kelompok kerja kan sesuai dengan 8 fungsi keluarga, jadi kalau ada acara kita usahakan kedelapan fungsi keluarga itu diterapkan disatu acara atau kegiatan itu.”

Lalu I<sub>7</sub> juga berpendapat mengenai bagaimana penerapan 8 fungsi keluarga dalam kehidupan masyarakat di kampung KB ini yaitu:

“8 fungsi keluarga ya diterapkan dengan baik, kalo ada kegiatan kan kita pakai penerapan 8 fungsi kegiatan.”

Lalu I<sub>8</sub> juga berpendapat mengenai bagaimana penerapan 8 fungsi keluarga dalam kehidupan masyarakat di kampung KB ini yaitu:

“Saya kurang tau kalau penerapan 8 fungsi keluarga, ya mungkin ada.”

Penerapan 8 fungsi keluarga dalam kehidupan masyarakat di Kampung KB Kaliwadas menurut I<sub>3</sub>, I<sub>4</sub>, I<sub>5</sub>, I<sub>6</sub>, I<sub>7</sub>, dan I<sub>8</sub> kesimpulannya adalah penerapan tersebut dilakukan dalam setiap kegiatan kampung KB, namun ada juga pengurus yang memang tidak mengetahui 8 fungsi keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa narasumber terkait dengan indikator derajat perubahan yang ingin dicapai pada pelaksanaan program

kampung KB dapat disimpulkan, derajat perubahan yang ingin dicapai pada pelaksanaan program kampung KB yaitu perubahan yang diinginkan para pihak pelaksana kampung KB yang terdapat pada tujuan kampung KB dan juga 8 fungsi keluarga, namun adanya beberapa hambatan seperti pengurus kampung KB yang kurang mengetahui dan memahami 8 fungsi keluarga juga acara atau kegiatan yang dilaksanakan di kampung KB yang belum tepat sasaran, sehingga dapat menyebabkan perubahan yang diharapkan kurang maksimal. Dari adanya hambatan yang terjadi maka tujuan dari program kampung KB tersebut yang tertuang dalam buku petunjuk teknis kampung KB tidak tercapai sepenuhnya, peneliti menemukan selain kurangnya minat masyarakat juga belum adanya penerapan secara maksimal dari 8 fungsi keluarga.

#### **4. Letak Pengambilan Keputusan**

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.

Pada indikator ini, peneliti akan mengetahui letak pengambilan keputusan dalam suatu program yang akan di implementasikan. Dari indikator letak pengambilan keputusan ini, peneliti menilai beberapa aspek yang terkandung di dalamnya mulai dari bagaimana dukungan dari lintas sektor terhadap program kampung KB, bagaimana proses penyusunan rencana kegiatan di kampung KB di Kampung Kaliwadas, dan bagaimana koordinasi yang dilakukan terhadap implementasi program kampung KB. Peneliti melakukan wawancara terkait dengan bagaimana



letak pengambilan keputusan bagaimana dukungan dari lintas sektor terhadap program kampung KB ini kepada I<sub>1</sub> yang mengatakan bahwa:

“Dari Kampung KB nya sendiri bisa langsung mengajukan ke dinas terkait atau ke swasta. Itu yang kita harapkan. Jadi bisa berbagai macam mekanisme, bisa melalui desa, bisa melalui pokja tingkat kabupaten/kota, bisa juga langsung ke dinas. Bagaimana itu peran kabupaten/kota seni mengelola itu, bisa saja nanti ada yang namanya proses musyawarah perencanaan kegiatan di Kampung KB. Kita kan bisa, nanti mengumpulkan seluruh ketua-ketua pokja Kampung KB dengan membawa usulan kegiatan, nanti si dinas KB di kabupaten/kota ini menyalurkan melalui pokja itu, kan di pokja tingkat kabupaten/kota itu terdiri dari banyak dinas, semisal, ternyata di Kampung KB ini banyak yang belum punya KTP, kartu keluarga dan akte lahir, disampaikanlah informasi itu ke disdukcapil, nanti disdukcapil akan menggarap. Itu namanya peran koordinasi. Bisa juga dari ketua pokja bikin proporsal dengan mencantumkan data bahwa ternyata di Kampung KB A banyak pengidap narkoba, misalkan banyak pengguna narkoba buatlah proposal penyuluhan ke BNN, ke kepolisian itu bisa. Intinya kan konsep Kampung KB itu adalah konsep pemberdayaan, bagaimana kita pemerintah menjadi fasilitator masyarakat yang ada di wilayah sekitar itu untuk mau dan mampu merubah kondisi kehidupannya, menjadi masyarakat yang sejahtera. Karena kalau pemerintah saja yang berjuang, itu tidak mungkin, makanya konsepnya itu adalah konsep pemberdayaan, peningkatan kemandirian masyarakat.”

Lalu I<sub>2</sub> juga berpendapat mengenai bagaimana dukungan dari lintas sektor terhadap program kampung KB ini yaitu:

“Lintas sektor itu seharusnya dengan berbagai dinas. Sebenarnya kita terus terang baru beberapa dinas saja yang kerjasama, dengan dinas kesehatan melalui pelayanan, kita sudah terbiasa dengan dinas lingkungan hidup beberapa kali kita ajak menjadi narasumber, sudah 4 kecamatan, disdukcapil juga sudah, dan dengan KUA juga pengadilan agama.. Lintas sektor yang mengurusnya DP3AKB. Sebenarnya kita mengirim surat ke dinas tersebut, kita minta untuk pembinaan, kita ajak bareng. Intinya berbagai dinas melakukan tupoksi nya masing-masing.”  
 “Dari kampung KB nya bisa mengajukan lintas sektor, bisa mengajukan ke DP3AKB dulu. Kita sudah disepakati bahwa kampung KB itu harus beda dengan kampung KB yang lain, jangan cuma setelah pertemuan selesai pulang saja. Kita harus ada kemajuan, apa yang harus dimajukan, inovasi apa yang harus dilakukan. Kalau mereka punya inovasi sendiri, lakukan saja sendiri, tidak harus dari kita.”

Menurut I<sub>1</sub> dan I<sub>2</sub> dukungan dari lintas sektor terhadap program kampung KB sudah ada, namun memang tidak semua kampung KB memiliki koordinasi dengan lintas sektor. Mekanisme untuk lintas sektor bisa dari DP3AKB yang mengurus dan meminta langsung kepada dinas terkait, dan bisa pula oleh masyarakat atau pengurus kampung KB nya langsung kepada dinas terkait sesuai kebutuhan di kampung KB tersebut, atau bisa pula dari dinas terkait yang ingin ikut membangun kampung KB tersebut.

Lalu I<sub>3</sub> juga berpendapat mengenai bagaimana dukungan dari lintas sektor terhadap program kampung KB ini, yaitu:

“Kita dari DP3AKB langsung ke kita, ke penyuluh KB dan langsung ke Kampung KB. Kita lebih kepada pokja poktan pembinaannya. Tapi karena Kampung KB itu kan sebenarnya harus digarap oleh semua dinas, lintas sektoral itu, leading sektoralnya itu. Lintas sektornya semua SKPD, semua dinas harus turun untuk membangun Kampung KB. Entah itu dari SDM, pembangunan, dan lain-lain dan kegiatan. Jadi pertanian harus ditanyakan kepada UPT pertanian yang ada di Kecamatan Serang ini, sudah berbuat apa untuk Kampung KB, pak lurah sudah berbuat apa untuk Kampung KB.”

“Silahkan kalau mau mendetail tidak perlu ke LH, tidak perlu ke Pak Lurah, wawancaranya dengan Pak RW, Pak RW tau siapa saja yang sudah berbuat di Kampung KB, apa saja kegiatan yang sudah dilakukan di Kampung KB. Selain oleh DP3AKB, kalau seputaran DP3AKB kita tau, karena memang melalui kita. Tapi kalau lintas sektoral, simplenya langsung Pak RW, nanti Pak RW akan menjawab siapa saja yang sudah berbuat di Kampung KB. Karena harus melalui beliau setiap yang mau turun ke Kampung KB. di luar kegiatan pembinaan pokja poktan kita. Nanti silahkan ditanyakan ke Pak RW, dari lintas sektor mana saja, SKPD mana saja yang sudah berbuat ke Kampung KB.”

Lalu I<sub>4</sub> juga berpendapat mengenai bagaimana dukungan dari lintas sektor terhadap program kampung KB ini yaitu:

“Sudah ada kerjasama dengan lintas sektor. Itu sudah disosialisasikan. Itu sudah intruksi peraturan, bahkan Kampung KB ini kan sudah intruksi presiden nawacitanya, jadi otomatis itu sudah harus. Selain BKKBN, ada LH tempat sampah, pertanian tanaman, pendidikan, peternakan bantuan ikan tapi gamau terima masyarakatnya, karena warganya susah, gaada lahan disananya. Tanaman gaada lahan juga bingung nanemnya di sekitar situ aja.”

“Intinya Kampung KB itu leading sektornya kita, lintas sektornya SKPD yang lain. Masing-masing dinas itu punya tugas masing-masing, dinas kesehatan meningkatkan derajat kesehatan di Kampung KB, dinas pendidikan meningkatkan SDM nya, pendidikannya. Lingkungan hidup meningkatkan lingkungannya, penataan lingkungan, kebersihannya. Dinas KB kesertaan ber KB dan banyak (karena kita lintas sektor), disduk dari segi administrasinya. Jadi bahasanya karena lintas sektoral, jadi dinas SKPD punya peran masing-masing, punya tugas masing-masing untuk meningkatkan Kampung KB. Jadi yang harus diperkuat lintas sektornya, koordinasi dengan lintas sektor.”

Lalu I<sub>5</sub> juga berpendapat mengenai bagaimana dukungan dari lintas sektor terhadap program kampung KB ini yaitu:

"Kalau mau bekerja sama dengan lintas sektor, yang mengajukannya bisa dari bawah dari Kampung KB, misal kita ada data mikro Kampung KB, dari situ mereka seharusnya dari mereka yang merekap/mengumpulkan dari RW itu apa kekurangannya, jadi dari data mikro itu keliatan, dari warga kita banyak yang gaada KTP misalkan, sudah direkap dari 1 RW misal ada 100 KK, dari 100 KK ini berapa yang tidak ada KTP, berapa yang tidak ada KK, berapa yang tidak ada BPJS, dan berapa yang tidak ada buku nikah. Dari situ keliatan, bisa pengajuan kesini, ini ada data-datanya, dari kita di ajukan ke DP3AKB, nanti dinas DP3AKB mereka menghubungi dinas yang bersangkutan dengan kebutuhan-kebutuhan, misal kekurangan KTP atau KK mereka bisa ke disduk. Misal kekurangan warga yang buku nikahnya rusak atau dulu tidak punya, mereka menghubungkannya ke KUA, yang menghubungkan ke dinas masing-masing dari DP3AKB, kekurangan apa yang dibutuhkan dari Kampung KB. Kita sudah pernah ada pengajuan untuk kekurangan KK dengan KTP, tapi gimana DP3AKB, karena mereka dari dinas masih banyak kegiatan, jadi bagi-bagi. Untuk sementara di Kampung KB ini belum ada, kalau untuk yang masuk dari dinas, kekurangan disdukcapil belum ada, isbat nikah untuk kekurangan buku nikah ke KUA belum ada.”

Lalu I<sub>6</sub> juga berpendapat mengenai bagaimana dukungan dari lintas sektor terhadap program kampung KB ini yaitu:

“Koordinasi dengan lintas sektor, ada dinas terkait di Kota Serang, provinsi juga ada, DP3AKB. Lintas sektor sosialisasi, pembinaan. Jika kegiatan itu ada, lintas sektorlah lurah menjadi narasumber daripada dinas terkait ketika ada kegiatan di kelurahan otomatis ikut.”

Lalu I<sub>7</sub> juga berpendapat mengenai bagaimana dukungan dari lintas sektor terhadap program kampung KB ini yaitu:

“Lintas sektor perlu kesemua dinas seperti dinas kesehatan, dinas pendidikan. Karena di Kampung KB sarana dan prasarana belum memadai pendidikannya.”

Lalu I<sub>8</sub> juga berpendapat mengenai bagaimana dukungan dari lintas sektor terhadap program kampung KB ini yaitu:

“Ada lintas sektor, dari kampung KB belum pernah mengajukan ke lintas sektor, cuma DP3AKB aja, karena wadahnya disitu, jadi kita kesitu sebagai yang menyambungkan. Dari lintas sektor belum ada selain DP3AKB dan BKKBN, dari instansi yang lain belum.”

Menurut I<sub>3</sub>, I<sub>4</sub>, I<sub>5</sub>, I<sub>6</sub>, I<sub>7</sub>, dan I<sub>8</sub> dukungan dari lintas sektor terhadap program kampung KB di Kampung Kaliwadas pernah ada yang diajukan oleh DP3AKB Kota Serang dalam pembangunan kampung KB yaitu dinas kesehatan, dinas lingkungan hidup, KUA dan pengadilan agama. Setelah saya kelapangan lintas sektor yang telah masuk ke Kampung KB di Kaliwadas yaitu dinas lingkungan hidup yang pernah memberikan tempat sampah 3 jenis kepada Kampung Kaliwadas, juga memberikan pohon untuk di tanam di lingkungan Kampung Kaliwadas. Namun tempat sampah tersebut sudah lama rusak dan tidak terpakai, sehingga sekarang sudah tidak ada. Pohon yang diberikan oleh dinas lingkungan

hidup pun tidak ada lahan untuk menanamnya, jadi diberikan kepada UPT kecamatan/pos penyuluhan KB untuk ditanam diberbagai tempat. Sedangkan KUA atau pengadilan agama pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang kampung KB.

Dari indikator letak pengambilan keputusan ini, peneliti juga menilai aspek bagaimana proses penyusunan rencana kegiatan di kampung KB di Kampung Kaliwadas. Peneliti melakukan wawancara terkait dengan bagaimana proses penyusunan rencana kegiatan di kampung KB di Kampung Kaliwadas ini kepada I<sub>3</sub> yang mengatakan bahwa:

“Di Kampung KB seharusnya ada penyusunan rencana kegiatan, untuk sementara belum ada, dari semenjak dibentuk belum ada dari Kampung KB membuat rencana. Dan memang itu harusnya ada, tapi untuk sementara harusnya ada, paling nanti.”

Lalu I<sub>4</sub> juga berpendapat mengenai bagaimana proses penyusunan rencana kegiatan di kampung KB di Kampung Kaliwadas ini yaitu:

“Kita terbatas sama penyediaan sarana gedung, karena gaada rumah data juga, bukan gedung tapi tempat, minimal untuk penyimpanan administrasi. Kesekretariatan KKB/posko harusnya posko Kampung KB rumah data itu ada. Jadi begitu orang datang, data itu ada, cuma kita tidak ada, jadi untuk merencanakannya pun belum ada tempat.”

Lalu I<sub>5</sub> juga berpendapat mengenai bagaimana proses penyusunan rencana kegiatan di kampung KB di Kampung Kaliwadas ini yaitu:

“Kalau rencana kerja kita di pos penyuluhan KB sendiri ada, tapi untuk di kampung KB nya sendiri kita melihat belum ada gerakan untuk mereka menyusun kegiatan, karena mereka kegiatannya sejauh ini dari kita, jadi mereka belum ada inisiatif untuk membuat kegiatan, maka belum ada rencana kegiatan.”

Lalu I<sub>6</sub> juga berpendapat mengenai bagaimana proses penyusunan rencana kegiatan di kampung KB di Kampung Kaliwadas ini yaitu:

“Rencana kegiatan di kampung KB kami kurang tau, tapi saya taunya ada kegiatan di kampung KB, mereka pasti melakukan perencanaan terlebih dulu sebelum melakukan kegiatan.”

Lalu I<sub>7</sub> juga berpendapat mengenai bagaimana proses penyusunan rencana kegiatan di kampung KB di Kampung Kaliwadas ini yaitu:

“Rencana disana ada, suka kumpul buat ngobrol-ngobrol mau ngadain apa nanti kegiatannya, tapi hanya ngobrol-ngobrol aja.”

Lalu I<sub>8</sub> juga berpendapat mengenai bagaimana proses penyusunan rencana kegiatan di kampung KB di Kampung Kaliwadas ini yaitu:

“Rencana kegiatan, ada, kita pernah merencanakan ingin ada instansi terkait, turun untuk sosialisasi kependudukan, kesehatan, remaja, inginnya dinas terkait turun langsung.”

Menurut I<sub>3</sub>, I<sub>4</sub>, I<sub>5</sub>, I<sub>6</sub>, I<sub>7</sub>, dan I<sub>8</sub> proses penyusunan rencana kegiatan di kampung KB di Kampung Kaliwadas belum ada, karena keterbatasan sarana dan prasarana.

Dan memang sejauh ini belum ada kegiatan rutin yang dilakukan oleh pengurus kampung KB di Kampung Kaliwadas yang memerlukan perencanaan kegiatan.

Lalu I<sub>9,1</sub> juga berpendapat mengenai bagaimana proses penyusunan rencana kegiatan di kampung KB di Kampung Kaliwadas ini yaitu:

“Merencanakan kegiatan kalau untuk BKB ada khusus untuk BKB saja. Untuk pelaksanaan PAUD”

Lalu I<sub>9-2</sub> juga berpendapat mengenai bagaimana proses penyusunan rencana kegiatan di kampung KB di Kampung Kaliwadas ini yaitu:

“Kalau rencana kegiatan sih kita suka ada ketemu sama pihak yang mau ngadain sosialisasi, pasti kita diskusiin, tapi untuk BKL ya saya aja yang jalanin, jani tidak usah pakai rencana.”

Lalu I<sub>9-3</sub> juga berpendapat mengenai bagaimana proses penyusunan rencana kegiatan di kampung KB di Kampung Kaliwadas ini yaitu:

“Rencana kegiatan lain selain pengajian belum ada.”

Lalu I<sub>9-4</sub> juga berpendapat mengenai bagaimana proses penyusunan rencana kegiatan di kampung KB di Kampung Kaliwadas ini yaitu:

”Rencana kegiatan, kita nanti menjelang ramadhan pengen mengadakan acara “menyambut ramadhan”, “pawai ta’aruf menyambut bulan suci ramadhan”, yang mengadakan PIK-R, remaja-remaja”

Menurut I<sub>9-1</sub>, I<sub>9-2</sub>, I<sub>9-3</sub> dan I<sub>9-4</sub> proses penyusunan rencana kegiatan di kampung KB di Kampung Kaliwadas belum ada karena sebagian dari mereka tidak mengetahui harus adanya rencana kegiatan, dan pengurus Kampung KB Kaliwadas pun belum melakukan kegiatan rutin untuk kampung KB. Kurangnya

sarana dan prasarana pun menjadi penghambat tidak adanya perencanaan kegiatan oleh pengurus kampung KB.

Dari indikator letak pengambilan keputusan ini, peneliti juga menilai aspek bagaimana koordinasi yang dilakukan terhadap implementasi program kampung KB. Peneliti melakukan wawancara terkait dengan bagaimana koordinasi yang dilakukan terhadap implementasi program kampung KB ini kepada I<sub>1</sub> yang mengatakan bahwa:

“Kalau BKKBN kita berkoordinasi dengan DP3AKB dan pokja (kelompok kerja) kampung KB. Kalau untuk turun ke lapangan langsung kita menghubungi ke pokja kampung KB, tapi kalau untuk ke DP3AKB kita berkoordinasi dengan memfasilitasi ke DP3AKB, dan juga nanti DP3AKB yang membuat laporan ke kita tentang kampung KB termasuk pelayanan KB.”

Lalu I<sub>2</sub> juga berpendapat mengenai bagaimana koordinasi yang dilakukan terhadap implementasi program kampung KB di Kampung Kaliwadas ini yaitu:

“koordinasi yang kita lakukan adalah dari DP3AKB ke UPT kecamatan (pos penyuluhan KB), lalu UPT itu langsung ke kampung KB. Dari DP3AKB berkoordinasi dengan BKKBN dengan melaporkan laporan data kepada BKKBN. Laporan dari kampung KB lalu ke UPT, nanti UPT merekap, lalu dikasi ke DPA3KB, dari DP3AKB ke BKKBN”

Lalu I<sub>3</sub> juga berpendapat mengenai bagaimana koordinasi yang dilakukan terhadap implementasi program kampung KB di Kampung Kaliwadas ini yaitu:

“Kalau Kampung KB kan ada pokja BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R, itu tiap itu ada laporannya dari tiap koordinator. Pokja ini bikin laporan ke koordinator, dari koordinator ke kita dari kita ke dinas.”



Lalu I<sub>4</sub> juga berpendapat mengenai bagaimana koordinasi yang dilakukan terhadap implementasi program kampung KBdi Kampung Kaliwadas ini yaitu:

“Ketua pokja melaporkan perkembangan Kampung KB kepada ketua Kampung KB (Ketua RW) dari situ lapor ke balai penyuluh, dari balai penyuluh ke DP3KB (P3AKB/Balai penyuluh).”

Lalu I<sub>5</sub> juga berpendapat mengenai bagaimana koordinasi yang dilakukan terhadap implementasi program kampung KBdi Kampung Kaliwadas ini yaitu:

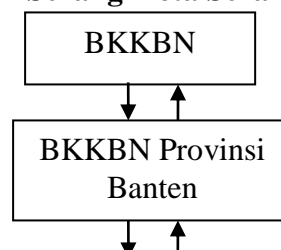
“Kalau kegiatan yang tiap bulan itu kebetulan yang membuat laporan dari DP3AKB, yang kegiatan Bu Imas jadi bukan kita. Jadi notulen, hasil notulen, atau hasil laporan itu yang membuat dari DP3AKB, karena mereka yang punya anggaran dan punya kegiatan. Lebih kepada pembuatan laporan hasil monitoring dan evaluasi Kampung KB setiap bulan.”

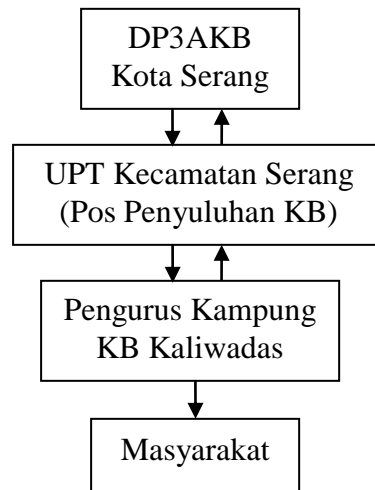
Lalu I<sub>8</sub> juga berpendapat mengenai bagaimana koordinasi yang dilakukan terhadap implementasi program kampung KBdi Kampung Kaliwadas ini yaitu:

“kita melakukan laporin ke Kecamatan, dari kecamatan nanti ke DP3AKB. Laporan ke UPT Kecamatan ke DP3AKB ke BKKBN.”

Berdasarkan hasil wawancara dan kenyataan dilapangan, peneliti menyimpulkan bahwa koordinasi yang dilakukan terhadap implementasi program kampung KBdi Kampung Kaliwadas ini sebagai berikut:

**Gambar 4.3**  
**Koordinasi Program Kampung KB di Kampung Kaliwadas Kelurahan**  
**Lopang Kecamatan Serang Kota Serang Provinsi Banten**





(Sumber: Diolah oleh peneliti)

Pada siklus diatas, dijelaskan bahwa dari BKKBN pusat koordinasi dilakukan kepada BKKBN Provinsi Banten, lalu ke DP3AKB Kota Serang, ke UPT Kecamatan Serang (Pos Penyuluhan KB), ke Pengurus Kampung KB Kaliwadas, dan kemasyarakat. Setelah itu koordinasi untuk laporan dibuat oleh pengurus Kampung KB Kaliwadas ke UPT Kecamatan Serang (Pos Penyuluhan KB), lalu dari UPT ke DP3AKB Kota Serang, lalu DP3AKB ke BKKBN Provinsi yang sudah terhubung dengan BKKBN pusat.

Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa narasumber terkait dengan indikator letak pengambilan keputusan dapat disimpulkan, letak pengambilan keputusan pada pelaksanaan program kampung KB berada di tangan BKKBN dan DP3AKB. Hasil wawancara peneliti menemukan bahwa BKKBN dan DP3AKB tidak melibatkan dan tidak mendiskusikan program kegiatan yang akan dilaksanakan pada kampung KB di Kampung Kaliwadas dengan pengurus kampung KB atau pengurus poktan (kelompok kegiatan) di Kampung KB Kaliwadas pada saat sebelum kegiatan dibuat. BKKBN dan DP3AKB hanya

melibatkan UPT Kecamatan Serang (Pos Penyuluhan KB), lalu oleh UPT Kecamatan Serang (Pos Penyuluhan KB) di koordinasikan dengan pengurus Kampung KB dan pengurus poktan (kelompok kegiatan) ketika kegiatan tersebut sudah ada dan dibuat.

### **5. Pelaksana Program**

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Dan, ini harus sudah terdata atau terpapar dengan baik pada bagian ini. Pada indikator ini, implementasi suatu program harus didukung dengan adanya pihak-pihak pelaksana program ini, peneliti menilai beberapa aspek yang terkandung di dalamnya mulai dari implementator dalam pelaksanaan program sampai dengan teknis yang dilakukan oleh pihak pelaksana program kampung KB. Peneliti melakukan wawancara terkait dengan bagaimana kinerja dinas terkait dalam melakukan pengawasan kampung KB kepada I<sub>1</sub> yang mengatakan bahwa:

”Kalau dikita itu rutin pertanggal 20 ada namanya rapat pengendalian program, jadi dalam rapat pengendalian program itu adalah media evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan.”

Lalu I<sub>2</sub> juga berpendapat mengenai bagaimana kinerja dinas terkait dalam melakukan pengawasan kampung KB ini yaitu:

“DP3AKB melakukan monitoring dan penggerakkan di kampung KB.”

Lalu I<sub>3</sub> juga berpendapat mengenai bagaimana kinerja dinas terkait dalam melakukan pengawasan kampung KB ini yaitu:

“Setiap DP3AKB melakukan pembinaan tiap bulan itu juga merangkap didalamnya evaluasi dan monitoring di pertemuan itu. Selain pembinaan juga dilakukan monev.”

Lalu I<sub>4</sub> juga berpendapat mengenai bagaimana kinerja dinas terkait dalam melakukan pengawasan kampung KB ini yaitu:

“Pernah ada BKKBN turun ke Kampung KB, dari bidang KB sosialisasi, dan penyuluhan KB, dan melihat pencapaian KB yang sudah ada di Kampung KB. Terakhir kali Desember.”

Lalu I<sub>5</sub> juga berpendapat mengenai bagaimana kinerja dinas terkait dalam melakukan pengawasan kampung KB ini yaitu:

“Di Kampung KB seharusnya ada monitoring dan evaluasi dari BKKBN sekalian monitoring biasanya, dari BKKBN pusat pun pernah ada, Cuma fokus ke rumah data.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan I<sub>1</sub>, I<sub>2</sub>, I<sub>3</sub>, I<sub>4</sub> dan I<sub>5</sub> bagaimana kinerja dinas terkait dalam melakukan pengawasan kampung KB, mereka melakukan evaluasi dan rencana kegiatan juga monitoring untuk kampung KB, setiap ada pembinaan ataupun sosialisasi baik melalui pengurus kampung KB maupun langsung ke masyarakat, BKKBN dan DP3AKB melakukan pengawasan untuk kedepannya dievaluasi.

Dari indikator pelaksana program kampung KB ini, peneliti juga menilai aspek bagaimana pelaksanaan pelayanan KB di kampung KB. Peneliti melakukan

wawancara terkait dengan bagaimana pelaksanaan pelayanan KB di kampung KB ini kepada I<sub>1</sub> yang mengatakan bahwa:

“Seharusnya terdapat bidan desa di tiap desa, kalau misalnya disatu desa itu tidak ada puskesmas, kalau sekarang sudah ada yang namanya puskesmas pembantu (pustu) nah itu pasti ada, walaupun semisal di kecamatan Cuma ada 1. Tapi di desa itu pasti ada postu, pasti ada bidan desa. Gamungkin engga, karena bidan desa itu 1 bidan 1 kalau sekarang.”

Lalu I<sub>2</sub> juga berpendapat mengenai bagaimana pelaksanaan pelayanan KB di kampung KB ini yaitu:

“Pelayanan KB kalau jadwal bidang KB kadang misal pelayanan KB warganya datang ditentukan ke puskesmas tertentu, ga sekali di mobil pelayanan datang ke kampung KB, ga khusus untuk kampung KB saja, untuk semua di puskesmas manapun yang disepakati.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan I<sub>1</sub> dan I<sub>2</sub> pelaksanaan pelayanan KB di kampung KB dengan adanya bidan desa yang dan pelayanan KB secara gratis baik melalui mobil pelayanan yang datang langsung ke lokasi, maupun diadakan di puskesmas terdekat. Hal tersebut bukan hanya diadakan di kampung KB, namun di semua desa.

Lalu I<sub>3</sub> juga berpendapat mengenai bagaimana pelaksanaan pelayanan KB di kampung KB ini yaitu:

“Disitu selain posyandu ada pemeriksaan umum juga biasa, bidan melakukan pelayanan KB suntik, pemeriksaan umum, biasanya bidan juga melakukan itu selain posyandu sebulan sekali, jadi bisa berobat masyarakat itu di bidan. Jadi tenaga medisnya lebih kepada di 5 meja posyandu.”

Lalu I<sub>4</sub> juga berpendapat mengenai bagaimana pelaksanaan pelayanan KB di kampung KB ini yaitu:

“Tenaga medis Kampung KB tidak ada bidan desa, tapi di posyandunya ada, posyandu setiap bulan ada bidannya. Pelayanan KB sebulan sekali, Cuma kalau kita kan dimintanya sebulan sekali, tapi tergantung dari DP3AKB nya. Ada jadwalnya dari DP3AKB, kalau memang bulan maret ini belum turun jadwalnya, itu kemaren memang sebulan sekali, dari mulai taun kemaren.”

Lalu I<sub>5</sub> juga berpendapat mengenai bagaimana pelaksanaan pelayanan KB di kampung KB ini yaitu:

“Puskesmas wilayah lopang paling dekat di unyur. Sementara wilayah lopang gabung dengan unyur, kalau wilayah lopang dianjurkan disitu. Petugas medis datang 1 bulan sekali waktu posyandu, dari puskesmas unyur bidannya. Jelas ada peningkatan pengguna KB. terutama MOP untuk pria jadi ada, lumayan kalau yang lain sih ada aja. Puskesmas keliling tidak pernah ada.”

Lalu I<sub>6</sub> juga berpendapat mengenai bagaimana pelaksanaan pelayanan KB di kampung KB ini yaitu:

“Kampung KB ketersediaan medis dari puskesmas terdekat. Dari dinas kesehatan sudah melekat dari kegiatan Kampung KB sendiri dan BKKBN. Pelayanan KB dari DP3AKB rutin, dari 2017 terpilih jadi Kampung KB, dasarnya karena banyaknya akseptor KB, rutin kalau kader dari peserta pelaksana Kampung KB itu sendiri mendapatkan akseptor KB baru bisa dilaksanakan. Akseptor KB meningkat.”

Lalu I<sub>7</sub> juga berpendapat mengenai bagaimana pelaksanaan pelayanan KB di kampung KB ini yaitu:

“Pelaksanaan program kampung KB di Kampung Kaliwadas itu cukup baik, ada pelayanan dari DP3AKB melalui mobil pelayanan yang datang ke kampung KB, ada juga penyediaan pelayanan KB di puskesmas terdekat.”

Lalu I<sub>8</sub> juga berpendapat mengenai bagaimana pelaksanaan pelayanan KB di kampung KB ini yaitu:

“Pelayanan KB, sesuai dari instruksi DP3AKB, misal bulan apa. Gantentu kapan pelayanan KB nya setaun sekali, atau setaun. Belum pernah mengajukan permintaan pelayanan KB warganya susah, kita mengajak KB masih pada menghindar saja.”

Lalu I<sub>10-1</sub> juga berpendapat bagaimana pelaksanaan pelayanan KB di kampung KB ini yaitu:

“Ada penyuluhan KB dari kota, dari provinsi pernah juga. Tadinya banyaknya suntik. Seharusnya IUD dan Implan, sedangkan kadernya sendiri suntik, jadi sekarang dianjurkan, kadernya juga harus memilih diantara 1, IUD atau Implan. Warga banyak yang KB. Kalau sekarang ibunya sibuk, jadi kalau ada pelayanan atau kegiatan di kampung KB Ibu sudah beberapa kali ga hadir.”

Pelaksanaan pelayanan KB di kampung KB Kaliwadas dengan adanya pelayanan KB baik melalui pelayanan di mobil pelayanan yang datang langsung ke kampung KB, maupun terdapat di puskesmas yang memang ditunjuk untuk melayani akseptor dari kampung KB. Untuk Kampung Kaliwadas, puskesmas yang menjadi tempat pelayanan yaitu puskesmas Unyur, karena di Kelurahan Lopang belum ada puskesmas, jadi pelayanan untuk Kampung KB Kaliwadas ada di puskesmas Unyur.

**Gambar 4.4**  
**Mobil Pelayanan KB yang Disediakan Saat Acara Sosialisasi dan Pelayanan Keluarga Berencana di Kampung KB Kaliwadas**



(Sumber: Dokumentasi Peneliti)

Saat acara sosialisasi dan pelayanan keluarga berencana di Kampung KB Kaliwadas, mobil pelayanan KB tersebut digunakan untuk pemasangan IUD, sedangkan pemasangan implan berada di salah satu rumah warga. Pelayanan KB langsung di Kampung KB Kaliwadas dan adanya mobil pelayanan ini baru pertama kali di Kampung Kaliwadas.

Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa narasumber terkait dengan indikator pelaksana program dalam implementasi program kampung KB dapat disimpulkan, pelaksana program dalam implementasi program kampung KB di Kampung Kaliwadas sebenarnya hanya terdapat 2 pihak pelaksana program yaitu BKKBN dan DP3AKB. Namun terdapat pelaksana program lain yang berperan penting karna yang mengkoordinasikan antara pihak BKKBN dan DP3AKB kepada pengurus kampung KB atau masyarakat Kampung KB Kaliwadas yaitu Pos Penyuluhan KB Kecamatan Serang. Sehingga dalam pengimplementasian program kampung KB ini terdapat 3 pelaksana program yang mendukung jalannya program tersebut yaitu BKKBN, DP3AKB, dan Pos Penyuluhan KB.

## **6. Sumberdaya yang Digunakan**



Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumberdaya-sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik. Didalam indikator ini berkaitan dengan sumber daya yang digunakan yang tentunya dapat mempengaruhi implementasi suatu kebijakan atau program. Dari indikator sumberdaya yang digunakan ini, peneliti menilai beberapa aspek yang terkandung didalamnya mulai dari sumber daya manusia sebagai fasilitator, sumber daya finansial, sampai dengan sumber daya waktu yang digunakan untuk mendukung program kampung KB tersebut. Peneliti melakukan wawancara terkait dengan sumber daya yang digunakan bagaimana sarana dan prasarana yang ada dalam menunjang program kampung KB ini kepada I<sub>1</sub> yang mengatakan bahwa:

“Fasilitas yang harus dimiliki di Kampung KB itu, kalau secara organisasi, kriteria keberhasilan Kampung KB itu bisa diukur, ada panduan monevnya. 1) Punya struktur organisasi (dipandu monev), 2) Punya bidan desa yang bersertifikat CTU, 3) Punya rencana kerja. Hal-hal yang memang harus ada ketika kita mau mengukur keberhasilan Kampung KB, kalau belum ada syarat-syarat itu berarti belum dikatakan berhasil.”

“Kalau fasilitas tiap poktan, di poktan juga punya pengurus, semisal BKB, punya ketua BKB nya siapa, sekretarisnya siapa, itu punya, ada, jadi, tapi bisa dikerjakan oleh orang yang sama, tapi dengan struktur yang berbeda, intinya harus punya struktur yang berbeda karena poktan itu adalah bagian dari pokja Kampung KB tadi.”

“Rumah data dan kesekretariatan KKB, kesekretariatan KKB, rumah data itu salah satu kegiatan yang ada di program KKBPK. Nah, di Kampung KB itu ada namanya rumah dataku, jadi rumah yang memang menjadi rujukan bagi setiap orang untuk mencari data tentang program atau tentang masyarakat yang ada di wilayah sekitar, disitu harusnya ada. Itu adanya di bidang pengendalian penduduk, bidang pengendalian penduduk selain rumah data ada pojok data, pojok kependudukan, ada juga sekolah kependudukan.”

Lalu I<sub>2</sub> juga berpendapat mengenai bagaimana sarana dan prasarana yang ada dalam menunjang program kampung KB ini yaitu:

“Sarana dan prasarana yang menunjang kampung KB sementara ini kita terus terang dari APBD belum punya, paling kita melalui dari dana DAK fisik yang sudah kita lakukan. Atau ada dari penyisihan-penyisihan kegiatan-kegiatan kita, yang bisa disisihkan untuk beli misalkan buku administrasi, papan-papan data itu sebagian sudah ada yang inti-inti saja, kalau yang lain-lain belum.”

“Kalau rumah data dan kesekretariatan KKB itu wacana kedepan di 2019 ini, kita punya PR harus mencanangkan rumah data, sebenarnya sudah kita sosialisasikan ke semua kampung KB, dan untuk sementara karena rumah data itu harus, dibulan maret 2019, kita baru mengajukan rumah data. Itu di pos KB yang ada di wilayah situ, kita pinjam sementara sebagai rumah data. Nanti disimpan data-data sementara di rumah yang mau disimpan data-data saja.”

Berdasarkan penjelasan I<sub>1</sub> sarana dan prasarana yang ada dalam menunjang program kampung KB secara keorganisasian yaitu 1) Punya struktur organisasi (dipanduan money), 2) Punya bidan desa yang bersertifikat CTU, 3) Punya rencana kerja, selain itu kampung KB juga perlu rumah data dan kesekretariatan KKB. Sedangkan menurut I<sub>2</sub> menjelaskan bahwa selamaini belum memenuhi sarana dan prasarana karena tidak ada dana dari APBD, hanya ada dana DAK (Dana Alokasi Khusus), namun untuk fasilitas seperti buku administrasi dan papan-papan data kami menyisihkan uang dari kegiatan untuk membeli itu, itu sebagian sudah ada yang inti-inti saja, kalau yang lain-lain belum ada.

Lalu I<sub>3</sub> juga berpendapat mengenai bagaimana sarana dan prasarana yang ada dalam menunjang program kampung KB ini yaitu:

“Belum punya rumah data. Data ada, tapi tidak ada/ belum ada tempat. 1) Karena tidak ada anggaran untuk penyewaan rumah, 2) Rumah data itu sebenarnya harus dari masyarakat, swasembada masyarakat. Jadi dari pemerintah tidak ada anggaran untuk itu. Seharusnya kita memfasilitasi, entah itu dalam bentuk fisik dibangun atau disewakan. Karena keterbatasan APBD untuk di Kota Serang, keterbatasan anggaran dari APBD, sehingga dari DP3AKB tidak bisa

memfasilitasi gedung/rumah. Jadi untuk sementara rumah data itu dikembalikan kepada masyarakat. Tinggal masyarakat mau dimana.”

Lalu I<sub>4</sub> juga berpendapat mengenai bagaimana sarana dan prasarana yang ada dalam menunjang program kampung KB ini yaitu:

“Sebetulnya diharuskan, tapi belum dibikin. Belum ada rumah yang *perfect* yang mau dibikin rumah data, tapi datanya ada. Semua fasilitas dari DP3AKB, bidan-bidannya dari terdekat aja, dari unyur, karena kampung KB masuk puskesmas unyur. Jadi ngambil bidannya dari puskesmas unyur.”

Lalu I<sub>5</sub> juga berpendapat mengenai bagaimana sarana dan prasarana yang ada dalam menunjang program kampung KB ini yaitu:

“Dari DP3AKB ada/memfasilitasi rumah atau ada anggaran untuk rumah atau apa, itu tidak ada. Jadi untuk sementara, memang harusnya difasilitasi oleh pemerintah, tapi karena belum ada, kita kembalikan ke masyarakat, mudah-mudahan masyarakat ada yang bisa memberikan swadaya untuk rumah data sehingga semuanya tersaji data di tempat itu.”

“Terus dengan adanya rumah data kan di Kampung KB itu kan rumah data keinginannya sih, dengan adanya rumah data itu kita ingin data-data, data apapun yang diinginkan oleh masyarakat, dan bukan hanya di lingkungan tersebut, tetapi dari segi kelurahan data itu tersedia di Kampung KB dengan adanya rumah data.”

Lalu I<sub>6</sub> juga berpendapat mengenai bagaimana sarana dan prasarana yang ada dalam menunjang program kampung KB ini yaitu:

“Fasilitas yang diperlukan belum memenuhi, belum ada rumah data dan sekretariat KKB, jadi sifatnya data itu masih di rumah yang belum dikhususkan, datanya ada tapi belum dianggap rumah data. Sarana dan prasarana seharusnya ditunjang dari SKPD terkait.”

Lalu I<sub>7</sub> juga berpendapat mengenai bagaimana sarana dan prasarana yang ada dalam menunjang program kampung KB ini yaitu:

“Sarana dan prasarana tempat belum ada, jadinya belum maksimal, seharusnya rumah data sudah ada, tapi karena lahannya belum ada jadi belum bisa buat rumah data. Jadi kendala karena kadang kita mau menjalankan kegiatan itu dengan tempat, tapi rumah data saja belum ada lahan. Masih banyak sih kita yang harus dibenahi di Kampung KB itu. Harapannya perlu di tingkatkan lagi kegiatan ini, pengennya ada tempat-tempat yang layak buat kegiatan Kampung KB. karena selaman ini belum ada tempat-tempat yang sekiranya nyaman. Karena selama ini kita tempat masih di rumah kader, itu pun tempatnya kurang enak kalau buat kegiatan.”

Lalu I<sub>8</sub> juga berpendapat mengenai bagaimana sarana dan prasarana yang ada dalam menunjang program kampung KB ini yaitu:

“Sarana dan prasarana kampung KB ada bantuan laptop dan infokus dari DP3AKB.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan I<sub>3</sub> sarana dan prasarana yang ada dalam menunjang program kampung KB belum ada seperti rumah data dan kesekretariatan KKB karena tidak ada anggaran untuk penyewaan rumah juga rumah data sebenarnya harus dari masyarakat atau swasembada masyarakat. Menurut I<sub>3</sub>, I<sub>4</sub>, I<sub>5</sub>, I<sub>6</sub>, dan I<sub>7</sub> pun sarana dan prasarana yang ada dalam menunjang program kampung KB belum memasai, belum adanya rumah data dan kesekretariatan KKB, hal tersebut karena tidak adanya dana khusus untuk tempat, dan juga untuk swasembada masyarakat belum ada yang berinisiatif untuk membuat rumah data dan kesekretariatan KKB. Sedangkan menurut I<sub>8</sub> sarana dan prasarana kampung KB ada bantuan laptop dan infokus dari DP3AKB, tetapi ketika peneliti menanyakan keberadaan laptop dan infokus tersebut, I<sub>8</sub> berkata ada di pengurus kampung KB yang lain.

Lalu I<sub>9-1</sub> juga berpendapat mengenai bagaimana sarana dan prasarana yang ada dalam menunjang program kampung KB ini yaitu:

“Sarana dan prasarana di BKB kurang, untuk penyuluhan dari kartu KKA, kalau untuk penyuluhan di posyandu dari KKA, dari lahir sampai perkembangan perbulan. Dulu dikasih ke ibu-ibu, setiap datang harus dibawa, terus banyak yang hilang, jadi disimpan di saya. Bangunan PAUD sekarang pakai rumah kontrakan orang tua, rumah kosong, daripada tidak dipakai, sebenarnya kalau ada yang mau memberikn dana untuk membangun, saya punya tanah kosong, tapi karena tidak ada dana jadi saya mundur, jadi berdiri sendiri saja. Sarana dan prasarana sampai saat ini hanya BKB KIT.”

“Anak-anak dan ibu-ibu nya ingin ada bangku dan meja untuk menulis dan sarana permainan, mengeluh ingin ada itu. Mainan juga dibutuhkan, karena saya hanya diberi untuk mainan itu sekali saja, dikasih dari BKKBN yaitu BKB KIT, waktu awal mendirikan PAUD. Pernah ada dari DP3AKB Ibu Yani memberikan papan tulis, spidol, buku 1 pak, penggaris 1, pulpen 1, dan tip-x 1 untuk PAUD secara sukarela pakai uang pribadi karena kasihan. Murid bawa meja sendiri-sendiri, yang tidak punya tidak pakai meja.”

**Gambar 4.5**  
**Kartu KKA**



(Sumber: Dokumentasi Peneliti)

Kartu KKA adalah kartu yang digunakan untuk melihat tumbuh kembang anak, kartu KKA ini digunakan pada saat posyandu, posyandu berintegrasi dengan bkb.

Lalu I<sub>9-2</sub> juga berpendapat mengenai bagaimana sarana dan prasarana yang ada dalam menunjang program kampung KB ini yaitu:

“BKR banyak sarana dan prasarana yang diperlukan, berharap tempat dan alat bantu yang lain misal buku pintarnya, kan belum ada. Kita belum ada sumber materinya kan dari mana.”

Lalu I<sub>9.3</sub> juga berpendapat mengenai bagaimana sarana dan prasarana yang ada dalam menunjang program kampung KB ini yaitu:

“BKL belum ada buku panduan itu untuk sumbernya, misalnya buat narasumber dari kita kan, kalau narasumbernya dari sana takut gabisa, jadi kita bisa sendiri.”

Lalu I<sub>9.4</sub> juga berpendapat mengenai bagaimana sarana dan prasarana yang ada dalam menunjang program kampung KB ini yaitu:

“Sarana dan prasarana, laptop dan infokus untuk PIK-R, untuk kegiatan majlis. Ada sarana dan prasarana laptop, tapi laptopnya gaada, gaada di kita, saya tidak tau dipegang sama kelurahan, katanya kalau dipake disini takut rusak, tapi kalau mau dipake ambil aja. Biasanya infokus digunakan untuk penyuluhan. Biasanya tempatnya di masjid, sekarang karena masjidnya dibongkar jadi dikobong di atas. Laptop dan infokus dikasih dari DP3AKB.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan I<sub>9.1</sub> sarana dan prasarana yang ada dalam menunjang program kampung KB Kaliwadas BKB pernah ada dari DP3AKB Ibu Yani memberikan papan tulis, spidol, buku 1 pak, penggaris 1, pulpen 1, dan tip-x 1 untuk PAUD namun secara sukarela pakai uang pribadi, sedangkan saat pembentukan ada BKB kit dan KKA. Menurut I<sub>9.2</sub> sarana dan prasarana yang ada dalam menunjang program kampung KB Kaliwadas BKR banyak sarana dan prasarana yang diperlukan, berharap tempat dan alat bantu misal buku pintar, karena BKR belum ada sumber materinya untuk sosialisasi, namun berdasarkan penelitian, ketua BKR sudah pernah mendapatkan pembinaan untuk BKR dari

DP3AKB. Untuk I<sub>9.3</sub> belum ada sarana dan prasarana dalam menunjang program kampung KB Kaliwadas paktan BKL, ketua BKL berharap terdapat buku panduan untuk BKL. Sedangkan menurut I<sub>9.4</sub> sarana dan prasarana yang ada dalam menunjang program kampung KB Kaliwadas untuk PIK-R ada laptop dan infokus, namun ketua PIK-R menjelaskan laptop dan infokus disimpan oleh kelurahan, sedangkan hasil observasi peneliti laptop dan infokus yang dimiliki kampung KB tidak ada di kelurahan.

**Gambar 4.6**  
**Kobong tempat mengaji sekaligus tempat PIK-R**



(Sumber: Dokumentasi Peneliti)

Kobong tempat mengaji remaja dan yang dijadikan tempat PIK-R oleh pengurus Kampung KB Kaliwadas, kegiatannya mengaji setiap hari dan juga untuk laki-laki menginap di kobong tersebut.

Lalu I<sub>10.1</sub> juga berpendapat mengenai bagaimana sarana dan prasarana yang ada dalam menunjang program kampung KB ini yaitu:

“Kalau saya lihatnya sih kalo tempat buat posyandu itu kurang layak, itu rumah warga, rumahnya Ibu Siti tapi dipake penimbangan balita, ibu hamil yang datang. Kalo KB sih saya ikut yg kemarin ada mobil pelayanan KB datang, baru pertama kali ada, jadi kita gausah jauh-jauh mau pasang implan atau IUD, gratis juga.”

Lalu I<sub>10.2</sub> juga berpendapat mengenai bagaimana sarana dan prasarana yang ada dalam menunjang program kampung KB ini yaitu:

“Saya punya remaja, tapi saya gatau ada BKR dan PIK-R, saya taunya ada pelayanan KB buat ibu-ibu, pernah waktu itu ada kumpul di masjid buat sosialisasi KB, kalau untuk remaja anak saya juga ga ikut apa-apa. Tau saya ada kobong di RT sebrang, tapi itu buat cowo aja, terus ngaji aja kegiatannya, ga pernah ada kegiatan buat remaja-remaja gitu.”

Lalu I<sub>10-3</sub> juga berpendapat mengenai bagaimana sarana dan prasarana yang ada dalam menunjang program kampung KB ini yaitu:

“Saya gatau, kalau untuk saya lansia pernah senam di rumah Bu Siti, itu katanya BKL, tapi pernah sekali aja gitu gaada lagi.”

Lalu I<sub>10-4</sub> juga berpendapat mengenai bagaimana sarana dan prasarana yang ada dalam menunjang program kampung KB ini yaitu:

“Kalau sarana dan prasarana belum siap semua, belum ada rumah data, kalo ada kegiatan apapun masih di rumah Ibu Siti. Kalau ada kumpul sosialisasi kan harus punya tiker dan lain-lain, ini kadang tidak ada tiker masih kurang kalau kata saya, ga keliatan kampung KB itu apa, cuma ada tulisan aja di depan gang, saya ikutan UPPKS, tapi UPPKS itu di Ibu Raminah, bukan di kampung KB sini.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan I<sub>10-1</sub>, I<sub>10-2</sub>, I<sub>10-3</sub> dan I<sub>10-4</sub> masyarakat juga berpendapat mengenai bagaimana sarana dan prasarana yang ada dalam menunjang program kampung KB, selama ini masyarakat posyandu di rumah Ibu Siti, lalu belum ada sarana dan prasarana yang berbentuk bangunan.

**Gambar 4.7**  
**Timbangan Bayi untuk Posyandu dan Timbangan untuk Lansia**





(Sumber: Dokumentasi peneliti)

Di Kampung KB Kaliwadas sarana dan prasarana yang jelas terlihat adalah timbangan bayi dan timbangan biasa, timbangan bayi digunakan untuk menimbang bayi saat posyandu, timbangan biasa digunakan untuk lansia yang ingin menimbang maupun ibu hamil dan masyarakat lain. Kedua timbangan ini berada di posko kampung KB sekaligus tempat posyandu yaitu rumah Ibu Siti.

Dari indikator sumberdaya yang digunakan kampung KB ini, peneliti juga menilai aspek bagaimana bagaimana dana dan anggaran dalam menunjang program kampung KB. Peneliti melakukan wawancara terkait dengan bagaimana dana dan anggaran dalam menunjang program kampung KB ini kepada I<sub>1</sub> yang mengatakan bahwa:

“Dana khusus untuk Kampung KB, jadi BKKBN itu menyalurkan anggaran melalui DAK BOKB di kabupaten/kota (dana alokasi khusus), itu kurang lebih untuk daerah DTPK itu 105 juta pertahun, non DTPK itu 100 juta pertahun (daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan terluar).”

Lalu I<sub>2</sub> juga berpendapat mengenai bagaimana dana dan anggaran dalam menunjang program kampung KB ini yaitu:

“Kalau dana kita adanya dari DAK, sebenarnya kalau khusus untuk uang kas kampung KB itu tidak ada, cuma intinya inisiatif ibu sendiri dengan kesepakatan ketua kampung KB. Kan peserta yang hadir di acara yang kita laksanakan itu ada yang transport Rp50.000, itu kita sepakati agar kampung KB punya uang kas, Rp50.000 itu disisihkan setengah. Jadi Rp30.000 untuk yang hadir, Rp20.000 disimpan, jadi kalau dari kita, dari Rp20.000 dikali yang hadir ada beberapa orang per pertemuan, itu disimpan ke bendahara. April kita belum ada dana lagi, jadi kita belum kegiatan ke kampung KB, dana hanya dari DAK (dana alokasi khusus), kalau APBD belum ada. Dana alokasi khusus dari pusat, dari BKKBN pusat.”

Berdasarkan I<sub>1</sub> dan I<sub>2</sub> program kampung KB didanai oleh DAK BOKB di kabupaten/kota (dana alokasi khusus), itu kurang lebih untuk daerah DTPK itu 105 juta pertahun, non DTPK itu 100 juta pertahun (daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan terluar). Menurut I<sub>2</sub> juga berpendapat mengenai bagaimana dana dan anggaran dalam menunjang program di kampung KB nya adalah dengan cara peserta/pengurus kampung KB yang hadir di acara/pembinaan yang DP3AKB laksanakan diberikan transport Rp50.000, itu kita sepakati agar kampung KB punya uang kas, Rp50.000 itu disisihkan setengah. Jadi Rp30.000 untuk yang hadir, Rp20.000 disimpan, jadi kalau dari DP3AKB, dari Rp20.000 dikali yang hadir ada beberapa orang per pertemuan, itu disimpan ke bendahara.

Lalu I<sub>3</sub> juga berpendapat mengenai bagaimana dana dan anggaran dalam menunjang program kampung KB ini yaitu:

“Untuk kegiatan dan pembinaan ada dari DP3AKB dan dari kas pengelola di Kampung KB. Jadi setiap DP3AKB melakukan pembinaan, itu ada uang transport untuk pengelola, itu disisihkan, tidak semua diterima oleh peserta pembinaan, jadi disisihkan sebagian untuk kas. Kas itu digunakan untuk kegiatan Kampung KB.”

“Dana membuat PAUD, pihak Balai Penyuluhan KB Kecamatan Serang tidak tahu menau. Dinas kami membantu dari BKB nya saja, jadi mereka hanya menamakan saja PAUD Kendedes, jadi diabaikan saja PAUD nya, kita tidak

berkesinambungan dengan PAUD itu, karena tidak ada SK nya. Seharusnya SK nya terpisah, ini SK nya Cuma 1 yaitu SK BKB.”

Lalu I<sub>4</sub> juga berpendapat mengenai bagaimana dana dan anggaran dalam menunjang program kampung KB ini yaitu:

“Anggaran untuk kegiatan KB ada dari DP3AKB, kalau untuk kampung KB itu tidak ada dana untuk sarana dan prasarana, adanya dana untuk pembinaan pokja, uang transport yang nanti setengah-setengah uangnya di sisihkan kepada bendahara kampung KB untuk disimpan untuk keperluan kampung KB.”

Lalu I<sub>5</sub> juga berpendapat mengenai bagaimana dana dan anggaran dalam menunjang program kampung KB ini yaitu:

“Sebenarnya untuk dana bisa mendapat bantuannya dari mana saja, sebenarnya sih memang jujur lurah-lurah tuh kurang mendukung, jadi melihat ada kegiatan, ada program, saya yang repot. Padahal kalau bisa melihat, dengan adanya Kampung KB kan dia bisa butuh apa di Kampung situ, kalau butuh sesuatu bisa ke dinas, linsek semuanya masuk.”

Lalu I<sub>6</sub> juga berpendapat mengenai bagaimana dana dan anggaran dalam menunjang program kampung KB ini yaitu:

“Itu memang kita terkendala dana. Dari APBDes tidak ada, kalau lingkungan kelurahan mungkin menjadi pelaksana dari kegiatan saja, kalau yang punya program dari SKPD terkait, anggarannya dari dinas terkait itu.”

Lalu I<sub>7</sub> juga berpendapat mengenai bagaimana dana dan anggaran dalam menunjang program kampung KB ini yaitu:

“itu kita memang terkendala di dana, tidak ada dana khusus untuk kampung KB.”

Lalu I<sub>8</sub> juga berpendapat mengenai bagaimana dana dan anggaran dalam menunjang program kampung KB ini yaitu:

“Ada bantuan dari DP3AKB perbulan Rp100.000 kalau sudah melaporkan laporan bulanan, dari DP3AKB saja, belum ada yang lainnya. Kalau dari kelurahan mensupport saja, mendukung saja.”

Bedasarkan hasil wawancara dengan I<sub>3</sub>, I<sub>4</sub>, I<sub>5</sub>, I<sub>6</sub>, I<sub>7</sub> dan I<sub>8</sub> juga berpendapat mengenai bagaimana dana dan anggaran dalam menunjang program kampung KB yaitu tidak adanya dana yang memang khusus untuk kampung KB, dari penelitian saya DAK (Dana Alokasi Khusus) yang diberikan oleh BKKBN pun bukan khusus untuk kampung KB, melainkan keseluruhan daerah untuk pelayanan KB secara keseluruhan.

Lalu I<sub>9-1</sub> juga berpendapat mengenai bagaimana dana dan anggaran dalam menunjang program kampung KB ini yaitu:

“Saya kasihan kepada yang mengajar, jadi pertama-tama PAUD itu ada sumbangan seikhlasnya, paling dapat Rp11.000 dibagi untuk 2 orang, jadi saya inisiatif bikin kartu bayar minimal Rp2000 setiap pertemuan, jadi kalau ga ke sekolah ga bayar, kalau masuk sekolah saja bayarnya. Guru orang sini, dia sukarela, yang 1 sarjana guru TK, yang satu lulusan SMA, dua-duanya mengajar di TK lain juga. Belum lama ini bayarannya dinaikin jadi Rp3000 perpertemuan, makin berkurang yang datang.”

Lalu I<sub>9-2</sub> juga berpendapat mengenai bagaimana dana dan anggaran dalam menunjang program kampung KB ini yaitu:

“Dapet reward 6 bulan sekali, sebulan 100.000 dana kampung KB 100.000. Pada kenyataannya, kalau kita mau ambil reward harus punya akseptor, kalo gabawa akseptor paling dipanding sisanya, nanti keluar lagi kalo kita bawa akseptor lagi. Tetep kita harus punya akseptor dulu, kalo gaada, bisa-bisa di panding.”

Lalu I<sub>9-3</sub> juga berpendapat mengenai bagaimana dana dan anggaran dalam menunjang program kampung KB ini yaitu:

“Setiap ada pembinaan, kan ada uang transport 50rb. 30.000 buat kita yang dateng. Yang 20rb dikasih ke bendahara. Jadi kalo ada kegiatan apapun, seperti fotocopy ke Bu RW. Waktu itu ada anggota 20 yang ikut, ada 2x jadi udah 800.000 ke Bu RW. Nanti untuk kegiatan disini.”

Lalu I<sub>9-4</sub> juga berpendapat mengenai bagaimana dana dan anggaran dalam menunjang program kampung KB ini yaitu:

“Dari kelurahan, dari Pak Lurah nya sendiri sering ngasi ke saya kalau ketemu, dari rumahnya langsung pribadi. Ada uang kas dari anak-anak setiap malam rabu nabung, Rp3000 masing-masing/per orang, uangnya ada di bendahara.”

“Belum ada dari DP3AKB secara uang untuk PIK-R. Kecuali kalau kita ikut penyuluhan undangan dari sana paling dikasih transport. Yang ikut penyuluhan kadang saya, kadang 2 orang, kadang 5 orang dari anak-anak PIK-R.”

Bedasarkan hasil wawancara dengan I<sub>9-1</sub>, I<sub>9-2</sub>, I<sub>9-3</sub> dan I<sub>9-4</sub> dana dan anggaran dalam menunjang program kampung KB terdapat pada uang yang dikumpulkan secara sukarela, seperti pada BKB PAUD dan PIK-R setiap pertemuan mengaji. Dana dan anggaran dalam menunjang program di kampung KB nya adalah dengan cara peserta/pengurus kampung KB yang hadir di acara/pembinaan yang DP3AKB laksanakan diberikan transport Rp50.000, itu kita sepakati agar kampung KB punya uang kas, Rp50.000 itu disisihkan setengah. Jadi Rp30.000 untuk yang

hadir, Rp20.000 disimpan, jadi kalau dari DP3AKB, dari Rp20.000 dikali yang hadi ada beberapa orang per pertemuan, itu disimpan ke bendahara. Untuk reward 6 bulan sekali, sebulan Rp100.000 dan kalau mau mengambil reward harus punya akseptor, peneliti telah mengkonfirmasi kepada pihak DP3AKB hal tersebut tidak ada.

Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa narasumber terkait dengan indikator sumber daya yang digunakan dalam program kampung KB dapat disimpulkan, sumber daya yang digunakan dalam program kampung KB yaitu Sarana dan prasarana juga dana untuk Kampung KB Kaliwadas belum semuanya maksimal dikerahkan. Adapun terkait dengan sumber daya dari pihak dinas juga belum memadai dan belum terjalin kerjasama dari sisi pelaksanaan, akan tetapi dari segi sumber daya finansial dalam program ini diperoleh dari pihak BKKBN dan DP3AKB selaku pelaksana program kampung KB yang diberikan DAK (dana alokasi khusus). Hal ini didukung dari pernyataan pengurus kampung KB yang menyebutkan bahwa sarana dan prasarana belum mencukupi atau sesuai.

#### **4.3.2 Context of Policy**

Di dalam *context of policy* terdapat tiga dimensi yang akan dijalankan indikator sejauh mana implementasi kebijakan atau program dapat berjalan. Indikator tersebut sebagai berikut.

##### **1. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi aktor yang terlibat**

Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna

memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang, sangat besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh arang dari api.

Pada indikator ini menjelaskan mengenai kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi yang digunakan para aktor yang terlibat untuk mendukung pelaksanaan suatu kebijakan atau program. Dari indikator kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat, peneliti menilai beberapa aspek yang terkandung didalamnya mulai pengaruh kekuasaan, kepentingan sampai dengan strategi yang digunakan untuk mendukung program kampung KB tersebut.

Peneliti melakukan wawancara terkait dengan apakah ada pembinaan bagi pengurus kampung KB guna meningkatkan kualitas sumberdaya manusia kepada I<sub>1</sub> yang mengatakan bahwa:

“Untuk poktan ada pembinaan, karena Kampung KB itu adalah lokasi penggarapan bersama program pemerintah, jadi siapapun boleh menggarap, boleh, semisal perkim, dia berhubungan dengan sarana dan prasarana, berarti dia melakukan pembinaan atau penggarapan Kampung KB itu dari sisi sarana parasarana lingkungannya gitu, jalan, sanitasi, SAB (Sarana Air Bersih) dan yang lain-lain, BKKBN iya, DP3AKB iya, BKKBN pembinaa keorganisasiannya atau kelembagaannya saya, kemudian pembinaan program KKBPK nya oleh BKKBN, DP3AKB bisa dalam program KB nya, bisa PP nya, DP3A, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dia bisa nanti penggarapannya adalah pembinaan tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan lain-lain. Jadi cakupannya luas. Jadi siapapun pihak manapun bisa ikut serta dalam hal pembinaan dan penggarapan Kampung KB. Dan itu memang yang diharapkan, karena salah satu kunci keberhasilan Kampung KB itu adalah ada penggarapan secara lintas sektor, baik pemerintahan maupun swasta, nanti tanggal 24 salah satunya kami akan mengundang sektor swasta dan BUMN, jadi nanti sektor swasta, BUMN, dan pemerintah akan kita kumpulkan, kita akan gali potensi-potensi kemitraan itu.”

“Pembinaan itu bisa langsung ke masyarakat, seharusnya pengurusnya menyampaikan lagi ke masyarakat, seharusnya membuat rencana kegiatan khusus di daerah Kampung KB nya.”

“Mekanisme pembinaan itu dilakukan dari beberapa pola, jenis pola pembinaan, pola pertama bisa langsung dari lembaga pembina kepada pengurus maupun kepada masyarakat, itu bisa pola pertama, pola kedua bisa dilakukan berjenjang dari lembaga pembina kepada pokja, lalu pokja kemudian membuat rencana untuk menindaklanjuti hasil pembinaan tersebut, tapi ada hal-hal semisal yang tidak bisa diteruskan kepada masyarakat, yang sifatnya hanya berenti di pokja, contoh pembinaan pokja sendiri, kalau pembinaan pokja itu kan bagaimana pokja itu dia bisa menjalankan roda organisasi sesuai dengan tata aturan sebuah organisasi, semisal administrasi cara penyusunan rencana kerja, cara penyusunan laporan hasil pekerjaan, cara menginput laporan website Kampung KB nya. Tapi untuk pembinaan yang sifatnya program, itu jelas harus diteruskan kepada masyarakat, contoh pembinaan tentang kesehatan reproduksi, contoh pembinaan tentang bagaimana cara mendidik anak-anak, menjadi orang tua hebat, itu kan si pokja ini dibekali sebuah wawasan, yang pada akhirnya wawasan itu akan digunakan atau disampaikan kembali kepada masyarakat, tapi oleh pokja, berjenjang, 2 pola itu yang biasanya dipakai.”

Lalu I<sub>2</sub> juga berpendapat mengenai apakah ada pembinaan bagi pengurus kampung KB guna meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yaitu:

“Tiap bulan dari DAK (Dana Alokasi Khusus) ada pertemuan pokja kampung KB. Pertemuan lokmin kampung KB, forum musyawarah, dan poktan. Jadi 1 bulan kita ada pertemuan khusus juga untuk kampung KB. Lokmin (loka karya mini) untuk mencapai kesepakatan antara pihak DP3AKB dengan pihak kampung KB, UPT dan pihak medis bidan terkait. Untuk membicarakan dan merembukkan pelayanan, hasil rembukan dari kita, kita bekerjasama dengan bidang KB untuk pelayanannya hari apa disepakati disitu.”

Menurut I<sub>1</sub> dan I<sub>2</sub>, pembinaan bagi pengurus kampung KB guna meningkatkan kualitas sumberdaya manusia itu sudah ada, terdapat pembinaan yang langsung ke masyarakat, dan ada yang melalui pengurus Kampung KB seperti poktan-poktan, setelah itu seharusnya pengurus kampung KB menyampaikan hasil pembinaan ke masyarakat, dengan membuat rencana kegiatan khusus di daerah Kampung KB nya. Tiap bulan dari DAK (Dana Alokasi Khusus) ada pertemuan pokja kampung



KB. Pertemuan lokmin kampung KB, forum musyawarah, dan poktan. Jadi setiap 1 bulan DP3AKB dengan UPT Kecamatan ada pertemuan khusus untuk kampung KB. Lokmin (loka karya mini) untuk mencapai kesepakatan antara pihak DP3AKB dengan pihak kampung KB, UPT dan pihak medis bidan terkait. Untuk membicarakan dan merembukkan pelayanan, hasil rembukan dari mereka dan bekerjasama dengan bidang KB untuk disepakati pelayanan KB.

Lalu I<sub>3</sub> juga berpendapat mengenai apakah ada pembinaan bagi pengurus kampung KB guna meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yaitu:

“Pembinaan pokja-pokja kalau dari DP3AKB, jadi pokja dikumpulkan, kita kasih pembinaan, sekarang baru tahun berjalan awal, mau ada kegiatan penyuluhan KB di majlis ta’lim, yang kedua kita mau ngadain keterampilan untuk PIK-R dan UPPKS, nanti mengolah seperti apa untuk penambahan incame di keluarga itu. Pengolahan makanan dan lain-lain. Bisa dalam bentuk kerajinan, makanan, jadi supaya dia jadi prodak untuk meningkatkan kesejahteraan Kampung KB itu.”

Lalu I<sub>4</sub> juga berpendapat mengenai apakah ada pembinaan bagi pengurus kampung KB guna meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yaitu:

“Pembinaan BKL itu penyuluhan di majlis ta’lim dan senam lansia, pengajian, BKR dan PIK-R penyuluhan narkoba. Posyandu dan BKB itu beda tapi terintegrasi, jadi ada BKB dan posyandu, sasarannya beda. Sasarannya beda, seperti BKB dengan PAUD, kalau posyandu itu sasarannya bayi dan balita, kalau BKB orang tuanya, bina keluarga balita, keluarga yang mempunyai balita, jadi kita melakukan penyuluhan ke ibunya, pembinaan buat orangtuanya. Keluarganya yang mempunyai balita.”

Lalu I<sub>5</sub> juga berpendapat mengenai apakah ada pembinaan bagi pengurus kampung KB guna meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yaitu:

“Pembinaan poktan dan DP3AKB yang setiap bulan. Kita tiap bulan ada kegiatan pertemuan pokja, lokmin dan forum musyawarah setiap bulan (loka karya mini)/rapat kecil-kecilan setiap bulan. Disitu bisa apa aja, kebetulan nanti bulan ini, kita mau diadakan praktek pengolahan makanan dll, khusus untuk peningkatan kesejahteraan keluarga dari DP3AKB. Biasanya selama ini kita kalau kegiatan hanya penyuluhan, sosialisasi, tapi tidak ada dampak, jadi kali ini judulnya sama, tapi praktek.”

Lalu I<sub>6</sub> juga berpendapat mengenai apakah ada pembinaan bagi pengurus kampung KB guna meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yaitu:

“Ada pembinaan untuk ketua kelompok kegiatan. Pembinaan SKPD, program kegiatan di SKPD terkait menyangkut Kampung KB.”

Lalu I<sub>7</sub> juga berpendapat mengenai apakah ada pembinaan bagi pengurus kampung KB guna meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yaitu:

“Pembinaan kita ada, jadi kalau dari DP3AKB nya akan melakukan kegiatan nanti disampaikan ke UPT kecamatan, nanti saya yang menyampaikan ke kampung KB nya, nanti saya bilang berapa orang yang ikut pembinaannya dari kampung KB Kaliwadas itu.”

Lalu I<sub>8</sub> juga berpendapat mengenai apakah ada pembinaan bagi pengurus kampung KB guna meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yaitu:

“Ada pembinaan untuk ketua kelompok kegiatan oleh DP3AKB. Karena kegiatan biasanya langsung ke pokja/poktan.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan I<sub>3</sub>, I<sub>4</sub>, I<sub>5</sub>, I<sub>6</sub>, I<sub>7</sub>, dan I<sub>8</sub> mengenai pembinaan bagi pengurus kampung KB guna meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, terdapat pembinaan bagi pengurus kampung KB dan pembinaan poktandari

DP3AKB setiap bulan. Di Pos Penyuluhan KB setiap bulan ada kegiatan pertemuan pokja, lokmin dan forum musyawarah.

Lalu I<sub>9-1</sub> juga berpendapat mengenai apakah ada pembinaan bagi pengurus kampung KB guna meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yaitu:

“Pembinaan ada dari DP3AKB, DP3AKB kesini sosialisasi langsung juga pernah, tapi bukan soal BKB, jadi keseluruhan untuk poktan, kalau khusus untuk ke PAUD belum pernah.”

Lalu I<sub>9-2</sub> juga berpendapat mengenai apakah ada pembinaan bagi pengurus kampung KB guna meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yaitu:

“Pembinaan atau pelatihan kesana tidak rutin (kadang-kadang). Biasanya pelatihan di KPRI, kadang terakhir di gedung margawiwitan. Tentang Kampung KB, Dapat uang transport, ada snack dari DP3AKB dan BKKBN biasanya.”

Lalu I<sub>9-3</sub> juga berpendapat mengenai apakah ada pembinaan bagi pengurus kampung KB guna meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yaitu:

“Ada pembinaan, itu pelatihan itu ada materi-materinya, yang diundang kesana pengurus poktan saja, yang bisa datang kesana, jumlahnya ditentukan dari sana, lewat Ibu Raminah kita dikasih tau.”

Lalu I<sub>9-4</sub> juga berpendapat mengenai apakah ada pembinaan bagi pengurus kampung KB guna meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yaitu:

“Kadang di Rau di Anyer ada penyuluhan dari DP3AKB.”

Menurut I<sub>9-1</sub>, I<sub>9-2</sub>, I<sub>9-3</sub> dan I<sub>9-4</sub> terdapat pembinaan bagi pengurus kampung KB guna meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Pembinaan dilaksanakan oleh

DP3AKB, setiap pelatihan/pembinaan terdapat materi masing-masing, berbeda setiap pertemuan. Jika materi tersebut tentang BKB maka yang datang adalah pengurus poktan BKB dan seterusnya, jumlah yang diundang ditentukan oleh DP3AKB melalui UPT Kecamatan Serang/Pos Penyuluhan KB.

Dari indikator kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi aktor yang terlihat di kampung KB ini, peneliti juga menilai aspek bagaimana sosialisasi yang dilakukan dalam memberikan pemahaman tentang program kampung KB. Peneliti melakukan wawancara terkait dengan bagaimana sosialisasi yang dilakukan dalam memberikan pemahaman tentang program kampung KB ini kepada I<sub>1</sub> yang mengatakan bahwa:

“Sosialisasi untuk awal terbentuknya kampung KB kita datang ke tempat yang akan dijadikan kampung KB, kita mensosialisasikan bahwa di kampung tersebut dijadikan kampung KB, bertahap kita jelaskan bahwa di kampung KB itu bukan KB saja, lalu selanjutnya diberi pemahaman lewat pembinaan-pembinaan yang kita lakukan.”

Lalu I<sub>2</sub> juga berpendapat mengenai bagaimana sosialisasi yang dilakukan dalam memberikan pemahaman tentang program kampung KB ini yaitu:

“Sosialisasi waktu awal dibentuknya kampung KB di tahun 2017 baru 1 kampung KB di kabupaten/kota. Di 2018 semua kecamatan harus punya kampung KB. Jadi kita ada penancangan kampung KB se Kota Serang, lalu setelah itu kita turun ke lapangan melalui UPT, kita sosialisasi bahwa kampung ini sudah dicanangkan sebagai kampung KB.”

Lalu I<sub>3</sub> juga berpendapat mengenai bagaimana sosialisasi yang dilakukan dalam memberikan pemahaman tentang program kampung KB ini yaitu:

“Pertama dibentuk ada sosialisasi di Kampung KB. sosialisasi oleh BKKBN langsung. Selanjutnya dilakukan pelatihan untuk pengurus Kampung KB, ada seperti UPPKS khusus kampung KB. Pokonya sekarang ini program utama pemerintah itu lokusnya Kampung KB, jadi poktan pokja yang ada disitu kalau memang ada kegiatan, misalkan BKL khusus Kampung KB, kita hanya bisa mengkoordinasikan dan menghadirkan orang-orang yang memang ada di kegiatan tersebut.”

Lalu I<sub>4</sub> juga berpendapat mengenai bagaimana sosialisasi yang dilakukan dalam memberikan pemahaman tentang program kampung KB ini yaitu:

“Dari BKKBN pernah lebih kepada pembinaan, tapi sesuaikan, biasanya DP3AKB dan BKKBN Provinsi Banten.”

Lalu I<sub>5</sub> juga berpendapat mengenai bagaimana sosialisasi yang dilakukan dalam memberikan pemahaman tentang program kampung KB ini yaitu:

“Sosialisasi dan pembinaan itu dari DP3AKB.”

Menurut I<sub>1</sub>, I<sub>2</sub>, I<sub>3</sub>, I<sub>4</sub> dan I<sub>5</sub> mengenai bagaimana sosialisasi yang dilakukan dalam memberikan pemahaman tentang program kampung KB, menjelaskan bahwa sosialisasi tentang kampung KB pernah dilakukan baik oleh BKKBN maupun oleh DP3AKB diawal pembentukan/pencanangan kampung KB. Untuk sosialisasi-sosialisasi lain yang terkait dengan kampung KB pun pernah dilakukan, seperti pemahaman tentang berKB dan lain-lain, namun tidak rutin dilakukannya.

Lalu I<sub>8</sub> juga berpendapat mengenai bagaimana sosialisasi yang dilakukan dalam memberikan pemahaman tentang program kampung KB ini yaitu:

“Masalah sosialisasi, sebagian masyarakat belum memahami kampung KB, taunya KB aja, sebenarnya kegiatannya tidak hanya KB saja, programnya dikependudukan, jadi masyarakatnya masih kurang partisipasinya. Sosialisasi kampung KB pernah di masjid. Sejauh ini DP3AKB kesini mendampingi, kalau ada kegiatan atau sosialisasi dan kalau ada pelayanan KB. Pemahaman masyarakat masih kurang, jadi hanya KB nya saja, sebenarnya tidak hanya KB saja, tapi karena saya pengurus jadi tahu, karena kampung KB kan hanya wadah.”

“Harapannya sinerginya ditingkatkan, sosialisasi ke atas sudah sampai, tapi kebawahnya, instansi itu ga sampai, jadi kadang-kadang gatau apapun, seharusnya dari atas tau dan kebawahnya juga, karena kampung KB kan harusnya jadi prioritas untuk menuntaskan segala sesuatunya, kependudukannya, kesehatannya, lintas sektor juga belum, mereka punya program seharusnya mereka melihat bahwa ada kampung KB, jangan sampai kita yang mengusulkan, harusnya mereka juga aktif turun ke kampung KB, seharusnya terbuka, ada anggaran juga kan di instansi masing-masing, ini kampung KB apa saja yang belum ada dilengkapi, kalau kita mengusulkan juga belum tentu, karena mereka kan sudah punya kegiatan sendiri.”

Lalu I<sub>9-1</sub> juga berpendapat mengenai bagaimana sosialisasi yang dilakukan dalam memberikan pemahaman tentang program kampung KB ini yaitu:

“Sosialisasi, jadi yang dikasih pembinaan adalah kader-kader, untuk ke ibu-ibunya anggota BKBnya belum pernah, hanya kader-kader nya dikasih pembinaan, cuma kader ada yang aktif ada yang engga, yang aktif hanya saya saja. Sosialisasi saya kepada ibu-ibu waktu pelaksanaan posyandu, di PAUD juga pernah, cuma sebentar saja. Pemahaman masyarakat seperti cara menyusui yang benar, pernah ada disosialisasikan kepada kader, motorik kasar dan halus orang tua harus tau, tapi belum ada sosialisasi lagi.”

Lalu I<sub>9-2</sub> juga berpendapat mengenai bagaimana sosialisasi yang dilakukan dalam memberikan pemahaman tentang program kampung KB ini yaitu:

“Sosialisasi untuk BKR secara langsung sih saat ini kita belum ada, karena keterbatasan tempat dan biaya juga.”

Lalu I<sub>9-3</sub> juga berpendapat mengenai bagaimana sosialisasi yang dilakukan dalam memberikan pemahaman tentang program kampung KB ini yaitu:

“Sosialisasi untuk BKL dari saya pernah sih bilang BKL itu apa dan bagaimana kepada masyarakat, tapi hanya dalam kegiatan posyandu kalau ada yang datang lansia nya buat nimbang, kalau diluar itu ya paling kita ngobrol-ngobrol aja, karna saya juga sudah termasuk lansia.”

Lalu I<sub>9-4</sub> juga berpendapat mengenai bagaimana sosialisasi yang dilakukan dalam memberikan pemahaman tentang program kampung KB ini yaitu:

“Untuk PIK-R belum ada sosialisasi seperti untuk remaja, pernah sih dari anak-anak kuliah yang datang kesini kasih sosialisasi tentang kenakalan remaja, tapi kalo kita ya Cuma ngaji karna kita kegiatannya ada di Kobong ini.”

Menurut I<sub>8</sub>, I<sub>9-1</sub>, I<sub>9-2</sub>, I<sub>9-3</sub> dan I<sub>9-4</sub> mengenai sosialisasi yang dilakukan dalam memberikan pemahaman tentang program kampung KB itu sudah ada diawal pembentukan kampung KB, namun sebagian masyarakat masih belum memahami kampung KB, hanya mengetahui KB saja, sedangkan di dalam kampung KB terdapat berbagai kegiatan yang dapat dilakukan. Kampung KB mayoritas diketahui oleh pengurus-pengurus kampung KB nya yang memang aktif langsung mengikuti setiap pembinaan yang diadakan. Namun untuk ke masyarakat awam masih belum optimal sosialisasinya dilakukan. Untuk pengurus poktan pun tidak ada inisiatif untuk mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang yang mereka ketahui.

**Gambar 4.8**  
**Sosialisasi dan Pelayanan Keluarga Berencana di Kampung KB Kaliwadas**



(Sumber: Dokumentasi peneliti)

**Gambar 4.9**  
**Kegiatan Penyuluhan KKBPK pada Majelis Ta'lim di Kampung Kaliwadas**



(Sumber: Dokumentasi peneliti)

Selama peneliti melakukan penelitian, sosialisasi yang dilakukan oleh DP3AKB kepada masyarakat langsung terhitung 2 kali, hal tersebut membuktikan tidak ada sosialisasi rutin terkait program kampung KB. Untuk gambar 4.5 merupakan Sosialisasi dan Pelayanan Keluarga Berencana di Kampung KB Kaliwadas, sosialisasi tersebut berisi menghimbau kepada masyarakat Kampung Kaliwadas untuk menggunakan KB IUD dan implan yang aman, juga menjelaskan bagaimana cara kerja ber KB. Untuk gambar 4.6 Kegiatan Penyuluhan KKBPK pada Majelis Ta'lim di Kampung Kaliwadas merupakan penyuluhan oleh KUA dan pengadilan agama yang diselenggarakan oleh DP3AKB untuk memberitahukan kepada masyarakat Kampung Kaliwadas pandangan islam dalam berKB, agar masyarakat tidak ragu lagi untuk berKB.



Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa narasumber terkait dengan indikator kekuasaan, kepentingan-kepetingan dan strategi aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program kampung KB dapat disimpulkan, kekuasaan, kepentingan-kepetingan dan strategi aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program kampung KB di Kampung Kaliwadas. BKKBN dan DP3AKB merupakan yang memiliki kekuasaan, UPT Kecamatan/Pos Penyuluhan KB hanya menjalankan intruksi dari DP3AKB. Untuk kepentingan kesejahteraan keluarga. Setiap aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program KB ini menjalankan tugasnya sesuai dengan kewenangan dan kepentingan yang dibuat dan menggunakan strategi yang ada terkecuali pengurus kampung KB dan pengurus poktan kampung KB yang belum menjalankan tugasnya untuk menyalurkan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat.

Selain itu, strategi yang digunakan dan dilaksanakan sudah tertata secara rapi tetapi sosialisasi yang dilakukan pihak pemerintah yaitu BKKBN dan DP3AKB seharusnya tidak cukup sampai disitu saja. Sosialisasi program kampung KB hanya dilakukan pada saat awal pembentukan/pencanangan kampung KB. Ditemukan juga hambatan-hambatan yang menjadi kelemahan dari program kampung KB seperti masyarakat juga sarana dan prasarana yang tidak mendukung.

## **2. Karakteristik Lembaga dan Rezim yang Berkuasa**

Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.

Di dalam indikator ini peneliti akan mengetahui lingkungan dimana suatu kebijakan atau program di implementasikan serta karakteristik dari lembaga yang berkuasa. Dari indikator karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa, peneliti menilai beberapa aspek yang terkandung di dalamnya mulai dari peran serta dorongan dari pemerintah serta kebijakan suatu program pemerintah dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat dalam hal implementasi program kampung KB ini. Peneliti melakukan wawancara terkait dengan karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa dalam perogram kampung KB ini, apasaja peran dari *stakeholder* dan kesiapan *stakeholder* dalam program kampung KB kepada I<sub>1</sub> yang mengatakan bahwa:

”DP3AKB dengan BKKBN itu lembaga yang mengelola program KB yang satu level, sama-sama eselon II, bedanya kalau DP3AKB adalah organ daerah, yang sudah dibawah gubernur, kalau BKKBN adalah instansi vertikal, lembaga vertikal yang langsung dibawah BKKBN pusat. Karena ini amanat undang-undang nomor 23 tahun 2014, ada pembagian kewenangan pelaksanaan program KKBPK antara pusat dan daerah. Nah BKKBN di provinsi itu sebetulnya tidak melaksanakan fungsi provinsi, tapi melaksanakan fungsi kewenangan BKKBN pusat yang ada didaerah BKKBN dan DP3AKB 1 level. Program KB inisiasinya ada di BKKBN.”

Lalu I<sub>2</sub> juga berpendapat mengenai peran dari *stakeholder* dan kesiapan *stakeholder* dalam program kampung KB ini yaitu:

“DP3AKB berperan berdasarkan pasal 2 peraturan walikota nomor 14 tahun 2017, tugas pokok melaksanakan urusan wajib non pelayanan dasar di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pelayanan program keluarga berencana. Dan fungsinya untuk perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan administrasi urusan dibidang pemberdayaan perempuan dan masyarakat, perlindungan perempuan dan anak, pengendalian penduduk, advokasi

penggerakan dan informasi serta keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.”

Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa narasumber terkait dengan indikator karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa pada implementasi program kampung KB dapat disimpulkan, karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa pada implementasi program kampung KB yaitu dari lingkungan kebijakan, BKKBN tetap berada dalam posisi teratas membawahi pihak pelaksana kampung KB seperti DP3AKB, UPT Kecamatan Serang dan pokja kampung KB. Pihak pelaksana melaksanakan tugasnya sesuai dengan wewenangnya masing-masing.

### **3. Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon dari Pelaksana**

Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah keputusan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

Di dalam indikator ini menegaskan kepada tingkat kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan atau program yang sedang berjalan. Dari indikator tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana, peneliti menilai beberapa aspek yang terkandung di dalamnya mulai dari bagaimana pemahaman masyarakat terhadap kampung KB di Kampung Kaliwadas, apakah ada pertemuan rutin yang dilakukan oleh pengurus kampung KB di Kampung Kaliwadas, juga apakah kendala yang dihadapi oleh pengelola selama proses pengelolaan kampung KB ini. Peneliti melakukan wawancara

terkait dengan bagaimana pemahaman masyarakat terhadap kampung KB di Kampung Kaliwadas ini kepada I<sub>8</sub> yang mengatakan bahwa:

“Pemahaman masyarakat di Kampung Kaliwadas ini tentang kampung KB belum tau banyak, mereka banyaknya taunya ya kampung KB itu hanya KB, mungkin yang tau kader-kader yang memang mengurus kampung KB, kalau ada kegiatan sosialisasi seperti dari DP3AKB itu masyarakat disini itu ya ikut aja, tapi gatau itu masuk ke acara kampung KB, mungkin ada yang tau yang sering ikut kegiatannya aja.”

Lalu I<sub>9.1</sub> juga berpendapat mengenai bagaimana pemahaman masyarakat terhadap kampung KB di Kampung Kaliwadas ini yaitu:

”Masyarakat itu kalau BKB taunya ya PAUD aja, gatau kalau PAUD itu BKB,kita ingin ibu-ibu mengetahui cara mendidik anak yang baik, tapi susah, tidak segampang yang dibayangkan, karena ibu-ibu sudah susah, tau BKB aja engga, jadi pemahamannya kurang.”

Lalu I<sub>9.2</sub> juga berpendapat mengenai bagaimana pemahaman masyarakat terhadap kampung KB di Kampung Kaliwadas ini yaitu:

“Kalau kaya kampung-kampung KB yang lain kan sekarang udah maju, warganya bagus lumayan, kita inginnya semua warga bersatu kerja sama dengan tulus ikhlas bareng-bareng, karena kalau ga didukung dengan warga bergerak kan kita gabakal maju, kita bilang harus ini itu, kalau warga tidak menyadari, tidak mau ikut serta kan ga jalan. Karena sekarang masih susah untuk yang seperti itu. Kadang itu-itu aja yang ada, kalau ada kegiatan juga. Walaupun kita sudah berusaha ngajak, ya kalau mereka gamau susah. Harapannya kita kumpul bersama, gotong royong, menyadari rutin, tapi kenyataannya yang ikut itu-itu aja orangnya, itu berarti pemahaman masyarakatnya masih kurang tentang kampung KB.”

Lalu I<sub>9.3</sub> juga berpendapat mengenai bagaimana pemahaman masyarakat terhadap kampung KB di Kampung Kaliwadas ini yaitu:

“Mulai kita merasakan ada Kampung KB itu ada pertemuan-pertemuan 2017, Jadi sedikit mengetahui seperti apa Kampung KB, tapi baru pengurus-pengurus kampung KB nya saja, mungkin sekarang itu agak lumayanarganya ada yang sering ikut kegiatan, itu tau kampung KB, tapi yang gapernah ikut kegiatan itu kurang tau mereka, jadi kalau ditanya tentang kampung KB pasti taunya KB nya saja.”

Lalu I<sub>9.4</sub> juga berpendapat mengenai bagaimana pemahaman masyarakat terhadap kampung KB di Kampung Kaliwadas ini yaitu:

“Awal mulanya, memang anak-anak di pondok ini, orang-orang sini yang dulu terjerumus tentang narkoba sebegini banyak, sebelum masuk kesini. Termasuk mantan pencuri juga banyak anak-anak nya ketika masuk di pesantren, saya rangkul semuanya suruh masuk kesini, Alhamdulillah berubah total, disitulah PIK-R melirik kesini. Jadi kalau PIK-R door to door ke rumah, gabakal nyampe, gabakal bisa di mengerti. Ketika digabungkan dengan Kampung KB, PIK-R ikut penyuluhan, beberapa kali anak-anak PIK-R ikut penyuluhan, yang diterangkan tentang KB, jadi anak-anak yang belum paham kesitu masih remaja, masih jauh pemikiran. Menurut saya dipisahkan saja kalau KB ya KB, PIK-R ya PIK-R, jadi jangan satu badan, jangan satu lembaga, harusnya dibuat sendiri lembaganya.”

Menurut I<sub>8</sub>, I<sub>9-1</sub>, I<sub>9-2</sub>, I<sub>9-3</sub> dan I<sub>9-4</sub> pemahaman masyarakat terhadap kampung KB di Kampung Kaliwadas ini masih kurang, masyarakat hanya mengetahui bahwa kampung KB itu hanya KB, mungkin yang mengetahui secara keseluruhan itu kader-kader atau yang mengurus/pengurus kampung KB, kalau ada kegiatan sosialisasi seperti dari DP3AKB, masyarakat hanya mengikuti saja, tapi tidak tahu hal itu adalah bagian dari program kampung KB. Yang mengikuti kegiatan atau acara pun hanya itu-itu saja. Untuk BKB masyarakat hanya mengetahui PAUD saja.

Lalu I<sub>10-1</sub> juga berpendapat mengenai bagaimana pemahaman masyarakat terhadap kampung KB di Kampung Kaliwadas ini yaitu:

“Saya KB IUD. Kalau pengen jelas di Bu Siti ke Bu RW. Kegiatan kampung KB ikut di Bu Siti kalau ada penyuluhan, kalau ada pembinaan balita saya gatau. Itu ibu-ibu kader biasanya yang ikut pembinaan ga pernah tau ada penyuluhan. KB banyak yang pake, KB Itu biasanya Ibu-ibu posyandu yang sering mengumumkan, cuma posisinya bukan disini, tapi di RT 03 yang seperti kaya gitu. Kalau disini tempatnya gaada. Jadi ga terlalu fokus ke Kampung KB.”

“Warga suka ikut KB, ada kegiatan penyuluhan, banyak yang ikut, bulan kemarin ada kumpul ke mushola di RT 01 itu ada uraian-uraian dari dinas langsung. Kemarin kan baru ada penyuluhan juga dari Kampung KB, implan dan IUD di Kampung KB (disana), iya disitu (di Ibu Siti) aja, kita mah cuma ikut aja. Ada banyak yang ikut, tapi dari RT sini kayanya belum ada, kadang-kadang suka dari RT 03, dari RT 01 yang banyak, RT 01 dan RT 05, kalau RT 04 orang-orangnya baru punya anak 1 atau 2, jadi gaada yang ikut.”

Lalu I<sub>10-2</sub> juga berpendapat mengenai bagaimana pemahaman masyarakat terhadap kampung KB di Kampung Kaliwadas ini yaitu:

“Punya anak 4, ada yang sudah kuliah di Unsera semester 4, anak Ibu gapernah ikut kegiatan remaja di kampung KB. PIK-R juga gatau gapernah ada, kadang kalo ada sosialisai banyak juga remaja ada yang hadir disitu. Kalau sekarang, apa-apa dididik, artinya harus dipelajari, bagaimana ngurusin lansia, gimana harus mendidik remaja, kasih masukan-masukan untuk remaja, ada banyak manfaatnya, perbedaan juga banyak. Harusnya kesana ke Kampung KB nya. Ketua Kampung KB adanya disana, di RT sana. Posyandu juga ada disana. Kalau Kampung KB nya itu disana di RT 01. Ke Ibu Siti itu ketuanya itu ketua Kampung KB. Disini juga Kampung KB sama, tapi kan pusatnya ada disana di RT 01 itu, kadang yang ikut penyuluhan cuma ketuanya aja.”

Lalu I<sub>10-3</sub> juga berpendapat mengenai bagaimana pemahaman masyarakat terhadap kampung KB di Kampung Kaliwadas ini yaitu:

“Lansia usia 55 tahun, kegiatan lansia di posyandu saja, penyuluhan lansia belum pernah, waktu itu pas posyandu senam sekalian, pengajian ikut yang malam jumat, malam minggu, dan malam senin. Karena disini Kampung, jadi kurang paham, ada juga kalau yang dekat-dekat disana, kaya kalau ada kegiatan BKR, terus kalau BKL kan lansia, jadi hanya beberapa, di datanya mah banyak, tapi tau sendiri namanya orang kampung. Nanyanya ke Ibu Siti, Ketuanya, adanya di RT 01. Itu tempatnya di situ Kampung KB itu. Kalau saya hanya sebagai anggota BKL. Kalau Ibu Siti ketua BKL.”

Lalu I<sub>10-4</sub> juga berpendapat mengenai bagaimana pemahaman masyarakat terhadap kampung KB di Kampung Kaliwadas ini yaitu:

“Pertama terlibat mengikuti, gaada modal berbentuk benda/uang, belum dan gaada. Ada kelompok usaha, kegiatan untuk usaha kecil. Nanti setiap bulan kadang-kadang rapat-rapat penyuluhan, penyuluhan di DP3AKB sebulan sekali atau beberapa bulan sekali ada kegiatan-kegiatan dari pusat, pakai mobil dinas, bus ¾, ada masuk ke tempat Kampung KB. Kampung KB ini aktif penyuluhannya kumpul-kumpul banyak orang-orangnya ada kegiatan usaha kecil yang sesuai keterampilannya. Dulu pas awal-awal bikin produk kerang/intip, pepes bandeng dll, ada pempek, kalau sekarang ini bikin dari olahan ikan. Ibu-ibu yang ikut penyuluhan itu dari pusat, dijualnya kalo ada acara-acara kampung KB ikut buat jualan, nanti ibu-ibu dinas pada beli untuk oleh-oleh. UPPKS dari Lopang, disini Cuma itu-itu aja, pusatnya di Ibu Raminah, PIK-R juga adanya di Sebrang aja. Disini gaada, adanya di RT sebrang, soalnya adanya disana, jadi ngambilnya dari sana, jadi diadainnya tetep disana, di RT sana, ya di Ibu ketuanya itu.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat I<sub>10-1</sub>, I<sub>10-2</sub>, I<sub>10-3</sub> dan I<sub>10-4</sub> mengenai bagaimana pemahaman masyarakat terhadap kampung KB di Kampung Kaliwadas, masyarakat secara keseluruhan belum mengetahui bahwa di kampung KB terdapat program pembangunan keluarga seperti poktan-poktan yang ada. Mereka hanya mengetahui kampung KB itu berarti masyarakatnya harus berKB. Adanya perbedaan antara daerah disebrang kiri dan kanan jalan raya pun menjadi salah satu penyebab tidak meratanya sosialisasi kampung KB. Masyarakat RT 01 lebih banyak mengetahui tentang kampung KB karena rumahnya berdekatan

dengan posko kampung KB yaitu rumah Bu Siti yang memang terkenal dan sangat aktif oleh masyarakat sekitar. Bahkan masyarakat yang berada di seberang jalan pun jika ditanya kampung KB mengarahkannya ke rumah Bu Siti karena mereka tidak tahu, ada beberapa dari mereka pun bilang bahwa Bu Siti adalah ketua kampung KB, padahal sebenarnya ketua kampung KB adalah Pak RW. Rumah Pak RW pun berada 1 RT dengan Ibu Siti yaitu di RT 01.

Dari indikator tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana di kampung KB ini, peneliti juga menilai aspek apakah ada pertemuan rutin yang dilakukan oleh pengurus kampung KB di Kampung Kaliwadas. Peneliti melakukan wawancara terkait dengan apakah ada pertemuan rutin yang dilakukan oleh pengurus kampung KB di Kampung Kaliwadas ini kepada I<sub>3</sub> yang mengatakan bahwa:

“Untuk pertemuan, kita juga terbatas sama sarana gedung, karena tempat, minimal untuk kesekretariatan KKB, biar kalau ada pertemuan gampang tempatnya, cuma kita tidak ada, jadi untuk pertemuan di kampung KB pun tidak ada.”

Lalu I<sub>4</sub> juga berpendapat mengenai apakah ada pertemuan rutin yang dilakukan oleh pengurus kampung KB di Kampung Kaliwadas ini yaitu:

“Mungkin pertemuan di kita selalu ada, untuk sosialisasi kepada pokja, kita mengadakan pertemuan. Kalau pertemuan untuk kegiatan rutin sudah ada perencanaannya, kalau kegiatan perencanaannya dari DP3AKB.”

Lalu I<sub>5</sub> juga berpendapat mengenai apakah ada pertemuan rutin yang dilakukan oleh pengurus kampung KB di Kampung Kaliwadas ini yaitu:



“Pertemuan rutin pokja yang dilakukan oleh pos penyuluhan KB ada sebulan sekali, lokmin, pertemuan pokja, dan musyawarah.”

Lalu I<sub>6</sub> juga berpendapat mengenai apakah ada pertemuan rutin yang dilakukan oleh pengurus kampung KB di Kampung Kaliwadas ini yaitu:

“Pertemuan rutin dari kader Kaliwadas di Kampung KB sendiri dan kader lingkungan yang lain se kelurahan.”

Lalu I<sub>7</sub> juga berpendapat mengenai apakah ada pertemuan rutin yang dilakukan oleh pengurus kampung KB di Kampung Kaliwadas ini yaitu:

“Setiap bulan ada.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan I<sub>3</sub>, I<sub>4</sub>, I<sub>5</sub>, I<sub>6</sub>, dan I<sub>7</sub> mengenai apakah ada pertemuan rutin yang dilakukan oleh pengurus kampung KB di Kampung Kaliwadas. Ada pertemuan tetapi dilaksanakan oleh UPT Kecamatan (Pos Penyuluhan KB) di kantornya yang mengundang kepada pengurus kampung KB juga, yang diperintahkan oleh DP3AKB untuk berkoordinasi dengan pengurus KB dalam urusan KB. Pertemuan rutin pokja yang dilakukan oleh pos penyuluhan KB ada sebulan sekali yaitu lokmin, pertemuan pokja, dan musyawarah.

Lalu I<sub>8</sub> juga berpendapat mengenai apakah ada pertemuan rutin yang dilakukan oleh pengurus kampung KB di Kampung Kaliwadas ini yaitu:

“Perkumpulan poktan dan ketua kampung KB tidak ada, adanya dari DP3AKB rutin perbulan, ketua kampung KB dan pokja.”

Lalu I<sub>9-1</sub> juga berpendapat mengenai apakah ada pertemuan rutin yang dilakukan oleh pengurus kampung KB di Kampung Kaliwadas ini yaitu:

“Pertemuan rutin poktan sebenarnya sebulan sekali di rumah bu siti yang sebagai pos KB, untuk bulan ini belum ada pertemuan.”

Lalu I<sub>9-2</sub> juga berpendapat mengenai apakah ada pertemuan rutin yang dilakukan oleh pengurus kampung KB di Kampung Kaliwadas ini yaitu:

“Paling cuma kalo ada tugas, ngisi bareng-bareng, baru kumpul-kumpul, di rumah Bu Siti.”

Lalu I<sub>9-3</sub> juga berpendapat mengenai apakah ada pertemuan rutin yang dilakukan oleh pengurus kampung KB di Kampung Kaliwadas ini yaitu:

“Pertemuan rutin ada di pengajian rutin, karena adanya di kobong, jadi pengajian setiap waktu, magrib, subuh, sehabis isya itu rutin.”

Lalu I<sub>9-4</sub> juga berpendapat mengenai apakah ada pertemuan rutin yang dilakukan oleh pengurus kampung KB di Kampung Kaliwadas ini yaitu:

”Pertemuan rutin, tidak terlalu ada, karena tergantung kegiatan yang ada di DP3AKB, pertemuan rutin untuk pengurus.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan I<sub>8</sub>, I<sub>9-1</sub>, I<sub>9-2</sub>, I<sub>9-3</sub> dan I<sub>9-4</sub> disimpulkan tidak ada pertemuan rutin yang dilakukan oleh pengurus kampung KB di Kampung

Kaliwadas, hanya ada pertemuan rutin pengurus kampung KB yang dilakukan oleh pos penyuluhan KB ada sebulan sekali yaitu lokmin, pertemuan poktan, dan musyawarah. Pengurus kampung KB hanya pernah berkumpul untuk membuat laporan di rumah Ibu Siti, itu pun tidak semuanya datang. Kendala tempat pen menjadi penghambat dalam tidak adanya pertemuan rutin di Kampung KB Kaliwadas.

Dari indikator tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana di kampung KB ini, peneliti juga menilai aspek apakah kendala yang dihadapi oleh pengelola selama proses pengelolaan kampung KB. Peneliti melakukan wawancara terkait dengan apakah kendala yang dihadapi oleh pengelola selama proses pengelolaan kampung KB ini kepada I<sub>1</sub> yang mengatakan bahwa:

“Kendalanya, kita ngasih program kegiatan ke pengurus pokja, nanti pokja seharusnya yang menyelenggarakan tahap selanjutnya, menyalurkan apa yang telah kita kasih ke pengurus pokja, itu memang harus biasanya rutin, misalkan setiap jumat kedua setiap bulannya, pengajian, senam, pembuatan anyaman atau apapun. Adapun kendala di pelaporan, itu hanya langsung online di website kami, yang bertugas mengupdate itu PLKB.”

Lalu I<sub>2</sub> juga berpendapat mengenai apakah kendala yang dihadapi oleh pengelola selama proses pengelolaan kampung KB ini yaitu:

“Kendalanya banyak, intinya dari pihak dinas inginnya sudah dikasih support seperti itu masyarakat itu menerima, seharusnya merespon juga. Masyarakatnya tidak bisa mengerti, kita pun tidak bisa memaksakan, mereka itu masih ada yang memahaminya kampung KB itu khusus untuk KB saja. Padahal yang kita inginkan kampung KB itu bisa bersinergi antara program satu dengan yang lainnya. Tapi sementara ini kesannya itu kampung KB untuk ibu-ibu, kesannya KB saja, jadi kita berusaha menerangkan kepada masyarakat melalui penyuluhan, bahwa kampung KB itu tidak hanya KB saja, ada banyak dan salah satunya adanya 4 pertemuan itu.”

Kesimpulan dari I<sub>1</sub> dan I<sub>2</sub> mengenai kendala yang dihadapi oleh pengelola selama proses pengelolaan kampung KB adalah kurangnya kontribusi masyarakat dan respon masyarakat terhadap program yang dibuat. Pengurus kampung KB khususnya pengurus poktan yang tidak melakukan tugasnya dengan baik pun menjadi hambatan tidak tersalurnya dengan baik program-program kampung KB.

Lalu I<sub>3</sub> juga berpendapat mengenai apakah kendala yang dihadapi oleh pengelola selama proses pengelolaan kampung KB ini yaitu:

“Kendalanya didalam kesertaan kesadaran masyarakat masih belum maksimal untuk membangun kampung nya sendiri melalui program Kampung KB, entah itu di dalam sektor kebersihan, karena disitu masih ada sampah, kesadaran masyarakat dalam ber-KB masih kurang, kesadaran remaja untuk tidak menikah diusia dini, karena masih ada pernikahan usia dini.”

Lalu I<sub>4</sub> juga berpendapat mengenai apakah kendala yang dihadapi oleh pengelola selama proses pengelolaan kampung KB ini yaitu:

“Kendala dari dana kita belum memadai kalau untuk program kampung KB, sarana dan prasarana juga masih kurang untuk kampung KB, masyarakatnya pun masih kurang aktif dan kurang partisipasinya dalam kampung KB ini.”

Lalu I<sub>5</sub> juga berpendapat mengenai apakah kendala yang dihadapi oleh pengelola selama proses pengelolaan kampung KB ini yaitu:

“Kendala sebenarnya Kampung KB di tingkat RW, jadi dengan (RW ini ada pembangunan meningkatnya kesejahteraan minimal, kita muluk, kesejahteraan kan akhirnya bisa merubah main set, jangankan 1 Kampung, 1 orang aja merubah kebiasaan seseorang kan susah. Jadi harapan kita sih sebenarnya dengan 1 kampung itu dari 1 RW misalnya berubah, kita kepengen 1 kelurahan bisa terwakilkan melalui 1 RW. Ini pembangunannya, muncul 1 RW bisa ditiru.

Intinya begitu mewakilkan dengan adanya itu bisa menjadi contoh untuk Kampung KB yang lain.”

Lalu I<sub>6</sub> juga berpendapat mengenai apakah kendala yang dihadapi oleh pengelola selama proses pengelolaan kampung KB ini yaitu:

“Kendala dari segi akseptor KB dan keluhan tidak ada. UPPKS perubahan belum signifikan karena mengawali belum, kita baru bentuk dari kelompoknya. Ingin KB bukan usia yang keatas saja, namun remaja juga untuk menahan menikah diusia dini. Akseptor perkembangannya ada, tapi dari generasi ini yang tidak terkendali.”

Lalu I<sub>7</sub> juga berpendapat mengenai apakah kendala yang dihadapi oleh pengelola selama proses pengelolaan kampung KB ini yaitu:

“Kendala nya di kampung KB ini belum ada rumah data dan kesekretariatan, belum ada tempat buat kita, kalo acara juga tempatnya terbatas. UPPKS pun belum besar, karena dananya kurang, jadi apa adanya aja.”

Menurut I<sub>3</sub>, I<sub>4</sub>, I<sub>5</sub>, I<sub>6</sub>, I<sub>7</sub> dan I<sub>8</sub> mengenai kendala yang dihadapi oleh pengelola selama proses pengelolaan kampung KB beragam, dari kurnagnya fasilitas sarana dan prasarana sampai kurangnya partisipasi masyarakat terhadap kegiatan yang dilaksanakan dikampung KB. Belum adanya rumah data dan kesekretariatan KKB adalah faktor utama kendala yang dirasakan oleh pengelola kampung KB di Kampung Kaliwadas.

Lalu I<sub>8</sub> juga berpendapat mengenai apakah kendala yang dihadapi oleh pengelola selama proses pengelolaan kampung KB ini yaitu:

“Kendalanya rumah data belum ada, di posko aja di rumah Ibu Siti kalo ada kegiatan, posyandu juga dirumah Bu Siti.”

Lalu I<sub>9.1</sub> juga berpendapat mengenai apakah kendala yang dihadapi oleh pengelola selama proses pengelolaan kampung KB ini yaitu:

“Kendala di BKB itu PAUD nya kita tempatnya terbatas, pakai rumah saudara saya yang tidak terpakai, fasilitas juga tidak ada meja dan lain-lain, kita untuk membayar guru pun sumbangan dari muridnya itu seikhlasnya, untungnya gurunya juga memang ikhlas, bisa buat beli minum juga diterima saja.”

Lalu I<sub>9.2</sub> juga berpendapat mengenai apakah kendala yang dihadapi oleh pengelola selama proses pengelolaan kampung KB ini yaitu:

“Kendalanya, selama ada Kampung KB itu kadang-kadang undangan untuk warga Kampung KB terutama poktan-poktan Kampung KB kadang-kadang bikin saling ngiri orang, undangan untuk poktan, kalau misalnya harus berangkat seharusnya dari sana aja yang nentuin, jangan kita. Soalnya yang namanya ibu-ibu kaya gitu, pada salah paham. Jadi pengennya namanya dari sana aja, gantian yang dateng dari 5 orang itu bergiliran, harus merasakan pelatihan, Ketua, wakil, sekretaris, bendahara. Sebagai ketua sudah menawarkan untuk berangkat, pengurus lain, tapi kalau tidak ada yang mau ya saya aja. Kadang ketua BKB Bu RW, ko yang pergi Ibu Iroh aja, padahal sebelum Bu RW ngomong, saya udah nawarin ke yang lain. Kalau pada gamau, yang penting saya udah nawarin, terserah, ya terpaksa saya yang pergi. Anggota yanglain ada yang punya anak kecil, ada yang repot.”

Lalu I<sub>9.3</sub> juga berpendapat mengenai apakah kendala yang dihadapi oleh pengelola selama proses pengelolaan kampung KB ini yaitu:

“Kendala selama ada Kampung KB ini kendala yang terlalu mencolok sih belum berasa. Tapi kadang suka ada undangan pelatihan untuk anggota-anggota poktan ini. Kadang-kadang pada “gaboleh rangkap”, “gaboleh double”, kalau bisa gantian. Jadi kalau misal ada undangan, pelatihan ke UPT, ke KPRI misalnya tanggal sekian untuk perwakilan 2 orang untuk lansia, balita, remaja suatu saat

ada undangan lagi, gabisa berangkat lagi, gantian yang lain, itu sering rebutan gitu, ada yang sirik karna itu-itu terus yang ikut. Ada juga yang dianya cape ikut terus karna yang lain pada gamau.”

Lalu I<sub>9.4</sub> juga berpendapat mengenai apakah kendala yang dihadapi oleh pengelola selama proses pengelolaan kampung KB ini yaitu:

“Kendalanya PIK-R kalau tidak dinaungi di pondok mungkin ga bakal jalan. Diajukan PIK-R kesini oleh Ibu Siti, karena ini sudah jadi pondok, dan berhubung semua disini remaja, dan masyarakat disini juga banyak, tapi memang banyak dari daerah lain, tapi yang diambil yang dari sini saja. Orang Kampung KB nya di Kaliwadas saja. Akhirnya Ibu RW dan Ibu Siti tidak mau ambil pusing, minta tolong ke kita. Kita pun masih awam sama PIK-R, tidak tau. Sehingga dari Ibu RW dan Ibu Siti gamau ambil pusing, lari lah kesini awal mula pembuatan PIK-R disini. Kendala PIK-R kadang soal waktu, ada pekerjaan lain, salah paham, itu aja.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan I<sub>8</sub>, I<sub>9.1</sub>, I<sub>9.2</sub>, I<sub>9.3</sub>, dan I<sub>9.4</sub> mengenai apakah kendala yang dihadapi oleh pengelola selama proses pengelolaan kampung KB. Kesimpulan yang didapat adalah kendala dalam fasilitas sarana dan prasarana kampung KB di Kaliwadas, belum adanya rumah data dan kesekretariatan KKB, belum adanya tempat yang layak untuk pelaksanaan BKB PAUD, juga belum adanya tempat untuk PIK-R karena masih menggunakan/menumpang kepada kobong. Untuk kendala selanjutnya yang disampaikan oleh ketua BKR dan BKL yaitu adanya kecemburuan sosial terhadap yang mengikuti pembinaan yang dilaksanakan oleh DP3AKB, karena ada yang sangat ingin datang tetapi tidak mendapatkan gikiran ada pula yang tidak mau datang namun tidak ada perwakilan dari poktannya, namun saling iri tetap ada,

menurut peneliti hal seperti ini seharusnya tidak perlu terjadi, karena tidak ditentukan oleh DP3AKB siapa yang berhak datang, maka terjadi hal tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa narasumber terkait dengan indikator tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana dapat disimpulkan, tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana yaitu pengurus kampung KB hanya sebatas melakukan kegiatan yang di berikan oleh DP3AKB saja tidak menyalurkan dan berinisiatif memberikan kepada masyarakat, dan mereka belum tanggap dalam hal permasalahan yang terjadi. Masyarakat pun belum banyak yang mengetahui program kampung KB secara keseluruhan.

#### **4.4 Pembahasan Hasil Penelitian**

Pada penelitian ini peneliti akan menguraikan pembahasan hasil penelitian atas dasar data yang diperoleh peneliti dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, serta studi kepustakaan terkait dengan implementasi program kampung Keluarga Berencana (KB) di Kampung Kaiwadas Kelurahan Lopang Kecamatan Serang Kota Serang Provinsi Banten yang meliputi beberapa indikator diantaranya sebagai berikut:

Implementasi program kampung KB merupakan penelitian mengenai bagaimana program kampung KB berlangsung, namun pelaksanaannya tidak akan sempurna apabila hanya BKKBN, DP3KB, dan pos penyuluhan KB saja yang melaksanakan kegiatan pembinaan dan memberikan kegiatan-kegiatan kepada kampung KB tersebut, melainkan perlu adanya partisipasi aktif dari masyarakat untuk berlangsungnya kegiatan-kegiatan di kampung KB ini.



Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada kegiatan poktan (kelompok kegiatan) kampung KB. Peneliti melakukan wawancara dan observasi lapangan untuk memperoleh informasi yang dapat mendukung terhadap fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Peneliti melakukan wawancara dengan pihak BKKBN, DP3AKB, Pos Penyuluhan KB, Kelurahan, Pengurus kampung KB, dan Masyarakat kampung KB. Teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teori implementasi menurut Merille S Grindle.

#### **4.4.1 *Content of policy***

##### **1. Kepentingan yang Mempengaruhi Kebijakan**

Pada suatu pelaksanaan atau pengimplementasian suatu kebijakan program pasti akan mengarah kepada kepentingan-kepentingan awal yang tentunya akan mempengaruhi jalannya kebijakan atau program yang telah dibuat sebelumnya. Dalam implementasi program kampung KB ini terdapat kepentingan yang mempengaruhi di dalam pelaksanaannya sebagai berikut:

Pertama, kepentingan program kampung KB yang terdiri dari 3 program utama, yaitu program kependudukan, program KB-KR (Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi), dan program PK (Pembangunan Keluarga) yang berintegrasi dengan lintas sektor. Namun di kampung KB Kaliwadas ini baru berjalan program KB-KR dan program PK. Di kampung KB terdapat kelompok kegiatan yang terdiri dari BKB, BKR, BKL, PIK-R, dan UPPKS yang termasuk program PK (Pembangunan Keluarga), namun hanya UPPKS yang berjalan 1 kecamatan, jadi kelompoknya 1 kelurahan, di kelompok Kelurahan Lopang yaitu kelompok UPPKS Tunas, terdapat anggota dari masyarakat Kampung Kaliwadas,

terdapat 1 kelompok UPPKS di Kelurahan Lopang, ketua UPPKS nya yaitu Ibu Raminah yang juga merupakan Ketua Forum Kelurahan Lopang. Untuk pelaksanaan KB itu berbeda dari poktan (kelompok kegiatan) hal utamanya KB, namun terdapat poktan yang menjadi program pembangunan keluarga.

Kedua, Kepentingan poktan yang berada di Kampung Kaliwadas yang terdiri dari 5 poktan. Pertama, BKB (Bina Keluaruga Balita) yang memiliki sasaran keluarga yang mempunyai balita, dan balitanya tersebut, berintegrasi dengan PAUD dan posyandu. Poktan BKL di Kampung Kaliwadas kegiatannya yaitu pada PAUD. Pembinaan ketua poktan BKB telah dilakukan oleh DP3AKB, namun ketua BKB mengaku baru pernah sesekali menyampaikan cara merawat anak di posyandu dengan cara mengobrol seperti biasa. Kedua, BKR (Bina Keluarga Remaja) yang memiliki sasaran keluarga yang memiliki remaja dan remaja itu sendiri. Poktan BKR di Kampung Kaliwadas kegiatannya belum ada, pernah sesekali melakukan gotong royong sewaktu awal-awal dicanangkan menjadi kampung KB, namun ketua poktan mengaku kegiatan BKR itu mengaji disatukan dengan BKL. Pembinaan ketua BKR telah dilakukan oleh DP3AKB, namun ketua BKR belum pernah menyampaikan kepada masyarakat. Ketiga, BKL (Bina Keluarga Lansia) yang memiliki sasaran keluarga yang mempunyai lansia dan lansia nya tersebut. Poktan BKL di Kampung Kaliwadas kegiatannya yaitu tensi dan menimbang berat badan berbarengan dengan kegiatan posyandu. Untuk senam lansia, pernah diadakan satu kali selama menjadi kampung KB. Pembinaan kepada ketua poktan BKL telah dilakukan oleh DP3AKB, namun ketua BKL belum pernah melakukan kegiatan untuk menyampaikan cara-cara mengurus lansia yang telah di berikan

pembinaan oleh DP3AKB. BKL seharusnya mengajarkan kepada keluarga-keluarga yang punya lansia untuk bisa membina dan mendidik lansia-lansia itu tetap produktif, tetap punya aktivitas, tetap sehat, tidak minder, hal tersebut merupakan output yang diharapkan dari BKL, jadi sasarannya bukan hanya keluarganya saja, tapi juga lansianya. Keempat, PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling- Remaja) yang memiliki sasaran remaja. Poktan PIK-R di Kampung Kaliwadas kegiatannya yaitu mengaji, poktan PIK-R di Kampung Kaliwadas yaitu berada di sebuah kobong/pesantren khusus laki-laki, dan mereka mengaji merupakan termasuk kegiatan rutin PIK-R. Pembinaan kepada ketua poktan PIK-R sudah dilakukan oleh DP3AKB, namun karena kekurangan fasilitas, sarana dan prasarana, ketua poktan PIK-R belum pernah melakukan sosialisasi PIK-R. Dan yang kelima, UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) yang memiliki sasaran anggota keluarga yang mempunyai keinginan untuk melakukan usaha. Poktan UPPKS kegiatannya yaitu produksi makanan olahan dari ikan, di Kampung Kaliwadas terdapat 1 kelompok UPPKS yang bernama UPPKS “TUNAS” dengan diketuai oleh Ibu Suprihatin dan terdapat 7 anggota lainnya. Di Kecamatan Serang terdapat 4 UPPKS, yaitu UPPKS Ratu di Lontar Baru, UPPKS Yudistira di Cimuncang, UPPKS Kreasi di Unyur, dan UPPKS Tunas di Lopang, yang anggotanya ada dari Kampung KB Kaliwadas.

Dapat disimpulkan, kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi pelaksanaan program kampung KB yaitu 3 program utama kampung KB, yang terdiri dari program kependudukan, program KB-KR (Keluarga Berencana dan Kesehatan

Reproduksi), dan program PK (Pembangunan Keluarga), juga kepentingan 5 poktan kampung KB yaitu BKB, BKR, BKL, PIK-R, dan UPPKS. Karena kampung KB adalah wadah, yang di dalamnya terdapat program KB, program KSPK, pengendalian penduduk, dan bidang pembangunan lainnya. Koordinasi yang dilakukan adalah dari BKKBN ke DP3AKB lalu ke UPT kecamatan (Pos Penyuluhan KB) setelah itu langsung ke kampung KB. Kampung KB sebenarnya 1 kelurahan namun untuk penggarapan wilayahnya 1 RW, di Kota Serang terdapat masing-masing 1 kampung KB di tiap kecamatan kecuali di Taktakan terdapat 2 kampung KB. Kampung KB selalu di prioritaskan dibandingkan dengan yang lain. Menjadi kampung KB di Kota Serang salah satu alasannya karena pencapaian KB nya sangat rendah, yang menentukan wilayahnya yaitu dari BKKBN. Jadi kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi pelaksanaan program kampung KB terdapat pada kepentingan BKKBN untuk meningkatkan program KB-KR, program PK, dan program kependudukan.

## **2. Jenis Manfaat yang Dihasilkan**

Suatu kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah akan memperoleh manfaatnya, baik itu merupakan manfaat yang dihasilkan ataupun manfaat yang diharapkan sebelumnya. Dalam hal implementasi program kampung KB di Kampung Kaliwadas terdapat manfaat yang diharapkan yaitu untuk dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

Sedangkan manfaat yang dihasilkan dari implementasi program kampung KB di Kampung Kaliwadas yaitu meningkatnya akseptor KB/ peserta KB dan memberikan wawasan pengetahuan kepada pengurus kampung KB juga masyarakat. Namun manfaat yang dihasilkan dari program kampung KB di Kampung Kaliwadas belum maksimal, karena pelaksanaan dari program kampung KB di Kampung Kaliwadas berjalan hanya dari BKKBN ke DP3AKB ke Pos Penyuluhan KB dan ke ketua poktan kampung KB saja, berhenti sampai disitu, karena ketua poktan kampung KB tidak menyalurkan kembali hasil dari pembinaan yang telah diberikan oleh DP3AKB, dan tidak ada inisiatif untuk membuat kegiatan rutin atau penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat. Dilain sisi DP3AKB pernah turun langsung ke masyarakat untuk memberikan penyuluhan langsung ke masyarakat namun hal tersebut tidak rutin. Pengurus kampung KB tidak menjalankan tugas dengan maksimal. Masyarakat masih banyak yang belum mengetahui program kampung KB, juga masih kurangnya fasilitas penunjang program kampung KB di Kampung Kaliwadas ini.

Selain itu, Peningkatan keterlibatan keluarga dalam poktan (kelompok kegiatan) di Kampung KB Kaliwadas masih kurang sehingga masyarakat belum mendapatkan manfaatnya secara maksimal. Partisipasi poktan dalam kampung KB dapat dilihat pada website kampung KB, yang bertugas mengupdate di website kampung KB adalah PLKB yang berada di UPT Kecamatan/Pos Penyuluhan KB. Partisipasi diukur dari kesertaan masyarakat dalam poktan. Ada laporan pengendalian penduduk, disitu terdapat berapa jumlah keluarga, jumlah keluarga yang memiliki balita, jumlah keluarga yang memiliki remaja, jumlah

keluarga yang memiliki lansia, dan jumlah remaja. Terdapat pula jumlah anggota poktan BKB, BKR, BKL, PIK-R, dan UPPKS. Jumlah partisipasi dihitung satu Kelurahan, jadi seharusnya poktan itu ada di tiap kampung di 1 kelurahan kampung KB itu, karena kampung KB itu sebenarnya 1 kelurahan, namun yang menjadi fokus utamanya itu 1 RW, maka tingkat partisipasi di hitung untuk 1 kelurahan. Namun di Kelurahan Lopang ini, terdapat poktan hanya di daerah utama kampung KB yaitu di Kampung Kaliwadas saja, kecuali poktan UPPKS, yang mencakup 1 kelurahan.

Disisi lain, manfaat program kampung KB sangat dirasakan oleh pengurus kampung KB khususnya pengurus poktan kampung KB di Kampung Kaliwadas. Karena partisipasi ketua kelompok kegiatan dalam pembinaan oleh DP3AKB sudah bagus, karena memang tiap poktan diundang ada kuotanya, dan diberi uang transport, namun seharusnya ketua poktan tersebut menyampaikan kembali kepada masyarakat hasil pembinaan tersebut, karena tujuannya diberikan pembinaan untuk disampaikan lagi kepada masyarakat. Hal ini lah yang membuat tingkat partisipasi masyarakat rendah dalam poktan, karena memang ketua poktan belum bisa menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan keterbatasan sarana dan prasarana salah satunya, juga ketidaksadaran dari ketua poktan tersebut.

Jadi dapat disimpulkan, jenis manfaat yang dihasilkan dalam pelaksanaan program kampung KB di Kampung Kaliwadas yaitu awalnya memang manfaat yang dirasakan oleh masyarakat kampung KB yaitu dengan adanya kegiatan di kampung KB, namun sekarang karena minimnya kegiatan poktan, masyarakat

kurang merasakan manfaat adanya Kampung KB di Kaliwadas. Pengurus kampung KB atau ketua poktan (kelompok kegiatan) mendapatkan manfaat positif dengan mengikuti pembinaan dari DP3AKB, namun manfaat tersebut tidak disalurkan kembali kepada masyarakat. dampaknya partisipasi masyarakat menjadi rendah. Adapula manfaat yang dirasakan yaitu meningkatnya jumlah akseptor KB di Kampung Kaliwadas, masyarakat dapat merasakan manfaat adanya program kampung KB yaitu dari pelayanan KB gratis.

### **3. Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai**

Pada suatu pelaksanaan kebijakan pasti memiliki suatu target atau ukuran perubahan yang ingin dicapai, seperti perubahan yang diinginkan ataupun perubahan yang sudah dihasilkan dari pelaksanaan suatu kebijakan. Dalam pelaksanaan program kampung KB ini, terdapat suatu derajat perubahan yang ingin dicapai, perubahan tersebut secara umum terdapat pada tujuan dari program kampung KB yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program KKBPK dan juga pembangunan di sektor terkait untuk mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas.

Disisi lain, perubahan yang ingin dicapai yang terdapat di Kampung KB Kaliwadas yaitu terdapat pada penerapan 8 fungsi keluarga, dalam kehidupan masyarakat di kampung KB Kaliwadas tanpa disadari cukup baik. Karena setiap pembinaan yang dilakukan langsung oleh DP3AKB kepada masyarakat di kampung KB Kaliwadas ini, sudah memasuki 8 fungsi keluarga ini. Diantaranya fungsi keagamaan, pendidikan/sosialisasi, reproduksi, ekonomi, perlindungan, kasih sayang, sosial budaya, dan pembinaan lingkungan. Pihak DP3AKB dan pos

penyuluhan KB sudah memasukkan ke delapan fungsi keluarga tersebut dalam setiap kegiatan yang mereka laksanakan, baik pada pembinaan krtua poktan, maupun pada sosialisasi langsung yang dilakukan kepada masyarakat di Kampung KB Kaliwadas. Jadi disetiap kegiatan diterapkan 8 fungsi keluarga.

Selain itu, dalam kampung KB terdapat indikator keberhasilan yang menjadi tolak ukur keberhasilan program Kampung KB dalam kependudukan, KB dan pembangunan keluarga. Secara keseluruhan setiap keluarga di Kampung KB Kaliwadas belum mampu melaksanakan fungsi secara optimal yaitu 8 fungsi keluarga yang terdiri dari fungsi keagamaan, fungsi sosialisasi/pendidikan, fungsi reproduksi, fungsi ekonomi, fungsi perlindungan, fungsi kasih sayang, fungsi sosial budaya, dan fungsi pembinaan lingkungan; untuk kesertaan ber-KB, masyarakat Kampung KB Kaliwadas terbina cukup baik kesertaan ber-KB nya; di Kampung KB Kaliwadas belum tersedianya pusat-pusat pelayanan KKBPK salah satu buktinya dengan belum adanya puskesmas di Kampung Kaliwadas, selama ini Kampung Kaliwadas diarahkan ke puskesmas Unyur; di Kampung KB Kaliwadas partisipasi keluarga dalam kelompok kegiatannya belum meningkat; juga belum tumbuh dan berkembangnya “gotong royong masyarakat dalam membangun kampung KB”.

Jadi dapat disimpulkan, derajat perubahan yang ingin dicapai pada pelaksanaan program kampung KB di Kaliwadas belum sesuai dengan indikator keberhasilan salahsatunya perubahan yang diinginkan para pihak pelaksana kampung KB yang terdapat pada tujuan kampung KB dan juga 8 fungsi keluarga, adanya beberapa hambatan seperti pengurus kampung KB yang kurang mengetahui dan memahami



8 fungsi keluarga juga acara atau kegiatan yang dilaksanakan di kampung KB yang belum tepat sasaran, sehingga dapat menyebabkan perubahan yang diharapkan kurang maksimal. Dari adanya hambatan yang terjadi maka tujuan dari program kampung KB tersebut yang tertuang dalam buku petunjuk teknis kampung KB tidak tercapai sepenuhnya, peneliti menemukan selain kurangnya minat masyarakat juga belum adanya penerapan secara maksimal dari 8 fungsi keluarga.

#### **4. Letak pengambilan keputusan**

Pada suatu kebijakan adanya letak pengambilan keputusan merupakan hal yang sangat penting. Hal ini dikarenakan suatu kebijakan akan jelas di implementasikan jika letak pengambilan keputusan sudah diketahui, letak pengambilan keputusan dalam implementasi program kampung KB yaitu berada di pihak BKKBN dan DP3AKB.

Selain itu, dukungan dari lintas sektor terhadap program kampung KB di kampung Kaliwadas juga berperan penting dalam pengambilan keputusan di kampung KB, namun lintas sektor ini belum berjalan dengan maksimal, karena belum banyak lintas sektor yang bekerjasama dengan Kampung KB Kaliwadas, dan yang sudah pernah bekerjasama pun belum terdapat dampak yang terlihat jelas, sehingga belum maksimal. Lintas sektor yang sudah pernah ada di Kampung Kaliwadas bekerjasama dengan DP3AKB, karena yang mengajukan kepada lintas sektor yang telah mendukung kampung KB di Kampung Kaliwadas sejauh ini didapatkan oleh DP3AKB. Sejauh ini dinas yang sudah bekerja sama dengan DP3AKB dalam pembangunan kampung KB baru dinas kesehatan, dinas

lingkungan hidup, KUA dan pengadilan agama. Lintas sektor yang telah masuk ke Kampung KB di Kaliwadas yaitu dinas lingkungan hidup yang pernah memberikan tempat sampah 3 jenis kepada Kampung Kaliwada, juga memberikan pohon untuk di tanam di lingkungan Kampung Kaliwadas. Namun tempat sampah tersebut sudah lama rusak dan tidak terpakai, sehingga sekarang sudah tidak ada. Pohon yang diberikan oleh dinas lingkungan hidup pun tidak ada lahan untuk menanamnya, jadi diberikan kepada UPT kecamatan/pos penyuluhan KB untuk ditanam diberbagai tempat. Kondisi lingkungan Kampung Kaliwadas terdapat tempat pembuangan sampah yang tidak terurus dan tidak dikelola dengan baik, sehingga tidak enak dipandang, dan mengganggu penciuman warga sekitar tempat pembuangan tersebut. Untuk KUA, pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kampung Kaliwadas, menjadi narasumber dalam kegiatan kampung KB.

Disisi lain, sebenarnya dari kampung KB bisa mengajukan langsung kepada dinas manapun untuk lintas sektor ini, namun karena ketidaktahuan masyarakat dan kurangnya informasi untuk itu, membuat masyarakat mengandalkan kepada DP3AKB saja, sedangkan sebenarnya masyarakat membutuhkan kegiatan dan fasilitas yang mungkin saja bisa diberikan oleh lintas sektor, karena kampung KB ini adalah kampung prioritas.

Dilain sisi berikutnya, belum terdapat pengambilan keputusan oleh pengurus Kampung KB di Kampung KB Kaliwadas. karena penyusunan rencana kegiatan di Kampung KB Kaliwadas pun belum ada, sehingga mereka belum mengadakan kegiatan-kegiatan yang memang membutuhkan perencanaan. Hal ini pun didasari

karena kurangnya fasilitas sarana dan prasarana, di Kampung KB Kaliwadas ini belum ada ada kesekretariatan KKB (Kependudukan dan Keluarga Berencana) yaitu untuk ketua poktan melakukan perencanaan dan kegiatan, yang memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan seperti penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat. Selama ini kalau ada kegiatan sosialisasi langsung dari DP3AKB ke masyarakat Kampung KB Kaliwadas, mereka menggunakan masjid untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Fasilitas di Kampung KB Kaliwadas ini pun belum memadai, karena masih menggunakan rumah warga yaitu rumah Ibu Siti sebagai pos KB, hampir setiap kegiatan dilakukan disitu, seperti posyandu, melakukan senam lansia, dan kalau ada sesuatu, ketua poktan pasti datang ke rumah Ibu Siti, karena Ibu Siti ini juga merupakan Sekretaris Kampung KB. Kalau rencana kegiatan di pos penyuluhan KB untuk Kampung KB Kaliwadas sudah ada, dan beberapa kali dilakukan.

Selanjutnya, koordinasi yang dilakukan terhadap implementasi program kampung KB sebenarnya dari BKKBN ke DP3AKB, dari DP3AKB ke UPT Kecamatan/Pos Penyuluhan KB, lalu dari pos penyuluhan KB langsung ke kampung KB. Untuk laporan sendiri, biasanya dari ketua poktan kampung KB ke pos penyuluhan KB, lalu oleh pos penyuluhan KB di olah data tersebut sebelum di berikan ke DP3AKB, dan DP3AKB melaporkan kembali ke BKKBN dengan cara mengisi website yang telah disediakan. Sehingga letak pengambilan keputusan terbesar memang terdapat pada BKKBN.

Dapat disimpulkan, letak pengambilan keputusan pada pelaksanaan program kampung KB berada di tangan BKKBN dan DP3AKB. Hasil wawancara peneliti

menemukan bahwa BKKBN dan DP3AKB tidak melibatkan dan tidak mendiskusikan program kegiatan yang akan dilaksanakan pada kampung KB di Kampung Kaliwadas dengan pengurus kampung KB atau pengurus poktan (kelompok kegiatan) di Kampung KB Kaliwadas pada saat sebelum kegiatan dibuat. BKKBN dan DP3AKB hanya melibatkan UPT Kecamatan Serang (Pos Penyuluhan KB), lalu oleh UPT Kecamatan Serang (Pos Penyuluhan KB) di koordinasikan dengan pengurus Kampung KB dan pengurus poktan (kelompok kegiatan) ketika kegiatan tersebut sudah ada dan dibuat.

### **5. Pelaksana Program**

Indikator pelaksanaan program dalam suatu pelaksanaan kebijakan atau program sangatlah berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan pada saat program tersebut diimplementasikan. Dalam pengimplementasian program kampung KB ini terdapat pelaksana program yang mendukung jalannya program tersebut yaitu BKKBN, DP3AKB, dan Pos Penyuluhan KB.

Pelaksana program kampung KB yang pertama yaitu BKKBN yang menjelaskan bahwa mereka rutin pertanggal 20 mengadakan rapat pengendalian program, jadi dalam rapat pengendalian program tersebut adalah media evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan, hal tersebut sudah melakukan pengawasan terlebih dahulu ke kampung KB. Kedua yaitu DP3AKB yang melakukan monitoring dan penggerakkan di kampung KB, hal tersebut sembari melakukan pengawasan pelaksanaan kampung KB. Dalam kegiatan yang dilakukan oleh DP3AKB ke kampung KB, mereka selalu melakukan monitoring pengawasan untuk evaluasi kedepannya.

Untuk pelaksana program ketiga yaitu pos penyuluhan KB, melaksanakan pelayanan KB di kampung KB cukup baik, karena sudah ada pelayanan KB gratis yang dilakukan oleh DP3AKB kepada Kampung KB Kaliwadas, baik itu melalui pos penyuluhan KB yang melaksanakan pelayanan di kantor pos penyuluhan KB, baik itu di puskesmas, dan juga pernah langsung datang mobil pelayanan KB ke Kampung KB Kaliwadas langsung. Tidak terdapat puskesmas di Kelurahan Lopang, namun Kampung KB Kaliwadas mempunyai Bidan, dari Puskesmas Pembantu (postu) di puakesmas terdekat yaitu puskesmas Unyur. Posyandu berjalan lancar dan rutin setiap bulan pasti dilaksanakan. Peningkatan pengguna KB pun cukup pesat di Kampung KB Kaliwadas ini. Bidan yang mengurus khusus di Kampung KB Kaliwadas dari puskesmas Unyur pun setiap posyandu datang ke rumah Ibu Siti tempat dilaksanakannya posyandu di Kampung KB Kaliwadas. Biasanya kader-kader di Kampung KB Kaliwadas akan mengajukan untuk pelayanan KB ke DP3AKB melalui pos penyuluhan KB Kecamatan Serang ketika ada akseptor KB baru, ketika banyak akseptor KB (Ibu yang ingin ber-KB, maka dilaksanakanlah pelayanan KB.

Dapat disimpulkan, pelaksana program dalam implementasi program kampung KB di Kampung Kaliwadas sebenarnya hanya terdapat 2 pihak pelaksana program yaitu BKKBN dan DP3AKB. Namun terdapat pelaksana program lain yang berperan penting karna yang mengkoordinasikan antara pihak BKKBN dan DP3AKB kepada pengurus kampung KB atau masyarakat Kampung KB Kaliwadas yaitu Pos Penyuluhan KB Kecamatan Serang. Sehingga dalam pengimplementasian program kampung KB ini terdapat 3 pelaksana program

yang mendukung jalannya program tersebut yaitu BKKBN, DP3AKB, dan Pos Penyuluhan KB.

## **6. Sumber Daya yang Digunakan**

Kebijakan atau program akan berhasil diimplementasikan jika menggunakan dan didukung dengan sumberdaya yang baik. Adapun dalam implementasi program kampung KB ini menggunakan sumberdaya yang mencakup mengenai sumberdaya manusia dan sumberdaya financial yang digunakan dalam pelaksanaan program kampung KB tersebut. Sumberdaya yang digunakan yaitu:

Pertama, sarana dan prasarana yang ada dalam menunjang Kampung KB. Sarana dan prasarana yang paling dibutuhkan yaitu rumah data dan kesekretariatan KKB, jadi ada tempat untuk melakukan kegiatan kampung KB. Sarana yang seharusnya ada di kampung KB yaitu seperti untuk BKB ada buku materi tentang BKB, materi kesehatan reproduksi, dan juga sarana lainnya seperti BKB Kit dan lain-lain, itu merupakan sarana utama yang seharusnya terdapat di BKB. Untuk BKR sarana yang seharusnya ada yaitu buku materi perencanaan keluarga, buku materi TRIAD KRR, buku materi komunikasi efektif orang tua terhadap remaja, buku materi peran orang tua dalam pembinaan tumbuh kembang remaja, buku materi kebersihan dan kesehatan diri remaja, dan buku materi pemenuhan gizi remaja, juga materi kesehatan reproduksi dan sarana lainnya seperti GenRe Kit, alat permainan edukatif GenRe, lembar balik GenRe dan lain-lain. Untuk BKL yaitu buku materi tentang lansia, materi kesehatan reproduksi, BKL Kit, media

partisipatif dan lain-lain. Untuk PIK-R tidak ada tertera saran khusus yang seharusnya dimiliki oleh poktan PIK-R, untuk UPPKS seharusnya ada sarana buku materi informasi pemberdayaan ekonomi keluarga, 8 langkah tingkatan penghasilan keluarga menuju ekonomi kuat dan mandiri, pengelolaan usaha kelompok, dan materi kesehatan reproduksi. Untuk perlengkapan posyandu, sudah ada fasilitas timbangan bayi dan timbangan dewasa yang disimpan khusus di Kampung KB Kaliwadas, kalau fasilitas lain untuk pelaksanaan posyandu itu dari bidan yang bawa, untuk fasilitas rumah menggunakan rumah Ibu Siti, meja dan kursi pun milik Ibu Siti. Untuk poktan BKB yang berintegrasi dengan posyandu, terdapat KKA (Kartu Kembang Anak). BKB juga berintegrasi dengan PAUD, di PAUD terdapat papan tulis dan spidol yang menurut ketua poktan BKB diberikan oleh salah satu orang dinas karena kasihan kurangnya fasilitas untuk PAUD. Untuk BKR, BKL, dan PIK-R belum ada fasilitas apapun untuk menunjang kegiatan mereka. Kegiatan pengajian PIK-R pun di kobong yang kurang layak.

Kedua, dana dan anggaran dalam menunjang program kampung KB. Dana dan anggaran dalam menunjang program kampung KB ada dari BKKBN melalui DAK (Dana Alokasi Khusus) BOKB (Bantuan Operasional Keluarga Berencana) untuk kabupaten/kota, itu kurang lebih untuk daerah DTPK itu 105 juta pertahun, non DTPK itu 100 juta pertahun (daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan terluar). Sedangkan menurut DP3AKB DAK (dana alokasi khusus) itu bukan khusus untuk kampung KB saja, tapi untuk pelayanan KB juga. Selama ini ada dana di kampung KB atas inisiatif Ibu Imas pihak DP3AKB, dengan kesepakatan ketua kampung KB untuk setiap ketua poktan yang ikut pembinaan oleh DP3AKB

setiap bulan, menyisihkan sebagian uangnya untuk kas kampung KB. Peserta yang hadir di acara yang kita laksanakan itu mendapatkan transport Rp50.000, itu kita sepakati agar kampung KB punya uang kas, Rp50.000 itu disisihkan setengah, jadi Rp30.000 untuk yang hadir, Rp20.000 disimpan. Rp20.000 dikali yang hadir ada beberapa orang per pertemuan, itu disimpan ke bendahara. Sejauh ini belum ada APBD, adanya DAK (dana alokasi khusus) dari BKKBN pusat.

Dapat disimpulkan, sumber daya yang digunakan dalam program kampung KB yaitu Sarana dan prasarana juga dana untuk Kampung KB Kaliwadas belum semuanya maksimal dikerahkan. Adapun terkait dengan sumber daya dari pihak dinas juga belum memadai dan belum terjalin kerjasama dari sisi pelaksanaan, akan tetapi dari segi sumber daya finansial dalam program ini diperoleh dari pihak BKKBN dan DP3AKB selaku pelaksana program kampung KB yang diberikan DAK (dana alokasi khusus). Hal ini didukung dari pernyataan pengurus kampung KB yang menyebutkan bahwa sarana dan prasarana belum mencukupi atau sesuai.

#### **4.4.2 *Context of policy***

##### **1. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan Strategi dari Aktor yang Terlibat.**

Pada suatu kebijakan akan memperhatikan dan mempertimbangkan kekuatan atau kekuasaan, kepentingan-kepentingan serta strategi yang digunakan oleh pihak pelaksana suatu kebijakan. Jika hal tersebut tidak direncanakan secara matang maka keberhasilan dalam suatu implementasi kebijakan program akan sulit dijalankan secara optimal. Dalam implementasi program kampung KB ini terdapat



kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat yang telah digunakan yaitu sebagai berikut:

Pertama, Pembinaan bagi pengurus kampung KB. Guna meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di Kampung KB, maka BKKBN dan DPAKB mengadakan pembinaan bagi pengurus kampung KB. Pembinaan dilakukan oleh BKKBN dan DP3AKB. Mekanisme pembinaan terdapat 2 pola, jenis pola pembinaan pertama langsung dari lembaga pembina kepada pengurus maupun kepada masyarakat. Pola pembinaan kedua bisa dilakukan berjenjang dari lembaga pembina kepada pengurus pokja, kemudian pengurus pokja membuat rencana untuk menindaklanjuti hasil pembinaan tersebut untuk disampaikan kepada masyarakat. Tetapi ada hal-hal yang tidak bisa diteruskan kepada masyarakat, yang sifatnya hanya berhenti di pengurus pokja seperti pembinaan untuk pengurus pokja itu sendiri, seperti bagaimana pengurus pokja itu bisa menjalankan roda organisasi sesuai dengan tata aturan sebuah organisasi, administrasi cara penyusunan rencana kerja, cara penyusunan laporan hasil pekerjaan, cara menginput laporan website kampung KB, dan lain-lain. Tapi untuk pembinaan yang sifatnya program, seharusnya diteruskan kepada masyarakat, seperti pembinaan tentang kesehatan reproduksi, pembinaan tentang bagaimana cara mendidik anak-anak, menjadi orang tua hebat, dan lain-lain. Pembinaan tersebut bertujuan untuk memberikan wawasan kepada pengurus pokja, jadi pengurus pokja dibekali wawasan untuk digunakan dan disampaikan kembali kepada masyarakat. Jadi, untuk pembinaan yang diberikan kepada pengurus pokja, seharusnya pengurus pokja tersebut menyampaikan lagi ke masyarakat, seharusnya membuat rencana

kegiatan khusus di daerah Kampung KB nya. Tiap bulan dari DAK (Dana Alokasi Khusus) ada pertemuan pokja kampung KB. Pertemuan pokja kampung KB itu terdiri dari pertemuan lokmin kampung KB, forum musyawarah, dan pembinaan ketua poktan. Jadi 1 bulan sekali ada pertemuan khusus juga untuk kampung KB.

Kedua, sosialisasi yang dilakukan dalam memberikan pemahaman tentang program kampung KB. Sosialisasi yang dilakukan dalam memberikan pemahaman tentang program kampung KB sudah dilakukan diawal pembentukan kampung KB, setelah penancangan kampung KB dilakukan oleh Walikota Serang. BKKBN dan DP3AKB telah turun langsung ke masyarakat untuk memberikan sosialisasi dan pemahaman ke masyarakat bahwa kampung mereka telah dijadikan kampung KB. Untuk sosialisasi penyampaian dari pembinaan yang telah dilakukan DP3AKB kepada pengurus pokja ada pengurus yang telah menyampaikan, ada pula yang belum menyampaikan. Untuk Ketua BKB mengaku pernah melakukan sosialisasi dari yang telah didapatkan dari pembinaan yang diselenggarakan oleh DP3AKB, namun sosialisasi itu hanya pernah dilakukan sekali di posyandu kepada ibu-ibu tentang cara merawat anak yang baik dan benar. Untuk BKR, BKL dan PIK-R belum pernah melakukan sosialisasi apapun terhadap ibu yang memiliki remaja. Sedangkan UPPKS pernah melakukan hanya kepada anggota UPPKS yang masuk kedalam kelompok UPPKS.

Dapat disimpulkan, kekuasaan, kepentingan-kepetingan dan strategi aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program kampung KB di Kampung Kaliwadas. BKKBN dan DP3AKB merupakan yang memiliki kekuasaan, UPT

Kecamatan/Pos Penyuluhan KB hanya menjalankan intruksi dari DP3AKB. Untuk kepentingan kesejahteraan keluarga. Setiap aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program KB ini menjalankan tugasnya sesuai dengan kewenangan dan kepentingan yang dibuat dan menggunakan strategi yang ada terkecuali pengurus kampung KB dan pengurus poktan kampung KB yang belum menjalankan tugasnya untuk menyalurkan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat.

Selain itu, strategi yang digunakan dan dilaksanakan sudah tertata secara rapi tetapi sosialisasi yang dilakukan pihak pemerintah yaitu BKKBN dan DP3AKB seharusnya tidak cukup sampai disitu saja. Sosialisasi program kampung KB hanya dilakukan pada saat awal pembentukan/pencanangan kampung KB. Ditemukan juga hambatan-hambatan yang menjadi kelemahan dari program kampung KB seperti masyarakat juga sarana dan prasarana yang tidak mendukung.

## **2. Karakteristik Lembaga dan Rezim yang Berkuasa**

Pada suatu pelaksanaan kebijakan, lingkungan dimana kebijakan tersebut akan diterapkan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya. Implementasi program kampung KB terdapat karakteristik dari lembaga dan rezim yang berkuasa yang turut mempengaruhi lingkungan dimana dimana suatu kebijakan tersebut diterapkan. Adapun dalam implementasi program kampung KB ini terdapat karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa seperti:

Karakteristik BKKBN dalam program kampung KB yaitu melakukan pembinaan, pengembangan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan nasional dibidang

pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga; melakukan pembinaan, pembimbingan dan fasilitas pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria ke bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga; melakukan penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi dibidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga; melakukan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi, penggerakan hubungan antar lembaga, bina lini lapangan serta pengelolaan data dan informasi dibidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga; penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan dibidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga; melakukan pelaksanaan tugas administrasi umum, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya; juga melakukan pembinaan dan fasilitasi terbentuknya badan kependudukan dan keluarga berencana daerah provinsi, kabupaten dan kota.

Peran dari *stakeholder* dan kesiapan *stakeholder* dalam program kampung KB yaitu DP3AKB dengan BKKBN, yang merupakan lembaga yang mengelola program KB. Perbedaannya kalau DP3AKB adalah organ daerah yang sudah dibawah gubernur, sedangkan BKKBN adalah instansi vertikal yang langsung

dibawah BKKBN pusat. Karena ini amanat undang-undang nomor 23 tahun 2014, ada pembagian kewenangan pelaksanaan program KKBPK antara pusat dan daerah. BKKBN di provinsi tidak melaksanakan fungsi provinsi, tetapi melaksanakan fungsi kewenangan BKKBN pusat yang ada di daerah. Program KB inisiasinya ada di BKKBN.DP3AKB berperan berdasarkan pasal 2 peraturan walikota nomor 14 tahun 2017, tugas pokok melaksanakan urusan wajib non pelayanan dasar di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pelayanan program keluarga berencana. Fungsinya untuk perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan administrasi urusan dibidang pemberdayaan perempuan dan masyarakat, perlindungan perempuan dan anak, pengendalian penduduk, advokasi pergerakan dan informasi serta keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Dapat disimpulkan, karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa pada implementasi program kampung KB dalam hal ini BKKBN bersifat fleksibel karena BKKBN dapat turun kelapangan langsung apabila ada kepentingan seperti melakukan monitoring dan evaluasi kampung KB, juga melakukan pembinaan langsung ke kampung KB. BKKBN tetap berada dalam posisi teratas membawahi pihak pelaksana kampung KB seperti DP3AKB, UPT Kecamatan Serang dan pokja kampung KB. Pihak pelaksana melaksanakan tugasnya sesuai dengan wewenangnya masing-masing.

### **3. Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon dari Pelaksana**

Pada pelaksanaan suatu kebijakan, kepatuhan dan respon dari pelaksana tidak kalah penting dengan indikator lainnya. Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana pada program kampung KB ini selain mencakup kepatuhan pelaksana program juga mencakup hambatan yang dirasakan oleh pihak pelaksana program sebagai berikut:

Pertama, pemahaman masyarakat terhadap kampung KB di Kampung Kaliwadas masih awam, karena kebanyakan dari mereka belum mengetahui secara keseluruhan apa itu kampung KB dan kegiatan apa saja yang ada di kampung KB, mereka hanya mengetahui kampung KB itu hanya KB, mungkin yang mengetahuinya hanya ketua kelompok kegiatan dan anggota kelompok kegiatan yang mengikuti pembinaan kampung KB dan memang yang mengurus kampung KB. Kalau ada kegiatan sosialisasi langsung ke masyarakat dari DP3AKB, masyarakat mengikuti sosialisasi tersebut karena mendapatkan pengumuman bahwa akan diadakan sosialisasi, tanpa mengetahui bahwa sosialisasi tersebut adalah dari kampung KB. Mungkin ada beberapa yang mengetahui bahwa itu adalah termasuk kedalam program kampung KB, namun hal itu diketahui oleh masyarakat yang sering mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan kampung KB saja. Untuk poktan BKB, masyarakat mengetahui PAUD dan posyandu, untuk PIK-R karena di kobong dan tidak ada kegiatan khusus, menjadikan itu hanya tempat mengaji seperti biasa.

Kedua, pertemuan rutin yang dilakukan oleh pengurus kampung KB di Kampung Kaliwadas keterbatasan di tempat, karena tidak ada tempat untuk melakukan pertemuan rutin di Kampung KB, ada rumah Bu Siti yang merupakan posko

kampung KB, namun hal tersebut masih belum membuat nyaman pengurus kampung KB dan Ketua Poktan untuk melakukan pertemuan rutin. Untuk pertemuan rutin pokja kampung KB yang diadakan oleh DP3AKB melalui pos penyuluhan KB selalu dilaksanakan. Sebulan sekali dilakukan pertemuan dengan ketua poktan kampung KB di pos penyuluhan KB berupa lokmin (lokakarya mini), pertemuan pokja, dan musyawarah.

Ketiga, terdapat kendala yang dihadapi oleh pengelola selama proses pengelolaan kampung KB di Kaliwadas yaitu, pertama kurangnya inisiatif pengurus KB dan ketua pokja dalam kegiatan kampung KB kepada masyarakat kampung KB, karena seharusnya setiap ada pembinaan dari DP3AKB, ketua pokja melakukan pembinaan juga kepada masyarakat kampung KB, namun di Kampung Kaliwadas ketua pokjanya tidak melakukan hal tersebut, hal itu menjadi kendala untuk keberhasilan program kampung KB. Kendala kedua pemahaman masyarakat tentang kampung KB yang masih kurang, karena masyarakat hanya mengetahui program kampung KB adalah program yang hanya tentang KB, menjadikan partisipasi masyarakat dalam kelompok kerja pun kurang. Kendala ketiga yaitu dari sarana dan prasarana kampung KB yang kurang memadai yaitu dari tidak adanya rumah data sehingga data-data di kampung KB Kaliwadas ini tidak lengkap dan berceceran, tidak adanya kesekretariatan KKB sehingga belum adanya mekanisme operasional seperti rapat perencanaan kegiatan, rapat koordinasi dengan dinas/instansi terkait pendukung kegiatan, sosialisasi kegiatan, juga monitoring dan evaluasi kegiatan. Kendala keempat yaitu kendala dari ketua poktan, dari ketua BKB yaitu kurangnya sarana dan prasarana untuk PAUD,

karena PAUD tempatnya masih menggunakan rumah yang tidak terpakai, fasilitasnya pun belum lengkap, seperti belum adanya meja untuk belajar dan kendala dana untuk memberikan gaji kepada guru PAUD tersebut, karena masih berupa iuran seikhlasnya. Kendala pada poktan BKR adalah kurang lengkapnya sarana dan prasarana seperti buku materi untuk BKR, dan juga masih ada kesalahpahaman terhadap pengurus poktan kampung KB, yang menjadikan saling iri untuk datang ke kegiatan pembinaan oleh DP3AKB. Kendala BKL yaitu kurangnya sarana dan prasarana dan juga kendala kesalahpahaman sama seperti BKR. Kendala PIK-R yaitu kendala sarana dan prasarana, tempat yang kurang layak dan karena memang PIK-R ini bergabung dengan pengajian di kobong, menjadikan tidak ada kegiatan aktif untuk PIK-R ini.

Dapat disimpulkan, tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana yaitu pengurus kampung KB hanya sebatas melakukan kegiatan yang di berikan oleh DP3AKB saja tidak menyalurkan dan berinisiatif memberikan kepada masyarakat, dan mereka belum tanggap dalam hal permasalahan yang terjadi. Masyarakat pun belum banyak yang mengetahui program kampung KB secara keseluruhan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pemaparan dan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai masalah dan temuan-temuan di lapangan terkait dengan penelitian “Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Kampung Kaliwadas Kelurahan Lopang Kecamatan Serang Kota Serang Provinsi Banten” Peneliti memperoleh kesimpulan akhir bahwa Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Kampung Kaliwadas Kelurahan Lopang Kecamatan Serang Kota Serang Provinsi Banten ini belum berjalan secara optimal karena kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat dan tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana dalam hal ini pengurus poktan (kelompok kegiatan) kampung KB Kaliwadas yang telah mengikuti pembinaan tidak menyampaikan atau berinisiatif membuat acara untuk kegiatan poktan kepada masyarakat. Seharusnya pengurus poktan (kelompok kegiatan) Kampung KB menyampaikan kembali materi yang telah mereka dapatkan dalam pembinaan dan berinisiatif membuat kegiatan untuk poktan (kelompok kegiatan), agar materi yang telah mereka dapat dari pembinaan dapat tersalurkan kepada masyarakat. Faktor lainnya, karena sumber daya yang digunakan yaitu belum ada anggaran khusus untuk Kampung KB, hanya ada DAK (Dana Alokasi Khusus) yang di keluarkan oleh BKKBN pusat, namun dana tersebut bukan hanya untuk program Kampung KB saja, melainkan untuk pelayanan KB secara menyeluruh

bagi Kabupaten/Kota sebesar Rp100.000.000 per tahun. Juga faktor sumber daya yang digunakan selanjutnya yaitu masih kurangnya sarana dan prasarana kampung KB. Yang terakhir yaitu letak pengambilan keputusan di Kampung KB Kaliwadas, Kampung KB Kaliwadas hanya pernah berkoordinasi dengan 2 lintas sektor selain BKKBN dan DP3AKB, yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan KUA/Kantor Pengadilan Agama, dan koordinasi tersebut adalah hasil dari DP3AKB, sedangkan pengurus kampung KB dan masyarakat Kampung Kaliwadas belum pernah berinisiatif mengajukan sendiri kepada lintas sektor sesuai kebutuhan Kampung Kaliwadas, untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kampung Kaliwadas.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran agar implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Kampung Kaliwadas Kelurahan Lopang Kecamatan Serang Kota Serang Provinsi Banten dapat berjalan secara optimal. Adapun saran tersebut yaitu sebagai berikut:

1. BKKBN dan DP3AKB menginfentarisasi kebutuhan sarana dan prasarana di Kampung KB dengan mengoptimalkan DAK (Dana Alokasi Khusus) yang sudah ada untuk kampung KB agar masyarakat dapat menjalankan kegiatan program kampung KB dengan optimal.
2. DP3AKB melakukan pengarahan kepada pengelola dan pelaksana kegiatan di kampung KB, dengan memberikan pembinaan untuk

memberikan pemahaman dan bagaimana seharusnya mengelola dan melaksanakan kegiatan di kampung KB.

3. Pengurus Kampung KB lebih berinisiatif menyampaikan materi pembinaan yang telah didapatkan kepada masyarakat kampung KB dengan membuat kegiatan atau sosialisasi untuk masing-masing poktan (kelompok kegiatan) agar tercapainya pembangunan keluarga di kampung KB.
4. Masyarakat dan pengurus kampung KB berinisiatif mengajukan kerjasama dengan lintas sektor yang dibutuhkan di Kampung Kaliwadas untuk program kependudukan, dengan terlebih dahulu mengajukan kerjasama kepada dinas terkait ataupun melalui DP3AKB.

## DAFTAR PUSAKA

### Buku:

- Agustino, Leo, 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Badan Pusat Statistik, 2018. *Statistik Indonesia 2018 (Statistical Yearbook Of Indonesia 2018)*. BPS-Statistics Indonesia
- Badan Pusat Statistik Kecamatan Serang, 2018. *Kecamatan Serang Dalam Angka 2018*. BPS-Statistics Of Serang Municipality
- Badan Pusat Statistik Kota Serang, 2017. *Kota Serang Dalam Angka 2017 (Serang Municipality In Figures 2017)*. BPS-Statistics Of Serang Municipality
- Badan Pusat Statistik Kota Serang, 2018. *Kota Serang Dalam Angka 2018 (Serang Municipality In Figures 2018)*. BPS-Statistics Of Serang Municipality
- Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, 2018. *Provinsi Banten Dalam Angka 2018 (Banten Province In Figures 2018)*. BPS-Statistics Of Banten Province
- Dwijowijoto, Riant Nugroho, 2003. *KEBIJAKAN PUBLIK Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Moleong, Lexy J, 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset
- Nugroho, Riant, 2012. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Sugiyono, 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Winarno, Budi, 2014. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS (Center Of academic Publishing Service)
- Ariani, Desi. 2018. *Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana di Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang*. Medan: Universitas Sumatera Utara. Skripsi
- Juanda, Galuh Melati Ningtias, 2017. *Implementasi Program Penanganan Anak Korban Kekerasan di Kota Serang*. Serang: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Skripsi

Maharani, Rachmawati Dwi, 2014. *Implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Kabupaten Lebak*. Serang: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Skripsi

Pertiwi, Apriadalista Nurul, 2017. *Analisis SWOT Pengelolaan Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Kampung Kaso Desa Sukaraja Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak*. Serang: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Skripsi

Putra, Tommy Adi, 2017. *Implementasi Program Kartu Lebak Sehat*. Serang: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Skripsi

Rafiudin, Muhamad, 2016. *Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak*. Serang: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Skripsi

Romanova, Silvia, 2016. *Implementasi Program Pro Rakyat Fase ke 5 Pemerintah Kota Cilegon (Studi Kasus Warung Ekonomi Pedagang Kaki Lima)*. Serang: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Skripsi

#### **Dokumen dan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

SK Walikota Serang Nomor: 476/Kep.223-Huk/2017

Panduan Kampung KB Percontohan

Panduan Monitoring dan Evaluasi Kampung KB

Pedoman Pengelolaan Kampung KB (Pedoman Bagi Pengelola Kampung KB di Lini Lapangan)

Petunjuk Teknis Kampung KB

Profil Kelurahan Lopang 2017

Rencana Strategi (Renstra) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Banten Tahun 2015-2019

Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Serang Tahun 2019-2023

**Sumber Lain:**

<http://Kampungkb.bkkbn.go.id/> diakses pada tanggal 20 Oktober 2018 pukul 15.00 WIB

[http://ppid.menlhk.go.id/berita\\_pemerintah/browse/55](http://ppid.menlhk.go.id/berita_pemerintah/browse/55) diakses pada tanggal 20 Oktober 2018 pukul 20.26 WIB

[https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/9841/Kampung-kb-inovasi-strategis-memberdayakan-masyarakat/0/artikel\\_gpr](https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/9841/Kampung-kb-inovasi-strategis-memberdayakan-masyarakat/0/artikel_gpr) diakses pada tanggal 25 Oktober 2018 pukul 22.47 WIB

<https://brainly.co.id/tugas/5960840> diakses pada tanggal 26 November 2018 pukul 21.30 WIB

## Matriks Hasil Wawancara Sebelum Reduksi Data

I Q	I <sub>1</sub>
1 Q	<p>Kampung KB bidang ini yang mengelola secara umum. Kampung KB adalah wadah, isinya ada program KB, program KSPK, ada bidang daladuk dan bidang pembangunan lainnya. Saya di subbid hubungan antara lembaga itu ngurus rumahnya, wadahnya, jadi semua terkait dalam bentuk pengelolaan Kampung KB, cuma punya bagian-bagiannya, kalau saya lebih kepada struktur kelebagaannya, kalau yang lain terkait dengan program kegiatannya, semisal di KB nanti ada pelayanan KB nya ada sosialisasi kespronya, di KS nanti ada kegiatan tribinanya, PIK-Remaja dan yang lain-lain. Itu semua terkait. Tapi umumnya di Adpin. Kampung KB itu adalah rumahnya. Isinya kegiatan-kegiatan, ada dari bidang KB, bidang KS, dari bidang pembangunan lainnya, kesehatan, kemudian sosial tenaga kerja, keamanan, nanti masuk disana.</p>
2 Q	<p>Program kampung KB sudah berjalan 3 tahun sejak dicanangkan oleh Presiden pada tanggal 14 Januari 2016. Kegiatannya macem-macam, contohnya untuk lansia, bisa pengajian untuk lansia, senam lansia, kemudian pembuatan keterampilan kreasi bagi lansia, intinya BKL itu mengajarkan kepada keluarga-keluarga yang punya lansia untuk bisa membina dan mendidik lansia-lansia itu tetap produktif, tetap punya aktivitas, tetap sehat, tidak minder, itu output yang diharapkan dari BKL, jadi sasarannya bukan keluarganya aja, tapi lansianya juga, sasarannya bisa langsung kita bikin kegiatan untuk lansianya.</p> <p>BKB dan PAUD, didalam konsep BKB holistik, itu terintegrasi antara PAUD dan BKB, jadi dimana ada PAUD pasti disitu ada BKB, tapi kalau yang BKB nya bukan BKB holistik, di bisa berdiri sendiri tanpa adanya PAUD, contoh BKB kan bisa saja nanti dipadukan dengan posyandu bisa, diposyandu itu kan udah jelas ada penimbangan, pemberian imunisasi buat anak, selagi itu dilaksanakan, orang tuanya juga diberikan pemahaman bagaimana cara mendidik balita. Bedanya antara PAUD dengan BKB dari sasarannya, kalau PAUD yang disasar adalah balitanya, tapi kalau misalkan BKB, orangtuanya, jadi kita sejalan, orang tuanya diberikan wawasan, si anak-anak nya juga diberikan wawasan, karena nanti ngerasain, kalau punya anak itu, bagaimana repotnya ngurus anak, gamudah, ketika kita punya balita, makanya, silahkan buka di playstore, disitu banyak materi-materi tentang ketahanan keluarga, bagaimana jadi orang tua yang hebat, bagaimana menjadi ibu rumah tangga yang bekerja, itu banyak materi-materi.</p>
3 Q	<p>Dikita itu ada laporan fl dala (pengendalian lapangan), di dalam laporan F1 dala itu, setiap bulan dilaporkan, berapa jumlah poktan yang ada di suatu wilayah, termasuk berapa jumlah anggota dari poktan tersebut disuatu wilayah dalam kurun waktu tertentu, dan ini sifatnya fluktuatif.</p> <p>Yang bertugas untuk mengupdate website Kampung KB itu adalah kader, PPKBD dan Sub PPKBD didampingi oleh PLKB atau PKB. PLKB dan PKB intinya sama, dia menjalankan fungsi 10 langkah PLKB, dimulai dari pendekatan kepada tokoh masyarakat sampai kepada proses pencatatan pelaporan dalam program KKBPK itu dilaksanakan, bedanya PKB adalah pejabat fungsional, kalau PLKB adalah pejabat fungsional umum atau struktural, pejabat fungsional, khusus penyuluh.</p> <p>Partisipasi diukur dari laporan kesertaan, jadi ada laporan di S1 dala itu berapa jumlah keluarga, berapa jumlah keluarga yang memiliki balita, dan berapa jumlah yang memiliki balita yang tergabung didalam kelompok BKB, jadi kita punya perbandingan, misal keluarganya 10 di Kampung KB itu, yang punya BKB 5, yang punya balita 5 keluarga, yang dari 5 keluarga itu kita berupaya kelimanya bisa menjadi peserta BKB. Kalau itu dikatakan sukses 100%, tapi kalau misal hanya dari 5 itu cuma ada 1 keluarga atau 2 keluarga saja, berarti itu tidak sukses, itu berarti kesertaannya rendah. diukur kuantitatif di website Kampung KB itu 1 desa, kuantitatif, kalau</p>

	<p>kualitatif panjang, sejauh ini hanya terukur kuantitatif.</p>
4	<p>Q Tujuan kampung KB seperti yang ada di juknis kampung KB yang dikeluarkan oleh BKKBN yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program KKBPK dan juga pembangunan di sektor terkait untuk mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas, itu secara umum nya. Kalau secara khususnya salahsatunya untuk peningkatan jumlah peserta KB.</p>
5	<p>Q Kelompok kerja (pokja) harus sesuai 8 fungsi keluarga, adanya ditingkat desa. Jadi yang namanya Kampung KB itu, bukan setingkat RW, tapi setingkat desa, namanya aja Kampung KB karena untuk mengidentikkan walaupun sebetulnya ketika berbicara cakupan kewilayahan RW adalah kampung, kampung adalah RW, tapi di dalam pedoman yang dikeluarkan oleh BKKBN bahwa Kampung KB itu sudah setingkat desa, jadi pokja ditingkat desa.</p> <p>Poktan. Sama saja seperti tadi saya bilang, bahwa Kampung KB itu pengurusnya adalah pokja Kampung KB, pokja Kampung KB itu punya seksi-seksi semisal tadi seksi ekonomi, itu poktan bisa masuk, poktan UPPKS, poktan itu kelompok kegiatan, nah di KS itu kan ada beberapa poktan, semisal tribina, BKB, BKR, BKL, UPPKS, dan PIK-Remaja. Nah nanti kespronya ada seksi kesehatan reproduksinya, bisa nanti PIK-R masuk disana kegiatannya, jadi setiap seksi itu punya program kegiatan yang mengarah sesuai dengan 8 fungsi keluarga, nanti di kespro itu juga bisa bidang kespro KB, seksi kespro dibidang KB masuk yang di sana kegiatannya. Sosialisasi tentang kespro, pelayanan KB dan lain-lain.</p>
6	<p>Q Dari Kampung KB nya sendiri bisa langsung mengajukan ke dinas terkait atau ke swasta. Itu yang kita harapkan. Jadi bisa berbagai macam mekanisme, bisa melalui desa, bisa melalui pokja tingkat kabupaten kota, bisa juga langsung ke dinas. Bagaimana itu peran kabupaten/kota seni mengelola itu, bisa saja nanti ada yang namanya proses musyawarah perencanaan kegiatan di Kampung KB. Kita kan bisa, nanti mengumpulkan seluruh ketua-ketua pokja Kampung KB dengan membawa usulan kegiatan, nanti si dinas KB di kabupaten kota ini menyalurkan melalui pokja itu, kan di pokja tingkat kabupaten/kota itu terdiri dari banyak dinas, semisal, ternyata di Kampung KB ini banyak yang belum punya KTP, kartu keluarga dan akte lahir, disampaikanlah informasi itu ke disdukcapil, nanti disdukcapil akan menggarap. Itu namanya peran koordinasi. Bisa juga dari ketua pokja bikin proporsal dengan mencantumkan data bahwa ternyata di Kampung KB A banyak pengidap narkoba, misalkan banyak pengguna narkoba buatlah proposal penyuluhan ke BNN, ke kepolisian itu bisa. Intinya kan konsep Kampung KB itu adalah konsep pemberdayaan, bagaimana kita pemerintah menjadi fasilitator masyarakat yang ada di wilayah sekitar itu untuk mau dan mampu merubah kondisi kehidupannya, menjadi masyarakat yang sejahtera. Karena kalau pemerintah saja yang berjuang, itu tidak mungkin, makanya konsepnya itu adalah konsep pemberdayaan, peningkatan kemandirian masyarakat.</p>
8	<p>Q Kalau BKKBN kita berkoordinasi dengan DP3AKB dan pokja (kelompok kerja) kampung KB. Kalau untuk turun ke lapangan langsung kita menghubungi ke pokja kampung KB, tapi kalau untuk ke DP3AKB kita berkoordinasi dengan memfasilitasi ke DP3AKB, dan juga nanti DP3AKB yang membuat laporan ke kita tentang kampung KB termasuk pelayanan KB.</p>
9	<p>Q Kalau dikita itu rutin pertanggal 20 ada namanya rapat pengendalian program, jadi dalam rapat pengendalian program itu adalah media evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan.</p>
10	<p>Q Seharusnya terdapat bidan desa di tiap desa, kalau misalnya disatu desa itu tidak ada puskesmas, kalau sekarang sudah ada yang namanya puskesmas pembantu (pustu) nah itu pasti ada, walaupun semisal di kecamatan Cuma ada 1. Tapi di desa itu pasti ada postu, pasti ada bidan desa. Gamungkin engga, karena bidan desa itu 1 bidan 1 kalau sekarang.</p>
11	<p>Q Fasilitas yang harus dimiliki di Kampung KB itu, kalau secara organisasi, kriteria keberhasilan Kampung KB itu bisa diukur, ada panduan monevnya. 1) Punya struktur organisasi (dipanduan monev), 2) Punya bidan desa yang bersertifikat CTU,</p>



	<p>3) Punya rencana kerja. Hal-hal yang memang harus ada ketika kita mau mengukur keberhasilan Kampung KB, kalau belum ada syarat-syarat itu berarti belum dikatakan berhasil.</p> <p>Kalau fasilitas tiap poktan, di poktan juga punya pengurus, semisal BKB, punya ketua BKB nya siapa, sekretarisnya siapa, itu punya, ada, jadi, tapi bisa dikerjakan oleh orang yang sama, tapi dengan struktur yang berbeda, intinya harus punya struktur yang berbeda karena poktan itu adalah bagian dari pokja Kampung KB tadi.</p> <p>Rumah data dan kesekretariatan KKB, kesekretariatan KKB itu pokja, rumah data itu salah satu kegiatan yang ada di program KKBPK. Nah, di Kampung KB itu ada namanya rumah dataku, jadi rumah yang memang menjadi rujukan bagi setiap orang untuk mencari data tentang program atau tentang masyarakat yang ada di wilayah sekitar, disitu harusnya ada. Itu adanya di bidang pengendalian penduduk, bidang pengendalian penduduk selain rumah data ada pojok data, pojok kependudukan, ada juga sekolah kependudukan.</p>
12	<p>Q Dana khusus untuk Kampung KB, jadi BKKBN itu menyalurkan anggaran melalui DAK BOKB di kabupaten/kota (dana alokasi khusus), itu kurang lebih untuk daerah DTPK itu 105 juta pertahun, non DTPK itu 100 juta pertahun (daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan terluar).</p>
13	<p>Q Untuk poktan ada pembinaan, karena Kampung KB itu adalah lokasi penggarapan bersama program pemerintah, jadi siapapun boleh menggarap, boleh, semisal perkim, dia berhubungan dengan sarana dan prasarana, berarti dia melakukan pembinaan atau penggarapan Kampung KB itu dari sisi sarana parasarana lingkungannya gitu, jalan, sanitasi, SAB (Sarana Air Bersih) dan yang lain-lain, BKKBN iya, DP3AKB iya, BKKBN pembinaa keorganisasiannya atau kelembagaannya saya, kemudian pembinaan program KKBPK nya oleh BKKBN, DP3AKB bisa dalam program KB nya, bisa PP nya, DP3A, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dia bisa nanti penggarapannya adalah pembinaan tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan lain-lain. Jadi cakupannya luas. Jadi siapapun pihak manapun bisa ikut serta dalam hal pembinaan dan penggarapan Kampung KB. Dan itu memang yang diharapkan, karena salah satu kunci keberhasilan Kampung KB itu adalah ada penggarapan secara lintas sektor, baik pemerintahan maupun swasta, nanti tanggal 24 salah satunya kami akan mengundang sektor swasta dan BUMN, jadi nanti sektor swasta, BUMN, dan pemerintah akan kita kumpulkan, kita akan gali potensi-potensi kemitraan itu.</p> <p>Q Pembinaan itu bisa langsung ke masyarakat, seharusnya pengurusnya menyampaikan lagi ke masyarakat, seharusnya membuat rencana kegiatan khusus di daerah Kampung KB nya.</p> <p>Mekanisme pembinaan itu dilakukan dari beberapa pola, jenis pola pembinaan, pola pertama bisa langsung dari lembaga pembina kepada pengurus maupun kepada masyarakat, itu bisa pola pertama, pola kedua bisa dilakukan berjenjang dari lembaga pembina kepada pokja, lalu pokja kemudian membuat rencana untuk menindaklanjuti hasil pembinaan tersebut, tapi ada hal-hal semisal yang tidak bisa diteruskan kepada masyarakat, yang sifatnya hanya berenti di pokja, contoh pembinaan pokja sendiri, kalau pembinaan pokja itu kan bagaimana pokja itu dia bisa menjalankan roda organisasi sesuai dengan tata aturan sebuah organisasi, semisal administrasi cara penyusunan rencana kerja, cara penyusunan laporan hasil pekerjaan, cara menginput laporan website Kampung KB nya. Tapi untuk pembinaan yang sifatnya program, itu jelas harus diteruskan kepada masyarakat, contoh pembinaan tentang kesehatan reproduksi, contoh pembinaan tentang bagaimana cara mendidik anak-anak, menjadi orang tua hebat, itu kan si pokja ini dibekali sebuah wawasan, yang pada akhirnya wawasan itu akan digunakan atau disampaikan kembali kepada masyarakat, tapi oleh pokja, berjenjang, 2 pola itu yang biasanya dipakai.</p>
14	<p>Q Sosialisasi untuk awal terbentuknya kampung KB kita datang ke tempat yang akan dijadikan kampung KB, kita mensosialisasikan bahwa di kampung tersebut</p>

	dijadikan kampung KB, bertahap kita jelaskan bahwa di kampung KB itu bukan KB saja, lalu selanjutnya diberi pemahaman lewat pembinaan-pembinaan yang kita lakukan.
15	Q DP3AKB dengan BKKBN itu lembaga yang mengelola program KB yang satu level, sama-sama eselon II, bedanya kalau DP3AKB adalah organ daerah, yang sudah dibawah gubernur, kalau BKKBN adalah instansi vertikal, lembaga vertikal yang langsung dibawah BKKBN pusat. Karena ini amanat undang-undang nomor 23 tahun 2014, ada pembagian kewenangan pelaksanaan program KKBPK antara pusat dan daerah. Nah BKKBN di provinsi itu sebetulnya tidak melaksanakan fungsi provinsi, tapi melaksanakan fungsi kewenangan BKKBN pusat yang ada didaerah BKKBN dan DP3AKB 1 level. Program KB inisiasinya ada di BKKBN.
18	Q Kendalanya, kita ngasih program kegiatan ke pengurus pokja, nanti pokja seharusnya yang menyelenggarakan tahap selanjutnya, menyalurkan apa yang telak kita kasih ke pengurus pokja, itu memang harus biasanya rutin, misalkan setiap jumat kedua setiap bulannya, pengajian, senam, pembuatan anyaman atau apapun. Adapun kendala di pelaporan, itu hanya langsung online di website kami, yang bertugas mengupdate itu PLKB.

I	I <sub>2</sub>
1	Q Kampung KB untuk operational penggerakannya di kita di dalduk, kalau semua pelayanan KB ada di bidang KB. Kalau kita dalduk mengolah data-data hasil pelayanan adanya di dalduk. Lebih fokus ke seksi penggerakannya masing-masing OPD. Di kabupaten/kota berbeda yang pegang kampung KB, ada yang di bidang KB, kalau kita di pengendalian penduduk. Dari BKKBN turunannya ke DP3AKB lalu ke UPT Kecamatan lalu langsung ke kampung KB. Kampung KB itu satu kelurahan, tiap kecamatan ada 1, kecuali di Taktakan ada 2 kampung KB. Kalau untuk penggarapan wilayahnya 1 RW, fokusnya ke 1 RW, di kampung KB sendiri poktannya tingkat RW, pokonya ketika dibentuk kampung KB, otomatis dibentuk BKB, BKL, dan BKR dibuat di 1 RW itu. Pokonya kampung KB selanjutnya kita prioritaskan disamping yang lain. Dibuat kampung KB itu salah satunya karena pencapaian KB nya sangat rendah, dan itupun yang menentukannya pihak dari BKKBN Provinsi Banten, jadi bukan kita yang menentukan, mereka sudah punya data melalui pendataan keluarga.
2	Q Kalau partisipasi poktan dilihat dari kehadiran dalam pembinaan, sudah bagus. PLKB kecamatan yang bertugas meng update website kampung KB. Sementara di PLKB, nanti kedepannya inginnya kampung KB difasilitasi laptop agar bisa update langsung ke website tersebut. Tapi sekarang karena keterbatasan sarana dan prasarana, masih PLKB tersebut yang menginput. Hanya pengurus poktan yang diundang untuk pembinaan, lalu yang menyampaikan ke masyarakat kampung KB nya itu seharusnya pengurus poktan itu, jadi intinya kepanjangan tangan dari kita. Kita membina pengurus poktan itu, kita berharap dari apa yang telah kita sampaikan, mereka bisa menyampaikan lagi ke masyarakat, tapi banyak yangtidak. Semoga saja mereka sudah melaksanakan tugasnya, tapi mungkin dari 5 orang yang diundang, ada 1 atau 2 orang yang menyampaikan, yang 3 nya belum. Kita sih berharapnya begitu. Pembinaan langsung ke masyarakat pernah, kita melalu majlis ta'lim, kita langsung berhubungan dengan ibu-ibu yang khusus di kampung KB. Kita juga telah melaksanakan KIE kepada perwakilan masyarakat. Khusus wilayah kampung KB, itu se Kota Serang di kampung KB. Kita undang, kita satukan, semua kampung KB disatukan se Kota Serang.
3	Q Kalau partisipasi poktan dilihat dari kehadiran dalam pembinaan, sudah bagus. PLKB kecamatan yang bertugas meng update website kampung KB. Sementara di PLKB, nanti kedepannya inginnya kampung KB difasilitasi laptop agar bisa update

	<p>langsung ke website tersebut. Tapi sekarang karena keterbatasan sarana dan prasarana, masih PLKB tersebut yang menginput.</p> <p>Hanya pengurus poktan yang diundang untuk pembinaan, lalu yang menyampaikan ke masyarakat kampung KB nya itu seharusnya pengurus poktan itu, jadi intinya kepanjangan tangan dari kita. Kita membina pengurus poktan itu, kita berharap dari apa yang telah kita sampaikan, mereka bisa menyampaikan lagi ke masyarakat, tapi banyak yang tidak. Semoga saja mereka sudah melaksanakan tugasnya, tapi mungkin dari 5 orang yang diundang, ada 1 atau 2 orang yang menyampaikan, yang 3 nya belum. Kita sih berharapnya begitu.</p> <p>Pembinaan langsung ke masyarakat pernah, kita melalui majlis ta'lim, kita langsung berhubungan dengan ibu-ibu yang khusus di kampung KB. Kita juga telah melaksanakan KIE kepada perwakilan masyarakat. Khusus wilayah kampung KB, itu se Kota Serang di kampung KB. Kita undang, kita satukan, semua kampung KB disatukan se Kota Serang.</p>
4	<p>Tujuan kampung KB sesuai dengan petunjuk teknis kampung KB dari BKKBN yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.</p>
5	<p>Penerapan 8 fungsi keluarga, di kampung KB itu sebenarnya dari kita materinya diterapkan, yang mereka kuasai, penyuluhan tentang keluarga, yang kita sampaikan itu sudah penerapan 8 fungsi keluarga. Cuma dari merekanya seharusnya menyampaikan lagi ke masyarakat. Intinya yang sudah disampaikan mereka paham.</p>
6	<p>Lintas sektor itu seharusnya dengan berbagai dinas. Sebenarnya kita terus terang baru beberapa dinas saja yang kerjasama, dengan dinas kesehatan melalui pelayanan, kita sudah terbiasa dengan dinas lingkungan hidup beberapa kali kita ajak menjadi narasumber, sudah 4 kecamatan, disdukcapil juga sudah, dan dengan KUA juga pengadilan agama.. Lintas sektor yang mengurusnya DP3AKB. Sebenarnya kita mengirim surat ke dinas tersebut, kita minta untuk pembinaan, kita ajak bareng. Intinya berbagai dinas melakukan tupoksi nya masing-masing.</p> <p>Dari kampung KB nya bisa mengajukan lintas sektor, bisa mengajukan ke DP3AKB dulu. Kita sudah disepakati bahwa kampung KB itu harus beda dengan kampung KB yang lain, jangan cuma setelah pertemuan selesai pulang saja. Kita harus ada kemajuan, apa yang harus dimajukan, inovasi apa yang harus dilakukan. Kalau mereka punya inovasi sendiri, lakukan saja sendiri, tidak harus dari kita.</p>
8	<p>koordinasi yang kita lakukan adalah dari DP3AKB ke UPT kecamatan (pos penyuluhan KB), lalu UPT itu langsung ke kampung KB. Dari DP3AKB berkoordinasi dengan BKKBN dengan melaporkan laporan data kepada BKKBN. Laporan dari kampung KB lalu ke UPT, nanti UPT merekap, lalu dikasi ke DP3AKB, dari DP3AKB ke BKKBN</p>
9	<p>DP3AKB melakukan monitoring dan penggerakkan di kampung KB.</p>
10	<p>Pelayanan KB kalau jadwal bidang KB kadang misal pelayanan KB warganya datang ditentukan ke puskesmas tertentu, ga sekali di mobil pelayanan datang ke kampung KB, ga khusus untuk kampung KB saja, untuk semua di puskesmas manapun yang disepakati.</p>
11	<p>Sarana dan prasarana yang menunjang kampung KB sementara ini kita terus terang dari APBD belum punya, paling kita melalui dari dana DAK fisik yang sudah kita lakukan. Ataupun ada dari penyisihan-penyisihan kegiatan-kegiatan kita, yang bisa disisihkan untuk beli misalkan buku administrasi, papan-papan data itu sebagian sudah ada yang inti-inti saja, kalau yang lain-lain belum.</p> <p>Kalau rumah data dan kesekretariatan KKB itu wacana kedepan di 2019 ini, kita punya PR harus mencanangkan rumah data, sebenarnya sudah kita sosialisasikan ke semua kampung KB, dan untuk sementara karena rumah data itu harus, dibulan maret 2019, kita baru mengajukan rumah data. Itu di pos KB yang ada di wilayah situ,</p>

	<p>kita pinjam sementara sebagai rumah data. Nanti disimpan data-data sementara di rumah yang mau disimpan data-data saja.</p>
12	<p>Q Kalau dana kita adanya dari DAK, sebenarnya kalau khusus untuk uang kas kampung KB itu tidak ada, cuma intinya inisiatif ibu sendiri dengan kesepakatan ketua kampung KB. Kan peserta yang hadir di acara yang kita laksanakan itu ada yang transport Rp50.000, itu kita sepakati agar kampung KB punya uang kas, Rp50.000 itu disisihkan setengah. Jadi Rp30.000 untuk yang hadir, Rp20.000 disimpan, jadi kalau dari kita, dari Rp20.000 dikali yang hadir ada beberapa orang per pertemuan, itu disimpan ke bendahara. April kita belum ada dana lagi, jadi kita belum kegiatan ke kampung KB, dana hanya dari DAK (dana alokasi khusus), kalau APBD belum ada. Dana alokasi khusus dari pusat, dari BKKBN pusat.</p>
13	<p>Q Tiap bulan dari DAK (Dana Alokasi Khusus) ada pertemuan pokja kampung KB. Pertemuan lokmin kampung KB, forum musyawarah, dan poktan. Jadi 1 bulan kita ada pertemuan khusus juga untuk kampung KB. Lokmin (loka karya mini) untuk mencapai kesepakatan antara pihak DP3AKB dengan pihak kampung KB, UPT dan pihak medis bidan terkait. Untuk membicarakan dan merembukkan pelayanan, hasil rembukan dari kita, kita bekerjasama dengan bidang KB untuk pelayanannya hari apa disepakati disitu.</p>
14	<p>Q Sosialisasi waktu awal dibentuknya kampung KB di tahun 2017 baru 1 kampung KB di kabupaten/kota. Di 2018 semua kecamatan harus punya kampung KB. Jadi kita ada pencanangan kampung KB se Kota Serang, lalu setelah itu kita turun ke lapangan melalui UPT, kita sosialisasi bahwa kampung ini sudah dicanangkan sebagai kampung KB.</p>
15	<p>Q DP3AKB berperan berdasarkan pasal 2 peraturan walikota nomor 14 tahun 2017, tugas pokok melaksanakan urusan wajib non pelayanan dasar di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pelayanan program keluarga berencana. Dan fungsinya untuk perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan administrasi urusan dibidang pemberdayaan perempuan dan masyarakat, perlindungan perempuan dan anak, pengendalian penduduk, advokasi pergerakan dan informasi serta keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.</p>
18	<p>Q Kendalanya banyak, intinya dari pihak dinas inginnya sudah dikasih support seperti itu masyarakat itu menerima, seharusnya merespon juga. Masyarakatnya tidak bisa mengerti, kita pun tidak bisa memaksakan, mereka itu masih ada yang memahaminya kampung KB itu khusus untuk KB saja. Padahal yang kita inginkan kampung KB itu bisa bersinergi antara program satu dengan yang lainnya. Tapi sementara ini kesannya itu kampung KB untuk ibu-ibu, kesannya KB saja, jadi kita berusaha menerangkan kepada masyarakat melalui penyuluhan, bahwa kampung KB itu tidak hanya KB saja, ada banyak dan salah satunya adanya 4 pertemuan itu.</p>

I Q	I <sub>3</sub>
2	<p>Q Selama ini belum ada/mengadakan konseling untuk remaja (PIK-R), tapi pernah ada penyuluhan PIK-R Kampung KB diundang di KPRI, sering diundang keluar anak-anak PIK-R, mengadakan pembuatan kerajinan dan dipamerkan. Catatan kegiatan yang pernah dilaksanakan di Kampung KB ada di buku pokja. Karena mereka masing-masing kelompok itu punya kegiatan sendiri, jadi adanya di tiap ketua poktan. Pembinaan apapun yang dilakukan oleh DP3AKB atau BKKBN pasti mereka mencatat.</p>
3	<p>Q Partisipasi, setiap ada pembinaan dari kita, 1 bulan sekali, karena yang kita hadirkan pengelola pokja, ya alhamdulillah. Kalau kita melakukan pembinaan itu bukan kepada masyarakat tapi kepada pokja pengelola, nanti pengelola yang melakukan pembinaan kepada masyarakat, jadi pokja-pokja dan poktan-poktan itu</p>

	kepanjangan dari kita.
5	Q Kelompok kerja, ada tingkat dari provinsi sampai kelurahan, tapi kalau di Kampung KB ada pokja Kampung KB, tapi tingkatannya kelurahan. Tingkat provinsi, kota, kecamatan, dan kelurahan, dan RW. Pokja itu harus sesuai dengan 8 fungsi keluarga, cuma peminanya bukan dibawah kita, tapi PKK. Kalo pokja dibawah PKK, sesuai 8 fungsi keluarga.
6	Q Kita dari DP3AKB langsung ke kita, ke penyuluh KB dan langsung ke Kampung KB. Kita lebih kepada pokja poktan pembinaannya. Tapi karena Kampung KB itu kan sebenarnya harus digarap oleh semua dinas, lintas sektoral itu, leading sektoralnya itu. Lintas sektornya semua SKPD, semua dinas harus turun untuk membangun Kampung KB. Entah itu dari SDM, pembangunan, dan lain-lain dan kegiatan. Jadi pertanian harus ditanyakan kepada UPT pertanian yang ada di Kecamatan Serang ini, sudah berbuat apa untuk Kampung KB, pak lurah sudah berbuat apa untuk Kampung KB. Silahkan kalau mau mendetail tidak perlu ke LH, tidak perlu ke Pak Lurah, wawancaranya dengan Pak RW, Pak RW tau siapa saja yang sudah berbuat di Kampung KB, apa saja kegiatan yang sudah dilakukan di Kampung KB. Selain oleh DP3AKB, kalau seputaran DP3AKB kita tau, karena memang melalui kita. Tapi kalau lintas sektoral, simplenya langsung Pak RW, nanti Pak RW akan menjawab siapa saja yang sudah berbuat di Kampung KB. Karena harus melalui beliau setiap yang mau turun ke Kampung KB. di luar kegiatan pembinaan pokja poktan kita. Nanti silahkan ditanyakan ke Pak RW, dari lintas sektor mana saja, SKPD mana saja yang sudah berbuat ke Kampung KB.
7	Q Di Kampung KB seharusnya ada penyusunan rencana kegiatan, untuk sementara belum ada, dari semenjak dibentuk belum ada dari Kampung KB membuat rencana. Dan memang itu harusnya ada, tapi untuk sementara harusnya ada, paling nanti.
8	Q Kalau Kampung KB kan ada pokja BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R, itu tiap itu ada laporannya dari tiap koordinator. Pokja ini bikin laporan ke koordinator, dari koordinator ke kita dari kita ke dinas.
9	Q Setiap DP3AKB melakukan pembinaan tiap bulan itu juga merangkap didalamnya evaluasi dan monitoring di pertemuan itu. Selain pembinaan juga dilakukan monev.
10	Q Disitu selain posyandu ada pemeriksaan umum juga biasa, bidan melakukan pelayanan KB suntik, pemeriksaan umum, biasanya bidan juga melakukan itu selain posyandu sebulan sekali, jadi bisa berobat masyarakat itu di bidan. Jadi tenaga medisnya lebih kepada di 5 meja posyandu.
11	Q Belum punya rumah data. Data ada, tapi tidak ada/ belum ada tempat. 1) Karena tidak ada anggaran untuk penyewaan rumah, 2) Rumah data itu sebenarnya harus dari masyarakat, swasembada masyarakat. Jadi dari pemerintah tidak ada anggaran untuk itu. Seharusnya kita memfasilitasi, entah itu dalam bentuk fisik dibangun atau disewakan. Karena keterbatasan APBD untuk di Kota Serang, keterbatasan anggaran dari APBD, sehingga dari DP3AKB tidak bisa memfasilitasi gedung/rumah. Jadi untuk sementara rumah data itu dikembalikan kepada masyarakat. Tinggal masyarakat mau dimana.
12	Q Untuk kegiatan dan pembinaan ada dari DP3AKB dan dari kas pengelola di Kampung KB. Jadi setiap DP3AKB melakukan pembinaan, itu ada uang transport untuk pengelola, itu disisihkan, tidak semua diterima oleh peserta pembinaan, jadi disisihkan sebagian untuk kas. Kas itu digunakan untuk kegiatan Kampung KB. Dana membuat PAUD, pihak Balai Penyuluhan KB Kecamatan Serang tidak tahu menau. Dinas kami membantu dari BKB nya saja, jadi mereka hanya menamakan saja PAUD Kendedes, jadi diabaikan saja PAUD nya, kita tidak berkesinambungan dengan PAUD itu, karena tidak ada SK nya. Seharusnya SK nya terpisah, ini SK nya Cuma 1 yaitu SK BKB.
	Q Pembinaan pokja-pokja kalau dari DP3AKB, jadi pokja dikumpulkan, kita

13	kasih pembinaan, sekarang baru tahun berjalan awal, mau ada kegiatan penyuluhan KB di majlis ta'lim, yang kedua kita mau ngadain keterampilan untuk PIK-R dan UPPKS, nanti mengolah seperti apa untuk penambahan income di keluarga itu. Pengolahan makanan dan lain-lain. Bisa dalam bentuk kerajinan, makanan, jadi supaya dia jadi prodak untuk meningkatkan kesejahteraan Kampung KB itu.
14	Q Pertama dibentuk ada sosialisasi di Kampung KB. sosialisasi oleh BKKBN langsung. Selanjutnya dilakukan pelatihan untuk pengurus Kampung KB, ada seperti UPPKS khusus kampung KB. Pokonya sekarang ini program utama pemerintah itu lokusnya Kampung KB, jadi poktan pokja yang ada disitu kalau memang ada kegiatan, misalkan BKL khusus Kampung KB, kita hanya bisa mengkoordinasikan dan menghadirkan orang-orang yang memang ada di kegiatan tersebut.
17	Q Untuk pertemuan, kita juga terbatas sama sarana gedung, karena tempat, minimal untuk kesekretariatan KKB, biar kalau ada pertemuan gampang tempatnya, cuma kita tidak ada, jadi untuk pertemuan di kampung KB pun tidak ada.
18	Q Kendalanya didalam kesertaan kesadaran masyarakat masih belum maksimal untuk membangun kampung nya sendiri melalui program Kampung KB, entah itu di dalam sektor kebersihan, karena disitu masih ada sampah, kesadaran masyarakat dalam ber-KB masih kurang, kesadaran remaja untuk tidak menikah usia dini, karena masih ada pernikahan usia dini.

I	I <sub>4</sub>
2	Q Kampung KB di Kaliwadas pelaksanaanya masih kurang partisipasi masyarakatnya, sudah kita lakukan pembinaan ketua pokjanya, namun belum bisa menyampaikan kepada masyarakat, kegiatannya pun belum banyak, tapi sudah ada BKB nya ada PAUD.
3	Q Ada capaian pelayanan KB di Kampung KB. Selalu ada peningkatan KB, artinya kesertaan ber KB nya ada peningkatan karena target kita adalah harus ada perubahan sebelum ada Kampung KB dan setelah ada Kampung KB.
5	Q 8 fungsi keluarga di Kampung KB, biasanya kalau kaya gitu kaya penyuluhan, penyuluhan agama, misal majlis ta'lim, ekonomi UPPKS atau pokja yang dibawah PKK, kalau UPPKS kan dibawah dinas KB, berarti mereka lewat UP2K (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga). Kalau ekonomi UP2K atau UPPKS, karena dibawah pokja lewat UP2K nya. Ada PKK, ada DP3AKB, kalau DP3AKB itu UPPKS, kalau PKK UP2K.
6	Q Sudah ada kerjasama dengan lintas sektor. Itu sudah disosialisasikan. Itu sudah intruksi peraturan, bahkan Kampung KB ini kan sudah intruksi presiden nawacita nya, jadi otomatis itu sudah harus. Selain BKKBN, ada LH tempat sampah, pertanian tanaman, pendidikan, peternakan bantuan ikan tapi gamau nerima masyarakatnya, karena warganya susah, gaada lahan disananya. Tanaman gaada lahan juga bingung nanemnya di sekitar situ aja. Intinya Kampung KB itu leading sektornya kita, lintas sektornya SKPD yang lain. Masing-masing dinas itu punya tugas masing-masing, dinas kesehatan meningkatkan derajat kesehatan di Kampung KB, dinas pendidikan meningkatkan SDM nya, pendidikannya. Lingkungan hidup meningkatkan lingkungannya, penataan lingkungan, kebersihannya. Dinas KB kesertaan ber KB dan banyak (karena kita lintas sektor), disduk dari segi administrasinya. Jadi bahasanya karena lintas sektoral, jadi dinas SKPD punya peran masing-masing, punya tugas masing-masing untuk meningkatkan Kampung KB. Jadi yang harus diperkuat lintas sektornya, koordinasi dengan lintas sektor.
7	Q Kita terbatas sama penyediaan sarana gedung, karena gaada rumah data juga, bukan gedung tapi tempat, minimal untuk penyimpanan administrasi. Kesekretariatan KKB/posko harusnya posko Kampung KB rumah data itu ada. Jadi begitu orang

		datang, data itu ada, cuma kita tidak ada, jadi untuk merencanakannya pun belum ada tempat.
8	Q	Ketua pokja melaporkan perkembangan Kampung KB kepada ketua Kampung KB (Ketua RW) dari situ lapor ke balai penyuluh, dari balai penyuluh ke DP3AKB (P3AKB/Balai penyuluh).
9	Q	Pernah ada BKKBN turun ke Kampung KB, dari bidang KB sosialisasi, dan penyuluhan KB, dan melihat pencapaian KB yang sudah ada di Kampung KB. Terakhir kali Desember
10	Q	Tenaga medis Kampung KB tidak ada bidan desa, tapi di posyandunya ada, posyandu setiap bulan ada bidannya. Pelayanan KB sebulan sekali, Cuma kalau kita kan dimintanya sebulan sekali, tapi tergantung dari DP3AKB nya. Ada jadwalnya dari DP3AKB, kalau memang bulan maret ini belum turun jadwalnya, itu kemaren memang sebulan sekali, dari mulai taun kemaren.
11	Q	Sebetulnya diharuskan, tapi belum dibikin. Belum ada rumah yang <i>perfect</i> yang mau dibikin rumah data, tapi datanya ada. Semua fasilitas dari DP3AKB, bidan-bidannya dari terdekat aja, dari unyur, karena kampung KB masuk puskesmas unyur. Jadi ngambil bidannya dari puskesmas unyur.
12	Q	Anggaran untuk kegiatan KB ada dari DP3AKB, kalau untuk kampung KB itu tidak ada dana untuk sarana dan prasarana, adanya dana untuk pembinaan pokja, uang transport yang nanti setengah-setengah uangnya di sisihkan kepada bendahara kampung KB untuk disimpan untuk keperluan kampung KB.
13	Q	Pembinaan BKL itu penyuluhan di majlis ta'lim dan senam lansia, pengajian, BKR dan PIK-R penyuluhan narkoba. Posyandu dan BKB itu beda tapi terintegrasi, jadi ada BKB dan posyandu, sasarannya beda. Sasarannya beda, seperti BKB dengan PAUD, kalau posyandu itu sasarannya bayi dan balita, kalau BKB orang tuanya, bina keluarga balita, keluarga yang mempunyai balita, jadi kita melakukan penyuluhan ke ibunya, pembinaan buat orangtuanya. Keluarganya yang mempunyai balita.
14	Q	Dari BKKBN pernah lebih kepada pembinaan, tapi sesuaikan, biasanya DP3AKB dan BKKBN Provinsi Banten.
17	Q	Mungkin pertemuan di kita selalu ada, untuk sosialisasi kepada pokja, kita mengadakan pertemuan. Kalau pertemuan untuk kegiatan rutin sudah ada perencanaannya, kalau kegiatan perencanaannya dari DP3AKB.
18	Q	Kendala dari dana kita belum memadai kalau untuk program kampung KB, sarana dan prasarana juga masih kurang untuk kampung KB, masyarakatnya pun masih kurang aktif dan kurang partisipasinya dalam kampung KB ini.

	I	I <sub>5</sub>
2	Q	Satu bulan dengan 2 bulan dengan 3 bulan itu harus berbeda capaiannya, harus lebih berkembang, kalau tidak berkembang, jalan ditempat artinya berarti Kampung KB tidak dibina oleh kita. MOP banyak di Kampung KB (data jumlah capaian yang ada di Kelurahan Lopang).
3	Q	Ada capaian pelayanan KB di Kampung KB. Selalu ada peningkatan KB, artinya kesertaan ber KB nya ada peningkatan karena target kita adalah harus ada perubahan sebelum ada Kampung KB dan setelah ada Kampung KB.
5	Q	Kalau pokja dibawah PKK, kalau dibawah kita itu poktan. Berarti pokja itu dibawah PKK pembinanya kelurahan. Kalau tingkat provinsi yang membina PKK tingkat provinsi, kalau kecamatan pembinanya kota. Pokonya berjenjang. Beda rumah, kalo pokja di bawah PKK, kalau DP3AKB poktan. Sama semuanya kalo untuk penyuluhan atau pembinaan ke masyarakat, itu lewat 8 fungsi keluarga, baik dari pokja atau poktan semua sesuai 8 fungsi keluarga. Cuma pembinanya aja yang beda.
6	Q	Kalau mau bekerja sama dengan lintas sektor, yang mengajukannya bisa dari bawah dari Kampung KB, misal kita ada data mikro Kampung KB, dari situ mereka

	<p>seharusnya dari mereka yang merekap/mengumpulkan dari RW itu apa kekurangannya, jadi dari data mikro itu kelihatan, dari warga kita banyak yang gaada KTP misalkan, sudah direkap dari 1 RW misal ada 100 KK, dari 100 KK ini berapa yang tidak ada KTP, berapa yang tidak ada KK, berapa yang tidak ada BPJS, dan berapa yang tidak ada buku nikah. Dari situ kelihatan, bisa pengajuan kesini, ini ada data-datanya, dari kita di ajukan ke DP3AKB, nanti dinas DP3AKB mereka menghubungi dinas yang bersangkutan dengan kebutuhan-kebutuhan, misal kekurangan KTP atau KK mereka bisa ke disduk. Misal kekurangan warga yang buku nikahnya rusak atau dulu tidak punya, mereka menghubungkannya ke KUA, yang menghubungkan ke dinas masing-masing dari DP3AKB, kekurangan apa yang dibutuhkan dari Kampung KB. Kita sudah pernah ada pengajuan untuk kekurangan KK dengan KTP, tapi gimana DP3AKB, karena mereka dari dinas masih banyak kegiatan, jadi bagi-bagi. Untuk sementara di Kampung KB ini belum ada, kalau untuk yang masuk dari dinas, kekurangan disdukcapil belum ada, isbat nikah untuk kekurangan buku nikah ke KUA belum ada.</p>
7	<p>Q Kalau rencana kerja kita di pos penyuluhan KB sendiri ada, tapi untuk di kampung KB nya sendiri kita melihat belum ada gerakan untuk mereka menyusun kegiatan, karena mereka kegiatannya sejauh ini dari kita, jadi mereka belum ada inisiatif untuk membuat kegiatan, maka belum ada rencana kegiatan.</p>
8	<p>Q Kalau kegiatan yang tiap bulan itu kebetulan yang membuat laporan dari DP3AKB, yang kegiatan Bu Imas jadi bukan kita. Jadi notulen, hasil notulen, hasil notulen, atau hasil laporan itu yang membuat dari DP3AKB, karena mereka yang punya anggaran dan punya kegiatan. Lebih kepada pembuatan laporan hasil monitoring dan evaluasi Kampung KB setiap bulan.</p>
9	<p>Q Di Kampung KB seharusnya ada monitoring dan evaluasi dari BKKBN sekalian monitoring biasanya, dari BKKBN pusat pun pernah ada, Cuma fokus ke rumah data.</p>
10	<p>Q Puskesmas wilayah lopang paling dekat di unyur. Sementara wilayah lopang gabung dengan unyur, kalau wilayah lopang dianjurkan disitu. Petugas medis datang 1 bulan sekali waktu posyandu, dari puskesmas unyur bidannya. Jelas ada peningkatan pengguna KB. terutama MOP untuk pria jadi ada, lumayan kalau yang lain sih ada aja. Puskesmas keliling tidak pernah ada.</p>
11	<p>Q Dari DP3AKB ada/memfasilitasi rumah atau ada anggaran untuk rumah atau apa, itu tidak ada. Jadi untuk sementara, memang harusnya difasilitasi oleh pemerintah, tapi karena belum ada, kita kembalikan ke masyarakat, mudah-mudahan masyarakat ada yang bisa memberikan swadaya untuk rumah data sehingga semuanya tersaji data di tempat itu.</p> <p>Terus dengan adanya rumah data kan di Kampung KB itu kan rumah data keinginannya sih, dengan adanya rumah data itu kita ingin data-data, data apapun yang diinginkan oleh masyarakat, dan bukan hanya di lingkungan tersebut, tetapi dari segi kelurahan data itu tersedia di Kampung KB dengan adanya rumah data.</p>
12	<p>Q Sebenarnya untuk dana bisa mendapat bantuannya dari mana saja, sebenarnya sih memang jujur lurah-lurah tuh kurang mendukung, jadi melihat ada kegiatan, ada program, saya yang repot. Padahal kalau bisa melihat, dengan adanya Kampung KB kan dia bisa butuh apa di Kampung situ, kalau butuh sesuatu bisa ke dinas, linsek semuanya masuk.</p>
13	<p>Q Pembinaan poktan dan DP3AKB yang setiap bulan. Kita tiap bulan ada kegiatan pertemuan pokja, lokmin dan forum musyawarah setiap bulan (loka karya mini)/rapat kecil-kecilan setiap bulan. Disitu bisa apa aja, kebetulan nanti bulan ini, kita mau diadakan praktek pengolahan makanan dll, khusus untuk peningkatan kesejahteraan keluarga dari DP3AKB. Biasanya selama ini kita kalau kegiatan hanya penyuluhan, sosialisasi, tapi tidak ada dampak, jadi kali ini judulnya sama, tapi praktek.</p>
14	<p>Q Sosialisasi dan pembinaan itu dari DP3AKB.</p>



17	Q	Pertemuan rutin pokja yang dilakukan oleh pos penyuluhan KB ada sebulan sekali, lokmin, pertemuan pokja, dan musyawarah.
18	Q	Kendala sebenarnya Kampung KB di tingkat RW, jadi dengan (RW ini ada pembangunan meningkatnya kesejahteraan minimal, kita muluk, kesejahteraan kan akhirnya bisa merubah main set, jangankan 1 Kampung, 1 orang aja merubah kebiasaan seseorang kan susah. Jadi harapan kita sih sebenarnya dengan 1 kampung itu dari 1 RW misalnya berubah, kita kepengen 1 kelurahan bisa terwakilkan melalui 1 RW. Ini pembangunannya, muncul 1 RW bisa ditiru. Intinya begitu mewakilkan dengan adanya itu bisa menjadi contoh untuk Kampung KB yang lain.

	I		I <sub>6</sub>
3	Q	Awal partisipasi poktan bagus. Jika ada kegiatan satu kelurahan terlibat, Kampung Kaliwadas namun pengurus dari kader kelurahan secara otomatis dari lingkungan masing-masing keterlibatan informasi dan ketika kegiatan turut serta se kelurahan. Kalau struktur sarannya ada pasti meningkat, namun ini sudah di data duluan, sudah masuk akseptor, jadi kalau peningkatan sarannya sudah tidak ada, kalau meningkat ya meningkat.	
5	Q	Penerapan 8 fungsi keluarga di kampung KB ini terus diterapkan, kita ada kelompok kerja kan sesuai dengan 8 fungsi keluarga, jadi kalau ada acara kita usahakan kedelapan fungsi keluarga itu diterapkan disatu acara atau kegiatan itu.	
6	Q	Koordinasi dengan lintas sektor, ada dinas terkait di Kota Serang, provinsi juga ada, DP3AKB. Lintas sektor sosialisasi, pembinaan. Jika kegiatan itu ada, lintas sektorlah lurah menjadi narasumber daripada dinas terkait ketika ada kegiatan di kelurahan otomatis ikut.	
7	Q	Rencana kegiatan di kampung KB kami kurang tau, tapi saya taunya ada kegiatan di kampung KB, mereka pasti melakukan perencanaan terlebih dulu sebelum melakukan kegiatan.	
10	Q	Kampung KB ketersediaan medis dari puskesmas terdekat. Dari dinas kesehatan sudah melekat dari kegiatan Kampung KB sendiri dan BKKBN. Pelayanan KB dari DP3AKB rutin, dari 2017 terpilih jadi Kampung KB, dasarnya karena banyaknya akseptor KB, rutin kalau kader dari peserta pelaksana Kampung KB itu sendiri mendapatkan akseptor KB baru bisa dilaksanakan. Akseptor KB meningkat.	
11	Q	Fasilitas yang diperlukan belum memenuhi, belum ada rumah data dan sekretariat KKB, jadi sifatnya data itu masih di rumah yang belum dikhususkan, datanya ada tapi belum dianggap rumah data. Sarana dan prasarana seharusnya ditunjang dari SKPD terkait.	
12	Q	Itu memang kita terkendala dana. Dari APBDes tidak ada, kalau lingkungan kelurahan mungkin menjadi pelaksana dari kegiatan saja, kalau yang punya program dari SKPD terkait, anggarannya dari dinas terkait itu.	
13	Q	Ada pembinaan untuk ketua kelompok kegiatan. Pembinaan SKPD, program kegiatan di SKPD terkait menyangkut Kampung KB.	
17	Q	Pertemuan rutin dari kader Kaliwadas di Kampung KB sendiri dan kader lingkungan yang lain se kelurahan.	
18	Q	Kendala dari segi akseptor KB dan keluhan tidak ada. UPPKS perubahan belum signifikan karena mengawali belum, kita baru bentuk dari kelompoknya. Ingin KB bukan usia yang keatas saja, namun remaja juga untuk menahan menikah diusia dini. Akseptor perkembangannya ada, tapi dari generasi ini yang tidak terkendali.	

	I		I <sub>7</sub>
--	---	--	----------------

3	<p>Kelompok kegiatan BKL pengajian, BKR pengajian dan senam, BKB posyandu dan PAUD, PIK-R majlis ta'lim, dan UPPKS bikin olahan rumahan baso dan kerajinan. PAUD dibuat pas ada Kampung KB. Kelompok UPPKS di Kampung KB ada tapi 1 Kelurahan, karena UPPKS itu satu kelurahan 1 kelompok, dan terdapat 4 kelompok di Kecamatan Serang. Kondisi ekonomi masyarakat sedikit berubah. Karena kita Kampung KB yang dulunya awam sama KB, jadi sekarang sedikit memahami. Kalau ekonomi belum signifikan, masih berusaha karena sekarang sudah ada UPPKS, karena untuk meningkat secepatnya itu tidak mungkin.</p> <p>Di Kelurahan Lopang ada 1 kelompok UPPKS, UPPKS "TUNAS" dengan alamat di Lopang Cilik RT03 RW02. Tidak ada kelompok UPPKS khusus di kampung KB, tapi anggota UPPKS "TUNAS" ini ada beberapa yang dari kampung KB. Sedangkan di Kecamatan Serang ada 4 kelompok UPPKS, yaitu kelompok "Ratu" di Lontar Baru, kelompok "Yudistira" di Cimuncang, kelompok "Kreasi" di Unyur, dan "Tunas" di Lopang.</p> <p>Nanti ada kegiatan di Kampung KB yang anggarannya pembinaan dari Kampung KB, dan sekarang mau diadakan praktek untuk meningkatkan kesejahteraan di Kampung KB. Praktek itu, praktek yang supaya bisa menghasilkan entah itu dalam bentuk kerajinan atau makanan itu yang dikelola anggarannya dari kas Kampung KB. Misal kita mau membuat suatu produk ekonomi kerakyatan, misalkan 1 produk makanan, di dalam pembinaan itu mau diadakan praktek, nah disitu dilakukan praktek membuat, cara membuat makanan, supaya sehingga si makanan ini menjadi sebuah produk dan bisa dipasarkan dan dijual dan pendapatannya akan kembali ke Kampung KB. Jadi supaya ada kegiatan di Kampung KB itu yang menghasilkan, Sehingga ekonomi dan kesejahteraan di Kampung KB itu meningkat. Jadi yang pengangguran diajak, misalkan produk ini berkembang dan bisa dipasarkan, yang pengangguran ini bisa diajak, dilibatkan dalam membuat keterampilan atau makanan itu. Itu termasuk poktan UPPKS, UP2K bisa, PIK-R bisa, marketingnya dari UPPKS, semuanya tidak keluar, berkesinambungan.</p>
5	<p>Q 8 fungsi keluarga ya diterapkan dengan baik, kalo ada kegiatan kan kita pakai penerapan 8 fungsi kegiatan.</p>
6	<p>Q Lintas sektor perlu kesemua dinas seperti dinas kesehatan, dinas pendidikan. Karena di Kampung KB sarana dan prasarana belum memadai pendidikannya.</p>
7	<p>Q Rencana disana ada, suka kumpul buat ngobrol-ngobrol mau ngadain apa nanti kegiatannya, tapi hanya ngobrol-ngobrol aja.</p>
10	<p>Q Pelaksanaan program kampung KB di Kampung Kaliwadas itu cukup baik, ada pelayanan dari DP3AKB melalui mobil pelayanan yang datang ke kampung KB, ada juga penyediaan pelayanan KB di puskesmas terdekat.</p>
11	<p>Q Sarana dan prasarana tempat belum ada, jadinya belum maksimal, seharusnya rumah data sudah ada, tapi karena lahannya belum ada jadi belum bisa buat rumah data. Jadi kendala karena kadang kita mau menjalankan kegiatan itu dengan tempat, tapi rumah data saja belum ada lahan. Masih banyak sih kita yang harus dibenahi di Kampung KB itu. Harapannya perlu di tingkatkan lagi kegiatan ini, pengennya ada tempat-tempat yang layak buat kegiatan Kampung KB. karena selaman ini belum ada tempat-tempat yang sekiranya nyaman. Karena selama ini kita tempat masih di rumah kader, itu pun tempatnya kurang enak kalau buat kegiatan.</p>
12	<p>Q itu kita memang terkendala di dana, tidak ada dana khusus untuk kampung KB.</p>
13	<p>Q Pembinaan kita ada, jadi kalau dari DP3AKB nya akan melakukan kegiatan nanti disampaikan ke UPT kecamatan, nanti saya yang menyampaikan ke kampung KB nya, nanti saya bilang berapa orang yang ikut pembinaannya dari kampung KB Kaliwadas itu.</p>
17	<p>Q Setiap bulan ada 3 kegiatan</p>
18	<p>Q Kendala nya di kampung KB ini belum ada rumah data dan kesekretariatan, belum ada tempat buat kita, kalo acara juga tempatnya terbatas. UPPKS pun belum</p>

	besar, karena dananya kurang, jadi apa adanya aja.
--	--

I Q	I <sub>8</sub>
2	Q Pelaksanaan program Kampung KB ini baik, ketua-ketua pokja mengikuti pembinaan-pembinaan dari dinas, dan posyandu berjalan terus, pelayanan KB juga ada.
3	Q Sesuai rutinitas ada perkembangan, pembentukannya juga berjalan baik dari awal, misalnya yang BKB, BKB berjalan, anak-anaknya ada, itu juga masih keterbatasan tempat, sarannya belum memadai. Tapi kalau kelompok kegiatan yang lain masih cakupan ketua kelompoknya aja kalo ada penyuluhan dari DP3AKB. Satu bulan sekali pelayanan KB, kemarin satu bulan dua kali, ada peningkatan penggunaan KB dari masyarakat. Peningkatan keikutsertaan masyarakat juga ada, ada kegiatan pembinaan, masyarakat antusias. Ada 40-70 yang datang di masjid ta'lim waktu kemarin dari BKKBN pusat ada penyuluhan. Kegiatan rutin BKB PAUD, BKL pengajian, Remaja pengajian, UPPKS usaha kegiatan buat produksi, cuma itu mereka tidak berfikir untuk lebih, jadi hanya cukup seperti itu, Kelompok UPPKS ada 1. Ekonomi masyarakat disini rata-rata pedagang dan buruh kasar/buruh pabrik. Setelah ada UPPKS sebenarnya ada perubahan, tapi kegiatannya belum terpikir untuk lebih kedepannya, hanya cukup untuk hari ini, tidak ada inisiatif untuk usahanya menjadi besar. Kondisi sosial remajanya ada majlis ta'lim.
5	Q Saya kurang tau kalau penerapan 8 fungsi keluarga, ya mungkin ada.
6	Q Ada lintas sektor, dari kampung KB belum pernah mengajukan ke lintas sektor, cuma DP3AKB aja, karena wadahnya disitu, jadi kita kesitu sebagai yang menyambungkan. Dari lintas sektor belum ada selain DP3AKB dan BKKBN, dari instansi yang lain belum.
7	Q Rencana kegiatan, ada, kita pernah merencanakan ingin ada instansi terkait, turun untuk sosialisasi kependudukan, kesehatan, remaja, inginnya dinas terkait turun langsung.
8	Q kita melakukan lapornya ke Kecamatan, dari kecamatan nanti ke DP3AKB. Laporan ke UPT Kecamatan ke DP3AKB ke BKKBN.
10	Q Pelayanan KB, sesuai dari instruksi DP3AKB, misal bulan apa. Gatentu kapan pelayanan KB nya setaun sekali, atau setaun. Belum pernah mengajukan permintaan pelayanan KB warganya susah, kita mengajak KB masih pada menghindar saja.
11	Q Sarana dan prasarana kampung KB ada bantuan laptop dan infokus dari DP3AKB.
12	Q Ada bantuan dari DP3AKB perbulan RP100.000 kalau sudah melaporkan laporan bulanan, dari DP3AKB saja, belum ada yang lainnya. Kalau dari kelurahan mensupport saja, mendukung saja.
13	Q Ada pembinaan untuk ketua kelompok kegiatan oleh DP3AKB. Karena kegiatan biasanya langsung ke pokja/poktan.
14	Q Masalah sosialisasi, sebagian masyarakat belum memahami kampung KB, taunya KB aja, sebenarnya kegiatannya tidak hanya KB saja, programnya dikependudukan, jadi masyarakatnya masih kurang partisipasinya. Sosialisasi kampung KB pernah di masjid. Sejauh ini DP3AKB kesini mendampingi, kalau ada kegiatan atau sosialisasi dan kalau ada pelayanan KB. Pemahaman masyarakat masih kurang, jadi hanya KB nya saja, sebenarnya tidak hanya KB saja, tapi karena saya pengurus jadi tahu, karena kampung KB kan hanya wadah. Harapannya sinerginya ditingkatkan, sosialisasi ke atas sudah sampai, tapi

	kebawahnya, instansi itu ga sampai, jadi kadang-kadang gatau apapun, seharusnya dari atas tau dan kebawahnya juga, karena kampung KB kan harusnya jadi prioritas untuk menuntaskan segala sesuatunya, kependudukannya, kesehatannya, lintas sektor juga belum, mereka punya program seharusnya mereka melihat bahwa ada kampung KB, jangan sampai kita yang mengusulkan, harusnya mereka juga aktif turun ke kampung KB, seharusnya terbuka, ada anggaran juga kan di instansi masing-masing, ini kampung KB apa saja yang belum ada dilengkapi, kalau kita mengusulkan juga belum tentu, karena mereka kan sudah punya kegiatan sendiri.
16	Q Pemahaman masyarakat di Kampung Kaliwadas ini tentang kampung KB belum tau banyak, mereka banyaknya taunya ya kampung KB itu hanya KB, mungkin yang tau kader-kader yang memang mengurus kampung KB, kalau ada kegiatan sosialisasi seperti dari DP3AKB itu masyarakat disini itu ya ikut aja, tapi gatau itu masuk ke acara kampung KB, mungkin ada yang tau yang sering ikut kegiatannya aja.
17	Q Perkumpulan poktan dan ketua kampung KB tidak ada, adanya dari DP3AKB rutin perbulan, ketua kampung KB dan pokja.
18	Q Kendalanya rumah data belum ada, di posko aja di rumah Ibu Siti kalo ada kegiatan, posyandu juga dirumah Bu Siti.

I	I <sub>9-1</sub>
3	<p>BKB kegiatan rutusnya waktu awal seminggu sekali, sekarang sudah seminggu 4 kali, senin sampai kamis, itu PAUD, kalau untuk penyuluhan sebulan sekali di posyandu, jadi setiap posyandu anaknya ditimbang, kalau posyandu untuk mengetahui berat badannya, kalau BKB, untuk tumbuh kembangnya, jadi kalau dari kartu KKA bisa dilihat perkembangannya. Paling banyak datang pernah 25 orang, waktu sukarela banyak yang datang awal-awal. Tapi disuruh bayar pada gaada, pada mundur gamau, karena orang sini susah inginnya bener-bener ga bayar.</p> <p>PAUD dibawah dinas pendidikan, BKB dibawah dinas DP3AKB, seharusnya menegaskan kepada ketua BKB karena dia menamakan BKB PAUD Kendedes. Padahal sudah dikasih tau kalau PAUD dan BKB berbeda. Membentuk PAUD mengambil kesempatan ada BKB, dan salah kita juga membentuk PAUD. PAUD nya masih mandiri, belum melibatkan dinas pendidikan, karena tidak ada SK nya, jadi berdiri sendiri mandiri, SK nya menggunakan SK BKB.</p> <p>PAUD dari jam 8-10, Gurunya ada 2, dan saya pembina, kalau salah satu guru tidak ada, saya yang mengganti. Tadinya hanya pakai kaos olahraga, sekarang ada batik, awalnya saya kaos olahraga saja. PAUD yang ikut awalnya diprioritaskan hanya kaliwadas, tapi dari mana-mana banyak yang ingin ikut masuk, awalnya saya tolak, tapi kasian juga, lama kelamaan yaudah tahun 2018 menerima yang lain, karena orang-orang sini memang yang pada malas, jadi daripada disini pada engga, jadi saya menarik dari luar. Ada kelas A dan Kelas B, banyak yang berenti dan ada yang anaknya ingin masuk tapi ibunya tidak mau mengantar anaknya terus ada anaknya yang ga mau, pengen nya main aja, tapi ibunya tidak membimbing, sekarang kelas A sudah sedikit, ada yang keluar. Kegiatan di PAUD edukasi seperti TK ada calistung (baca, tulis, ngitung), PAUD ini sudah merambat ke TK, karena ibu-ibu ingin anaknya bisa baca supaya bisa langsung masuk SD. Jadwal nya pagi dibarengin, ada 2 kelas A dan B, dibagi 1 gurunya, yang lulusan kuliah kelas B pemantapan, yang lulusan SMA kelas A dasar-dasar.</p> <p>Di daerah kampung KB tidak ada PAUD dan TK, jadi PAUD ini jadi TK juga. Jadi daripada BKB ini tidak dimanfaatkan, jadi saya manfaatkan dengan membuat PAUD, pertamanya kumpulan anak-anak biasa. PAUD dibuat sejak adanya kampung KB, tidak bekerjasama dengan dinas pendidikan, masih mandiri, saya juga ingin, tapi harus punya yayasan, harus ada uang. Perubahan sebelum jadi kampung KB dan setelah jadi kampung KB, untuk pengetahuan ibu-ibunya ada peningkatan, dari</p>

		mereka gatau tentang mengurus bayi yang benar, tapi tetap saja masih belum diterapkan, karena susah, tapi pelan-pelan, perubahan ada tapi tidak drastis.
7	Q	Merencanakan kegiatan kalau untuk BKB ada khusus untuk BKB saja. Untuk pelaksanaan PAUD
11	Q	Sarana dan prasarana di BKB kurang, untuk penyuluhan dari kartu KKA, kalau untuk penyuluhan di posyandu dari KKA, dari lahir sampai perkembangan perbulan. Dulu dikasih ke ibu-ibu, setiap dateng harus dibawa, terus banyak yang hilang, jadi disimpan di saya. Bangunan PAUD sekarang pakai rumah kontrakan orang tua, rumah kosong, daripada tidak dipakai, sebenarnya kalau ada yang mau memberikn dana untuk membangun, saya punya tanah kosong, tapi karena tidak ada dana jadi saya mundur, jadi berdiri sendiri saja. Sarana dan prasarana sampai saat ini hanya BKB KIT. Anak-anak dan ibu-ibu nya ingin ada bangku dan meja untuk menulis dan sarana permainan, mengeluh ingin ada itu. Mainan juga dibutuhkan, karena saya hanya diberi untuk mainan itu sekali saja, dikasih dari BKKBN yaitu BKB KIT, waktu awal mendirikan PAUD. Pernah ada dari DP3AKB Ibu Yani memberikan papan tulis, spidol, buku 1 pak, penggaris 1, pulpen 1, dan tip-x 1 untuk PAUD secara sukarela pakai uang pribadi karena kasihan. Murid bawa meja sendiri-sendiri, yang tidak punya tidak pakai meja.
12	Q	Saya kasihan kepada yang mengajar, jadi pertama-tama PAUD itu ada sumbangan seikhlasnya, paling dapat Rp11.000 dibagi untuk 2 orang, jadi saya inisiatifbikin kartu bayar minimal Rp2000 setiap pertemuan, jadi kalau ga ke sekolah ga bayar, kalau masuk sekolah saja bayarnya. Guru orang sini, dia sukarela, yang 1 sarjana guru TK, yang satu lulusan SMA, dua-duanya mengajar di TK lain juga. Belum lama ini bayarannya dinaikin jadi Rp3000 perpertemuan, makin berkurang yang datang.
13	Q	Pembinaan ada dari DP3AKB, DP3AKB kesini sosialisasi langsung juga pernah, tapi bukan soal BKB, jadi keseluruhan untuk poktan, kalau khusus untuk ke PAUD belum pernah.
14	Q	Sosialisasi, jadi yang dikasih pembinaan adalah kader-kader, untuk ke ibu-ibunya anggota BKBnya belum pernah, hanya kader-kader nya dikasih pembinaan, cuma kader ada yang aktif ada yang engga, yang aktif hanya saya saja. Sosialisasi saya kepada ibu-ibu waktu pelaksanaan posyandu, di PAUD juga pernah, cuma sepintas saja. Pemahaman masyarakat seperti cara menyusui yang benar, pernah ada disosialisasikan kepada kader, motorik kasar dan halus orang tua harus tau, tapi belum ada sosialisasi lagi.
16	Q	Masyarakat itu kalau BKB taunya ya PAUD aja, gatau kalau PAUD itu BKB, kita ingin ibu-ibu mengetahui cara mendidik anak yang baik, tapi susah, tidak segampang yang dibayangkan, karena ibu-ibu sudah susah, tau BKB aja engga, jadi pemahamannya kurang.
17	Q	Pertemuan rutin poktan sebenarnya sebulan sekali di rumah bu siti yang sebagai pos KB, untuk bulan ini belum ada pertemuan.
18	Q	Kendala di BKB itu PAUD nya kita tempatnya terbatas, pakai rumah saudara saya yang tidak terpakai, fasilitas juga tidak ada meja dan lain-lain, kita untuk membayar guru pun sumbangan dari muridnya itu seikhlasnya, untungya gurunya juga memang ikhlas, bisa buat beli minum juga diterima saja.
	I	I <sub>9,2</sub>
3	Q	Kondisi sosial ada PIK-R di majelis, kegiatannya mengaji sehari-hari BKR, pengajian minggu sore dan malam Jum'at, dan minggu sore. Kadang disatuin pengajian bareng BKL. Jadi datanya nyampur, belum ada kegiatan khusus. Kadang kalau datang semua banyak. Kalau dari RT 01-05 minggu sore. Kalau dari

	<p>sebrang, malam jumat sama jumat siang jam 2an. Ada juga dari RT kita Cuma 1-2 Orang Doang.</p> <p>PIK-R di majelis, Belum ada khusus BKB, BKL, BKR, jadi dicampur aja, belum ada, kita belum ada tempat. Mausih pengen, tempat mah diusahain bisa disini, tapi gaada waktu. Sebagian BKR kan remajanya ada yang gabisa baca, Sebelum jadi Kampung KB, pengetahuannya jadi lebih tambah luas, banyak yang ber KB. Keikutsertaan akseptor KB juga bertambah. Disini yang sepuh-sepuh yang muda-muda pada gatau/gamau, padahal hari minggu tidak kerja, ada pertemuan RT juga harus di panggil lagi. Gaada uang kas di BKR, Bikin sendiri ketua BKR seperti buku absen dan lain-lain pakai uang kantong sendiri (seharusnya ke Bu RW (Kata Bu Siti) itu buat bikin profil juga abis 20rb pakai uang sendiri) buat ada kegiatan dipanggil dari kecamatan. Kalau BKR punya buku baru buat, kalau BKL tidak buat.</p>
7	<p>Q Kalau rencana kegiatan sih kita suka ada ketemu sama pihak yang mau ngadain sosialisasi, pasti kita diskusiin, tapi untuk BKL ya saya aja yang jalanin, jani tidak usah pakai rencana.</p>
11	<p>Q BKR banyak sarana dan prasarana yang diperlukan, berharap tempat dan alat bantu yang lain misal buku pintarnya, kan belum ada. Kita belum ada sumber materinya kan dari mana.</p>
12	<p>Q Dapet reward 6 bulan sekali, sebulan 100.000 dana kampung KB 100.000. Pada kenyataannya, kalau kita mau ambil reward harus punya akseptor, kalo gabawa akseptor paling dipanding sisanya, nanti keluar lagi kalo kita bawa akseptor lagi. Tetep kita harus punya akseptor dulu, kalo gaada, bisa-bisa di panding.</p>
13	<p>Q Pembinaan atau pelatihan kesana tidak rutin (kadang-kadang). Biasanya pelatihan di KPRI, kadang terakhir di gedung margawiwitan. Tentang Kampung KB, Dapat uang transport, ada snack dari DP3AKB dan BKKBN biasanya.</p>
14	<p>Q Sosialisasi untuk BKR secara langsung sih saat ini kita belum ada, karena keterbatasan tempat dan biaya juga.</p>
16	<p>Q Kalau kaya kampung-kampung KB yang lain kan sekarang udah maju, warganya bagus lumayan, kita inginnya semua warga bersatu kerja sama dengan tulus ikhlas bareng-bareng, karena kalau ga didukung dengan warga bergerak kan kita gabakal maju, kita bilang harus ini itu, kalau warga tidak menyadari, tidak mau ikut serta kan ga jalan. Karena sekarang masih susah untuk yang seperti itu. Kadang itu-itu aja yang ada, kalau ada kegiatan juga. Walaupun kita sudah berusaha ngajak, ya kalau mereka gamau susah. Harapannya kita kumpul bersama, gotong royong, menyadari rutin, tapi kenyataannya yang ikut itu-itu aja orangnya, itu berarti pemahaman masyarakatnya masih kurang tentang kampung KB.</p>
17	<p>Q Paling cuma kalo ada tugas, ngisi bareng-bareng, baru kumpul-kumpul, di rumah Bu Siti.</p>
18	<p>Q Kendalanya, selama ada Kampung KB itu kadang-kadang undangan untuk warga Kampung KB terutama poktan-poktan Kampung KB kadang-kadang bikin saling ngiri orang, undangan untuk poktan, kalau misalnya harus berangkat seharusnya dari sana aja yang nentuin, jangan kita. Soalnya yang namanya ibu-ibu kaya gitu, pada salah paham. Jadi pengennya namanya dari sana aja, gantian yang dateng dari 5 orang itu bergiliran, harus merasakan pelatihan, Ketua, wakil, sekretaris, bendahara. Sebagai ketua sudah menawarkan untuk berangkat, pengurus lain, tapi kalau tidak ada yang mau ya saya aja. Kadang ketua BKB Bu RW, ko yang pergi Ibu Iroh aja, padahal sebelum Bu RW ngomong, saya udah nawarin ke yang lain. Kalau pada gamau, yang penting saya undah nawarin, terserah, ya terpaksa saya yang pergi. Anggota yang lain ada yang punya anak kecil, ada yang repot.</p>

I	I <sub>9.3</sub>
Q	BKL di kita aja, soalnya Kampung KB itu dibagi jalan. Percobaannya

3	<p>didaerah sini, nanti kalau ada perkembangan jelas baru nyebrang. Tapi Pak RW pengennya kita 1 RW bareng-bareng, setiap kegiatan itu menyeluruh, jangan di 3 RT aja. Kalau ada penyuluhan sebrang ikut, jadi udah pada kesini, tapi ga seluruhnya, paling yang BKB yang balita ngambil dari sebrang. Kan ada 6 anggota tiap poktan, dari sebrang juga dilibatkan. Cuma untuk yang lansia itu kan kegiatannya kan di pengajian yang sering tiap minggu, jumat siang ada. Itu keseluruhan, kalo khusus belum ada, belum terbina gaada waktu, jadi langsung semua.</p> <p>150 lansia 1 RW, 90 di Ibu (di 3 RT), namun belum ada data pastinya. Kalau ada kegiatan, terutama kegiatan untuk PKK kecamatan. Mengisi pokja 4, jadi bagian dari semua untuk sementara ini kalau ada pelatihan apa-apa udah nabung. Kalo untuk masing-masing poktan belum ada, jadi digabungin, Paling senam, BKL dan BKR digabungin.</p>
7	<p>Q Rencana kegiatan lain selain pengajian belum ada.</p>
11	<p>Q BKL belum ada buku panduan itu untuk sumbernya, misalnya buat narasumber dari kita kan, kalau narasumbernya dari sana takut gabisa, jadi kita bisa sendiri.</p>
12	<p>Q Setiap ada pembinaan, kan ada uang transport 50rb. 30.000 buat kita yang datang. Yang 20rb dikasih ke bendahara. Jadi kalo ada kegiatan apapun, seperti fotocopy ke Bu RW. Waktu itu ada anggota 20 yang ikut, ada 2x jadi udah 800.000 ke Bu RW. Nanti untuk kegiatan disini.</p>
13	<p>Q Ada pembinaan, itu pelatihan itu ada materi-materinya, yang diundang kesana pengurus poktan saja, yang bisa datang kesana, jumlahnya ditentukan dari sana, lewat Ibu Raminah kita dikasih tau.</p>
14	<p>Q Sosialisasi untuk BKL dari saya pernah sih bilang BKL itu apa dan bagaimana kepada masyarakat, tapi hanya dalam kegiatan posyandu kalau ada yang datang lansia nya buat nimbang, kalau diluar itu ya paling kita ngobrol-ngobrol aja, karna saya juga sudah termasuk lansia.</p>
16	<p>Q Mulai kita merasakan ada Kampung KB itu ada pertemuan-pertemuan 2017, Jadi sedikit mengetahui seperti apa Kampung KB, tapi baru pengurus-pengurus kampung KB nya saja, mungkin sekarang itu agak lumayan warganya ada yang sering ikut kegiatan, itu tau kampung KB, tapi yang gapernah ikut kegiatan itu kurang tau mereka, jadi kalaupun ditanya tentang kampung KB pasti taunya KB nya saja.</p>
17	<p>Q Pertemuan rutin ada di pengajian rutin, karena adanya di kobong, jadi pengajian setiap waktu, magrib, subuh, sehabis isya itu rutin.</p>
18	<p>Q Kendala selama ada Kampung KB ini kendala yang terlalu mencolok sih belum berasa. Tapi kadang suka ada undangan pelatihan untuk anggota-anggota poktan ini. Kadang-kadang pada “gaboleh rangkap”, “gaboleh double”, kalau bisa gantian. Jadi kalau misal ada undangan, pelatihan ke UPT, ke KPRI misalnya tanggal sekian untuk perwakilan 2 orang untuk lansia, balita, remaja suatu saat ada undangan lagi, gabisa berangkat lagi, gantian yang lain, itu sering rebutan gitu, ada yang sirik karna itu-itu terus yang ikut. Ada juga yang dianya cape ikut terus karna yang lain pada gamau.</p>

I	I <sub>9-4</sub>
3	<p>Q Banyak yang ikut PIK-R, tapi tidak masuk anggota. Anggota hanya ada 40, ada beberapa anak belum dimasukkan. Karena laporannya ada di K0, jadi yang baru-baru belum masuk. Karena disini PIK-R itu ikut ke pondok, jadi anak-anak yang masuk ke pondok sekalian masuk ke dalam PIK-R, bukan pondok ikut PIK-R, tapi PIK-R ikut ke pondok. 40 orang laki-laki dan perempuan. Pondok (mengaji) laki-laki dan perempuan. Tapi yang nginep dipondok laki-laki semua.</p> <p>Kalau masyarakat awam tau Kampung KB itu KB saja. Kalau PIK-R</p>

	<p>kebanyakan masyarakat mengenal, belum tau apa itu PIK-R, masih langka didengar oleh telinga masyarakat di sini. Pelaksanaan program Kampung KB berjalan normal, berjalan lancar, namun PIK-R kedengarannya masih awam, masih langka.</p> <p>Untuk perkembangan PIK-R alhamdulillah meningkat. Sebenarnya memang PIK-R itu belum ada sekretariatnya, Cuma disini ikut numpang di pondok/kobong. Sosialisasi ke masyarakat/remaja-remaja yang belum masuk PIK-R, termasuk kerja bakti, Pengajian rutin, karena adanya di kobong, jadi pengajian setiap waktu, magrib, subuh, sehabis isya. Pendidikan rata-rata remaja SMA, tapi kebanyakannya kerja dan dagang.</p>
7	<p>Q Rencana kegiatan, kita nanti menjelang ramadhan pengen mengadakan acara “menyambut ramadhan”, “pawai ta’aruf menyambut bulan suci ramadhan”, yang mengadakan PIK-R, remaja-remaja</p>
11	<p>Q Sarana dan prasarana, laptop dan infokus untuk PIK-R, untuk kegiatan majlis. Ada sarana dan prasarana laptop, tapi laptopnya gaada, gaada di kita, saya tidak tau dipegang sama kelurahan, katanya kalau dipake disini takut rusak, tapi kalau mau dipake ambil aja. Tapi infokus ada disini/kobong. Biasanya infokus digunakan untuk penyuluhan. Biasanya tempatnya dimasjid, sekarang karena masjidnya dibongkar jadi dikobong di atas. Laptop dan infokus dikasih dari DP3AKB.</p>
12	<p>Q Dari kelurahan, dari Pak Lurah nya sendiri sering ngasi ke saya kalau ketemu, dari rumahnya langsung pribadi. Ada uang kas dari anak-anak setiap malam rabu nabung, Rp3000 masing-masing/per orang, uangnya ada di bendahara.</p> <p>Belum ada dari DP3AKB secara uang untuk PIK-R. Kecuali kalau kita ikut penyuluhan undangan dari sana paling dikasih transport. Yang ikut penyuluhan kadang saya, kadang 2 orang, kadang 5 orang dari anak-anak PIK-R.</p>
13	<p>Q Kadang di Rau di Anyer ada penyuluhan dari DP3AKB.</p>
14	<p>Q Untuk PIK-R belum ada sosialisasi seperti untuk remaja, pernah sih dari anak-anak kuliah yang datang kesini kasih sosialisasi tentang kenakalan remaja, tapi kalo kita ya Cuma ngaji karna kita kegiatannya ada di Kobong ini.</p>
16	<p>Q Awal mulanya, memang anak-anak di pondok ini, orang-orang sini yang dulu terjerumus tentang narkoba sebagaimana banyak, sebelum masuk kesini. Termasuk mantan pencuri juga banyak anak-anak nya ketika masuk di pesantren, saya rangkul semuanya suruh masuk kesini, Alhamdulillah berubah total, disitulah PIK-R melirik kesini. Jadi kalau PIK-R door to door ke rumah, gabakal nyampe, gabakal bisa di mengerti. Ketika digabungkan dengan Kampung KB, PIK-R ikut penyuluhan, beberapa kali anak-anak PIK-R ikut penyuluhan, yang diterangkan tentang KB, jadi anak-anak yang belum paham kesitu masih remaja, masih jauh pemikiran. Menurut saya dipisahkan saja kalau KB ya KB, PIK-R ya PIK-R, jadi jangan satu badan, jangan satu lembaga, harusnya dibuat sendiri lembaganya.</p>
17	<p>Q Pertemuan rutin, tidak terlalu ada, karena tergantung kegiatan yang ada di DP3AKB, pertemuan rutin untuk pengurus.</p>
18	<p>Q Kendalanya PIK-R kalau tidak dinaungi di pondok mungkin ga bakal jalan. Diajukan PIK-R kesini oleh Ibu Siti, karena ini sudah jadi pondok, dan berhubung semua disini remaja, dan masyarakat disini juga banyak, tapi memang banyak dari daerah lain, tapi yang diambil yang dari sini saja. Orang Kampung KB nya di Kaliwadas saja. Akhirnya Ibu RW dan Ibu Siti tidak mau ambil pusing, minta tolong ke kita. Kita pun masih awam sama PIK-R, tidak tau. Sehingga dari Ibu RW dan Ibu Siti gamau ambil pusing, lari lah kesini awal mula pembuatan PIK-R disini. Kendala PIK-R kadang soal waktu, ada pekerjaan lain, salah paham, itu aja.</p>

I	I <sub>10-1</sub>
Q	Ada penyuluhan KB dari kota, dari provinsi pernah juga. Tadinya banyaknya



10	suntik. Seharusnya IUD dan Implan, sedangkan kadernya sendiri suntik, jadi sekarang dianjurkan, kadernya juga harus memilih diantara 1, IUD atau Implan. Warga banyak yang KB. Kalau sekarang ibunya sibuk, jadi kalau ada pelayanan atau kegiatan di kampung KB Ibu sudah beberapa kali ga hadir.
11	Q Kalau saya lihatnya sih kalo tempat buat posyandu itu kurang layak, iturumah warga, rumahnya Ibu Siti tapi dipake penimbangan balita, ibu hamil yang dateng. Kalo KB sih saya ikut yg kemarin ada mobil pelayanan KB dateng, baru pertama kali ada, jadi kita gausah jauh-jauh mau pasang implan atau IUD, gratis juga.
16	Q Saya KB IUD. Kalau pengen jelas di Bu Siti ke Bu RW. Kegiatan kampung KB ikut di Bu Siti kalau ada penyuluhan, kalau ada pembinaan balita saya gatau. Itu ibu-ibu kader biasanya yang ikut pembinaan ga pernah tau ada penyuluhan. KB banyak yang pake, KB Itu biasanya Ibu-ibu posyandu yang sering mengumumkan, cuma posisinya bukan disini, tapi di RT 03 yang seperti kaya gitu. Kalau disini tempatnya gaada. Jadi ga terlalu fokus ke Kampung KB. Warga suka ikut KB, ada kegiatan penyuluhan, banyak yang ikut, bulan kemarin ada kumpul ke mushola di RT 01 itu ada uraian-uraian dari dinas langsung. Kemarin kan baru ada penyuluhan juga dari Kampung KB, implan dan IUD di Kampung KB (disana), iya disitu (di Ibu Siti) aja, kita mah cuma ikut aja. Ada banyak yang ikut, tapi dari RT sini kayanya belum ada, kadang-kadang suka dari RT 03, dari RT 01 yang banyak, RT 01 dan RT 05, kalau RT 04 orang-orangnya baru punya anak 1 atau 2, jadi gaada yang ikut.

I Q	I <sub>10-2</sub>
11	Q Saya punya remaja, tapi saya gatau ada BKR dan PIK-R, saya taunya ada pelayanan KB buat ibu-ibu, pernah waktu itu ada kumpul di masjid buat sosialisasi KB, kalau untuk remaja anak saya juga ga ikut apa-apa. Tau saya ada kobong di RT sebrang, tapi itu buat cowo aja, terus ngaji aja kegiatannya, ga pernah ada kegiatan buat remaja-remaja gitu.
16	Q Punya anak 4, ada yang sudah kuliah di Unsera semester 4, anak Ibu gapernah ikut kegiatan remaja di kampung KB. PIK-R juga gatau gapernah ada, kadang kalo ada sosialisai banyak juga remaja ada yang hadir disitu. Kalau sekarang, apa-apa dididik, artinya harus dipelajari, bagaimana ngurusin lansia, gimana harus mendidik remaja, kasih masukan-masukan untuk remaja, ada banyak manfaatnya, perbedaan juga banyak. Harusnya kesana ke Kampung KB nya. Ketua Kampung KB adanya disana, di RT sana. Posyandu juga ada disana. Kalau Kampung KB nya itu disana di RT 01. Ke Ibu Siti itu ketuanya itu ketua Kampung KB. Disini juga Kampung KB sama, tapi kan pusatnya ada disana di RT 01 itu, kadang yang ikut penyuluhan cuma ketuanya aja.

I Q	I <sub>10-3</sub>
11	Q Saya gatau, kalau untuk saya lansia pernah senam di rumah Bu Siti, itu katanya BKL, tapi pernah sekali aja gitu gaada lagi.
16	Q Lansia usia 55 tahun, kegiatan lansia di posyandu saja, penyuluhan lansia belum pernah, waktu itu pas posyandu senam sekalian, pengajian ikut yang malam jumat, malam minggu, dan malam senin. Karena disini Kampung, jadi kurang paham, ada juga kalau yang dekat-dekat disana, kaya kalau ada kegiatan BKR, terus kalau BKL kan lansia, jadi hanya beberapa, di datanya mah banyak, tapi tau sendiri namanya orang kampung. Nanyanya ke Ibu Siti, Ketuanya, adanya di RT 01. Itu tempatnya di situ Kampung KB itu. Kalau saya hanya sebagai anggota BKL. Kalau Ibu Siti ketua

	BKL.
--	------

I Q	I <sub>10-4</sub>
11 Q	<p>Kalau sarana dan prasarana belum siap semua, belum ada rumah data, kalo ada kegiatan apapun masih di rumah Ibu Siti. Kalau ada kumpul sosialisasi kan harus punya tiker dan lain-lain, ini kadang tidak ada tiker masih kurang kalau kata saya, ga keliatan kampung KB itu apa, cuma ada tulisan aja di depan gang, saya ikutan UPPKS, tapi UPPKS itu di Ibu Raminah, bukan di kampung KB sini.</p>
16 Q	<p>Pertama terlibat mengikuti, gaada modal berbentuk benda/uang, belum dan gaada. Ada kelompok usaha, kegiatan untuk usaha kecil. Nanti setiap bulan kadang-kadang rapat-rapat penyuluhan, penyuluhan di DP3AKB sebulan sekali atau beberapa bulan sekali ada kegiatan-kegiatan dari pusat, pakai mobil dinas, bus <math>\frac{3}{4}</math>, ada masuk ke tempat Kampung KB. Kampung KB ini aktif penyuluhannya kumpul-kumpul banyak orang-orangnya ada kegiatan usaha kecil yang sesuai keterampilannya. Dulu pas awal-awal bikin produk kerang/intip, pepes bandeng dll, ada pempek, kalau sekarang ini bikin dari olahan ikan. Ibu-ibu yang ikut penyuluhan itu dari pusat, dijualnya kalo ada acara-acara kampung KB ikut buat jualan, nanti ibu-ibu dinas pada beli untuk oleh-oleh. UPPKS dari Lopang, disini Cuma itu-itu aja, pusatnya di Ibu Raminah, PIK-R juga adanya di Sebrang aja. Disini gaada, adanya di RT sebrang, soalnya adanya disana, jadi ngambilnya dari sana, jadi diadainnya tetep disana, di RT sana, ya di Ibu ketuanya itu.</p>

## Matriks Hasil Wawancara Setelah Reduksi Data

### 1. Isi Kebijakan

#### A. Kepentingan-Kepentingan yang Mempengaruhi Kebijakan

Q	Latar belakang dibuatnya program Kampung KB?	Kesimpulan
1	<p>Kampung KB bidang ini yang mengelola secara umum. Kampung KB adalah wadah, isinya ada program KB, program KSPK, ada bidang daladuk dan bidang pembangunan lainnya. Saya di subbid hubungan antara lembaga itu ngurus rumahnya, wadahnya, jadi semua terkait dalam bentuk pengelolaan Kampung KB, cuma punya bagian-bagiannya, kalau saya lebih kepada struktur kelebagaannya, kalau yang lain terkait dengan program kegiatannya, semisal di KB nanti ada pelayanan KB nya ada sosialisasi kespronya, di KS nanti ada kegiatan tribinanya, PIK-Remaja dan yang lain-lain. Itu semua terkait. Tapi umumnya di Adpin. Kampung KB itu adalah rumahnya. Isinya kegiatan-kegiatan, ada dari bidang KB, bidang KS, dari bidang pembangunan lainnya, kesehatan, kemudian sosial tenaga kerja, keamanan, nanti masuk disana.</p>	<p>kepentingan utama dalam pelaksanaan program kampung KB. Kampung KB adalah wadah, yang di dalamnya terdapat program KB, program KSPK, pengendalian penduduk, dan bidang pembangunan lainnya. Koordinasi yang dilakukan adalah dari BKKBN ke DP3AKB lalu ke UPT kecamatan (Pos Penyuluhan KB) setelah itu langsung ke kampung KB. Kampung KB sebenarnya 1 kelurahan namun untuk penggarapan wilayahnya 1 RW, di Kota Serang terdapat masing-masing 1 kampung KB di tiap kecamatan kecuali di Taktakan terdapat 2 kampung KB. Kampung KB selalu di prioritaskan dibandingkan dengan yang lain. Menjadi kampung KB di Kota Serang salah satu alasannya karena pencapaian KB nya sangat rendah, yang menentukan wilayahnya yaitu dari BKKBN. Jadi kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi pelaksanaan program kampung KB terdapat pada kepentingan BKKBN untuk meningkatkan program KB-KR, program PK, dan program kependudukan.</p>
2	<p>Kampung KB untuk operational penggerakannya di kita di dalduk, kalau semua pelayanan KB ada di bidang KB. Kalau kita dalduk mengolah data-data hasil pelayanan adanya di dalduk. Lebih fokus ke seksi penggerakannya masing-masing OPD. Di kabupaten/kota berbeda yang pegang kampung KB, ada yang di bidang KB, kalau kita di pengendalian penduduk. Dari BKKBN turunannya ke DP3AKB lalu ke UPT Kecamatan lalu langsung ke kampung KB. Kampung KB itu satu kelurahan, tiap kecamatan ada 1, kecuali di Taktakan ada 2 kampung KB. Kalau untuk penggarapan wilayahnya 1 RW, fokusnya ke 1 RW, di kampung KB sendiri poktannya tingkat RW, pokonya ketika dibentuk kampung KB, otomatis dibentuk BKB, BKL, dan BKR dibuat di 1 RW itu. Pokonya kampung KB selalu kita prioritaskan disamping yang lain. Dibuat kampung KB itu salah satunya karena pencapaian KB nya sangat rendah, dan itupun yang menentukannya pihak dari BKKBN Provinsi Banten, jadi bukan kita yang menentukan, mereka sudah punya data melalui pendataan keluarga.</p>	<p>kepentingan utama dalam pelaksanaan program kampung KB. Kampung KB adalah wadah, yang di dalamnya terdapat program KB, program KSPK, pengendalian penduduk, dan bidang pembangunan lainnya. Koordinasi yang dilakukan adalah dari BKKBN ke DP3AKB lalu ke UPT kecamatan (Pos Penyuluhan KB) setelah itu langsung ke kampung KB. Kampung KB sebenarnya 1 kelurahan namun untuk penggarapan wilayahnya 1 RW, di Kota Serang terdapat masing-masing 1 kampung KB di tiap kecamatan kecuali di Taktakan terdapat 2 kampung KB. Kampung KB selalu di prioritaskan dibandingkan dengan yang lain. Menjadi kampung KB di Kota Serang salah satu alasannya karena pencapaian KB nya sangat rendah, yang menentukan wilayahnya yaitu dari BKKBN. Jadi kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi pelaksanaan program kampung KB terdapat pada kepentingan BKKBN untuk meningkatkan program KB-KR, program PK, dan program kependudukan.</p>

#### B. Jenis Manfaat yang Dihasilkan

Q	Sejauh ini bagaimana pelaksanaan dari program kampung KB?	Kesimpulan
1	<p>Program kampung KB sudah berjalan 3 tahun sejak dicanangkan oleh Presiden pada tanggal 14 Januari 2016. Keegiatannya macem-macam, contohnya untuk lansia, bisa pengajian untuk lansia, senam lansia, kemudian pembuatan keterampilan kreasi bagi lansia, intinya BKL itu mengajarkan kepada keluarga-keluarga yang punya lansia untuk bisa membina dan mendidik lansia-lansia itu tetap produktif, tetap punya aktivitas, tetap sehat, tidak minder, itu output yang diharapkan dari BKL, jadi sasarannya bukan keluarganya aja, tapi lansianya juga, sasarannya bisa langsung kita bikin kegiatan untuk lansianya.</p> <p>BKB dan PAUD, didalam konsep BKB holistik, itu terintegrasi antara PAUD dan BKB, jadi dimana ada PAUD pasti disitu ada BKB, tapi kalau yang BKB nya bukan BKB holistik, di bisa berdiri sendiri tanpa adanya PAUD, contoh BKB kan bisa saja nanti dipadukan dengan posyandu bisa, diposyandu itu kan udah jelas ada penimbangan, pemberian imunisasi buat anak, selagi itu dilaksanakan, orang tuanya juga diberikan pemahaman bagaimana cara mendidik balita. Bedanya antara PAUD dengan BKB dari sasarannya, kalau PAUD yang disasar adalah balitanya, tapi kalau misalkan BKB, orangtuanya, jadi kita sejalan, orang tuanya diberikan wawasan, si anak-anak nya juga diberikan wawasan, karena nanti ngerasain, kalau punya anak itu, bagaimana repotnya ngurus anak, gamudah, ketika kita punya balita, makanya, silahkan buka di playstore, disitu banyak materi-materi tentang ketahanan keluarga, bagaimana jadi orang tua yang hebat, bagaimana menjadi ibu rumah tangga yang bekerja, itu banyak materi-materi.</p>	<p>manfaat yang diharapkan para pihak pengelola kampung KB memang mengarah kepada manfaat positif yang mengarah kepada kepentingan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan keluarga. Akan tetapi setelah program kampung KB tersebut berjalan, peneliti menemukan adanya perbedaan manfaat yang dihasilkan saat ini. Awalnya memang manfaat dirasakan oleh masyarakat kampung KB yaitu dengan adanya kegiatan di kampung KB, namun sekarang karena minimnya kegiatan poktan, masyarakat kurang merasakan manfaat adanya Kampung KB di Kaliwadas. Pengurus kampung KB atau ketua poktan (kelompok kegiatan) mendapatkan manfaat positif dengan mengikuti pembinaan dari DP3AKB, namun manfaat tersebut tidak disalurkan kembali kepada masyarakat. dampaknya partisipasi masyarakat menjadi rendah. Adapula manfaat yang dirasakan yaitu meningkatnya jumlah akseptor KB di Kampung Kaliwadas, masyarakat dapat merasakan manfaat adanya program kampung KB yaitu dari pelayanan KB gratis.</p>
2	<p>Pelaksanaan kampung KB itu bukan cuma pelayanan tentang KB saja, tapi ada BKB, BKL, BKR, PIK-R, dan UPPKS yang semua itu disebut pokja (kelompok kerja). Kita melakukan pembinaan kepada pengurus pokja tersebut, kepada ketua-ketua pokja, sebagai perwakilan, untuk diteruskan kembali kepada masyarakat melalui mereka.</p>	
3	<p>Selama ini belum ada/mengadakan konseling untuk remaja (PIK-R), tapi pernah ada penyuluhan PIK-R Kampung KB diundang di KPRI, sering diundang keluar anak-anak PIK-R, mengadakan pembuatan kerajinan dan dipamerkan. Catatan kegiatan yang pernah dilaksanakan di Kampung KB ada di buku pokja. Karena mereka masing-masing kelompok itu punya kegiatan sendiri, jadi adanya di tiap ketua poktan. Pembinaan apapun yang dilakukan oleh DP3AKB atau BKKBN pasti mereka mencatat.</p>	
4	<p>Kampung KB di Kaliwadas pelaksanaannya masih kurang partisipasi masyarakatnya, sudah kita lakukan pembinaan ketua pokjanya, namun belum bisa menyampaikan kepada masyarakat, kegiatannya pun</p>	

	belum banyak, tapi sudah ada BKB nya ada PAUD.	
5	Satu bulan dengan 2 bulan dengan 3 bulan itu harus berbeda capaiannya, harus lebih berkembang, kalau tidak berkembang, jalan ditempat artinya berarti Kampung KB tidak dibina oleh kita. MOP banyak di Kampung KB (data jumlah capaian yang ada di Kelurahan Lopang).	
8	Pelaksanaan program Kampung KB ini baik, ketua-ketua pokja mengikuti pembinaan-pembinaan dari dinas, dan posyandu berjalan terus, pelayanan KB juga ada.	
<b>Q</b>	<b>Apakah ada peningkatan keterlibatan keluarga dalam kelompok kegiatan di kampung KB?</b>	
1	<p>Dikita itu ada laporan f1 dala (pengendalian lapangan), di dalam laporan F1 dala itu, setiap bulan dilaporkan, berapa jumlah poktan yang ada di suatu wilayah, termasuk berapa jumlah anggota dari poktan tersebut disuatu wilayah dalam kurun waktu tertentu, dan ini sifatnya fluktuatif.</p> <p>Yang bertugas untuk mengupdate website Kampung KB itu adalah kader, PPKBD dan Sub PPKBD didampingi oleh PLKB atau PKB. PLKB dan PKB intinya sama, dia menjalankan fungsi 10 langkah PLKB, dimulai dari pendekatan kepada tokoh masyarakat sampai kepada proses pencatatan pelaporan dalam program KKBPK itu dilaksanakan, bedanya PKB adalah pejabat fungsional, kalau PLKB adalah pejabat fungsional umum atau struktural, pejabat fungsional, khusus penyuluh.</p> <p>Partisipasi diukur dari laporan kesertaan, jadi ada laporan di S1 dala itu berapa jumlah keluarga, berapa jumlah keluarga yang memiliki balita, dan berapa jumlah yang memiliki balita yang tergabung didalam kelompok BKB, jadi kita punya perbandingan, misal keluarganya 10 di Kampung KB itu, yang punya BKB 5 , yang punya balita 5 keluarga, yang dari 5 keluarga itu kita berupaya kelimanya bisa menjadi peserta BKB. Kalau itu dikatakan sukses 100%, tapi kalau misal hanya dari 5 itu cuma ada 1 keluarga atau 2 keluarga saja, berarti itu tidak sukses, itu berarti kesertaannya rendah. diukur kuantitatif di website Kampung KB itu 1 desa, kuantitatif, kalau kualitatif panjang, sejauh ini hanya terukur kuantitatif.</p>	
2	<p>Kalau partisipasi poktan dilihat dari kehadiran dalam pembinaan, sudah bagus. PLKB kecamatan yang bertugas meng update website kampung KB. Sementara di PLKB, nanti kedepannya inginnya kampung KB difasilitasi laptop agar bisa update langsung ke website tersebut. Tapi sekarang karena keterbatasan sarana dan prasarana, masih PLKB tersebut yang menginput.</p> <p>Hanya pengurus poktan yang diundang untuk pembinaan, lalu yang menyampaikan ke masyarakat kampung KB nya itu seharusnya pengurus poktan itu, jadi intinya kepanjangan tangan dari kita. Kita membina pengurus poktan itu, kita berharap dari apa yang telah kita sampaikan, mereka bisa menyampaikan lagi ke</p>	

	<p>masyarakat, tapi banyak yang tidak. Semoga saja mereka sudah melaksanakan tugasnya, tapi mungkin dari 5 orang yang diundang, ada 1 atau 2 orang yang menyampaikan, yang 3 nya belum. Kita sih berharapnya begitu.</p> <p>Pembinaan langsung ke masyarakat pernah, kita melalui majlis ta'lim, kita langsung berhubungan dengan ibu-ibu yang khusus di kampung KB. Kita juga telah melaksanakan KIE kepada perwakilan masyarakat. Khusus wilayah kampung KB, itu se Kota Serang di kampung KB. Kita undang, kita satukan, semua kampung KB disatukan se Kota Serang.</p>	
3	<p>Partisipasi, setiap ada pembinaan dari kita, 1 bulan sekali, karena yang kita hadirkan pengelola pokja, ya alhamdulillah. Kalau kita melakukan pembinaan itu bukan kepada masyarakat tapi kepada pokja pengelola, nanti pengelola yang melakukan pembinaan kepada masyarakat, jadi pokja-pokja dan poktan-poktan itu kepanjangan dari kita.</p>	
4	<p>Ada capaian pelayanan KB di Kampung KB. Selalu ada peningkatan KB, artinya kesertaan ber KB nya ada peningkatan karena target kita adalah harus ada perubahan sebelum ada Kampung KB dan setelah ada Kampung KB.</p>	
5	<p>Jadi ekonominya meningkat melalui keterampilan kesertaan berKB nya juga meningkat, karena awal ditunjuk menjadi Kampung KB itu masyarakat main set nya belum tau, bahkan sampai sekarang masih seperti itu, susah merubahnya masyarakat itu. Ya kesertaan berKB nya meningkat, ekonomi masyarakat meningkat, SDM nya meningkat itu melalui masing-masing pokja dan poktan, mungkin melalui UPPKS, kesejahteraannya masyarakatnya meningkat, ekonomi kegiatannya meningkat, keterampilannya itu bisa meningkat sehingga bisa produktif, dari pembinaan masyarakat SDM nya meningkat. Mulai dari pengetahuan pendidikan, pendidikan usia dini, narkoba dan lain-lain, SDM nya juga meningkat, lebih mengutamakan kepada pendidikan. Tidak sebodoh kaya orang kampung jadi merasa bahwa pendidikan itu penting. Terus kesertaan berKB nya juga meningkat yang tadinya dia tidak mau berKB, jadi berKB, semuanya meningkat untuk secara umum.</p>	
6	<p>Awal partisipasi poktan bagus. Jika ada kegiatan satu kelurahan terlibat, Kampung Kaliwadas namun pengurus dari kader kelurahan secara otomatis dari lingkungan masing-masing keterlibatan informasi dan ketika kegiatan turut serta se kelurahan. Kalau struktur sasarnya ada pasti meningkat, namun ini sudah di data duluan, sudah masuk akseptor, jadi kalau peningkatan sasarnya sudah tidak ada, kalau meningkat ya meningkat.</p>	
7	<p>Kelompok kegiatan BKL pengajian, BKR pengajian dan senam, BKB posyandu dan PAUD, PIK-R majlis ta'lim, dan UPPKS bikin olahan rumahan baso dan kerajinan. PAUD dibuat pas ada Kampung KB. Kelompok UPPKS di Kampung KB ada tapi 1 Kelurahan, karena</p>	

	<p>UPPKS itu satu Kelurahan 1 kelompok, dan terdapat 4 kelompok di Kecamatan Serang. Kondisi ekonomi masyarakat sedikit berubah. Karena kita Kampung KB yang dulunya awam sama KB, jadi sekarang sedikit memahami. Kalau ekonomi belum signifikan, masih berusaha karena sekarang sudah ada UPPKS, karena untuk meningkat secepatnya itu tidak mungkin.</p> <p>Di Kelurahan Lopang ada 1 kelompok UPPKS, UPPKS "TUNAS" dengan alamat di Lopang Cilik RT03 RW02. Tidak ada kelompok UPPKS khusus di kampung KB, tapi anggota UPPKS "TUNAS" ini ada beberapa yang dari kampung KB. Sedangkan di Kecamatan Serang ada 4 kelompok UPPKS, yaitu kelompok "Ratu" di Lontar Baru, kelompok "Yudistira" di Cimuncang, kelompok "Kreasi" di Unyur, dan "Tunas" di Lopang.</p> <p>Nanti ada kegiatan di Kampung KB yang anggarannya pembinaan dari Kampung KB, dan sekarang mau diadakan praktek untuk meningkatkan kesejahteraan di Kampung KB. Praktek itu, praktek yang supaya bisa menghasilkan entah itu dalam bentuk kerajinan atau makanan itu yang dikelola anggarannya dari kas Kampung KB. Misal kita mau membuat suatu produk ekonomi kerakyatan, misalkan 1 produk makanan, di dalam pembinaan itu mau diadakan praktek, nah disitu dilakukan praktek membuat, cara membuat makanan, supaya sehingga si makanan ini menjadi sebuah produk dan bisa dipasarkan dan dijual dan pendapatannya akan kembali ke Kampung KB. Jadi supaya ada kegiatan di Kampung KB itu yang menghasilkan, Sehingga ekonomi dan kesejahteraan di Kampung KB itu meningkat. Jadi yang pengangguran diajak, misalkan produk ini berkembang dan bisa dipasarkan, yang pengangguran ini bisa diajak, dilibatkan dalam membuat keterampilan atau makanan itu. Itu termasuk poktan UPPKS, UP2K bisa, PIK-R bisa, marketingnya dari UPPKS, semuanya tidak keluar, berkesinambungan.</p>	
8	<p>Sesuai rutinitas ada perkembangan, pembentukannya juga berjalan baik dari awal, misalnya yang BKB, BKB berjalan, anak-anaknya ada, itu juga masih keterbatasan tempat, sarananya belum memadai. Tapi kalau kelompok kegiatan yang lain masih cakupan ketua kelompoknya aja kalo ada penyuluhan dari DP3AKB.</p> <p>Satu bulan sekali pelayanan KB, kemarin satu bulan dua kali, ada peningkatan penggunaan KB dari masyarakat. Peningkatan keikutsertaan masyarakat juga ada, ada kegiatan pembinaan, masyarakat antusias. Ada 40-70 yang datang di masjid ta'lim waktu kemarin dari BKKBN pusat ada penyuluhan.</p> <p>Kegiatan rutin BKB PAUD, BKL pengajian, Remaja pengajian, UPPKS usaha kegiatan buat produksi, cuma itu mereka tidak berfikit untuk lebih, jadi hanya cukup seperti itu, Kelompok UPPKS ada 1. Ekonomi masyarakat disini rata-rata pedagang dan buruh kasar/buruh pabrik. Setelah ada UPPKS sebenarnya ada perubahan, tapi kegiatannya belum terpikir untuk lebih</p>	

	<p>kedepannya, hanya cukup untuk hari ini, tidak ada inisiatif untuk usahanya menjadi besar. Kondisi sosial remajanya ada majlis ta'lim.</p>	
9-1	<p>BKB kegiatan rutusnya waktu awal seminggu sekali, sekarang sudah seminggu 4 kali, senin sampai kamis, itu PAUD, kalau untuk penyuluhan sebulan sekali di posyandu, jadi setiap posyandu anaknya ditimbang, kalau posyandu untuk mengetahui berat badannya, kalau BKB, untuk tumbuh kembangnya, jadi kalau dari kartu KKA bisa dilihat perkembangannya. Paling banyak datang pernah 25 orang, waktu sukarela banyak yang datang awal-awal. Tapi disuruh bayar pada gaada, pada mundur gamau, karena orang sini susah inginnya bener-bener ga bayar.</p> <p>PAUD dibawah dinas pendidikan, BKB dibawah dinas DP3AKB, seharusnya menegaskan kepada ketua BKB karena dia menamakan BKB PAUD Kendedes. Padahal sudah dikasih tau kalau PAUD dan BKB berbeda. Membentuk PAUD mengambil kesempatan ada BKB, dan salah kita juga membentuk PAUD. PAUD nya masih mandiri, belum melibatkan dinas pendidikan, karena tidak ada SK nya, jadi berdiri sendiri mandiri, SK nya menggunakan SK BKB.</p> <p>PAUD dari jam 8-10, Gurunya ada 2, dan saya pembina, kalau salah satu guru tidak ada, saya yang mengganti. Tadinya hanya pakai kaos olahraga, sekarang ada batik, awalnya hanya kaos olahraga saja. PAUD yang ikut awalnya diprioritaskan hanya kaliwadas, tapi dari mana-mana banyak yang ingin ikut masuk, awalnya saya tolak, tapi kasian juga, lama kelamaan yaudah tahun 2018 menerima yang lain, karena orang-orang sini memang yang pada malas, jadi daripada disini pada engga, jadi saya menarik dari luar. Ada kelas A dan Kelas B, banyak yang berenti dan ada yang anaknya ingin masuk tapi ibunya tidak mau mengantar anaknya terus ada anaknya yang ga mau, pengen nya main aja, tapi ibunya tidak membimbing, sekarang kelas A sudah sedikit, ada yang keluar. Kegiatan di PAUD edukasi seperti TK ada calistung (baca, tulis, ngitung), PAUD ini sudah merambat ke TK, karena ibu-ibu ingin anaknya bisa baca supaya bisa langsung masuk SD. Jadwal nya pagi dibarengin, ada 2 kelas A dan B, dibagi 1 gurunya, yang lulusan kuliah kelas B pemantapan, yang lulusan SMA kelas A dasar-dasar.</p> <p>Di daerah kampung KB tidak ada PAUD dan TK, jadi PAUD ini jadi TK juga. Jadi daripada BKB ini tidak dimanfaatkan, jadi saya manfaatkan dengan membuat PAUD, pertamanya kumpulan anak-anak biasa. PAUD dibuat sejak adanya kampung KB, tidak bekerjasama dengan dinas pendidikan, masih mandiri, saya juga ingin, tapi harus punya yayasan, harus ada uang. Perubahan sebelum jadi kampung KB dan setelah jadi kampung KB, untuk pengetahuan ibu-ibunya ada peningkatan, dari mereka gatau tentang mengurus bayi yang benar, tapi tetap saja masih belum diterapkan, karena susah, tapi pelan-pelan, perubahan ada tapi tidak drastis.</p>	



9-2	<p>Kondisi sosial ada PIK-R di majelis, kegiatannya mengaji sehari-hari</p> <p>BKR, pengajian minggu sore dan malam Jum'at, dan minggu sore. Kadang disatuin pengajian bareng BKL. Jadi datanya nyampur, belum ada kegiatan khusus. Kadang kalau datang semua banyak. Kalau dari RT 01-05 minggu sore. Kalau dari sebrang, malam jumat sama jumat siang jam 2an. Ada juga dari RT kita Cuma 1-2 Orang Doang.</p> <p>PIK-R di majelis, Belum ada khusus BKB, BKL, BKR, jadi dicampur aja, belum ada, kita belum ada tempat. Mausih pengen, tempat mah diusahain bisa disini, tapi gaada waktu. Sebagian BKR kan remajanya ada yang gabisa baca, Sebelum jadi Kampung KB, pengetahuannya jadi lebih tambah luas, banyak yang ber KB. Keikutsertaan akseptor KB juga bertambah. Disini yang sepuh-sepuh yang muda-muda pada gatau/gamau, padahal hari minggu tidak kerja, ada pertemuan RT juga harus di panggil lagi. Gaada uang kas di BKR, Bikin sendiri ketua BKR seperti buku absen dan lain-lain pakai uang kantong sendiri (seharusnya ke Bu RW (Kata Bu Siti) itu buat bikin profil juga abis 20rb pakai uang sendiri) buat ada kegiatan dipanggil dari kecamatan. Kalau BKR punya buku baru buat, kalau BKL tidak buat.</p>	
9-3	<p>BKL di kita aja, soalnya Kampung KB itu dibagi jalan. Percobaannya didaerah sini, nanti kalau ada perkembangan jelas baru nyebrang. Tapi Pak RW pengennya kita 1 RW bareng-bareng, setiap kegiatan itu menyeluruh, jangan di 3 RT aja. Kalau ada penyuluhan sebrang ikut, jadi udah pada kesini, tapi ga seluruhnya, paling yang BKB yang balita ngambil dari sebrang. Kan ada 6 anggota tiap poktan, dari sebrang juga dilibatkan. Cuma untuk yang lansia itu kan kegiatannya kan di pengajian yang sering tiap minggu, jumat siang ada. Itu keseluruhan, kalo khusus belum ada, belum terbina gaada waktu, jadi langsung semua.</p> <p>150 lansia 1 RW, 90 di Ibu (di 3 RT), namun belum ada data pastinya. Kalau ada kegiatan, terutama kegiatan untuk PKK kecamatan. Mengisi pokja 4, jadi bagian dari semua untuk sementara ini kalau ada pelatihan apa-apa udah nabung. Kalo untuk masing-masing poktan belum ada, jadi digabungin, Paling senam, BKL dan BKR digabungin.</p>	
9-4	<p>Banyak yang ikut PIK-R, tapi tidak masuk anggota. Anggota hanya ada 40, ada beberapa anak belum dimasukkan. Karena laporannya ada di KO, jadi yang baru-baru belum masuk. Karena disini PIK-R itu ikut ke pondok, jadi anak-anak yang masuk ke pondok sekalian masuk ke dalam PIK-R, bukan pondok ikut PIK-R, tapi PIK-R ikut ke pondok. 40 orang laki-laki dan perempuan. Pondok (mengaji) laki-laki dan perempuan. Tapi yang nginep dipondok laki-laki semua.</p> <p>Kalau masyarakat awam tau Kampung KB itu KB saja. Kalau PIK-R kebanyakan masyarakat mengenal, belum tau apa itu PIK-R, masih langka didengar oleh telinga masyarakat di sini. Pelaksanaan program Kampung</p>	

	<p>KB bejalan normal, berjalan lancar, namun PIK-R kedengaranya masih awam, masih langka.</p> <p>Untuk perkembangan PIK-R alhamdulillah meningkat. Sebenarnya memang PIK-R itu belum ada sekretariatnya, Cuma disini ikut numpang di pondok/kobong. Sosialisasi ke masyarakat/remaja-remaja yang belum masuk PIK-R, termasuk kerja bakti, Pengajian rutin, karena adanya di kobong, jadi pengajian setiap waktu, magrib, subuh, sehabis isya. Pendidikan rata-rata remaja SMA, tapi kebanyakannya kerja dan dagang.</p>	
--	---	--

### C. Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai

Q	Apa tujuan dari program kampung KB?	Kesimpulan
1	<p>Tujuan kampung KB seperti yang ada di juknis kampung KB yang dikeluarkan oleh BKKBN yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program KKBPK dan juga pembangunan di sektor terkait untuk mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas, itu secara umum nya. Kalau secara khususnya salahsatunya untuk peningkatan jumlah peserta KB.</p>	<p>perubahan yang diinginkan para pihak pelaksana kampung KB tersebut belum terealisasi dengan baik. Adanya beberapa hambatan seperti pengurus kampung KB yang kurang mengetahui dan acara atau kegiatan yang dilaksanakan di kampung KB yang belum tepat sasaran, sehingga perubahan yang diharapkan pun terhambat.</p> <p>Dari adanya hambatan yang terjadi maka tujuan dari program kampung KB tersebut yang tertuang dalam buku petunjuk teknis kampung KB tidak tercapai sepenuhnya, peneliti menemukan selain kurangnya minat masyarakat juga belum adanya penerapan secara maksimal dari 8 fungsi keluarga.</p>
2	<p>Tujuan kampung KB sesuai dengan petunjuk teknis kampung KB dari BKKBN yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.</p>	
Q	Bagaimana penerapan 8 fungsi keluarga dalam kehidupan masyarakat di kampung KB?	
1	<p>Kelompok kerja (pokja) harus sesuai 8 fungsi keluarga, adanya ditingkat desa. Jadi yang namanya Kampung KB itu, bukan setingkat RW, tapi setingkat desa, namanya aja Kampung KB karena untuk mengidentikkan walaupun sebetulnya ketika berbicara cakupan kewilayahan RW adalah kampung, kampung adalah RW, tapi di dalam pedoman yang dikeluarkan oleh BKKBN bahwa Kampung KB itu sudah setingkat desa, jadi pokja ditingkat desa.</p> <p>Poktan. Sama saja seperti tadi saya bilang, bahwa Kampung KB itu pengurusnya adalah pokja Kampung KB, pokja Kampung KB itu punya seksi-seksi semisal tadi seksi ekonomi, itu poktan bisa masuk, poktan UPPKS, poktan itu kelompok kegiatan, nah di KS itu kan ada beberapa poktan, semisal tribina, BKB, BKR, BKL, UPPKS, dan PIK-Remaja. Nah nanti kespronya ada seksi kesehatan reproduksinya, bisa nanti PIK-R masuk disana kegiatannya, jadi setiap seksi itu punya program kegiatan yang mengarah sesuai dengan 8 fungsi keluarga, nanti di kespro itu juga bisa bidang kespro KB,</p>	

	seksi kespro dibidang KB masuk yang di sana kegiatannya. Sosialisasi tentang kespro, pelayanan KB dan lain-lain.	
2	Penerapan 8 fungsi keluarga, di kampung KB itu sebenarnya dari kita materinya diterapkan, yang mereka kuasai, penyuluhan tentang keluarga, yang kita sampaikan itu sudah penerapan 8 fungsi keluarga. Cuma dari merekanya seharusnya menyampaikan lagi ke masyarakat. Intinya yang sudah disampaikan mereka paham.	
3	Kelompok kerja, ada tingkat dari provinsi sampai kelurahan, tapi kalau di Kampung KB ada pokja Kampung KB, tapi tingkatannya kelurahan. Tingkat provinsi, kota, kecamatan, dan kelurahan, dan RW. Pokja itu harus sesuai dengan 8 fungsi keluarga, cuma pembinanya bukan dibawah kita, tapi PKK. Kalo pokja dibawah PKK, sesuai 8 fungsi keluarga.	
4	8 fungsi keluarga di Kampung KB, biasanya kalau kaya gitu kaya penyuluhan, penyuluhan agama, misal majlis ta'lim, ekonomi UPPKS atau pokja yang dibawah PKK, kalau UPPKS kan dibawah dinas KB, berarti mereka lewat UP2K (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga). Kalau ekonomi UP2K atau UPPKS, karena dibawah pokja lewat UP2K nya. Ada PKK, ada DP3AKB, kalau DP3AKB itu UPPKS, kalau PKK UP2K.	
5	Kalau pokja dibawah PKK, kalau dibawah kita itu poktan. Berarti pokja itu dibawah PKK pembinanya kelurahan. Kalau tingkat provinsi yang membinaanya PKK tingkat provinsi, kalau kecamatan pembinanya kota. Pokonya berjenjang. Beda rumah, kalo pokja di bawah PKK, kalau DP3AKB poktan. Sama semuanya kalo untuk penyuluhan atau pembinaan ke masyarakat, itu lewat 8 fungsi keluarga, baik dari pokja atau poktan semua sesuai 8 fungsi keluarga. Cuma pembinanya aja yang beda.	
6	Penerapan 8 fungsi keluarga di kampung KB ini terus diterapkan, kita ada kelompok kerja kan sesuai dengan 8 fungsi keluarga, jadi kalau ada acara kita usahakan kedelapan fungsi keluarga itu diterapkan disatu acara atau kegiatan itu.	
7	8 fungsi keluarga ya diterapkan dengan baik, kalo ada kegiatan kan kita pakai penerapan 8 fungsi kegiatan.	
8	Saya kurang tau kalau penerapan 8 fungsi keluarga, ya mungkin ada.	

#### D. Letak Pengambilan Keputusan

Q	Bagaimana dukungan dari lintas sektor terhadap program kampung KB?	Kesimpulan
1	Dari Kampung KB nya sendiri bisa langsung mengajukan ke dinas terkait atau ke swasta. Itu yang kita harapkan. Jadi bisa berbagai macam mekanisme, bisa	letak pengambilan keputusan pada pelaksanaan program kampung KB

	<p>melalui desa, bisa melalui pokja tingkat kabupaten kota, bisa juga langsung ke dinas. Bagaimana itu peran kabupaten/kota seni mengelola itu, bisa saja nanti ada yang namanya proses musyawarah perencanaan kegiatan di Kampung KB. Kita kan bisa, nanti mengumpulkan seluruh ketua-ketua pokja Kampung KB dengan membawa usulan kegiatan, nanti si dinas KB di kabupaten kota ini menyalurkan melalui pokja itu, kan di pokja tingkat kabupaten/kota itu terdiri dari banyak dinas, semisal, ternyata di Kampung KB ini banyak yang belum punya KTP, kartu keluarga dan akte lahir, disampaikanlah informasi itu ke disdukcapil, nanti disdukcapil akan menggarap. Itu namanya peran koordinasi. Bisa juga dari ketua pokja bikin proporsal dengan mencantumkan data bahwa ternyata di Kampung KB A banyak pengidap narkoba, misalkan banyak pengguna narkoba buatlah proposal penyuluhan ke BNN, ke kepolisian itu bisa. Intinya kan konsep Kampung KB itu adalah konsep pemberdayaan, bagaimana kita pemerintah menjadi fasilitator masyarakat yang ada di wilayah sekitar itu untuk mau dan mampu merubah kondisi kehidupannya, menjadi masyarakat yang sejahtera. Karena kalau pemerintah saja yang berjuang, itu tidak mungkin, makanya konsepnya itu adalah konsep pemberdayaan, peningkatan kemandirian masyarakat.</p>	<p>berada di tangan BKKBN dan DP3AKB. Hasil wawancara peneliti menemukan bahwa BKKBN dan DP3AKB tidak melibatkan dan tidak mendiskusikan program kegiatan yang akan dilaksanakan pada kampung KB di Kampung Kaliwadas dengan pengurus kampung KB atau pengurus poktan (kelompok kegiatan) di Kampung KB Kaliwadas pada saat sebelum kegiatan dibuat. BKKBN dan DP3AKB hanya melibatkan UPT Kecamatan Serang (Pos Penyuluhan KB), lalu oleh UPT Kecamatan Serang (Pos Penyuluhan KB) di koordinasikan dengan pengurus Kampung KB dan pengurus poktan (kelompok kegiatan) ketika kegiatan tersebut sudah ada dan dibuat. Pihak yang terlibat disini yaitu hanya ada di 3 pihak yaitu, BKKBN, DP3AKB dan Balai Penyuluhan KB (Pos Penyuluhan KB).</p>
2	<p>Lintas sektor itu seharusnya dengan berbagai dinas. Sebenarnya kita terus terang baru beberapa dinas saja yang kerjasama, dengan dinas kesehatan melalui pelayanan, kita sudah terbiasa dengan dinas lingkungan hidup beberapa kali kita ajak menjadi narasumber, sudah 4 kecamatan, disdukcapil juga sudah, dan dengan KUA juga pengadilan agama.. Lintas sektor yang mengurusnya DP3AKB. Sebenarnya kita mengirim surat ke dinas tersebut, kita minta untuk pembinaan, kita ajak bareng. Intinya berbagai dinas melakuka tupoksi nya masing-masing.</p> <p>Dari kampung KB nya bisa mengajukan lintas sektor, bisa mengajukan ke DP3AKB dulu. Kita sudah disepakati bahwa kampung KB itu harus beda dengan kampung KB yang lain, jangan cuma setelah pertemuan selesai pulang saja. Kita harus ada kemajuan, apa yang harus dimajukan, inovasi apa yang harus dilakukan. Kalau mereka punya inovasi sendiri, lakukan saja sendiri, tidak harus dari kita.</p>	
3	<p>Kita dari DP3AKB langsung ke kita, ke penyuluh KB dan langsung ke Kampung KB. Kita lebih kepada pokja poktan pembinaannya. Tapi karena Kampung KB itu kan sebenarnya harus digarap oleh semua dinas, lintas sektoral itu, leading sektoralnya itu. Lintas sektornya semua SKPD, semua dinas harus turun untuk membangun Kampung KB. Entah itu dari SDM, pembangunan, dan lain-lain dan kegiatan. Jadi pertanian harus ditanyakan kepada UPT pertanian yang ada di Kecamatan Serang ini, sudah berbuat apa untuk Kampung KB, pak lurah sudah berbuat apa untuk</p>	

	<p>Kampung KB.</p> <p>Silahkan kalau mau mendetail tidak perlu ke LH, tidak perlu ke Pak Lurah, wawancaranya dengan Pak RW, Pak RW tau siapa saja yang sudah berbuat di Kampung KB, apa saja kegiatan yang sudah dilakukan di Kampung KB. Selain oleh DP3AKB, kalau seputaran DP3AKB kita tau, karena memang melalui kita. Tapi kalau lintas sektoral, simplenya langsung Pak RW, nanti Pak RW akan menjawab siapa saja yang sudah berbuat di Kampung KB. Karena harus melalui beliau setiap yang mau turun ke Kampung KB. di luar kegiatan pembinaan pokja poktan kita. Nanti silahkan ditanyakan ke Pak RW, dari lintas sektor mana saja, SKPD mana saja yang sudah berbuat ke Kampung KB.</p>	
4	<p>Sudah ada kerjasama dengan lintas sektor. Itu sudah disosialisasikan. Itu sudah intruksi peraturan, bahkan Kampung KB ini kan sudah intruksi presiden nawacita nya, jadi otomatis itu sudah harus. Selain BKKBN, ada LH tempat sampah, pertanian tanaman, pendidikan, peternakan bantuan ikan tapi gamau terima masyarakatnya, karena warganya susah, gaada lahan disananya. Tanaman gaada lahan juga bingung nanemnya di sekitar situ aja.</p> <p>Intinya Kampung KB itu leading sektornya kita, lintas sektornya SKPD yang lain. Masing-masing dinas itu punya tugas masing-masing, dinas kesehatan meningkatkan derajat kesehatan di Kampung KB, dinas pendidikan meningkatkan SDM nya, pendidikannya. Lingkungan hidup meningkatkan lingkungannya, penataan lingkungan, kebersihannya. Dinas KB kesertaan ber KB dan banyak (karena kita lintas sektor), disduk dari segi administrasinya. Jadi bahasanya karena lintas sektoral, jadi dinas SKPD punya peran masing-masing, punya tugas masing-masing untuk meningkatkan Kampung KB. Jadi yang harus diperkuat lintas sektornya, koordinasi dengan lintas sektor.</p>	
5	<p>Kalau mau bekerja sama dengan lintas sektor, yang mengajukannya bisa dari bawah dari Kampung KB, misal kita ada data mikro Kampung KB, dari situ mereka seharusnya dari mereka yang merekap/mengumpulkan dari RW itu apa kekurangannya, jadi dari data mikro itu keliatan, dari warga kita banyak yang gaada KTP misalkan, sudah direkap dari 1 RW misal ada 100 KK, dari 100 KK ini berapa yang tidak ada KTP, berapa yang tidak ada KK, berapa yang tidak ada BPJS, dan berapa yang tidak ada buku nikah. Dari situ keliatan, bisa pengajuan kesini, ini ada data-datanya, dari kita di ajukan ke DP3AKB, nanti dinas DP3AKB mereka menghubungi dinas yang bersangkutan dengan kebutuhan-kebutuhan, misal kekurangan KTP atau KK mereka bisa ke disduk. Misal kekurangan warga yang buku nikahnya rusak atau dulu tidak punya, mereka menghubungkannya ke KUA, yang menghubungkan ke dinas masing-masing dari DP3AKB, kekurangan apa yang dibutuhkan dari Kampung KB. Kita sudah pernah</p>	

	ada pengajuan untuk kekurangan KK dengan KTP, tapi gimana DP3AKB, karena mereka dari dinas masih banyak kegiatan, jadi bagi-bagi. Untuk sementara di Kampung KB ini belum ada, kalau untuk yang masuk dari dinas, kekurangan disdukcapil belum ada, isbat nikah untuk kekurangan buku nikah ke KUA belum ada.	
6	Koordinasi dengan lintas sektor, ada dinas terkait di Kota Serang, provinsi juga ada, DP3AKB. Lintas sektor sosialisasi, pembinaan. Jika kegiatan itu ada, lintas sektorlah lurah menjadi narasumber daripada dinas terkait ketika ada kegiatan di kelurahan otomatis ikut.	
7	Lintas sektor perlu kesemua dinas seperti dinas kesehatan, dinas pendidikan. Karena di Kampung KB sarana dan prasarana belum memadai pendidikannya.	
8	Ada lintas sektor, dari kampung KB belum pernah mengajukan ke lintas sektor, cuma DP3AKB aja, karena wadahnya disitu, jadi kita kesitu sebagai yang menyambungkan. Dari lintas sektor belum ada selain DP3AKB dan BKKBN, dari instansi yang lain belum.	
Ø	<b>Bagaimana proses penyusunan rencana kegiatan di kampung KB di Kampung Kaliwadas?</b>	
3	Di Kampung KB seharusnya ada penyusunan rencana kegiatan, untuk sementara belum ada, dari semenjak dibentuk belum ada dari Kampung KB membuat rencana. Dan memang itu harusnya ada, tapi untuk sementara harusnya ada, paling nanti.	
4	Kita terbatas sama penyediaan sarana gedung, karena gaada rumah data juga, bukan gedung tapi tempat, minimal untuk penyimpanan administrasi. Kesekretariatan KKB/posko harusnya posko Kampung KB rumah data itu ada. Jadi begitu orang datang, data itu ada, cuma kita tidak ada, jadi untuk merencanakannya pun belum ada tempat.	
5	Kalau rencana kerja kita di pos penyuluhan KB sendiri ada, tapi untuk di kampung KB nya sendiri kita melihat belum ada gerakan untuk mereka menyusun kegiatan, karena mereka kegiatannya sejauh ini dari kita, jadi mereka belum ada inisiatif untuk membuat kegiatan, maka belum ada rencana kegiatan.	
6	Rencana kegiatan di kampung KB kami kurang tau, tapi saya taunya ada kegiatan di kampung KB, mereka pasti melakukan perencanaan terlebih dulu sebelum melakukan kegiatan.	
7	Rencana disana ada, suka kumpul buat ngobrol-ngobrol mau ngadain apa nanti kegiatannya, tapi hanya ngobrol-ngobrol aja.	
8	Rencana kegiatan, ada, kita pernah merencanakan ingin ada instansi terkait, turun untuk sosialisasi kependudukan, kesehatan, remaja, inginnya dinas terkait turun langsung.	
9-1	Merencanakan kegiatan kalau untuk BKB ada khusus untuk BKB saja. Untuk pelaksanaan PAUD	

9-2	Kalau rencana kegiatan sih kita suka ada ketemu sama pihak yang mau ngadain sosialisasi, pasti kita diskusiin, tapi untuk BKL ya saya aja yang jalanin, jani tidak usah pakai rencana.	
9-3	Rencana kegiatan lain selain pengajian belum ada.	
9-4	Rencana kegiatan, kita nanti menjelang ramadhan pengen mengadakan acara “menyambut ramadhan”, “pawai ta’aruf menyambut bulan suci ramadhan”, yang mengadakan PIK-R, remaja-remaja	
<b>Q</b>	<b>Bagaimana koordinasi yang dilakukan terhadap implementasi program kampung KB?</b>	
1	Kalau BKKBN kita berkoordinasi dengan DP3AKB dan pokja (kelompok kerja) kampung KB. Kalau untuk turun ke lapangan langsung kita menghubungi ke pokja kampung KB, tapi kalau untuk ke DP3AKB kita berkoordinasi dengan memfasilitasi ke DP3AKB, dan juga nanti DP3AKB yang membuat laporan ke kita tentang kampung KB termasuk pelayanan KB.	
2	koordinasi yang kita lakukan adalah dari DP3AKB ke UPT kecamatan (pos penyuluhan KB), lalu UPT itu langsung ke kampung KB. Dari DP3AKB berkoordinasi dengan BKKBN dengan melaporkan laporan data kepada BKKBN. Laporan dari kampung KB lalu ke UPT, nanti UPT merekap, lalu dikasi ke DPA3KB, dari DP3AKB ke BKKBN	
3	Kalau Kampung KB kan ada pokja BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R, itu tiap itu ada laporannya dari tiap koordinator. Pokja ini bikin laporan ke koordinator, dari koordinator ke kita dari kita ke dinas.	
4	Ketua pokja melaporkan perkembangan Kampung KB kepada ketua Kampung KB (Ketua RW) dari situ lapor ke balai penyuluh, dari balai penyuluh ke DP3KB (P3AKB/Balai penyuluh).	
5	Kalau kegiatan yang tiap bulan itu kebetulan yang membuat laporan dari DP3AKB, yang kegiatan Bu Imas jadi bukan kita. Jadi notulen, hasil notulen, hasil notulen, atau hasil laporan itu yang membuat dari DP3AKB, karena mereka yang punya anggaran dan punya kegiatan. Lebih kepada pembuatan laporan hasil monitoring dan evaluasi Kampung KB setiap bulan.	
8	kita melakukan laporin ke Kecamatan, dari kecamatan nanti ke DP3AKB. Laporan ke UPT Kecamatan ke DP3AKB ke BKKBN.	

### E. Pelaksana Program

<b>Q</b>	<b>Bagaimana kinerja dinas terkait dalam melakukan pengawasan kampung KB?</b>	<b>Kesimpulan</b>
	Kalau dikita itu rutin pertanggal 20 ada namanya	sebenarnya hanya

1	rapat pengendalian program, jadi dalam rapat pengendalian program itu adalah media evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan.	terdapat 2 pihak pelaksana program dalam pelaksanaan kampung KB ini yaitu BKKBN dan DP3AKB. BKKBN dan DP3AKB belum mengetahui secara jelas, pelaksanaan yang tidak optimal terdapat pada kampung KB Kaliwadas, seperti antara pengurus kampung KB dan pengurus poktan kepada masyarakat.
2	DP3AKB melakukan monitoring dan penggerakkan di kampung KB.	
3	Setiap DP3AKB melakukan pembinaan tiap bulan itu juga merangkap didalamnya evaluasi dan monitoring di pertemuan itu. Selain pembinaan juga dilakukan monev.	
4	Pernah ada BKKBN turun ke Kampung KB, dari bidang KB sosialisasi, dan penyuluhan KB, dan melihat pencapaian KB yang sudah ada di Kampung KB. Terakhir kali Desember.	
5	Di Kampung KB seharusnya ada monitoring dan evaluasi dari BKKBN sekalian monitoring biasanya, dari BKKBN pusat pun pernah ada, Cuma fokus ke rumah data.	
<b>Q</b>	<b>Bagaimana pelaksanaan pelayanan KB di kampung KB?</b>	
1	Seharusnya terdapat bidan desa di tiap desa, kalau misalnya disatu desa itu tidak ada puskesmas, kalau sekarang sudah ada yang namanya puskesmas pembantu (pustu) nah itu pasti ada, walaupun semisal di kecamatan Cuma ada 1. Tapi di desa itu pasti ada postu, pasti ada bidan desa. Gamungkin engga, karena bidan desa itu 1 bidan 1 kalau sekarang.	
2	Pelayanan KB kalau jadwal bidang KB kadang misal pelayanan KB warganya datang ditentukan ke puskesmas tertentu, ga sekali di mobil pelayanan datang ke kampung KB, ga khusus untuk kampung KB saja, untuk semua di puskesmas manapun yang disepakati.	
3	Disitu selain posyandu ada pemeriksaan umum juga biasa, bidan melakukan pelayanan KB suntik, pemeriksaan umum, biasanya bidan juga melakukan itu selain posyandu sebulan sekali, jadi bisa berobat masyarakat itu di bidan. Jadi tenaga medisnya lebih kepada di 5 meja posyandu.	
4	Tenaga medis Kampung KB tidak ada bidan desa, tapi di posyandunya ada, posyandu setiap bulan ada bidannya. Pelayanan KB sebulan sekali, Cuma kalau kita kan dimintanya sebulan sekali, tapi tergantung dari DP3AKB nya. Ada jadwalnya dari DP3AKB, kalau memang bulan maret ini belum turun jadwalnya, itu kemaren memang sebulan sekali, dari mulai taun kemaren.	
5	Puskesmas wilayah lopang paling dekat di unyur. Sementara wilayah lopang gabung dengan unyur, kalau wilayah lopang dianjurkan disitu. Petugas medis datang 1 bulan sekali waktu posyandu, dari puskesmas unyur bidannya. Jelas ada peningkatan pengguna KB. terutama MOP untuk pria jadi ada, lumayan kalau yang lain sih ada aja. Puskesmas keliling tidak pernah ada.	
6	Kampung KB ketersediaan medis dari puskesmas terdekat. Dari dinas kesehatan sudah melekat dari kegiatan Kampung KB sendiri dan BKKBN. Pelayanan KB dari	



	DP3AKB rutin, dari 2017 terpilih jadi Kampung KB, dasarnya karena banyaknya akseptor KB, rutin kalau kader dari peserta pelaksana Kampung KB itu sendiri mendapatkan akseptor KB baru bisa dilaksanakan. Akseptor KB meningkat.	
7	Pelaksanaan program kampung KB di Kampung Kaliwadas itu cukup baik, ada pelayanan dari DP3AKB melalui mobil pelayanan yang datang ke kampung KB, ada juga penyediaan pelayanan KB di puskesmas terdekat.	
8	Pelayanan KB, sesuai dari instruksi DP3AKB, misal bulan apa. Gatentu kapan pelayanan KB nya setaun sekali, atau setaun. Belum pernah mengajukan permintaan pelayanan KB warganya susah, kita mengajak KB masih pada menghindar saja.	
10-1	Ada penyuluhan KB dari kota, dari provinsi pernah juga. Tadinya banyaknya suntik. Seharusnya IUD dan Implan, sedangkan kadernya sendiri suntik, jadi sekarang dianjurkan, kadernya juga harus memilih diantara 1, IUD atau Implan. Warga banyak yang KB. Kalau sekarang ibunya sibuk, jadi kalau ada pelayanan atau kegiatan di kampung KB Ibu sudah beberapa kali ga hadir.	

## F. Sumber yang Digunakan

Q	Bagaimana sarana dan prasarana yang ada dalam menunjang program kampung KB?	Kesimpulan
1	<p>Fasilitas yang harus dimiliki di Kampung KB itu, kalau secara organisasi, kriteria keberhasilan Kampung KB itu bisa diukur, ada panduan monevnya. 1) Punya struktur organisasi (dipandu monev), 2) Punya badan desa yang bersertifikat CTU, 3) Punya rencana kerja. Hal-hal yang memang harus ada ketika kita mau mengukur keberhasilan Kampung KB, kalau belum ada syarat-syarat itu berarti belum dikatakan berhasil.</p> <p>Kalau fasilitas tiap poktan, di poktan juga punya pengurus, semisal BKB, punya ketua BKB nya siapa, sekretarisnya siapa, itu punya, ada, jadi, tapi bisa dikerjakan oleh orang yang sama, tapi dengan struktur yang berbeda, intinya harus punya struktur yang berbeda karena poktan itu adalah bagian dari pokja Kampung KB tadi.</p> <p>Rumah data dan kesekretariatan KKB, kesekretariatan KKB itu pokja, rumah data itu salah satu kegiatan yang ada di program KKBPK. Nah, di Kampung KB itu ada namanya rumah dataku, jadi rumah yang memang menjadi rujukan bagi setiap orang untuk mencari data tentang program atau tentang masyarakat yang ada di wilayah sekitar, disitu harusnya ada. Itu adanya di bidang pengendalian penduduk, bidang pengendalian penduduk selain rumah data ada pojok data, pojok kependudukan, ada juga sekolah kependudukan.</p>	<p>sumber daya yang digunakan oleh pihak kampung KB belum semuanya maksimal dikerahkan. Adapun terkait dengan sumber daya dari pihak Dinas juga belum memadai dan belum terjalin kerjasama dari sisi pelaksanaan, akan tetapi dari segi sumber daya finansial dalam program ini diperoleh dari pihak BKKBN dan DP3AKB selaku pelaksana program kampung KB yang diberikan DAK (dana alokasi khusus). Hal ini didukung dari pernyataan pengurus kampung KB yang menyebutkan bahwa sarana dan prasarana belum mencukupi atau sesuai. Selain itu sumber dan waktu pelaksanaan program ini juga menyita banyak waktu.</p>
2	Sarana dan prasarana yang menunjang kampung KB sementara ini kita terus terang dari APBD belum punya, paling kita melalui dari dana DAK fisik yang sudah	

	<p>kita lakukan. Ataupun ada dari penyisihan-penyisihan kegiatan-kegiatan kita, yang bisa disisihkan untuk beli misalkan buku administrasi, papan-papan data itu sebagian sudah ada yang inti-inti saja, kalau yang lain-lain belum.</p> <p>Kalau rumah data dan kesekretariatan KKB itu wacana kedepan di 2019 ini, kita punya PR harus mencanangkan rumah data, sebenarnya sudah kita sosialisasikan ke semua kampung KB, dan untuk sementara karena rumah data itu harus, dibulan maret 2019, kita baru mengajukan rumah data. Itu di pos KB yang ada di wilayah situ, kita pinjam sementara sebagai rumah data. Nanti disimpan data-data sementara di rumah yang mau disimpan data-data saja.</p>	
3	<p>Belum punya rumah data. Data ada, tapi tidak ada/ belum ada tempat. 1) Karena tidak ada anggaran untuk penyewaan rumah, 2) Rumah data itu sebenarnya harus dari masyarakat, swasembada masyarakat. Jadi dari pemerintah tidak ada anggaran untuk itu. Seharusnya kita memfasilitasi, entah itu dalam bentuk fisik dibangun atau disewakan. Karena keterbatasan APBD untuk di Kota Serang, keterbatasan anggaran dari APBD, sehingga dari DP3AKB tidak bisa memfasilitasi gedung/rumah. Jadi untuk sementara rumah data itu dikembalikan kepada masyarakat. Tinggal masyarakat mau dimana.</p>	
4	<p>Sebetulnya diharuskan, tapi belum dibikin. Belum ada rumah yang <i>perfect</i> yang mau dibikin rumah data, tapi datanya ada. Semua fasilitas dari DP3AKB, bidan-bidannya dari terdekat aja, dari unyur, karena kampung KB masuk puskesmas unyur. Jadi ngambil bidannya dari puskesmas unyur.</p>	
5	<p>Dari DP3AKB ada/memfasilitasi rumah atau ada anggaran untuk rumah atau apa, itu tidak ada. Jadi untuk sementara, memang harusnya difasilitasi oleh pemerintah, tapi karena belum ada, kita kembalikan ke masyarakat, mudah-mudahan masyarakat ada yang bisa memberikan swadaya untuk rumah data sehingga semuanya tersaji data di tempat itu.</p> <p>Terus dengan adanya rumah data kan di Kampung KB itu kan rumah data keinginannya sih, dengan adanya rumah data itu kita ingin data-data, data apapun yang diinginkan oleh masyarakat, dan bukan hanya di lingkungan tersebut, tetapi dari segi kelurahan data itu tersedia di Kampung KB dengan adanya rumah data.</p>	
6	<p>Fasilitas yang diperlukan belum memenuhi, belum ada rumah data dan sekretariat KKB, jadi sifatnya data itu masih di rumah yang belum dikhususkan, datanya ada tapi belum dianggap rumah data. Sarana dan prasarana seharusnya ditunjang dari SKPD terkait.</p>	
7	<p>Sarana dan prasarana tempat belum ada, jadinya belum maksimal, seharusnya rumah data sudah ada, tapi karena lahannya belum ada jadi belum bisa buat rumah data. Jadi kendala karena kadang kita mau menjalankan kegiatan itu dengan tempat, tapi rumah data saja belum ada lahan. Masih banyak sih kita yang harus dibenahi di Kampung KB itu. Harapannya perlu di tingkatkan lagi</p>	

	kegiatan ini, pengennya ada tempat-tempat yang layak buat kegiatan Kampung KB. karena selaman ini belum ada tempat-tempat yang sekiranya nyaman. Karena selama ini kita tempat masih di rumah kader, itu pun tempatnya kurang enak kalau buat kegiatan.	
8	Sarana dan prasarana kampung KB ada bantuan laptop dan infokus dari DP3AKB.	
9-1	<p>Sarana dan prasarana di BKB kurang, untuk penyuluhan dari kartu KKA, kalau untuk penyuluhan di posyandu dari KKA, dari lahir sampai perkembangan perbulan. Dulu dikasih ke ibu-ibu, setiap dateng harus dibawa, terus banyak yang hilang, jadi disimpan di saya. Bangunan PAUD sekarang pakai rumah kontrakan orang tua, rumah kosong, daripada tidak dipakai, sebenarnya kalau ada yang mau memberikn dana untuk membangun, saya punya tanah kosong, tapi karena tidak ada dana jadi saya mundur, jadi berdiri sendiri saja. Sarana dan prasarana sampai saat ini hanya BKB KIT.</p> <p>Anak-anak dan ibu-ibu nya ingin ada bangku dan meja untuk menulis dan sarana permainan, mengeluh ingin ada itu. Mainan juga dibutuhkan, karena saya hanya diberi untuk mainan itu sekali saja, dikasih dari BKKBN yaitu BKB KIT, waktu awal mendirikan PAUD. Pernah ada dari DP3AKB Ibu Yani memberikan papan tulis, spidol, buku 1 pak, penggaris 1, pulpen 1, dan tip-x 1 untuk PAUD secara sukarela pakai uang pribadi karena kasihan. Murid bawa meja sendiri-sendiri, yang tidak punya tidak pakai meja.</p>	
9-2	BKR banyak sarana dan prasarana yang diperlukan, berharap tempat dan alat bantu yang lain misal buku pintarnya, kan belum ada. Kita belum ada sumber materinya kan dari mana.	
9-3	BKL belum ada buku panduan itu untuk sumbernya, misalnya buat narasumber dari kita kan, kalau narasumbernya dari sana takut gabisa, jadi kita bisa sendiri.	
9-4	Sarana dan prasarana, laptop dan infokus untuk PIK-R, untuk kegiatan majlis. Ada sarana dan prasarana laptop, tapi laptopnya gaada, gaada di kita, saya tidak tau dipegang sama kelurahan, katanya kalau dipake disini takut rusak, tapi kalau mau dipake ambil aja. Tapi infokus ada disini/kobong. Biasanya infokus digunakan untuk penyuluhan. Biasanya tempatnya dimasjid, sekarang karena masjidnya dibongkar jadi dikobong di atas. Laptop dan infokus dikasih dari DP3AKB.	
10-1	Kalau saya lihatnya sih kalo tempat buat posyandu itu kurang layak, iturumah warga, rumahnya Ibu Siti tapi dipake penimbangan balita, ibu hamil yang dateng. Kalo KB sih saya ikut yg kemarin ada mobil pelayanan KB dateng, baru pertama kali ada, jadi kita gausah jauh-jauh mau pasang implan atau IUD, gratis juga.	
10-2	Saya punya remaja, tapi saya gatau ada BKR dan PIK-R, saya taunya ada pelayanan KB buat ibu-ibu, pernah waktu itu ada kumpul di masjid buat sosialisasi KB, kalau untuk remaja anak saya juga ga ikut apa-apa. Tau saya ada kobong di RT sebrang, tapi itu buat cowo aja, terus ngaji	

	<p>aja kegiatannya, ga pernah ada kegiatan buat remaja-remaja gitu.</p>	
10-3	<p>Saya gatau, kalau untuk saya lansia pernah senam di rumah Bu Siti, itu katanya BKL, tapi pernah sekali aja gitu gaada lagi.</p>	
10-4	<p>Kalau sarana dan prasarana belum siap semua, belum ada rumah data, kalo ada kegiatan apapun masih di rumah Ibu Siti. Kalau ada kumpul sosialisasi kan harus punya tiker dan lain-lain, ini kadang tidak ada tiker masih kurang kalau kata saya, ga keliatan kampung KB itu apa, cuma ada tulisan aja di depan gang, saya ikutan UPPKS, tapi UPPKS itu di Ibu Raminah, bukan di kampung KB sini.</p>	
<b>Q</b>	<p align="center"><b>Bagaimana dana dan anggaran dalam menunjang program kampung KB?</b></p>	
1	<p>Dana khusus untuk Kampung KB, jadi BKKBN itu menyalurkan anggaran melalui DAK BOKB di kabupaten/kota (dana alokasi khusus), itu kurang lebih untuk daerah DTPK itu 105 juta pertahun, non DTPK itu 100 juta pertahun (daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan terluar).</p>	
2	<p>Kalau dana kita adanya dari DAK, sebenarnya kalau khusus untuk uang kas kampung KB itu tidak ada, cuma intinya inisiatif ibu sendiri dengan kesepakatan ketua kampung KB. Kan peserta yang hadir di acara yang kita laksanakan itu ada yang transport Rp50.000, itu kita sepakati agar kampung KB punya uang kas, Rp50.000 itu disisihkan setengah. Jadi Rp30.000 untuk yang hadir, Rp20.000 disimpan, jadi kalau dari kita, dari RP20.000 dikali yang hadi ada beberapa orang per pertemuan, itu disimpan ke bendahara. April kita belum ada dana lagi, jadi kita belum kegiatan ke kampung KB, dana hanya dari DAK (dana alokasi khusus), kalau APBD belum ada. Dana alokasi khusus dari pusat, dari BKKBN pusat.</p>	
3	<p>Untuk kegiatan dan pembinaan ada dari DP3AKB dan dari kas pengelola di Kampung KB. Jadi setiap DP3AKB melakukan pembinaan, itu ada uang transport untuk pengelola, itu disisihkan, tidak semua diterima oleh peserta pembinaan, jadi disisihkan sebagian untuk kas. Kas itu digunakan untuk kegiatan Kampung KB.</p> <p>Dana membuat PAUD, pihak Balai Penyuluhan KB Kecamatan Serang tidak tahu menau. Dinas kami membantu dari BKB nya saja, jadi mereka hanya menamakan saja PAUD Kendedes, jadi diabaikan saja PAUD nya, kita tidak berkesinambungan dengan PAUD itu, karena tidak ada SK nya. Seharusnya SK nya terpisah, ini SK nya Cuma 1 yaitu SK BKB.</p>	
4	<p>Anggaran untuk kegiatan KB ada dari DP3AKB, kalau untuk kampung KB itu tidak ada dana untuk sarana dan prasarana, adanya dana untuk pembinaan pokja, uang transport yang nanti setengah-setengah uang nya di sisihkan kepada bendahara kampung KB untuk disimpan untuk keperluan kampung KB.</p>	

5	Sebenarnya untuk dana bisa mendapat bantuannya dari mana saja, sebenarnya sih memang jujur lurah-lurah tuh kurang mendukung, jadi melihat ada kegiatan, ada program, saya yang repot. Padahal kalau bisa melihat, dengan adanya Kampung KB kan dia bisa butuh apa di Kampung situ, kalau butuh sesuatu bisa ke dinas, linsek semuanya masuk.
6	Itu memang kita terkendala dana. Dari APBDes tidak ada, kalau lingkungan kelurahan mungkin menjadi pelaksana dari kegiatan saja, kalau yang punya program dari SKPD terkait, anggarannya dari dinas terkait itu.
7	itu kita memang terkendala di dana, tidak ada dana khusus untuk kampung KB.
8	Ada bantuan dari DP3AKB perbulan RP100.000 kalau sudah melaporkan laporan bulanan, dari DP3AKB saja, belum ada yang lainnya. Kalau dari kelurahan mensupport saja, mendukung saja.
9-1	Saya kasihan kepada yang mengajar, jadi pertama-tama PAUD itu ada sumbangan seikhlasnya, paling dapat Rp11.000 dibagi untuk 2 orang, jadi saya inisiatif bikin kartu bayar minimal Rp2000 setiap pertemuan, jadi kalau ga ke sekolah ga bayar, kalau masuk sekolah saja bayarnya. Guru orang sini, dia sukarela, yang 1 sarjana guru TK, yang satu lulusan SMA, dua-duanya mengajar di TK lain juga. Belum lama ini bayarannya dinaikin jadi Rp3000 perpertemuan, makin berkurang yang datang.
9-2	Dapet reward 6 bulan sekali, sebulan 100.000 dana kampung KB 100.000. Pada kenyataannya, kalau kita mau ambil reward harus punya akseptor, kalo gabawa akseptor paling dipanding sisanya, nanti keluar lagi kalo kita bawa akseptor lagi. Tetep kita harus punya akseptor dulu, kalo gaada, bisa-bisa di panding.
9-3	Setiap ada pembinaan, kan ada uang transport 50rb. 30.000 buat kita yang dateng. Yang 20rb dikasih ke bendahara. Jadi kalo ada kegiatan apapun, seperti fotocopy ke Bu RW. Waktu itu ada anggota 20 yang ikut, ada 2x jadi jadi udah 800.000 ke Bu RW. Nanti untuk kegiatan disini.
9-4	Dari kelurahan, dari Pak Lurah nya sendiri sering ngasi ke saya kalau ketemu, dari rumahnya langsung pribadi. Ada uang kas dari anak-anak setiap malam rabu nabung, Rp3000 masing-masing/per orang, uangnya ada di bendahara. Belum ada dari DP3AKB secara uang untuk PIK-R. Kecuali kalau kita ikut penyuluhan undangan dari sana paling dikasih transport. Yang ikut penyuluhan kadang saya, kadang 2 orang, kadang 5 orang dari anak-anak PIK-R.

## 2. Konteks Kebijakan

### A. Kekuasaan, Kepentingan-Kepentingan & Strategi Aktor yang Terlibat

Q	Apakah ada pembinaan bagi pengurus kampung KB guna meningkatkan kualitas sumberdaya manusia?	Kesimpulan
1	<p>Untuk poktan ada pembinaan, karena Kampung KB itu adalah lokasi penggarapan bersama program pemerintah, jadi siapapun boleh menggarap, boleh, semisal perkim, dia berhubungan dengan sarana dan prasarana, berarti dia melakukan pembinaan atau penggarapan Kampung KB itu dari sisi sarana parasarana lingkungannya gitu, jalan, sanitasi, SAB (Sarana Air Bersih) dan yang lain-lain, BKKBN iya, DP3AKB iya, BKKBN pembinaa keorganisasiannya atau kelembagaannya saya, kemudian pembinaan program KKBPK nya oleh BKKBN, DP3AKB bisa dalam program KB nya, bisa PP nya, DP3A, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dia bisa nanti penggarapannya adalah pembinaan tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan lain-lain. Jadi cakupannya luas. Jadi siapapun pihak manapun bisa ikut serta dalam hal pembinaan dan penggarapan Kampung KB. Dan itu memang yang diharapkan, karena salah satu kunci keberhasilan Kampung KB itu adalah ada penggarapan secara lintas sektor, baik pemerintahan maupun swasta, nanti tanggal 24 salah satunya kami akan mengundang sektor swasta dan BUMN, jadi nanti sektor swasta, BUMN, dan pemerintah akan kita kumpulkan, kita akan gali potensi-potensi kemitraan itu.</p> <p>Pembinaan itu bisa langsung ke masyarakat, seharusnya pengurusnya menyampaikan lagi ke masyarakat, seharusnya membuat rencana kegiatan khusus di daerah Kampung KB nya.</p> <p>Mekanisme pembinaan itu dilakukan dari beberapa pola, jenis pola pembinaan, pola pertama bisa langsung dari lembaga pembina kepada pengurus maupun kepada masyarakat, itu bisa pola pertama, pola kedua bisa dilakukan berjenjang dari lembaga pembina kepada pokja, lalu pokja kemudian membuat rencana untuk menindaklanjuti hasil pembinaan tersebut, tapi ada hal-hal semisal yang tidak bisa diteruskan kepada masyarakat, yang sifatnya hanya berenti di pokja, contoh pembinaan pokja sendiri, kalau pembinaan pokja itu kan bagaimana pokja itu dia bisa menjalankan roda organisasi sesuai dengan tata aturan sebuah organisasi, semisal administrasi cara penyusunan rencana kerja, cara penyusunan laporan hasil pekerjaan, cara menginput laporan website Kampung KB nya. Tapi untuk pembinaan yang sifatnya program, itu jelas harus diteruskan kepada masyarakat, contoh pembinaan tentang kesehatan reproduksi, contoh pembinaan tentang bagaimana cara mendidik anak-anak, menjadi orang tua hebat, itu kan si pokja ini dibekali sebuah wawasan, yang pada akhirnya wawasan itu akan digunakan atau disampaikan kembali kepada masyarakat, tapi oleh pokja, berjenjang, 2 pola itu yang biasanya dipakai.</p>	<p>BKKBN dan DP3AKB merupakan yang memiliki kekuasaan, UPT Kecamatan/Pos Penyuluhan KB hanya menjalankan intruksi dari DP3AKB. Untuk pengurus kampung KB, belum menhalankan tugasnya untuk menyalurkan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat. Setiap aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program KB ini menjalankan tugasnya sesuai dengan kewenangan dan kepentingan yang dibuat dan menggunakan strategi yang ada terkecuali pengurus kampung KB dan pengurus poktan kampung KB.</p> <p>Selain itu, strategi yang digunakan dan dilaksanakan sudah tertata secara rapi tetapi sosialisasi yang dilakukan pihak pemerintah yaitu BKKBN dan DP3AKB seharusnya tidak cukup sampai disitu saja. Sosialisasi program kampung KB hanya dilakukan pada saat awal pembentukan/pencanangan kampung KB. Ditemukan juga hambatan-hambatan yang menjadi kelemahan dari program kampung KB seperti masyarakat juga sarana dan prasarana yang tidak mendukung.</p>

2	<p>Tiap bulan dari DAK (Dana Alokasi Khusus) ada pertemuan pokja kampung KB. Pertemuan lokmin kampung KB, forum musyawarah, dan poktan. Jadi 1 bulan kita ada pertemuan khusus juga untuk kampung KB. Lokmin (loka karya mini) untuk mencapai kesepakatan antara pihak DP3AKB dengan pihak kampung KB, UPT dan pihak medis bidang terkait. Untuk membicarakan dan merembukkan pelayanan, hasil rembukan dari kita, kita bekerjasama dengan bidang KB untuk pelayanannya hari apa disepakati disitu.</p>
3	<p>Pembinaan pokja-pokja kalau dari DP3AKB, jadi pokja dikumpulkan, kita kasih pembinaan, sekarang baru tahun berjalan awal, mau ada kegiatan penyuluhan KB di majlis ta'lim, yang kedua kita mau ngadain keterampilan untuk PIK-R dan UPPKS, nanti mengolah seperti apa untuk penambahan incame di keluarga itu. Pengolahan makanan dan lain-lain. Bisa dalam bentuk kerajinan, makanan, jadi supaya dia jadi prodak untuk meningkatkan kesejahteraan Kampung KB itu.</p>
4	<p>Pembinaan BKL itu penyuluhan di majlis ta'lim dan senam lansia, pengajian, BKR dan PIK-R penyuluhan narkoba. Posyandu dan BKB itu beda tapi terintegrasi, jadi ada BKB dan posyandu, sasarannya beda. Sasarannya beda, seperti BKB dengan PAUD, kalau posyandu itu sasarannya bayi dan balita, kalau BKB orang tuanya, bina keluarga balita, keluarga yang mempunyai balita, jadi kita melakukan penyuluhan ke ibunya, pembinaan buat orangtuanya. Keluarganya yang mempunyai balita.</p>
5	<p>Pembinaan poktan dan DP3AKB yang setiap bulan. Kita tiap bulan ada kegiatan pertemuan pokja, lokmin dan forum musyawarah setiap bulan (loka karya mini)/rapat kecil-kecilan setiap bulan. Disitu bisa apa aja, kebetulan nanti bulan ini, kita mau diadakan praktek pengolahan makanan dll, khusus untuk peningkatan kesejahteraan keluarga dari DP3AKB. Biasanya selama ini kita kalau kegiatan hanya penyuluhan, sosialisasi, tapi tidak ada dampak, jadi kali ini judulnya sama, tapi praktek.</p>
6	<p>Ada pembinaan untuk ketua kelompok kegiatan. Pembinaan SKPD, program kegiatan di SKPD terkait menyangkut Kampung KB.</p>
7	<p>Pembinaan kita ada, jadi kalau dari DP3AKB nya akan melakukan kegiatan nanti disampaikan ke UPT kecamatan, nanti saya yang menyampaikan ke kampung KB nya, nanti saya bilang berapa orang yang ikut pembinaannya dari kampung KB Kaliwadas itu.</p>
8	<p>Ada pembinaan untuk ketua kelompok kegiatan oleh DP3AKB. Karena kegiatan biasanya langsung ke pokja/poktan.</p>
9-1	<p>Pembinaan ada dari DP3AKB, DP3AKB kesini sosialisasi langsung juga pernah, tapi bukan soal BKB, jadi keseluruhan untuk poktan, kalau khusus untuk ke PAUD belum pernah.</p>
9-2	<p>Pembinaan atau pelatihan kesana tidak rutin (kadang-kadang). Biasanya pelatihan di KPRI, kadang</p>

	terakhir di gedung margawiwitan. Tentang Kampung KB, Dapat uang transport, ada snack dari DP3AKB dan BKKBN biasanya.	
9-3	Ada pembinaan, itu pelatihan itu ada materi-materinya, yang diundang kesana pengurus poktan saja, yang bisa dateng kesana, jumlahnya ditentukan dari sana, lewat Ibu Raminah kita dikasih tau.	
9-4	Kadang di Rau di Anyer ada penyuluhan dari DP3AKB.	
Q	<b>Bagaimana sosialisasi yang dilakukan dalam memberikan pemahaman tentang program kampung KB?</b>	
1	Sosialisasi untuk awal terbentuknya kampung KB kita datang ke tempat yang akan dijadikan kampung KB, kita mensosialisasikan bahwa di kampung tersebut dijadikan kampung KB, bertahap kita jelaskan bahwa di kampung KB itu bukan KB saja, lalu selanjutnya diberi pemahaman lewat pembinaan-pembinaan yang kita lakukan.	
2	Sosialisasi waktu awal dibentuknya kampung KB di tahun 2017 baru 1 kampung KB di kabupaten/kota. Di 2018 semua kecamatan harus punya kampung KB. Jadi kita ada pencaangan kampung KB se Kota Serang, lalu setelah itu kita turun ke lapangan melalui UPT, kita sosialisasi bahwa kampung ini sudah dicanangkan sebagai kampung KB.	
3	Pertama dibentuk ada sosialisasi di Kampung KB. sosialisasi oleh BKKBN langsung. Selanjutnya dilakukan pelatihan untuk pengurus Kampung KB, ada seperti UPPKS khusus kampung KB. Pokonya sekarang ini program utama pemerintah itu lokusnya Kampung KB, jadi poktan pokja yang ada disitu kalau memang ada kegiatan, misalkan BKL khusus Kampung KB, kita hanya bisa mengkoordinasikan dan menghadirkan orang-orang yang memang ada di kegiatan tersebut.	
4	Dari BKKBN pernah lebih kepada pembinaan, tapi disesuaikan, biasanya DP3AKB dan BKKBN Provinsi Banten.	
5	Sosialisasi dan pembinaan itu dari DP3AKB.	
8	Masalah sosialisasi, sebagian masyarakat belum memahami kampung KB, taunya KB aja, sebenarnya kegiatannya tidak hanya KB saja, programnya dikependudukan, jadi masyarakatnya masih kurang partisipasinya. Sosialisasi kampung KB pernah di masjid. Sejauh ini DP3AKB kesini mendampingi, kalau ada kegiatan atau sosialisasi dan kalau ada pelayanan KB. Pemahaman masyarakat masih kurang, jadi hanya KB nya saja, sebenarnya tidak hanya KB saja, tapi karena saya pengurus jadi tahu, karena kampung KB kan hanya wadah. Harapannya sinerginya ditingkatkan, sosialisasi ke atas sudah sampai, tapi kebawahnya, instansi itu ga sampai, jadi kadang-kadang gatau apapun, seharusnya dari atas tau dan kebawahnya juga, karena kampung KB kan	



	<p>harusnya jadi prioritas untuk menuntaskan segala sesuatunya, kependudukannya, kesehatannya, lintas sektor juga belum, mereka punya program seharusnya mereka melihat bahwa ada kampung KB, jangan sampai kita yang mengusulkan, harusnya mereka juga aktif turun ke kampung KB, seharusnya terbuka, ada anggaran juga kan di instansi masing-masing, ini kampung KB apa saja yang belum ada dilengkapi, kalau kita mengusulkan juga belum tentu, karena mereka kan sudah punya kegiatan sendiri.</p>	
9-1	<p>Sosialisasi, jadi yang dikasih pembinaan adalah kader-kader, untuk ke ibu-ibunya anggota BKBnya belum pernah, hanya kader-kader nya dikasih pembinaan, cuma kader ada yang aktif ada yang engga, yang aktif hanya saya saja. Sosialisasi saya kepada ibu-ibu waktu pelaksanaan posyandu, di PAUD juga pernah, cuma sepintas saja. Pemahaman masyarakat seperti cara menyusui yang benar, pernah ada disosialisasikan kepada kader, motorik kasar dan halus orang tua harus tau, tapi belum ada sosialisasi lagi.</p>	
9-2	<p>Sosialisasi untuk BKR secara langsung sih saat ini kita belum ada, karena keterbatasan tempat dan biaya juga.</p>	
9-3	<p>Sosialisasi untuk BKL dari saya pernah sih bilang BKL itu apa dan bagaimana kepada masyarakat, tapi hanya dalam kegiatan posyandu kalau ada yang datang lansia nya buat nimbang, kalau diluar itu ya paling kita ngobrol-ngobrol aja, karna saya juga sudah termasuk lansia.</p>	
9-4	<p>Untuk PIK-R belum ada sosialisasi seperti untuk remaja, pernah sih dari anak-anak kuliah yang datang kesini kasih sosialisasi tentang kenakalan remaja, tapi kalo kita ya Cuma ngaji karna kita kegiatannya ada di Kobong ini.</p>	

## B. Karakteristik Lembaga & Rezim yang Berkuasa

Q	Apasaja peran dari <i>stakeholder</i> dan kesiapan <i>stakeholder</i> dalam program kampung KB?	Kesimpulan
1	<p>DP3AKB dengan BKKBN itu lembaga yang mengelola program KB yang satu level, sama-sama eselon II, bedanya kalau DP3AKB adalah organ daerah, yang sudah dibawah gubernur, kalau BKKBN adalah instansi vertikal, lembaga vertikal yang langsung dibawah BKKBN pusat. Karena ini amanat undang-undang nomor 23 tahun 2014, ada pembagian kewenangan pelaksanaan program KKBPK antara pusat dan daerah. Nah BKKBN di provinsi itu sebetulnya tidak melaksanakan fungsi provinsi, tapi melaksanakan fungsi kewenangan BKKBN pusat yang ada didaerah BKKBN dan DP3AKB 1 level. Program KB inisiasinya ada di BKKBN.</p>	<p>dari lingkungan kebijakan, BKKBN tetap berada dalam posisi teratas membawahi pihak pelaksana kampung KB seperti DP3AKB, UPT Kecamatan Serang dan pokja kampung KB. Pihak pelaksana melaksanakan tugasnya sesuai dengan wewenangnya masing-masing.</p>
2	<p>DP3AKB berperan berdasarkan pasal 2 peraturan walikota nomor 14 tahun 2017, tugas pokok melaksanakan urusan wajib non pelayanan dasar di bidang pemberdayaan</p>	

	perempuan, perlindungan anak dan pelayanan program keluarga berencana. Dan fungsinya untuk perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan administrasi urusan dibidang pemberdayaan perempuan dan masyarakat, perlindungan perempuan dan anak, pengendalian penduduk, advokasi penggerakan dan informasi serta keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.	
--	--	--

### C. Tingkat Kepatuhan & Adanya Respon dari Pelaksana

Q	Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap kampung KB di Kampung Kaliwadas?	Kesimpulan
8	Pemahaman masyarakat di Kampung Kaliwadas ini tentang kampung KB belum tau banyak, mereka banyaknya taunya ya kampung KB itu hanya KB, mungkin yang tau kader-kader yang memang mengurus kampung KB, kalau ada kegiatan sosialisasi seperti dari DP3AKB itu masyarakat disini itu ya ikut aja, tapi gatau itu masuk ke acara kampung KB, mungkin ada yang tau yang sering ikut kegiatannya aja.	<p>pengurus kampung KB hanya sebatas melakukan apa yang di berikan kegiatan oleh DP3AKB saja tidak menyalurkan dan berinisiatif memberikan kepada masyarakat, dan mereka belum tanggap dalam hal permasalahan yang terjadi. Masyarakat pun belum banyak yang mengetahui program kampung KB secara keseluruhan.</p>
9-1	Masyarakat itu kalau BKB taunya ya PAUD aja, gatau kalau PAUD itu BKB, kita ingin ibu-ibu mengetahui cara mendidik anak yang baik, tapi susah, tidak segampang yang dibayangkan, karena ibu-ibu sudah susah, tau BKB aja engga, jadi pemahamannya kurang.	
9-2	Kalau kaya kampung-kampung KB yang lain kan sekarang udah maju, warganya bagus lumayan, kita inginnya semua warga bersatu kerja sama dengan tulus ikhlas bareng-bareng, karena kalau ga didukung dengan warga bergerak kan kita gabakal maju, kita bilang harus ini itu, kalau warga tidak menyadari, tidak mau ikut serta kan ga jalan. Karena sekarang masih susah untuk yang seperti itu. Kadang itu-itu aja yang ada, kalau ada kegiatan juga. Walaupun kita sudah berusaha ngajak, ya kalau mereka gamau susah. Harapannya kita kumpul bersama, gotong royong, menyadari rutin, tapi kenyataannya yang ikut itu-itu aja orangnya, itu berarti pemahaman masyarakatnya masih kurang tentang kampung KB.	
9-3	Mulai kita merasakan ada Kampung KB itu ada pertemuan-pertemuan 2017, Jadi sedikit mengetahui seperti apa Kampung KB, tapi baru pengurus-pengurus kampung KB nya saja, mungkin sekarang itu agak lumayan warganya ada yang sering ikut kegiatan, itu tau kampung KB, tapi yang gapernah ikut kegiatan itu kurang tau mereka, jadi walaupun ditanya tentang kampung KB pasti taunya KB nya saja.	
9-4	Awal mulanya, memang anak-anak di pondok ini, orang-orang sini yang dulu terjerumus tentang narkoba sebageian banyak, sebelum masuk kesini. Termasuk mantan pencuri juga banyak anak-anak nya ketika masuk di pesantren, saya rangkul semuanya suruh masuk kesini, Alhamdulillah berubah total, disitulah PIK-R melirik kesini. Jadi kalau PIK-R door to door ke rumah, gabakal	






	<p>nyampe, gabakal bisa di mengerti. Ketika digabungkan dengan Kampung KB, PIK-R ikut penyuluhan, beberapa kali anak-anak PIK-R ikut penyuluhan, yang diterangkan tentang KB, jadi anak-anak yang belum paham kesitu masih remaja, masih jauh pemikiran. Menurut saya dipisahkan saja kalau KB ya KB, PIK-R ya PIK-R, jadi jangan satu badan, jangan satu lembaga, harusnya dibuat sendiri lembaganya.</p>	
10-1	<p>Saya KB IUD. Kalau pengen jelas di Bu Siti ke Bu RW. Kegiatan kampung KB ikut di Bu Siti kalau ada penyuluhan, kalau ada pembinaan balita saya gatau. Itu ibu-ibu kader biasanya yang ikut pembinaan ga pernah tau ada penyuluhan. KB banyak yang pake, KB Itu biasanya Ibu-ibu posyandu yang sering mengumumkan, cuma posisinya bukan disini, tapi di RT 03 yang seperti kaya gitu. Kalau disini tempatnya gaada. Jadi ga terlalu fokus ke Kampung KB.</p> <p>Warga suka ikut KB, ada kegiatan penyuluhan, banyak yang ikut, bulan kemarin ada kumpul ke mushola di RT 01 itu ada uraian-uraian dari dinas langsung. Kemarin kan baru ada penyuluhan juga dari Kampung KB, implan dan IUD di Kampung KB (disana), iya disitu (di Ibu Siti) aja, kita mah cuma ikut aja. Ada banyak yang ikut, tapi dari RT sini kayanya belum ada, kadang-kadang suka dari RT 03, dari RT 01 yang banyak, RT 01 dan RT 05, kalau RT 04 orang-orangnya baru punya anak 1 atau 2, jadi gaada yang ikut.</p>	
10-2	<p>Punya anak 4, ada yang sudah kuliah di Unsera semester 4, anak Ibu gapernanh ikut kegiatan remaja di kampung KB. PIK-R juga gatau gapernah ada, kadang kalo ada sosialisai banyak juga remaja ada yang hadir disitu. Kalau sekarang, apa-apa dididik, artinya harus dipelajari, bagaimana ngurusin lansia, gimana harus mendidik remaja, kasih masukan-masukan untuk remaja, ada banyak manfaatnya, perbedaan juga banyak. Harusnya kesana ke Kampung KB nya. Ketua Kampung KB adanya disana, di RT sana. Posyandu juga ada disana. Kalau Kampung KB nya itu disana di RT 01. Ke Ibu Siti itu ketuanya itu ketua Kampung KB. Disini juga Kampung KB sama, tapi kan pusatnya ada disana di RT 01 itu, kadang yang ikut penyuluhan cuma ketuanya aja.</p>	
10-3	<p>Lansia usia 55 tahun, kegiatan lansia di posyandu saja, penyuluhan lansia belum pernah, waktu itu pas posyandu senam sekalian, pengajian ikut yang malam jumat, malam minggu, dan malam senin. Karena disini Kampung, jadi kurang paham, ada juga kalau yang dekat-dekat disana, kaya kalau ada kegiatan BKR, terus kalau BKL kan lansia, jadi hanya beberapa, di datanya mah banyak, tapi tau sendiri namanya orang kampung. Nanyanya ke Ibu Siti, Ketuanya, adanya di RT 01. Itu tempatnya di situ Kampung KB itu. Kalau saya hanya sebagai anggota BKL. Kalau Ibu Siti ketua BKL.</p>	
10-4	<p>Pertama terlibat mengikuti, gaada modal berbentuk benda/uang, belum dan gaada. Ada kelompok usaha, kegiatan untuk usaha kecil. Nanti setiap bulan</p>	

	<p>kadang-kadang rapat-rapat penyuluhan, penyuluhan di DP3AKB sebulan sekali atau beberapa bulan sekali ada kegiatan-kegiatan dari pusat, pakai mobil dinas, bus ¾, ada masuk ke tempat Kampung KB. Kampung KB ini aktif penyuluhannya kumpul-kumpul banyak orang-orangnya ada kegiatan usaha kecil yang sesuai keterampilannya. Dulu pas awal-awal bikin produk kerang/intip, pepes bandeng dll, ada pempek, kalau sekarang ini bikin dari olahan ikan. Ibu-ibu yang ikut penyuluhan itu dari pusat, dijualnya kalo ada acara-acara kampung KB ikut buat jualan, nanti ibu-ibu dinas pada beli untuk oleh-oleh. UPPKS dari Lopang, disini Cuma itu-itu aja, pusatnya di Ibu Raminah, PIK-R juga adanya di Sebrang aja. Disini gaada, adanya di RT sebrang, soalnya adanya disana, jadi ngambilnya dari sana, jadi diadainnya tetep disana, di RT sana, ya di Ibu ketuanya itu.</p>	
<b>Q</b>	<b>Apakah ada pertemuan rutin yang dilakukan oleh pengurus kampung KB di Kampung Kaliwadas?</b>	
3	<p>Untuk pertemuan, kita juga terbatas sama sarana gedung, karena tempat, minimal untuk kesekretariatan KKB, biar kalau ada pertemuan gampang tempatnya, cuma kita tidak ada, jadi untuk pertemuan di kampung KB pun tidak ada.</p>	
4	<p>Mungkin pertemuan di kita selalu ada, untuk sosialisasi kepada pokja, kita mengadakan pertemuan. Kalau per pertemuan untuk kegiatan rutin sudah ada perencanaannya, kalau kegiatan perencanaannya dari DP3AKB.</p>	
5	<p>Pertemuan rutin pokja yang dilakukan oleh pos penyuluhan KB ada sebulan sekali, lokmin, pertemuan pokja, dan musyawarah.</p>	
6	<p>Pertemuan rutin dari kader Kaliwadas di Kampung KB sendiri dan kader lingkungan yang lain se kelurahan.</p>	
7	<p>Setiap bulan ada 3 kegiatan</p>	
8	<p>Perkumpulan poktan dan ketua kampung KB tidak ada, adanya dari DP3AKB rutin perbulan, ketua kampung KB dan pokja.</p>	
9-1	<p>Pertemuan rutin poktan sebenarnya sebulan sekali di rumah bu siti yang sebagai pos KB, untuk bulan ini belum ada pertemuan.</p>	
9-2	<p>Paling cuma kalo ada tugas, ngisi bareng-bareng, baru kumpul-kumpul, di rumah Bu Siti.</p>	
9-3	<p>Pertemuan rutin ada di pengajian rutin, karena adanya di kobong, jadi pengajian setiap waktu, magrib, subuh, sehabis isya itu rutin.</p>	
9-4	<p>Pertemuan rutin, tidak terlalu ada, karena tergantung kegiatan yang ada di DP3AKB, pertemuan rutin untuk pengurus.</p>	

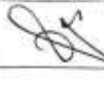
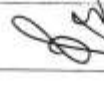
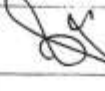

Q	Apakah kendala yang dihadapi oleh pengelola selama proses pengelolaan kampung KB?	
1	Kendalanya, kita ngasih program kegiatan ke pengurus pokja, nanti pokja seharusnya yang menyelenggarakan tahap selanjutnya, menyalurkan apa yang telak kita kasih ke pengurus pokja, itu memang harus biasanya rutin, misalkan setiap jumat kedua setiap bulannya, pengajian, senam, pembuatan anyaman atau apapun. Adapun kendala di pelaporan, itu hanya langsung online di website kami, yang bertugas mengupdate itu PLKB.	
2	Kendalanya banyak, intinya dari pihak dinas inginnya sudah dikasih support seperti itu masyarakat itu menerima, seharusnya merespon juga. Masyarakatnya tidak bisa mengerti, kita pun tidak bisa memaksakan, mereka itu masih ada yang memahaminya kampung KB itu khusus untuk KB saja. Padahal yang kita inginkan kampung KB itu bisa bersinergi antara program satu dengan yang lainnya. Tapi sementara ini kesannya itu kampung KB untuk ibu-ibu, kesannya KB saja, jadi kita berusaha menerangkan kepada masyarakat melalui penyuluhan, bahwa kampung KB itu tidak hanya KB saja, ada banyak dan salah satunya adanya 4 pertemuan itu.	
3	Kendalanya didalam kesertaan kesadaran masyarakat masih belum maksimal untuk membangun kampung nya sendiri melalui program Kampung KB, entah itu di dalam sektor kebersihan, karena disitu masih ada sampah, kesadaran masyarakat dalam ber-KB masih kurang, kesadaran remaja untuk tidak menikah diusia dini, karena masih ada pernikahan usia dini.	
4	Kendala dari dana kita belum memadai kalau untuk program kampung KB, sarana dan prasarana juga masih kurang untuk kampung KB, masyarakatnya pun masih kurang aktif dan kurang partisipasinya dalam kampung KB ini.	
5	Kendala sebenarnya Kampung KB di tingkat RW, jadi dengan (RW ini ada pembangunan meningkatnya kesejahteraan minimal, kita muluk, kesejahteraan kan akhirnya bisa merubah main set, jangankan 1 Kampung, 1 orang aja merubah kebiasaan seseorang kan susah. Jadi harapan kita sih sebenarnya dengan 1 kampung itu dari 1 RW misalnya berubah, kita kepengen 1 kelurahan bisa terwakilkan melalui 1 RW. Ini pembangunannya, muncul 1 RW bisa ditiru. Intinya begitu mewakili dengan adanya itu bisa menjadi contoh untuk Kampung KB yang lain.	
6	Kendala dari segi akseptor KB dan keluhan tidak ada. UPPKS perubahan belum signifikan karena mengawali belum, kita baru bentuk dari kelompoknya. Ingin KB bukan usia yang keatas saja, namun remaja juga untuk menahan menikah diusia dini. Akseptor perkembangannya ada, tapi dari generasi ini yang tidak terkendali.	

7	Kendala nya di kampung KB ini belum ada rumah data dan kesekretariatan, belum ada tempat buat kita, kalo acara juga tempatnya terbatas. UPPKS pun belum besar, karena dananya kurang, jadi apa adanya aja.	
8	Kendalanya rumah data belum ada, di posko aja di rumah Ibu Siti kalo ada kegiatan, posyandu juga dirumah Bu Siti.	
9-1	Kendala di BKB itu PAUD nya kita tempatnya terbatas, pakai rumah saudara saya yang tidak terpakai, fasilitas juga tidak ada meja dan lain-lain, kita untuk membayar guru pun sumbangan dari muridnya itu seikhlasnya, untungnya gurunya juga memang ikhlas, bisa buat beli minum juga diterima saja.	
9-2	Kendalanya, selama ada Kampung KB itu kadang-kadang undangan untuk warga Kampung KB terutama poktan-poktan Kampung KB kadang-kadang bikin saling ngiri orang, undangan untuk poktan, kalau misalnya harus berangkat seharusnya dari sana aja yang nentuin, jangan kita. Soalnya yang namanya ibu-ibu kaya gitu, pada salah paham. Jadi pengennya namanya dari sana aja, gantian yang dateng dari 5 orang itu bergiliran, harus merasakan pelatihan, Ketua, wakil, sekretaris, bendahara. Sebagai ketua sudah menawarkan untuk berangkat, pengurus lain, tapi kalau tidak ada yang mau ya saya aja. Kadang ketua BKB Bu RW, ko yang pergi Ibu Iroh aja, padahal sebelum Bu RW ngomong, saya udah nawarin ke yang lain. Kalau pada gamau, yang penting saya udah nawarin, terserah, ya terpaksa saya yang pergi. Anggota yang lain ada yang punya anak kecil, ada yang repot.	
9-3	Kendala selama ada Kampung KB ini kendala yang terlalu mencolok sih belum berasa. Tapi kadang suka ada undangan pelatihan untuk anggota-anggota poktan ini. Kadang-kadang pada “gaboleh rangkap”, “gaboleh double”, kalau bisa gantian. Jadi kalau misal ada undangan, pelatihan ke UPT, ke KPRI misalnya tanggal sekian untuk perwakilan 2 orang untuk lansia, balita, remaja suatu saat ada undangan lagi, gabisa berangkat lagi, gantian yang lain, itu sering rebutan gitu, ada yang sirik karna itu-itu terus yang ikut. Ada juga yang dianya cape ikut terus karna yang lain pada gamau.	
9-4	Kendalanya PIK-R kalau tidak dinaungi di pondok mungkin ga bakal jalan. Diajukan PIK-R kesini oleh Ibu Siti, karena ini sudah jadi pondok, dan berhubung semua disini remaja, dan masyarakat disini juga banyak, tapi memang banyak dari daerah lain, tapi yang diambil yang dari sini saja. Orang Kampung KB nya di Kaliwadas saja. Akhirnya Ibu RW dan Ibu Siti tidak mau ambil pusing, minta tolong ke kita. Kita pun masih awam sama PIK-R, tidak tau. Sehingga dari Ibu RW dan Ibu Siti gamau ambil pusing, lari lah kesini awal mula pembuatan PIK-R disini. Kendala PIK-R kadang soal waktu, ada pekerjaan lain, salah paham, itu aja.	



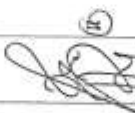
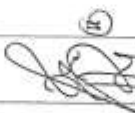

Pembimbing I : CATATAN BIMBINGAN  
 Dr. Agus Syarif, M. Si  
 Pembimbing II : R. Iry Handayani, M. Si

NO	TANGGAL	CATATAN DOSEN PEMBIMBING	PARAF DOSEN
1.	27-09-2018	Disusi topik Penelitian	
2.	19-10-2018	Bimbingan Budul, lembar B1B 1	
3.	18-11-2018	Bimbingan BAB 1. - Perbaiki Latar belakang masalah - Melengkapi data untuk identifikasi masalah - Penjelasan identifikasi masalah pada latar belakang masalah	
4.	23-11-2018	Bimbingan B1B 1 - Perbaiki Latar belakang masalah - tambahkan bukti foto	
5.	26-11-2018	Perbaiki lagi Latar Belakang - Identifikasi masalah	






Catatan Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II  
 Nomor 1543/2018/MS

NO	TANGGAL	CATATAN DOSEN PEMBIMBING	PARAF DOSEN
6.	29-11-2018	BAB I che - Lajis B1B 1, h p16 II	
7.	14-12-2018	Tambah Landasan Teori - Menonjolkan teori yg cocok - Kerangka Berfikir - Penjelasan tentang informan - Informasi pengisian - Pedoman wawancara	
8.	20-12-2018	proposal che - Lajis ke p16 II	
1.	9/12/19	- Perbaikan Redaksional - Penulisan lokasi dll - Identitas lokasi dg sumber informasi & data - lalunya sudah ok!	

Catatan Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II  
 Nomor 1543/2018/MS

NO	TANGGAL	CATATAN DOSEN PEMBIMBING	SALAF DOSEN
2.	8/01/19	Conjungsi kata terdapat di Bab 1 Tambahan informasi + yg ada di Bab 108 (Buku Rn. Banten)	
3.	16/01/19	Proposal s.d.l. Fix	
9.	17-01-19	ACC sempurna	
4.	19/01/19	ACC sempurna	
	20/01/19	Acc revisi proposal acc lengkap	

Catatan: Amarah tetap akan melakukan tugas masing-masing pada minggu ke-1 dan ke-2 dengan 2 pertemuan  
maksudnya 15 Mei tetap masuk

NO	TANGGAL	CATATAN DOSEN PEMBIMBING	SALAF DOSEN
	27/02/19	ACC lapangan	
	1/03/19	ACC lapangan	
	20/03/19	Perbaikan Bab 10	
	14/04/19	Harus sama persis dgn Lect. 10.10.19 Apakah telah ada hasil baru yg didapat di lap? tPR1 dgn sama di jadwalkan Palingnya saja yg di gres dlm pembuatannya	
	17/06/19	Draft skripsi dan Cayutan by P66 I	

Catatan: Amarah tetap akan melakukan tugas masing-masing pada minggu ke-1 dan ke-2 dengan 2 pertemuan  
maksudnya 15 Mei tetap masuk





## DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Yuda Ganda Putra, S.IP. MM selaku Subbidang Hubungan Antar Lembaga dan Bina Lini Lapangan BKKBN Provinsi Banten



Wawancara dengan Ibu Imas Hotimah, S.Pd, M.Si selaku Seksi Penggerakan dan Pendayagunaan Penyuluh KB (PLKB) dan Kader KB DP3AKB Kota Serang



Wawancara dengan Bapak H. Cece Saputra, S.KM selaku Kepala Balai Penyuluhan KB Kecamatan Serang



Wawancara dengan Ibu Nunuk Sunartowati selaku Ketua Forum Kader dan PPKBD Kecamatan Serang



Wawancara dengan Ibu Elisiana, S.Sos selaku Ketua PKB Kecamatan Serang



Wawancara dengan Bapak Sodri, S.E selaku Kepala Kelurahan Lopang



Wawancara dengan Ibu Raminah selaku Ketua Forum Kelurahan Lopang dan Ketua Kelompok Kegiatan UPPKS



Wawancara dengan Bapak Agus F, S.H selaku Ketua Kampung KB Kaliwadas/Ketua RW. 06



Wawancara dengan Ibu Iroh Sutiroh selaku Ketua Kelompok Kegiatan BKR

Wawancara dengan Ibu Hasanah selaku Ketua Kelompok Kegiatan BKB dan Bendahara Kampung KB



Wawancara dengan Ibu Siti selaku Ketua Kelompok Kegiatan BKL dan Sekretaris Kampung KB



Wawancara dengan Bapak Ali Rohman selaku Ketua Kelompok Kegiatan PIK-R



Wawancara dengan Ibu Nurhayati selaku Masyarakat Kelompok Kegiatan BKB dan Akseptor KB



Wawancara dengan Ibu Fatiah selaku Masyarakat Kelompok Kegiatan BKR dan PIK-R

Wawancara dengan Ibu Eva S selaku Masyarakat Kelompok Kegiatan BKL



Wawancara dengan Ibu Yeti selaku Masyarakat Kelompok Kegiatan UPPKS



Gerbang Selamat datang di kampung KB dan daftar nama kelompok kegiatan di kampung KB



Tanda pencanangan Kampung KB Kaliwadas dan Posko Kampung KB Kaliwadas



Posyandu rutin setiap bulan di Kampung KB Kaliwadas yang diadakan di posko kampung KB



Posyandu di Kampung KB Kaliwadas yang bertempat di posko kampung KB yaitu rumah Ibu Siti



Fasilitas di Kampung KB Kaliwadas yaitu timbangan bayi dan timbangan lansia juga mobil pelayanan KB untuk pemasangan IUD



Sosialisasi dan pelayanan keluarga berencana di Kampung KB yang terdapat pemasangan Implan, juga pemasangan IUD di mobil pelayanan KB





Kelompok UPPKS Tunas dari Kelurahan Lopang berjualan saat acara sosialisasi dan pelayanan keluarga berencana di Kampung KB Kaliwadas



Kondisi lingkungan Kampung KB Kaliwadas terdapat tempat pembuangan sampah yang mengganggu, dan juga foto kanan merupakan kobong tempat mengaji yang sekaligus dijadikan tempat PIK-R

Sosialisasi Penyuluhan KKBPK pada Majelis Ta'lim di Kampung KB se Kota Serang





Pembinaan masyarakat Kampung KB Kaliwadas merajut menggunakan benang wol dan keterampilan lainnya



Suasana pembinaan keterampilan dan suasana mengajar di PAUD menggunakan papan tulis yang kecil



Suasana PAUD di Kamung KB Kaliwadas

## CURRICULUM VITAE



### DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Riski Hoeriah  
Tempat/Tanggal Lahir: Bogor, 15 Maret 1998  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Status Perkawinan : Belum Kawin  
Telephone : 087808408680  
Email : riskihoeriah@gmail.com  
Alamat Sekarang : Kampung Negla Sari RT 01 RW 04 Desa Gunung Sari  
Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor Jawa Barat

### PENDIDIKAN FORMAL

Tahun 2006-2011 SD Negeri Gunung Picung 05  
Tahun 2011-2013 SMP PGRI Gunung Picung  
Tahun 2013-2015 SMA Negeri 1 Pamijahan Bogor  
Tahun 2015-Sekarang Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

### PENGALAMAN ORGANISASI

Bendahara OSIS SMP PGRI Gunung Picung 2010/2011  
OSIS SMA Negeri 1 Pamijahan 2013/2014  
Bendahara Pramuka Fatmawati SMA Negeri 1 Pamijahan 2013/2014  
Bendahara Perhimpunan Mahasiswa Bogor Barat 2017  
Bendahara Bogor Youth Space 2018